PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 696 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Dharmasraya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Dharmasraya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Dharmasraya menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

KELIMA : Bupati Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Oktober 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 696 - 2023
TANGGAL 16 OKTOBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Kepentingan umum;

C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	13 Tahun 2022	14 Agustus 2022	Tidak Sesuai, (melebihi 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan)
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/787/BKD-2023	7 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	415.4/10/BUP-2023 100.3.7/VIII/9/BA/DPRD-2023	15 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	415.4/11/BUP-2023 100.3.7/VIII/10/BA/DPRD -2023	15 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/384/BKD-2023	30 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD	415.4/12/BUP-2023 100.3.7/IX/11/BA/DPRD-2023	13 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/891/BKD-2023	22 September 2022	Belum Sesuai, (melebihi 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD pada tanggal 13 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 18 September 2023, ***tidak sesuai*** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan pada

tanggal 14 Agustus 2023, ***tidak sesuai*** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Dharmasraya dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 15 Agustus 2023, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 30 Agustus 2023, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan Bupati Dharmasraya pada tanggal 13 September, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Namun penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya ke gubernur untuk di evaluasi pada tangal 22 September 2023 ***sudah sesuai*** dengan ketentuan yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Dharmasraya harus konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp940.316.324.005 mengalami penambahan sebesar Rp23.467.529.615 atau 3% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp916.848.794.390.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp100.842.119.674 bertambah sebesar Rp9.384.904.062 atau 9% menjadi sebesar Rp110.227.023.736.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp812.206.674.716 bertambah sebesar Rp14.682.625.553 atau 2% menjadi sebesar Rp826.889.300.269.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp940.316.324.005 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**100.842.119.674**	**110.227.023.736**	**9.384.904.062**	**9 %**
Pajak Daerah	22.776.715.953	23.851.781.411	1.075.065.458	5 %
Retribusi Daerah	3.623.788.885	3.455.938.885	(167.850.000)	5 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836	4.832.210.107	508.144.271	12 %
Lain-lain PAD yang Sah	70.117.549.000	78.087.093.333	7.969.544.333	11 %
PENDAPATAN TRANSFER	**812.206.674.716**	**826.889.300.269**	**14.682.625.553**	**2 %**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	760.965.265.000	759.342.458.907	(1.622.806.093)	0 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.241.409.716	67.546.841.362	16.305.431.646	32 %
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**3.800.000.000**	**3.200.000.000**	**(600.000.000)**	**16 %**
Pendapatan Hibah	3.800.000.000	3.200.000.000	(600.000.000)	16 %
Jumlah Pendapatan	**916.848.794.390**	**940.316.324.005**	**23.467.529.615**	**3 %**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp100.842.119.674 bertambah sebesar Rp9.384.904.062 atau atau 9% menjadi sebesar Rp110.227.023.736.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		%	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahn APBD TA. 2023	% Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahn APBD TA. 2023
	(Rp)			(Rp)					
	Target	Realisasi		Target	Realisasi Per Agustus 2023		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5
PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.415.369.674,00	108.010.790.645,80	102,46	100.842.119.674,00	71.506.920.644,69	70,91	110.227.023.736,00	9.384.904.062,00	9,31
Pajak Daerah	22.776.715.953,00	21.634.158.143,48	94,98	22.776.715.953,00	15.242.754.541,00	66,92	23.851.781.411,00	1.075.065.458,00	4,72
Pajak Hotel	180.000.000,00	193.432.436,00	107,46	180.000.000,00	166.111.000,00	92,28	210.000.000,00	30.000.000,00	16,67
Pajak Restoran	1.425.000.000,00	1.721.533.518,00	120,81	1.425.000.000,00	842.919.746,00	59,15	1.400.000.000,00	(25.000.000,00)	(1,75)
Pajak Hiburan	3.000.000,00	4.129.250,00	137,64	6.500.000,00	1.575.000,00	24,23	7.000.000,00	500.000,00	7,69
Pajak Reklame	235.000.000,00	260.438.054,00	110,82	235.000.000,00	171.383.729,00	72,93	300.000.000,00	65.000.000,00	27,66
Pajak Penerangan Jalan	12.973.500.000,00	13.226.640.017,48	101,95	12.970.000.000,00	9.165.110.172,00	70,66	13.625.000.000,00	655.000.000,00	5,05
Pajak Parkir	6.000.000,00	6.427.883,00	107,13	6.000.000,00	5.097.300,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Pajak Air Tanah	15.000.000,00	16.611.667,00	110,74	15.000.000,00	11.277.407,00		30.000.000,00	15.000.000,00	
Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.100.000,00	101,00	10.000.000,00	4.050.000,00	40,50	10.000.000,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	425.000.000,00	371.121.511,00	87,32	425.000.000,00	252.506.047,00	59,41	500.000.000,00	75.000.000,00	17,65
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.504.215.953,00	2.475.105.302,00	54,95	4.504.215.953,00	2.281.134.507,00	50,64	4.557.781.411,00	53.565.458,00	1,19
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	3.348.616.505,00	111,62	3.000.000.000,00	2.341.589.633,00	78,05	3.200.000.000,00	200.000.000,00	6,67
Retribusi Daerah	3.873.808.400,00	2.759.700.350,00	71,24	3.623.788.885,00	1.148.176.300,00	31,68	3.455.938.885,00	(167.850.000,00)	(4,63)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	275.000.000,00	252.522.850,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	110.000.000,00	156.483.000,00	142,26	200.000.000,00	89.526.000,00	44,76	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00
Retribusi Pelayanan Pasar	8.000.000,00	8.020.000,00	100,25		720.000,00	#DIV/0!	1.500.000,00	1.500.000,00	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	320.000.000,00	234.152.000,00	73,17	322.500.000,00	153.063.000,00	47,46	322.500.000,00	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	33.300.000,00	111,00	30.000.000,00	10.800.000,00	36,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000,00	45.940.000,00	91,88	50.000.000,00	30.150.500,00	60,30	50.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	336.625.000,00	67,33	500.000.000,00	68.475.000,00	13,70	500.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.118.058.400,00	632.338.500,00	56,56	1.364.558.400,00	348.309.800,00	25,16	1.112.708.400,00	(271.850.000,00)	(19,63)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00			0,00			0,00	
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	32.500.000,00	12.400.800,00	38,16	30.000.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	2.500.000,00	8,33
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.500.000,00	3.520.000,00	100,57	3.500.000,00	2.920.000,00	83,43	3.500.000,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	625.000.000,00	421.510.500,00	51,09	625.000.000,00	256.938.700,00	31,14	825.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	601.750.000,00	622.887.700,00	103,51	278.230.485,00	187.271.500,00	67,31	278.230.485,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	100,00	4.324.065.836,00	4.832.210.107,00	111,75	4.832.210.107,00	508.144.271,00	11,75
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	100,00	4.324.065.836,00	4.832.210.107,00	111,75	4.832.210.107,00	508.144.271,00	11,75
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas PenyertaanModal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.440.779.485,00	79.292.868.316,34	106,52	70.117.549.090,00	50.283.779.898,69	71,71	78.087.093.333,00	7.969.544.333,00	11,37
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.270.730.485,00	1.130.369.548,00	88,95	1.592.500.000,00	4.915.000,00	0,31	600.000.000,00	(992.500.000,00)	(62,32)
Hasil Sewa BMD			0,00	10.000.000,00	-	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00	102.704.000,00	0,00	170.000.000,00	67.150.000,00	0,00	124.000.000,00	(46.000.000,00)	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00	1.289.885.522,00	0,00	1.100.000.000,00	350.234.488,00	31,84	500.000.000,00	(600.000.000,00)	(54,55)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	120.000.000,00	162.151.172,00	0,00	120.000.000,00	92.147.341,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)- LO		-	0,00			0,00	-	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00	-	0,00	100.000.000,00	-	0,00	-	(100.000.000,00)	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.800.000.000,00	3.047.851.066,94	0,00	2.800.000.000,00	1.286.379.201,30	45,94	2.300.000.000,00	(500.000.000,00)	(17,86)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.740.000.000,00	3.181.107.944,40	0,00	1.740.000.000,00	383.365.533,51	22,03	600.000.000,00	(1.140.000.000,00)	(65,52)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	180.000.000,00	10.822.160,00	0,00	180.000.000,00	12.562.162,00	0,00	180.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	0,00	-	120.980,00		300.000,00	300.000,00	
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	0,00	-	1.165.283,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	-	0,00	-	74.250,00		250.000,00	250.000,00	
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	-	0,00	-	166.499,38		400.000,00	400.000,00	
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	-	0,00	-			50.000,00	50.000,00	
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	0,00	-	83.054,50		200.000,00	200.000,00	
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	-	0,00	-	6.141.726,00		15.000.000,00	15.000.000,00	
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	0,00	-	833.000,00		833.000,00	833.000,00	
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	0,00	-			100.000,00	100.000,00	
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	-	0,00	50.000.000,00	-	0,00		(50.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN			0,00	-	4.460.788.959,00	0,00	4.460.788.959,00	4.460.788.959,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	75.563.294,00	0,00	100.000.000,00	15.457.109,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	220.000.000,00	309.331.877,00	0,00	220.000.000,00	544.111.481,00	247,32	700.000.000,00	480.000.000,00	218,18
Pendapatan BLUD	59.526.063.000,00	62.787.950.607,00	0,00	54.601.063.000,00	38.802.923.275,00	70,81	59.775.509.142,00	4.974.446.142,00	9,08
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.153.988.000,00	7.195.331.125,00	100,58	7.153.988.000,00	4.255.160.954,00	59,48	8.597.882.232,00	1.443.676.232,00	20,18

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp22.776.715.953 bertambah sebesar Rp1.075.065.458 atau 5% menjadi sebesar Rp23.851.781.411.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

1) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp12.970.000.000 bertambah sebesar Rp555.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp13.625.000.000.
2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.504.215.953 bertambah sebesar Rp53.565.458 atau 1% menjadi sebesar Rp4.557.781.411.
3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp3.000.000.000 bertambah sebesar Rp200.000.000 atau 7% menjadi sebesar Rp3.200.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.623.788.885 berkurang sebesar Rp(167.850.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp3.455.938.885.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp1.102.500.000 bertambah sebesar Rp101.500.000 atau 9% menjadi sebesar Rp1.204.000.000 dengan rincian antara lain :
   a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan semula sebesar Rp200.000.000 bertambah sebesar Rp100.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp300.000.000.
   b) Retribusi Pelayanan Pasar semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.500.000,00.
   c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tetap sebesar Rp322.500.000.
   d) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tetap sebesar Rp500.000.000.
2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp2.243.058.400 berkurang sebesar Rp(269.350.000) atau (12%) menjadi sebesar Rp1.973.708.400 dengan rincian antara lain :
   a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.384.558.400 berkuang sebesar Rp(271.850.000) atau (20%) menjadi sebesar Rp1.112.708.400.
   b) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tetap sebesar Rp825.000.000.

3) Retribusi Perizinan Tertentu tetap sebesar Rp278.230.485 dengan rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022..

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya* ***harus segera menetapkan*** *Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp71.488.274.358,69 atau 67,89% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp105.302.908.633 yang diuraikan antara lain :

1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp15.241.255.509 atau 66,92% dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.776.715.953.

2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.148.389.700 atau 31,69% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.623.788.885.

Terhadap alokasi Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp4.324.065.836 bertambah sebesar Rp508.144.271 atau 12% menjadi sebesar Rp4.832.210.107.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai *(performance based)*, atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp70.117.549.000 bertambah sebesar Rp7.969.544.333 atau 11% menjadi sebesar Rp78.087.093.333, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan semula sebesar Rp1.592.500.000 berkurang sebesar Rp(992.500.000) atau (62%) menjadi sebesar Rp600.000.000.
2) Jasa Giro semula sebesar Rp1.220.000.000 berkurang sebesar Rp(600.000.000) atau (49%) menjadi sebesar Rp620.000.000.
3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp2.900.000.000 berkurang sebesar Rp(600.000.000) atau (21%) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.
4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain semula sebesar Rp1.740.000.000 berkurang sebesar Rp(1.140.000.000) atau (66%) menjadi sebesar Rp600.000.000.
5) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp370.000.000 bertambah sebesar Rp4.890.788.959 atau 1.322% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.260.788.959.
6) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp54.801.063.000 bertambah sebesar Rp4.974.446.142 atau 9% menjadi sebesar Rp59.775.509.142.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp812.206.674 bertambah sebesar Rp14.682.625.553 atau 2% menjadi sebesar Rp826.889.300.269 atau 87,94% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp760.965.265.000 berkurang sebesar Rp(1.622.806.093) atau 0,21% menjadi sebesar Rp759.342.458.907 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp699.414.449.000 berkurang sebesar Rp(1.622.806.093) atau (0,23%) menjadi sebesar Rp697.791.642.907 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
   a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp22.020.936.000 bertambah sebesar Rp4.399.000 atau 0,01% menjadi sebesar Rp22.025.335.000.

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp489.147.384.000.

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp60.509.917.000.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp127.736.212.000 berkurang sebesar Rp(1.627.205.093) atau (1%) menjadi sebesar Rp126.109.006.907.

2) Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal tetap sebesar Rp8.601.217.000.

3) Dana Desa tetap sebesar Rp52.949.599.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Dharmasraya sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemenkeu	
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH				-
PENDAPATAN TRANSFER				-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**760.965.265.000**	**759.342.458.907**	**707.877.462.000**	**1.484.602.093**
Dana Perimbangan	**699.414.449.000**	**697.791.642.907**	**699.276.245.000**	**1.484.602.093**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**22.020.936.000**	**22.025.335.000**	**22.025.335.000**	-
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.834.005.000	8.834.005.000	8.834.005.000	-
DBH PPh Pasal 21	4.750.324.000	4.750.324.000	4.750.324.000	-
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	38.233.000	42.632.000	42.632.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dan Gas Bumi	51.780.000	51.780.000	51.780.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.154.119.000	1.154.119.000	1.154.119.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				-
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara_x0002_Royalty	5.400.888.000	5.400.888.000	5.400.888.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	531.646.000	531.646.000	531.646.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000	1.259.941.000	1.259.941.000	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	**489.147.384.000**	**489.147.384.000**	**489.147.384.000**	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.147.384.000	489.147.384.000	489.147.384.000	-
- DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya	300.805.012.000	300.805.012.000	300.805.012.000	-
- DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	188.342.372.000	188.342.372.000	188.342.372.000	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**60.509.917.000**	**60.509.917.000**	**60.367.314.000**	**- 142.603.000**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.429.134.000	1.429.134.000	1.429.134.000	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.698.814.000	1.698.814.000	1.698.814.000	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.229.379.000	9.229.379.000	9.229.379.000	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.670.023.000	10.670.023.000	10.670.023.000	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.430.879.000	1.430.879.000	1.430.879.000	-
DAK Fisik Bidang Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	16.337.884.000	16.337.884.000	16.195.281.000	- 142.603.000
DAK Kesehatan Pengendalian Penyakit	137.107.000	137.107.000	137.107.000	-
DAK Penguatan Sistem Kesehatan	19.576.697.000	19.576.697.000	19.576.697.000	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**127.736.212.000**	**126.109.006.907**	**127.736.212.000**	**1.627.205.093**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	33.470.300.000	33.435.090.472	33.470.300.000	35.209.528
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	-
DAK Non Fisik-TPG PNSD	56.319.009.000	56.319.009.000	56.319.009.000	-
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	752.601.000	752.601.000	752.601.000	-
DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.270.640.000	2.270.640.000	2.270.640.000	-
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.971.400.000	4.422.600.000	3.971.400.000	- 451.200.000
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.006.800.000	1.006.800.000	1.006.800.000	-
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan	8.045.076.000	8.045.076.000	8.045.076.000	-
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000	402.648.000	402.648.000	-
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	13.946.876.000	12.507.111.993	13.946.876.000	1.439.764.007
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kekuarga Berencana	3.851.017.000	3.398.236.550	3.851.017.000	452.780.450
DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000	403.679.400	420.370.000	16.690.600
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	511.300.000	511.082.000	511.300.000	218.000
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	307.597.492	438.800.000	131.202.508
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	879.375.000	876.835.000	879.375.000	2.540.000
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal	**8.601.217.000**	**8.601.217.000**	**8.601.217.000**	-
Dana Desa	**52.949.599.000**	**52.949.599.000**	**52.949.599.000**	-
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	-	-	-	-

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus mempedomani*** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp51.241.409.716 bertambah sebesar Rp16.305.431.646 atau 32% menjadi sebesar Rp67.546.841.362 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil diuraikan hanya pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.800.000.000 berkurang sebesar Rp(600.000.000) atau (16%) menjadi sebesar Rp3.200.000.000.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.029.378.138.553 berkurang sebesar Rp(48.649.282.468) atau turun (5%) menjadi sebesar Rp980.728.856.085.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan ***setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan*** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.755.317.832 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah	(Rp)	%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	**766.159.260.882**	**714.463.937.180**	**(51.695.323.702)**	**7 %**
Belanja Pegawai	471.538.672.736	414.618.723.717	(56.919.949.019)	12 %
Belanja Barang dan Jasa	280.817.797.266	282.111.928.583	1.294.131.317	0 %
Belanja Hibah	13.802.790.880	17.733.284.880	3.930.494.000	28 %
BELANJA MODAL	**151.236.483.671**	**152.365.898.157**	**1.129.414.486**	**1 %**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.340.791.768	42.233.931.093	3.893.139.325	10 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.417.466.354	55.200.497.264	9.783.030.910	22 %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.569.056.460	51.343.724.700	(10.225.331.760)	17 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.208.742.689	2.889.318.700	(2.319.423.989)	45 %
Belanja Modal Aset Lainnya	700.426.400	698.426.400	(2.000.000)	0 %
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000**	**4.154.380.709**	**3.154.380.709**	**315 %**
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	4.154.380.709	3.154.380.709	315 %
BELANJA TRANSFER	**110.982.394.000**	**109.744.640.039**	**(1.237.753.961)**	**1 %**
Belanja Bagi Hasil	2.632.820.000	3.045.066.039	412.246.039	16 %
Belanja Bantuan Keuangan	108.349.574.000	106.699.574.000	(1.650.000.000)	2 %
Jumlah Belanja	**1.029.378.138.553**	**980.728.856.085**	**(48.649.282.468)**	**5 %**

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

   Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

   a. SPM bidang Pendidikan

      Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp17.117.495.055 bertambah sebesar Rp21.045.509.065 atau 123% menjadi sebesar Rp38.163.004.120 atau 12% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp314.177.638.158. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

      1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan semula sebesar Rp2.233.915.660 bertambah sebesar Rp12.990.672.000 atau 582% menjadi sebesar Rp15.224.587.660, agar alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian:

         a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi semula sebesar Rp7.945.714.755 bertambah sebesar Rp3.203.118.085 atau 40% menjadi sebesar Rp11.148.832.840 agar alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.

e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp5.839.214.640 bertambah sebesar Rp4.715.414.980 atau 81% menjadi sebesar Rp10.554.629.620, agar alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.

d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp1.098.650.000 bertambah sebesar Rp136.304.000 atau 12% menjadi sebesar Rp1.234.954.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian:

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ***belum dianggarkan***, untuk itu agar alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ***belum dianggarkan***, untuk itu agar alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

   a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

   b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

   c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp12.543.000 bertambah sebesar Rp89.374.900 atau 713% menjadi sebesar Rp101.917.900, **harus digunakan** alokasi anggarannya untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp25.593.000 bertambah sebesar Rp2.518.925.800 atau 9.842% menjadi sebesar Rp2.544.518.800 **harus digunakan** alokasi anggarannya untuk menjamin:

a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD semula sebesar Rp10.000.000 bertambah sebesar Rp72.086.000 atau 721% menjadi sebesar Rp82.086.000, **agar digunakan** alokasi anggarannya untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan semula sebesar Rp30.000.000 bertambah sebesar Rp740.140.500 atau 2.467% menjadi sebesar Rp770.140.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).

7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan ***belum dianggarkan***, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tetap sebesar Rp10.000.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.

c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.

d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Bidang Pendidikan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp1.354.875.725 berkurang sebesar Rp(18.886.300) atau (1%) menjadi sebesar Rp1.335.989.425 atau 2% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp80.542.502.416 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tetap sebesar Rp43.995.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

   a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.

   b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

   c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :

      (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)

      (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90

tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp210.879.900 berkurang sebesar Rp(18.885.300) atau 9% menjadi sebesar Rp191.993.600, agar alokasi anggarannya diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: :

   a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.

   b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

   c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp180.000.000 berkurang sebesar Rp(1.000) menjadi sebesar Rp179.999.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

   a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.

   b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.

   c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :

      (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal

      (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tetap sebesar Rp51.800.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

   a) Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

   b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.

   c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

      (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita,

pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi

(2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar tetap sebesar Rp43.003.400 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:

a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi:

(1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera

(2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif tetap sebesar Rp60.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).

b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.

(3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.

7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut tetap sebesar Rp39.000.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.

d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.

8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tetap sebesar Rp164.520.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.

c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

(1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus tetap sebesar Rp320.047.725, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

(1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat tetap sebesar Rp50.000.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.

b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:

(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.

(2) Edukasi.

(3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.

(4) Edukasi kepatuhan minum obat.

(5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis tetap sebesar Rp135.330.000 alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non

kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

(1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

(2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.

(3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

(4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV tetap sebesar Rp56.300.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi

(1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

(2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.

3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.

4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.

6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.

7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.

8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.

9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan

11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp4.102.380.000 berkurang sebesar Rp(136.476.200) atau (3%) menjadi sebesar Rp3.965.903.800 atau 5% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.026.967.826. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.481.338.000 berkurang sebesar Rp(77.591.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp1.403.747.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp2.621.042.000 berkurang sebesar Rp(58.885.200) atau (2%) menjadi sebesar Rp2.562.156.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp148.746.600 berkurang sebesar Rp(120.138.000) atau (81%) menjadi sebesar Rp28.608.600 atau 1% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.499.644.800 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp45.808.600 berkurang sebesar Rp(29.930.000) atau (65%) menjadi sebesar Rp15.878.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp34.428.000 berkurang sebesar Rp(24.698.000) atau (66%) menjadi sebesar Rp12.730.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.

3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp61.615.000 berkurang sebesar Rp(61.615.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

   a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.

   b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

   c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.

4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp3.895.000 berkurang sebesar Rp(3.895.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0 untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.

2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

e. SPM Trantibumlinmas

1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp542.475.700 bertambah sebesar Rp237.624.400 atau 44% menjadi sebesar Rp780.100.100 atau 9% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.705.171.950. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota semula sebesar Rp52.475.000 berkurang sebesar Rp(31.110.600) atau (%) menjadi sebesar Rp21.364.400, untuk itu **agar dialokasikan anggaran yang**

mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp284.134.100 bertambah sebesar Rp277.450.900 atau 98% menjadi sebesar Rp561.585.000, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukkannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp205.866.600 berkruang sebesar Rp(8.715.900) atau (4%) menjadi sebesar Rp197.150.700, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp1.366.994.700 bertambah sebesar Rp294.983.000 atau 22% menjadi sebesar Rp1.661.977.700 atau 21% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.820.229.976. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp477.400.000 berkurang sebesar Rp(28.502.000) atau (6%) menjadi sebesar Rp448.898.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran semula sebesar Rp39.860.000 bertambah sebesar Rp2.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp41.860.000, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia **belum dianggarkan**, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi, Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.

3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum semula sebesar Rp359.734.000 bertambah sebesar Rp52.750.000 atau 15% menjadi sebesar Rp412.484.000 atau 5% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.820.229.976. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :

a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar semula semula sebesar Rp359.734.000 bertambah sebesar Rp52.750.000 atau 15% menjadi sebesar Rp412.484.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota **belum dianggarkan**, untuk itu agar dialokasikan anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untukKabupaten/kota yaitu:

1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.

2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Trantibumlinmas belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Trantibumlinmas dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp398.252.200 bertambah sebesar Rp1.176.060.700 atau 295% menjadi sebesar Rp1.574.312.900 atau 26% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp6.173.491.650. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp235.949.600 bertambah sebesar Rp1.211.930.100 atau 514% menjadi sebesar Rp1.447.879.700, alokasi anggarannya untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :

   a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan

masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan.

2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp162.302.600 berkurang sebesar Rp(35.869.400) atau (22%) menjadi sebesar Rp126.433.200 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.

b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.

3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Sosial belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Sosial dimaksud.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *serta* ***mengalihkan alokasi Belanja Hibah*** *pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023* ***dalam rangka pemenuhan SPM*** *tersebut.*

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah *Kabupaten Dharmasraya harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.* ***Sehingga Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengalihkan alokasi belanja dari DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi kebutuhan pencapaian SPM.***

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

   Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatn tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional		P-APBD 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**		**488.321.757.643**	**49,79**
	a.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1)	-	-
	b.	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2)	1.403.747.000	0,14
	c.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)	1.945.179.500	0,20
	d.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4)	293.203.700	0,03
	e.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	379.264.600	0,04
	f.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	3.113.310.750	0,32
	g.	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7)	-	-
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	481.187.052.093	49,06
2.	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**		**1.627.122.800**	**0,17**
	a.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	733.539.000	0,07
	b.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	863.573.800	0,09
	c.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	30.010.000	0,00
3.	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**		**235.018.379.512**	**23,96**
	a.	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1)	495.440.600	0,05
	b.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2)	6.481.249.100	0,66
	c.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)	122.776.411.501	12,52
	d.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)	98.351.509.869	10,03
	e.	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	1.663.578.600	0,17
	f.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	41.597.000	0,00
	g.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7)	5.208.592.842	0,53
4.	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**		**163.829.091.004**	**16,70**
	a.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)	150.381.713.173	15,33
	b.	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)	10.873.517.131	1,11
	c.	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3)	36.560.000	0,00
	d.	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)	2.537.300.700	0,26
5.	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**		**77.264.594.646**	**7,88**
	a.	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	7.621.696.820	0,78
	b.	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	526.379.060	0,05
	c.	Infrastruktur Perkotaan (PP3)	68.995.298.766	7,04
	d.	Energi dan Ketenagalistrikan (PP4)	111.180.000	0,01
	e.	Transformasi Digital (PP5)	10.040.000	0,00
6.	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**		**8.972.152.300**	**0,91**
	a.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	1.205.492.600	0,12
	b.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	7.750.666.700	0,79
	c.	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	15.993.000	0,00
7.	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**		**5.695.758.180**	**0,58**
	a.	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	3.489.821.180	0,36
	b.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2)	-	-
	c.	Penegakan Hukum Nasional (PP3)	-	-
	d.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	1.561.103.800	0,16
	e.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5)	644.833.200	0,07
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		980.728.856.085	100,00
	Total Belanja Daerah		980.728.856.085	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ***sudah selaras*** dengan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas nasional sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mempedomani sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	4.151.965.450	0,42
2	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	3.530.614.100	0,36
3	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	547.264.200	0,06
4.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	79.594.207.646	8,12
5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	241.850.044.992	24,66
6	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	15.343.746.931	1,56
7	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	635.711.012.766	64,82
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	980.728.856.085	100.00
	Total Belanja Daerah	980.728.856.085	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ***sudah selaras*** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan prioritas provinsi Tahun 2022.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

   Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Pemerataan pembangunan infrastrukur;	79.089.739.746	8,06
2	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju;	6.374.679.550	0,65
3	Memajukan pendidikan yang berkarakter;	98.409.002.469	10,03
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;	123.796.702.001	12,62
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;	637.678.618.746	65,02
6	Pembangunan yang berkelanjutan;	17.957.540.500	1,83
7	Membangkitkan identitas daerah;	16.419.960.373	1,67
8	Membangun berbasis nagari.	1.002.612.700	0,10
	Total Belanja Daerah	980.728.856.085	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ***sudah selaras*** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

   Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

   a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

      Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp328.875.458.137 atau 31,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.029.378.138.553 menjadi sebesar Rp342.560.147.169 atau 34,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp980.728.856.085, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitunhan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1	2	3	4	5
1	**a. Urusan Bidang Pendidikan:**	**308.247.201.000**	**314.177.638.158**	**5.930.437.158**
	1) Belanja Operasi:	285.530.051.488	275.289.532.594	- 10.240.518.894
	a. belanja pegawai;	246.287.482.876	222.213.590.597	- 24.073.892.279
	b. belanja barang dan jasa;	34.068.168.612	43.620.441.997	9.552.273.385
	c. belanja hibah;	5.174.400.000	9.455.500.000	4.281.100.000
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	22.717.149.512	38.888.105.564	16.170.956.052
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.758.614.048	11.911.106.624	6.152.492.576
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.118.330.975	24.203.780.240	12.085.449.265
	c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	4.840.204.489	2.773.218.700	- 2.066.985.789
	d Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	**7.165.037.465**	**11.204.796.381**	**4.039.758.916**
	1) Belanja Operasi:	7.165.037.465	11.095.732.881	3.930.695.416
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	6.075.037.465	10.090.732.881	4.015.695.416
	c. belanja hibah;	1.090.000.000	1.005.000.000	- 85.000.000
	2) Belanja Modal;	-	109.063.500	109.063.500
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	**11.931.502.300**	**12.481.207.288**	**549.704.988**
	1) Belanja Operasi:	1.061.979.300	1.430.957.388	368.978.088
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	1.061.979.300	1.430.957.388	368.978.088
	2) Belanja Modal;	10.869.523.000	11.050.249.900	180.726.900
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	**1.531.717.372**	**4.696.505.342**	**3.164.787.970**
	1) Belanja Operasi:	1.531.717.372	4.661.005.342	3.129.287.970
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	1.261.717.372	2.541.611.342	1.279.893.970
	c. belanja hibah;	270.000.000	2.119.394.000	1.849.394.000
	d. belanja bantuan sosial.			-
	2) Belanja Modal;	-	35.500.000	35.500.000
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	-	-	-
2	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)**	**328.875.458.137**	**342.560.147.169**	**13.684.689.032**
3	**Total Belanja Daerah**	**1.029.378.138.553**	**980.728.856.085**	**- 48.649.282.468**
4	**Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%**	**31,95**	**34,93**	

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus *mempertahankan secara terus menerus dan konsisten* dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

1) standar isi.
2) standar proses.
3) standar kompetensi lulusan.
4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
5) standar sarana dan prasarana.
6) standar pengelolaan.
7) standar pembiayaan.
8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp231.708.039.379 atau 31,99% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp724.277.475.372 berkurang sebesar Rp(4.553.711.212) menjadi sebesar Rp227.154.328.167 atau 32,64% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp695.938.795.113 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	Komponen Perhitunhan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selsisih
1	**a. Urusan bidang Kesehatan:**	228.530.337.379	223.991.626.167	(4.538.711.212)
	1) Belanja Operasi:	187.684.100.250	185.294.285.709	(2.389.814.541)
	a. belanja pegawai;	112.482.947.919	103.710.150.664	(8.772.797.255)
	b. belanja barang dan jasa;	75.201.152.331	81.584.135.045	6.382.982.714
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	40.846.237.129	38.697.340.458	(2.148.896.671)
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.824.360.680	22.844.002.209	(1.980.358.471)
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.428.831.849	14.398.831.849	(30.000.000)
	c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	824.080.000	756.080.000	(68.000.000)
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.538.200		(68.538.200)
	e.Belanja Modal Aset Lainnya	700.426.400	698.426.400	(2.000.000)

NO	Komponen Perhitunhan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	**3.177.702.000**	**3.162.702.000**	**(15.000.000)**
	2. Bagian Umum Sekretariat Daerah	60.000.000	45.000.000	(15.000.000)
	Sub Kegiatan 4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	45.000.000	(15.000.000)
	3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.117.702.000	3.117.702.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).	143.000.000	143.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.	529.650.000	529.650.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK.	80.000.000	80.000.000	-
	Sub Kegiatan .14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.	28.000.000	28.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).	104.000.000	104.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.700.000	20.700.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	815.167.000	815.167.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000	14.100.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).	360.000.000	360.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).	913.500.000	913.500.000	-
	Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas pada BPBD.	109.585.000	109.585.000	-
2	**Anggaran Kesehatan (a+b)**	**231.708.039.379**	**227.154.328.167**	**(4.553.711.212)**
3	**Total Belanja Daerah**	**1.029.378.138.553**	**980.728.856.085**	**(48.649.282.468)**
4	**Gaji ASN**	**305.100.663.181**	**284.790.060.972**	**(20.310.602.209)**
5	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)**	**724.277.475.372**	**695.938.795.113**	**(28.338.680.259)**
6	**Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%**	**31,99**	**32,64**	

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji*, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan ***prevalensi stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita semula sebesar Rp6.879.779.700 berkurang sebesar Rp(40.538.400) atau 0,59% menjadi sebesar Rp6.806.678.100 atau 0,66% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp1.029.378.138.553.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp6.806.678.100 atau sekitar 0,66% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, kabupaten/kota agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran untuk penanganan stunting setidaknya mencapai angka 1,32% dari APBD Kabupaten/Kota (rata-rata porsi penganggaran penanganan stunting Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp348.393.686.418 atau 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp870.984.216.046, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10

Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	RAPBD 2023	Selisih
1	Total Belanja Daerah	1.029.378.138.553	980.728.856.085	- 48.649.282.468
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a belanja bagi hasil	2.632.820.000	3.045.066.039	412.246.039
	b bantuan keuangan	108.349.574.000	106.699.574.000	- 1.650.000.000
	c jumah (a+b)	110.982.394.000	109.744.640.039	- 1.237.753.961
3	Selisih (1-2)	918.395.744.553	870.984.216.046	- 47.411.528.507
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	367.358.297.821	348.393.686.418	- 18.964.611.403

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp465.766.265.531, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11

Format Perhitungan Belanja Infrasrtuktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		Jumlah		
			APBD 2023	RAPBD 2023	Selisih
1.	a	Belanja Modal:	359.183.174.779	332.345.557.661	- 26.837.617.118
		1) tanah;	-	-	-
		2) peralatan dan mesin;			
		3) bangunan dan gedung;	45.417.466.354	55.200.497.264	9.783.030.910
		4) jalan, jaringan, dan irigasi;	61.569.056.460	51.343.724.700	- 10.225.331.760
		5) aset tetap lainnya;	5.208.742.689	2.889.318.700	- 2.319.423.989
		6) aset lainnya.	700.426.400	698.426.400	- 2.000.000
	b	Belanja Pemeliharaan	9.085.882.720	8.987.848.990	- 98.033.730
		Jumlah 1 = (a + b)	368.269.057.499	341.333.406.651	- 26.935.650.848
2.	a	Belanja Hibah;	13.802.790.880	17.733.284.880	3.930.494.000
	b	Belanja Bantuan Sosial;	-	-	-
	c	Belanja Bantuan Keuangan.	108.349.574.000	106.699.574.000	- 1.650.000.000
		jumlah 2 = (a + b + c)	122.152.364.880	124.432.858.880	2.280.494.000
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		490.421.422.379	465.766.265.531	- 24.655.156.848
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang penggunannya bersifat umum dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2023		53%	53%	

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***sudah memenuhi*** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *untuk tetap konsisten secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga *batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027* sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (termasuk beanja gaji) semula sebesar Rp8.799.958.200 atau 0,86% dari total belanja daerah sebesar Rp1.029.378.138.553 berkurang sebesar Rp(2.836.243.300) atau (32,23%) menjadi sebesar Rp5.963.714.900 atau 0,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp980.728.856.085.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan di luar belanja gaji pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yaitu sekurang-kurangnya **0,75%** (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya ***harus berupaya memenuhi alokasi anggaran*** *untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, sekurang-kurangnya 1% (satupersen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.*

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

   a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya semula sebesar Rp1.525.604.000 berkurang sebesar Rp(424.157.000) atau (27,80%) menjadi sebesar Rp895.661.425 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuia pada kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***belum memenuhi*** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk dapat memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk:

1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Dharmasraya dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***tidak diperkenankan*** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

   a. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Dharmasraya semula sebesar Rp900.000.000 berkurang sebesar Rp(117.395.000) atau 13,04% menjadi sebesar Rp782.605.000 atau 0,08% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

      Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

   b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Dharmasraya sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Kepala Daerah di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp424.000.200 bertambah sebesar Rp125.906.000 atau 30% menjadi sebesar Rp549.906.200 atau 0,06% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

      Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud ***yang memadai*** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp19.993.000 bertambah sebesar Rp17.098.000 atau 85,52% menjadi sebesar Rp37.091.000,00 atau 0,003% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp426.527.514.383 atau 98,17% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp434.477.826.740 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini ***sudah memenuhi*** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).*

e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tetap sebesar Rp752.875.000 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

f. Proporsi alokasi anggaran rincian objek belanja pada masing-masing ***sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran*** yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan ***harus diformulasikan kembali*** alokasi rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan dimaksud sehingga penggunaan APBD lebih fokus terhadap keluaran yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp766.159.260.882 berkuang sebesar Rp(51.695.323.702) atau (7%) menjadi sebesar Rp714.463.937.180 atau 72,85% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp980.728.856.085, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp471.538.672.736 berkurang sebesar Rp(56.919.949.019) menjadi sebesar Rp414.618.723.717 atau 42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp305.120.042.181 berkurang sebesar Rp(20.329.981.209) atau (7%) menjadi sebesar Rp284.790.060.972 atau 29% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1)j)(1), butir D.16.a.1)j)(2), butir D.16.a.1)j)(3) dan butir D.16.a.1)j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp19.776.319.540 berkurang sebesar Rp(659.845.972) atau (3%) menjadi sebesar Rp19.116.473.568.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp530.679.373 berkurang sebesar Rp(27.092.420) atau (5%) menjadi sebesar Rp503.586.953.

c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.576.192.716 berkurang sebesar Rp(143.792.754) atau (9%) menjadi sebesar Rp1.432.399.962.

d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp59.547.306 berkurang sebesar Rp(4.580.562) atau (8%) menjadi sebesar Rp54.966.744.

e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD menjadi semula sebesar Rp2.386.800 berkurang sebesar Rp(10.790) atau (0,45%) menjadi sebesar Rp2.376.000.

f) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula sebesar Rp2.983.500 berkurang sebesar Rp(13.498) atau (0,45%) menjadi sebesar Rp2.970.002.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1)j)(5) dan butir D.16.a.1)j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp9.228.604.730 berkurang sebesar Rp(240.660.000) atau (3%) menjadi sebesar Rp8.987.944.730.

(1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp2.457.000.000 berkuang sebesar Rp(189.000.000) atau (8%) menjadi sebesar Rp2.268.000.000.

(2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp570.000.000.

(3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp2.364.617.606 berkurang sebesar Rp(181.504.812) atau (8%) menjadi sebesar Rp2.183.112.764.

(4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp4.422.600.000 berkurang sebesar Rp(340.200.000) atau (8%) menjadi sebesar Rp4.082.400.000.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp120.000.000 berkurang sebesar Rp(9.000.000) atau (8%) menjadi sebesar Rp111.000.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, *sudah sesuai* dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas *50 milyar* sampai dengan *150 milyar* dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000* dan *paling tinggi sebesar 0,40%.* Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp67.711.861.410 berkurang sebesar Rp(37.909.868.269) atau (56%) menjadi sebesar Rp29.801.993.141 atau 3% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN.

6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya semula sebesar Rp64.725.914.465 berkurang sebesar Rp(1.954.202.259) atau (3%) menjadi sebesar Rp62.771.712.206.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 engan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan

mempedomani butir D.16.a.1)j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap sebesar Rp56.319.009.000.

8) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD tetap sebesar Rp2.270.640.000.

9) Belanja Tamsil Guru PNSD tetap sebesar Rp752.601.000.

Untuk poin 7) s.d p) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1)j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp1.138.955.798 bertambah sebesar Rp53.633.260 atau 4,7% menjadi sebesar Rp1.192.589.058 atau atau 5% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.851.781.411 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp776.385.798 bertambah sebesar Rp109.592.010 atau 14% menjadi sebesar Rp885.977.808.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp362.570.000 berkurang sebesar Rp(55.958.750) atau (15%) menjadi sebesar Rp306.611.250.

b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp212.625.613 berkurang sebesar Rp(34.748.343) menjadi sebesar Rp164.968.732 atau 5% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.455.938.885 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp99.038.667 berkurang sebesar Rp(6.454.269) atau (7%) menjadi sebesar Rp92.584.398.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp113.586.946 berkurang sebesar Rp(41.202.612) atau (36%) menjadi sebesar Rp72.384.334.

Alokasi insentif atas pemungutan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

11) Belanja Honorarium semula sebesar Rp3.829.440.000 berkurang sebesar Rp(1.760.540.000) atau (46%) menjadi sebesar Rp2.068.900.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :

a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp3.130.250.000 berkurang sebesar Rp(1.449.850.000) atau (46%) menjadi sebesar Rp1.680.400.000.

b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp682.390.000 berkurang sebesar Rp(305.890.000) atau (45%) menjadi sebesar Rp376.500.000.

c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp16.800.000 berkurang sebesar Rp(4.800.000) atau (29%) menjadi sebesar Rp12.000.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp355.276.473.717 atau 36% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah *Kabupaten Dharmasraya* tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi *ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah* ***maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD****. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir* D.16.a.1)(e)(f)(g) *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.*

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp280.817.797.266 bertambah sebesar Rp1.294.131.317 atau 0,46% menjadi sebesar Rp282.111.928.583 atau 28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

1) Belanja Barang semula sebesar Rp78.713.433.533 berkurang sebesar Rp(9.987.928.411) atau (13%) menjadi sebesar Rp68.725.505.052 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :
   a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula sebesar Rp2.718.454.300 bertambah sebesar Rp211.308.200 atau 8% menjadi sebesar Rp2.929.762.500.
   b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula sebesar Rp1.308.215.800 bertambah sebesar Rp26.827.250 atau 2% menjadi sebesar Rp1.335.043.050.
   c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp42.194.841.578 berkudang sebesar Rp(19.031.621.006) atau (45%) menjadi sebesar Rp23.163.220.572.
   d) Belanja Barang untuk Djual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula sebesar Rp2.683.851.395 bertambah sebesar Rp1.486.149.285 atau 55% menjadi sebesar Rp4.170.000.680.
   e) Belanja Natura dan Pakan-Natura semula sebesar Rp1.094.252.500 bertambah sebesar Rp304.926.000 atau 28% menjadi sebesar Rp1.399.178.500.
   f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp7.903.999.000 bertambah sebesar Rp2.109.208.000 atau 27% menjadi sebesar Rp10.013.207.000.
   g) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan semula sebesar Rp2.983.136.000 bertambah sebesar Rp319.867.000 atau 11% menjadi sebesar Rp3.303.003.000.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan

dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa semula sebesar Rp81.256.736.534 berkurang sebesar Rp(3.230.213.347) atau (4%) menjadi sebesar Rp78.026.523.187 yang antara lain diuraikan :

a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp62.751.452.584 berkurang sebesar Rp(4.862.897.310) atau (8%) menjadi sebesar Rp57.888.555.274 yang diuraikan antara lain :

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp2.688.500.000 bertambah sebesar Rp42.500.000 atau 2% menjadi sebesar Rp2.731.000.000.

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp1.782.980.000 berkurang sebesar Rp(361.340.000) datau (20%) menjadi sebesar Rp1.421.640.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya *dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,* serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(3) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp3.977.050.000 berkurang sebesar Rp(786.425.500) atau (20%) menjadi sebesar Rp3.190.624.500.

(4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp4.515.200.000 bertambah sebesar Rp42.500.000 atau 2% menjadi sebesar Rp2.731.000.000.

(5) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp3.020.730.000 berkurang sebesar Rp(159.870.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp2.860.860.000.

(6) Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp12.916.270.000 berkurang sebesar Rp(1.435.034.400) atau (11%) menjadi sebesar Rp11.481.235.600.

Harus dibatasi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah ***dilarang*** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukkannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***tidak diperkenankan*** *untuk mengalokasikan* anggaran *tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(7) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan semula sebesar Rp883.250.000 bertambah sebesar Rp402.850.000 atau 46% menjadi sebesar Rp1.286.100.000.

(8) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp978.400.000 bertambah sebesar Rp352.370.000 atau 36% menjadi sebesar Rp1.330.770.000.Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp1.492.850.000 berkurang sebesar Rp(257.600.000) atau (17%) menjadi sebesar Rp1.235.250.000.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp11.490.863.950 bertambah sebesar Rp1.150.119.538 atau 10% menjadi sebesar Rp12.640.983.488 yang diuraikan antara lain :

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa semula sebesar Rp960.000.000 bertambah sebesar Rp150.000.000 atau 16% menjadi sebesar Rp1.110.000.000.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp9.454.099.200 bertambah sebesar Rp1.148.624.400 atau 12% menjadi sebesar Rp10.602.723.600.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp249.051.000 bertambah sebesar Rp1.426.728 atau 1% menjadi sebesar Rp250.477.728.

(4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp311.313.750 bertambah sebesar Rp355.410 atau 0,11% menjadi sebesar Rp311.669.160.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp2.548.813.000 bertambah sebesar Rp771.445.000 atau 30% menjadi sebesar Rp3.320.258.000.

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.407.879.000 berkurang sebesar Rp(157.500.000) atau (11%) menjadi sebesar Rp1.250.379.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.*

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

d) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp100.000.000 bertambah sebesar Rp647.000.000 atau 647% menjadi sebesar Rp747.000.000.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp1.764.728.000 bertambah sebesar Rp414.619.425 atau 23% menjadi sebesar Rp2.179.347.425.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya

manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek- aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp9.085.882.720 berkurang sebesar Rp(98.033.730) atau (1%) menjadi sebesar Rp8.987.848.990 yang diuraikan pada :

   a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp5.713.490.000 berkurang sebesar Rp(357.865.000) atau (6%) menjadi sebesar Rp5.355.625.000.

   b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp527.282.720 bertambah sebesar Rp160.256.270 atau 30% menjadi sebesar Rp6870538.990.

   c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp2.845.110.000 bertambah sebesar Rp99.575.000 menjadi sebesar Rp2.944.685.000.

   Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

   Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp49.672.371.000 bertambah sebesar Rp8.096.398.750 atau 16% menjadi sebesar Rp57.768.769.750 yang diuraikan pada :

   a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp48.778.232.000 bertambah sebesar Rp8.794.436.750 atau 18% menjadi sebesar Rp57.572.668.750.

   b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp894.139.000 berkurang sebesar Rp(698.038.000) atau (78%) menjadi sebesar Rp196.101.000.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya alokasi Belanja Perjalanan Dinas ***dirasionalkan*** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar *menghitung kembali dan mengefisiensikan alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud,* sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Selanjutnya, penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri ***agar tidak dianggarkan*** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ***kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah*** Kabupaten Dharmasraya, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp145.600.000 bertambah sebesar Rp40.200.000 atau 28% menjadi sebesar Rp185.800.000 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada :

   a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp145.600.000 bertambah sebesar Rp16.200.000 atau 11% menjadi sebesar Rp161.800.000.

   b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp24.000.000.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp26.159.614.412 berkurang sebesar Rp(1.095.306.765) atau (4%) menjadi sebesar Rp25.064.307.647.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp4.152.681.099 berkurang sebesar Rp(741.128.224) atau (18%) menjadi sebesar Rp3.411.552.875.

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp4.840.204.489 berkurang sebesar Rp(2.066.985.789) atau (43%) menjadi sebesar Rp2.773.218.700.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp31.249.079.222 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp4.017.500.000 menjadi sebesar Rp35.266.579.222 ***tidak sama*** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.885.090.472, ***tidak sesuai*** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar ***melakukan penghitungan ulang*** *dan menganggarkan Belanja BOS sesuai dengan pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2023 atau* ***memberikan penjelasan*** *bila ketidaksesuaian ini karena memanfaatkan sisa dana BOS tahun sebelumnya.*

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp21.118.339.569 bertambah sebesar Rp4.049.574.967 atau 19% menjadi sebesar Rp25.167.914.536.

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp35.784.159.067 bertambah sebesar Rp7.569.014.890 atau 21% menjadi sebesar Rp43.353.173.957.

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp4.292.950.680 berkruang sebesar Rp(1.980.358.471) atau (46%) menjadi sebesar Rp2.312.592.209.

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp250.000.000 berkurang sebesar Rp(30.000.000) atau (12%) menjadi sebesar Rp220.000.000.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD semula sebesar Rp4.840.204.489 berkurang sebesar Rp(2.066.985.769) atau (43%) menjadi sebesar Rp2.773.218.700.

Belanja BLUD sebesar Rp73.826.899.402 ***lebih besar*** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.775.509.142. Untuk itu ***agar diberikan penjelasan*** penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak bertentangan dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp13.802.790.880 bertambah sebesar Rp3.930.494.000 atau 28% menjadi sebesar Rp17.733.284.880 atau 1,8% dari total belanja daerah sebesar Rp980.728.856.085 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tetap sebesar Rp1.500.000.000.
2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp11.414.400.000 bertambah sebesar Rp2.994.000 atau (0,02%) menjadi sebesar Rp11.417.394.000.
3) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp90.000.000 bertambah sebesar Rp3.927.500.000 atau 4.364% menjadi sebesar Rp4.017.500.000.
4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp798.390.880.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial ***dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan*** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai

urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Dharmasraya baru sebesar Rp46.729.796.545 atau 5% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp798.390.880 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan

tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA, 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.1.000.000.000 dan untuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.500.000.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilukada serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dan 2024, Bupati dan DPRD Kabupaten Dharmasraya ***belum memenuhi*** **porsi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Dharmasraya sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini**.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp151.236.483.671 bertambah sebesar Rp1.129.414.486 atau 1% menjadi sebesar Rp152.365.898.157 atau 15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, ***harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022***.

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir ***D.16.b.1)*** dan butir ***D.16.b.3)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Dharmasraya sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir ***D.16.b.9)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp38.340.791.768 bertambah sebesar Rp3.893.139.328 atau 10% menjadi sebesar Rp42.233.931.093 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
   1) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp2.510.000.000 bertambah sebesar Rp245.009.200 atau 10% menjadi sebesar Rp2.755.009.200.
   2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp5.461.855.949 bertambah sebesar Rp754.878.800 atau 14% menjadi sebesar Rp6.216.734.749.
   3) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp1.525.700.000 bertambah sebesar Rp5.408.531.400 atau 354% menjadi sebesar Rp6.934.231.400.
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp45.417.466.354 bertambah sebesar Rp9.783.030.910 atau 22% menjadi sebesar Rp55.200.497.264 antara lain dengan rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp.44.804.966.354 bertambah sebesar Rp7.432.727.250 atau 17% menjadi sebesar Rp51.595.631.204.
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp61.569.056.460 berkurang sebesar Rp(10.225.331.760) atau (17%) menjadi sebesar Rp51.343.724.700 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
   1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp47.329.878.060 berkurang sebesar Rp(7.633.533.560) atau (16%) menjadi sebesar Rp39.696.344.500.
   2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp13.531.738.400 berkurang sebesar Rp(2.572.570.200) atau (19%) menjadi sebesar Rp10.959.168.200.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, *dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya,* sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan *sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah* berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tetap sebesar Rp18.871.145.000.

b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp78.770.000 bertambah sebesar Rp174.085.000 atau 221% menjadi sebesar Rp252.855.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap rencana penambahan Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD TA.2023 harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini ***agar ditinjau kembali*** *sehingga penambahan belanja modal hanya dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat dipastikan selesai pada akhir tahun.*

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000 bertambah sebesar Rp3.154.380.709 atau 315% menjadi sebesar Rp4.154.380.709 atau 0,42% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk ***dihitung kembali*** dan disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir ***D.16.c.*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp110.982.394.000 berkurang sebesar Rp(1.237.753.961) atau (1%) menjadi sebesar Rp109.744.604.039 atau 11,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp2.632.820.000 bertambah sebesar Rp412.246.039 menjadi sebesar Rp3.045.066.039 atau 11,25% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.051.781.411 diuraikan dengan rincian obyek:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp2.240.643.000 bertambah sebesar Rp412.246.039 menjadi sebesar Rp2.715.122.141 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 11,38% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.851.781.411.

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp392.177.000 berkurang sebesar Rp(62.233.102) menjadi sebesar Rp329.943.898 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 10% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.200.000.000.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Dharmasraya dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp108.349.574.000 berkurang sebesar Rp(1.650.000.000) menjadi sebesar Rp106.699.574.000 atau 10,88% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp52.949.599.000, sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp53.749.975.000.

c. Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut ***sudah memenuhi*** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp511.172.719.000 yaitu sebesar Rp51.117.271.900, atau terdapat selisih lebih sebesar Rp2.632.703.100.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan

pembiayaan semula sebesar Rp114.029.344.163 berkurang sebesar Rp(72.116.812.083) atau (63%) menjadi sebesar Rp41.912.532.080.

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan tetap sebesar Rp1.500.000.000 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ***belum*** konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	P - RKPD	P - KUA-PPAS	P - APBD
1.	Jumlah Program	133 program	188 program	181 program	184 program
2.	Jumlah Kegiatan	-	420 kegiatan	406 kegiatan	410 kegiatan
3.	Jumlah Sub Kegiatan	-	1008 sub kegiatan	967 Sub kegiatan	972 Sub kegiatan
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	1.088.383.416.778	1.027.106.486.442	1.019.193.043.650	980.728.856.085

Jumlah program sebanyak 184 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD TA. 2023 ***belum sesuai*** namun tidak melebihi jumlah program dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 188. Jumlah kegiatan sebanyak 410 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD TA. 2023 ***belum sesuai*** namun tidak melebihi jumlah kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 420. Jumlah sub kegiatan sebanyak 972 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD TA. 2023 ***belum sesuai*** namun tidak melebihi jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 1008.

Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.088.383.416.778 sama dengan total pagu anggaran Prubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2022. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran 8 Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.019.193.043.650 sama dengan total nilai PPAS sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran Perubahan RKPD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp(46.377.630.357) atau (4,26)% dari pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp(38.464.187.565) atau 3,77% dari nilai PPAS Tahun 2023.

Untuk itu agar deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Untuk itu, agar deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk lebih konsisten dengan dokumen RKPD serta KUA-PPAS Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu penambahan kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD ***hanya diperkenankan*** *sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.*

Berdasarkan Tabel 11 di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Bupati Dharmasraya dengan RKPD serta KUA dan PPAS, terdapat sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, KUA dan PPAS tetapi tidak tercantum dalam RKPD, antara lain pada :

1. Dinas Pangan, antara lain pada sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Dinas Kependudukan dan Capil, antara lain pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, ***terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan*** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 184 program, ***tidak sama dan melebihi*** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 133 program, sehingga diduga ada penambahan program baru diluar yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya.

B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.088.383.416.778 ***lebih tinggi*** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp980.728.856.085. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp107.654.560.693 atau **9,89%** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD ***sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan***, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

D. Alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah ***dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023*** berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.1)e)(1)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

E. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/*5252*/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasaraya agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023. Bila ketentuan ***tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti*** maka ***nomor register untuk penetapan Perda Perubahan APBD tidak akan diberikan.*** Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Pasaman menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register Perda Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.

F. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.

G. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah ***dilarang*** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

H. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

I. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 188/ 2 / KPTSP-DPRD/2023

TENTANG
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah disampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Untuk di evaluasi;

b. bahwa Gubernur Sumatera Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-696-2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-696-2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dalam rangka membahas Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyempurnakan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal 19 Oktober 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,
KETUA,

PARIYANTO

WAKIL KETUA,

ADI GUNAWAN

WAKIL KETUA

ADE SUDARMAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

BERITA ACARA

NOMOR: 415.4 / 13 /BUP-2023

NOMOR: 100.3.7/X/13 /BA/DPRD-2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Oktober**Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga,** kami yang bertandatangan dibawah ini:

I	SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E	:	Bupati Dharmasraya, Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang beralamat di Pulau Punjung, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
II. 1.	PARIYANTO, S.H	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
2.	Ir. H. ADI GUNAWAN, M.M	:	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
3.	ADE SUDARMAN, S.Pd	:	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
			point 1, 2, dan 3 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Selajutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

MENYATAKAN BAHWA :

1. **Pihak Pertama (I) dan Pihak kedua (II)** telah melakukan rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas hasil Evaluasi Gubernur terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. **Pihak Pertama (I)** dan **Pihak Kedua (II)** telah menyepakati Jawaban hasil Evaluasi Gubernur tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap tiga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Punjung, 19 Oktober 2023

BUPATI DHARMASRAYA,
Selaku
PIHAK PERTAMA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,
Selaku
PIHAK KEDUA

PARIYANTO, S.H
KETUA

Ir. H. ADI GUNAWAN, M.M
WAKIL KETUA

ADE SUDARMAN, S.Pd
WAKIL KETUA

LAMPIRAN I : **BERITA ACARA**

NOMOR : 415.4/ 13 /BUP-2022
100.3.7/X/ 13 / BA/DPRD-2023

TANGGAL : 19 OKTOBER 2023

KESEPAKATAN JAWABAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 903- 696 -2023 TANGGAL 16 OKTOBER 2023.

STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.982.267.918.085,00 dengan rincian sebagai berikut:

4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**110.227.023.736,00**
4.1.01	Pajak Daerah	23.850.981.411
4.1.02	Retribuis Daerah	3.456.738.885
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.832.210.107
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.087.093.333
4.2	**PENDAPATAN TRASNFER**	**828.428.362.269,00**
4.2.01	Pendapatan Trasnfer Pemerintah Pusat	760.881.520.907
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.546.841.362
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.200.000.000,00**
4.3.01	Pendpatan Hibah	3.200.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**941.855.386.005,00**
5	BELANJA DAERAH	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**714.730.300.737,00**
4.1.01	Belanja Pegawai	400.006.118.955
4.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.601.249.202
4.1.05	Belanja Hibah	29.122.932.580
5.2	**BELANJA MODAL**	**152.416.828.609,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.345.977.665
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.200.220.019
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.343.724.700
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.828.479.825
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	698.426.400
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.154.380.709,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.154.380.709
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**110.966.408.030,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.730.772.030
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.235.636.000
	JUMLAH BELANJA	**982.267.918.085,00**
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) -	**40.412.532.080,00**

6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**		**41.912.532.080**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		41.912.532.080
		Jumlah Penerimaam Pembiayaan	**41.912.532.080**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**		**1.500.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		1.500.000.000
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.500.000.000**
		Pembiayaan Netto	**40.412.532.080**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN**		**-**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA

BAKHTIANTO

WAKIL KETUA

ABI GUNAWAN

WAKIL KETUA

ADE SUDARMAN

LAMPIRAN II : BERITA ACARA
NOMOR : 415.4/ 13 /BUP-2023
NOMOR : 100.3.7/X/ 13 /BA/DPRD-2023
TANGGAL : 19 OKTOBER 2023

TENTANG : KESEPAKATAN JAWABAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 903- 696 -2023 TANGGAL 16 OKTOBER 2023

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
I.	**TUJUAN EVALUASI**			
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan : a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Kepentingan Umum; c. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perbuahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sudah mempedomani : a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Kepentingan Umum; c. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	Kedepan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD tetap mempedomani Ketentuan peraturan perundang-undangan.
II.	**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**			
		Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang	Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD pada	Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Dharmasraya tetapk konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses

<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:</td><td rowspan="3">tanggal 13 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 22 September 2022, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, hal ini disebabkan karena keterlambatan dalam enteri belanja ke SIPD atas kesepakatan dengan DPRD, disamping itu terjadi erorr system SIPD selama 2 (dua) hari tanggal 19 s/d 20 September 2023 yang mengakibatkan terkendala dalam menginput RKA ke SIPD,</td><td rowspan="3">penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Penetapan/Persetujuan/Surat</th><th rowspan="2">Ket.</th></tr>
<tr><th>Nomor</th><th>Tanggal</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023</td><td>13 Tahun 2022</td><td>14 Agustus 2022</td><td>Tidak Sesuai, (melebihi 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>900/787/BKD-2023</td><td>7 Agustus 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA</td><td>415.4/10/BUP-2023 jo 100.3.7/VIII/9/BA/DPRD-2023</td><td>15 Agustus 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS</td><td>415.4/11/BUP-2023 jo 100.3.7/VIII/10/BA/DPRD-2023</td><td>15 Agustus 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>900/384/BKD-2023</td><td>30 Agustus 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD</td><td>415.4/12/BUP-2023 jo 100.3.7/IX/11/BA/DPRD-2023</td><td>13 September 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur</td><td>900/891/BKD-2023</td><td>22 September 2023</td><td>Belum Sesuai, (melebihi 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD pada tanggal 13 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 18 September 2023, ***tidak sesuai*** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.		
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2023, ***tidak sesuai*** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD	Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2023, ***tidak sesuai*** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.	Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, hal ini disebabkan karena banyaknya perbaikan atas hasil validasi dari bapppeda Provinsi sehingga terjadi keterlambatan dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.	
		Selanjutnya penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Dharmasraya dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 15 Agustus 2023, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.	Pemerintah Kabupaten dalam penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Dharmasraya dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 15 Agustus 2023 ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.	
		Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 30 Agustus 2023, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam)	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 30 Agustus 2023, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		hari kerja per minggu.	bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.	
		Pengambilan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan Bupati Dharmasraya pada tanggal 13 September, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Namun penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya ke gubernur untuk di evaluasi pada tangal 22 September 2023 belum sesuai dengan ketentuan yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Pengambilan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan Bupati Dharmasraya pada tanggal 13 September, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Namun penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya ke gubernur untuk di evaluasi pada tangal 22 September 2023 belum sesuai dengan ketentuan yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.	
III.	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM**			
		A. Kebijakan Pendapatan Daerah		
		Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp940.316.324.005 mengalami penambahan sebesar Rp23.467.529.615 atau 3% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp916.848.794.390. Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp100.842.119.674 bertambah sebesar Rp9.384.904.062 atau 9% menjadi sebesar Rp110.227.023.736. 2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp812.206.674.716 bertambah sebesar Rp14.682.625.553 atau 2% menjadi sebesar	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat perbedaan jumlah pendapatan antara Ranperda yang diajukan untuk evaluasi dengan Ranperda yang disampaikan setelah evaluasi. Perbedaan itu terjadi pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat awalnya saat Ranperda yang diajukan untuk evaluasi sebesar Rp.759.342.458.907,- dan pada saat Ranperda disampaikan setelah evaluasi menjadi sebesar Rp.760.881.250.907,- atau betambah sebesar Rp.1.539.062.000,-. Penambahan ini didasari dengan	Kedepannya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Ranperda APBD terhadap Penganggaran target Pendapatan Daerah tetap dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan

<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Rp826.889.300.269.</td><td rowspan="4">PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana pada PMK tersebut Kabupaten Dharmasraya mendapat tambahan belanja dari alokasi kinerja Pemerintah Desa sebanyak 11 (sebelas) nagari masing-masing sebesar Rp.139.642.000,- dimana tambahan alokasi Dana Desa tersebut belum masuk dalam Ranperda yang diajukan sewaktu evaluasi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut sudah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 2
Pendapatan Daerah setelah evaluasi gubernur
<table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah (Rp)</th><th colspan="2">Bertambah/(Berkurang)</th></tr><tr><th>Sebelum Perubahan</th><th>Setelah Perubahan</th><th>(Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>PENDAPATAN DAERAH</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td><td>100.842.119.674</td><td>110.227.023.736</td><td>9.384.904.062</td><td>9%</td></tr><tr><td>Pajak Daerah</td><td>22.776.715.953</td><td>23.850.981.411</td><td>1.074.265.458</td><td>5%</td></tr><tr><td>Retribusi Daerah</td><td>3.623.788.885</td><td>3.456.738.885</td><td>(167.050.000)</td><td>5%</td></tr><tr><td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td><td>4.324.065.836</td><td>4.832.210.107</td><td>508.144.271</td><td>12%</td></tr><tr><td>Lain-lain PAD yang Sah</td><td>70.117.549.000</td><td>78.087.093.333</td><td>7.969.544.333</td><td>11%</td></tr><tr><td>PENDAPATAN TRANSFER</td><td>812.206.674.716</td><td>828.428.362.269</td><td>16.221.687.553</td><td>2%</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</td><td>760.965.265.000</td><td>760.881.520.907</td><td>(83.744.093)</td><td>0%</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Antar Daerah</td><td>51.241.409.716</td><td>67.546.841.362</td><td>16.305.431.646</td><td>32%</td></tr><tr><td>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</td><td>3.800.000.000</td><td>3.200.000.000</td><td>(600.000.000)</td><td>16%</td></tr><tr><td>Pendapatan Hibah</td><td>3.800.000.000</td><td>3.200.000.000</td><td>(600.000.000)</td><td>16%</td></tr><tr><td>Jumlah Pendapatan</td><td>916.848.794.390</td><td>941.855.386.005</td><td>25.006.591.615</td><td>3%</td></tr></table></td><td rowspan="4">Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp940.316.324.005 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tabel 2
Pendapatan Daerah
<table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah (Rp)</th><th colspan="2">Bertambah/(Berkurang)</th></tr><tr><th>Sebelum Perubahan</th><th>Setelah</th><th>(Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>PENDAPATAN DAERAH</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td><td>100.842.119.674</td><td>110.227.023.736</td><td>9.384.904.062</td><td>9%</td></tr><tr><td>Pajak Daerah</td><td>22.776.715.953</td><td>23.851.781.411</td><td>1.075.065.458</td><td>5%</td></tr><tr><td>Retribusi Daerah</td><td>3.623.788.885</td><td>3.455.938.885</td><td>(167.850.000)</td><td>5%</td></tr><tr><td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td><td>4.324.065.836</td><td>4.832.210.107</td><td>508.144.271</td><td>12%</td></tr><tr><td>Lain-lain PAD yang Sah</td><td>70.117.549.000</td><td>78.087.093.333</td><td>7.969.544.333</td><td>11%</td></tr><tr><td>PENDAPATAN TRANSFER</td><td>812.206.674.716</td><td>826.889.300.269</td><td>14.682.625.553</td><td>2%</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</td><td>760.965.265.000</td><td>759.342.458.907</td><td>(1.622.806.093)</td><td>0%</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Antar Daerah</td><td>51.241.409.716</td><td>67.546.841.362</td><td>16.305.431.646</td><td>32%</td></tr><tr><td>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</td><td>3.800.000.000</td><td>3.200.000.000</td><td>(600.000.000)</td><td>16%</td></tr><tr><td>Pendapatan Hibah</td><td>3.800.000.000</td><td>3.200.000.000</td><td>(600.000.000)</td><td>16%</td></tr><tr><td>Jumlah Pendapatan</td><td>916.848.794.390</td><td>940.316.324.005</td><td>23.467.529.615</td><td>3%</td></tr></table></td></tr>
</table>

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
		Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp100.842.119.674 bertambah sebesar Rp9.384.904.062 atau atau 9% menjadi sebesar Rp110.227.023.736.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp100.842.119.674 bertambah sebesar Rp9.384.904.062 atau atau 9% menjadi sebesar Rp110.227.023.736,- secara rinci tersaji pada tabel 2.1 dibawah ini	
		Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.		

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		%	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2022	% Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2022
	(Rp)			(Rp)					
	Target	Realisasi		Target	Realisasi Per Agustus 2023				
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8:2	10=9:2
PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.842.119.674,00	160.616.789.645,26	162,46	100.842.119.674,00	71.976.926.944,00	71,91	110.227.023.736,00	9.384.904.062,00	9,31
Pajak Daerah	22.776.715.953,00	21.834.156.143,46	94,56	22.776.715.953,00	15.242.754.541,00	66,92	25.651.781.411,00	2.875.065.458,00	4,72
Pajak Hotel	186.000.000,00	193.472.436,00	107,48	186.000.000,00	108.711.000,00	62,29	210.000.000,00	30.000.000,00	16,67
Pajak Restoran	1.429.000.000,00	1.731.533.016,00	126,91	1.429.000.000,00	842.915.746,00	58,10	1.400.000.000,00	(35.000.000,00)	(1,75)
Pajak Hiburan	3.000.000,00	4.170.750,00	137,94	8.000.000,00	1.576.000,00	24,23	7.000.000,00	500.000,00	7,69
Pajak Reklame	250.000.000,00	280.436.054,00	112,02	250.000.000,00	171.365.726,00	72,03	300.000.000,00	50.000.000,00	27,58
Pajak Penerangan Jalan	12.873.000.000,00	13.226.940.917,46	131,65	13.873.000.000,00	8.199.110.172,00	70,69	13.629.000.000,00	956.000.000,00	5,05
Pajak Parkir	6.000.000,00	6.427.960,00	107,13	6.000.000,00	5.087.300,00	0,08	12.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Pajak Air Tanah	15.000.000,00	16.811.997,00	112,74	15.000.000,00	11.271.467,00		30.000.000,00	15.000.000,00	
Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.100.000,00	101,00	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	425.000.000,00	271.121.211,00	63,32	425.000.000,00	252.368.041,00	59,41	500.000.000,00	75.000.000,00	17,65
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.804.215.953,00	2.415.105.302,00	50,26	4.804.215.953,00	3.291.134.501,00	68,64	4.937.781.411,00	133.565.458,00	1,16
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	3.348.616.505,00	111,62	3.000.000.000,00	2.344.586.620,00	78,05	3.200.000.000,00	200.000.000,00	6,67
Retribusi Daerah	3.973.666.868,00	3.759.786.358,00	71,24	3.623.786.868,00	1.139.176.368,00	31,69	3.465.556.883,00	(157.930.985,00)	(4,63)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	275.000.000,00	252.323.850,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	110.000.000,00	156.460.000,00	142,28	200.000.000,00	88.538.000,00	44,74	300.000.000,00	190.000.000,00	50,00
Retribusi Pelayanan Pasar	8.000.000,00	8.010.000,00	100,13		725.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	320.000.000,00	234.152.000,00	73,17	322.000.000,00	133.963.000,00	41,60	322.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	30.000.000,00	33.300.000,00	111,00	30.000.000,00	10.800.000,00	36,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000,00	45.040.000,00	81,98	50.000.000,00	31.150.000,00	62,30	50.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	336.625.000,00	67,33	500.000.000,00	68.475.000,00	13,70	500.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.118.858.483,00	622.338.595,00	55,64	1.384.558.483,00	348.309.900,00	25,16	1.112.796.483,00	-271.850.000,00	(19,63)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pesiar/Pariwisata yang Dikembangkan	0,00	0,00			0,00			0,00	
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pada	32.000.000,00	12.400.000,00	38,75	80.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	3.000.000,00	9,38
Retribusi Pelayanan Kepariwisataan Hewan	3.500.000,00	3.570.000,00	102,00	3.500.000,00	3.430.000,00	98,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengujian Produksi Usaha Daerah	625.000.000,00	421.910.000,00	67,51	625.000.000,00	239.936.700,00	38,39	625.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Izin Mendirikan Bangunan	801.750.000,00	822.967.700,00	102,65	276.750.000,00	197.271.300,00	71,29	276.750.000,00	0,00	0,00
Retribusi Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Tabel 2.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.842.119.674	110.227.023.736	9.384.904.062	9%
4.1.01	Pajak Daerah	22.776.715.953	23.650.981.411	1.074.265.458	5%
4.1.02	Retribusi Daerah	3.623.786.883	3.456.738.885	(167.050.000)	5%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.936	4.832.210.107	508.144.271	12%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	70.117.549.000	78.087.093.333	7.969.544.333	11%

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut

1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9=8-5	10=8/5
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**4.324.063.036,00**	**4.324.063.036,00**	**100,00**	**4.324.063.036,00**	**4.832.210.197,00**	**111,75**	**4.832.210.197,00**	**508.144.271,00**	**11,75**
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**70.448.779.405,00**	**79.292.992.716,34**	**106,52**	**78.117.549.808,00**	**58.283.779.896,00**	**71,71**	**70.807.093.232,00**	**7.960.544.232,00**	**11,37**
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.275.730.405,00	1.130.389.940,00	88,61	1.502.500.000,00	4.915.000,00	0,31	900.000.000,00	-602.500.000,00	(62,72)
Hasil Sewa BMD			0,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00	100.734.000,00	0,00	170.000.000,00	57.150.000,00	0,00	174.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00	1.280.085.022,00	0,00	1.100.000.000,00	358.234.466,00	31,94	500.000.000,00	-600.000.000,00	(54,55)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	125.000.000,00	162.151.177,00	0,00	120.000.000,00	82.147.341,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
Kemunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) LG			0,00			0,00		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00		0,00	100.000.000,00		0,00		-100.000.000,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pihak Lain	2.800.000.000,00	2.347.851.000,54	0,00	2.800.000.000,00	1.296.370.291,00	46,04	2.300.000.000,00	-500.000.000,00	(17,86)
Pencairan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.740.000.000,00	3.181.107.946,40	0,00	1.740.000.000,00	380.000.532,51	22,03	600.000.000,00	-1.140.000.000,00	(65,52)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	150.000.000,00	10.622.100,00	0,00	160.000.000,00	12.562.162,00	0,00	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	0,00		129.980,00		300.000,00	300.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	0,00		1.165.202,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	-	0,00		74.250,00		250.000,00	250.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	-	0,00		196.409,00		400.000,00	400.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	-	0,00				50.000,00	50.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	0,00		82.054,00		200.000,00	200.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	-	0,00		6.141.720,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	0,00		833.000,00		833.000,00	833.000,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	0,00				100.000,00	100.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00		0,00	50.000.000,00		0,00		-50.000.000,00	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Jaminan Pesiunan Tabungan Perumahan Rakyat, ASN			0,00		4.460.700.950,00	0,00	4.460.700.950,00	4.460.700.950,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	75.502.294,00	0,00	100.000.000,00	15.457.186,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Dinas Dalam Negeri, Pengadaan Dinas Biasa	235.000.000,00	389.331.877,00	0,00	220.000.000,00	544.111.401,00	247,32	760.000.000,00	400.000.000,00	218,18
Pendapatan BLUD	59.526.042.000,00	62.197.350.637,00	0,00	54.551.063.000,00	38.932.923.275,00	71,01	59.775.308.142,00	4.574.448.142,00	8,08
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada PKTP	7.153.806.000,00	7.165.331.125,00	100,16	7.153.086.000,00	4.259.160.504,00	59,53	8.597.662.232,00	1.442.576.232,00	20,16

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :		
		a. Pajak Daerah		
		Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp22.776.715.953 bertambah sebesar Rp1.075.065.458 atau 5% menjadi sebesar Rp23.851.781.411.	Pemerintah Kabuapten Dharmasrya dalam Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp22.776.715.953 bertambah sebesar Rp1.074.0265.458 atau 5% menjadi sebesar Rp23.850.981.411,- dengan Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain : 1. Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp12.970.000.000 bertambah sebesar Rp555.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp13.625.000.000. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.504.215.953 bertambah sebesar Rp53.565.458 atau 1% menjadi sebesar Rp4.557.781.411. 3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp3.000.000.000 bertambah sebesar Rp200.000.000 atau 7% menjadi sebesar Rp3.200.000.000.	Pemerintah Kabuapten Dharmasrya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sudah menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain : 1. Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp12.970.000.000 bertambah sebesar Rp555.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp13.625.000.000. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.504.215.953 bertambah sebesar Rp53.565.458 atau 1% menjadi sebesar Rp4.557.781.411. 3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp3.000.000.000 bertambah sebesar Rp200.000.000 atau 7% menjadi sebesar Rp3.200.000.000.		
		b. Retribusi Daerah		
		Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.623.788.885 berkurang sebesar Rp(167.850.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp3.455.938.885.	Pemerintah Kabupaten Dhamasraya dalam Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.623.788.885 berkurang sebesar Rp(167.050.000)	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain : 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp1.102.500.000 bertambah sebesar Rp101.500.000 atau 9% menjadi sebesar Rp1.204.000.000 dengan rincian antara lain : a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan semula sebesar Rp200.000.000 bertambah sebesar Rp100.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp300.000.000. b. Retribusi Pelayanan Pasar semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.500.000,00 c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tetap sebesar Rp322.500.000 d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tetap sebesar Rp500.000.000. 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp2.243.058.400 berkurang sebesar Rp(269.350.000) atau (12%) menjadi sebesar Rp1.973.708.400 dengan rincian antara lain: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.384.558.400 berkuang sebesar Rp(271.850.000) atau (20%) menjadi sebesar Rp1.112.708.400. b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tetap sebesar Rp825.000.000. 3) Retribusi Perizinan Tertentu tetap sebesar Rp278.230.485 dengan rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	atau (5%) menjadi sebesar Rp3.456.738.885,- dengan target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain : 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp1.102.500.000 bertambah sebesar Rp101.500.000 atau 9% menjadi sebesar Rp1.204.000.000 dengan rincian antara lain : a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan semula sebesar Rp200.000.000 bertambah sebesar Rp100.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp300.000.000. b. Retribusi Pelayanan Pasar semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.500.000,00 c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tetap sebesar Rp322.500.000 d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tetap sebesar Rp500.000.000. 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp2.243.058.400 berkurang sebesar Rp(269.350.000) atau (12%) menjadi sebesar Rp1.973.708.400 dengan rincian antara lain: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.384.558.400 berkuang sebesar Rp(271.850.000) atau (20%) menjadi sebesar Rp1.112.708.400. 3) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tetap sebesar Rp825.000.000,-	
		Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 ini sudah melakukan proses penyusunan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retrubsi Daerah dan bulan Oktober ini sudah diajukan Ranperda PDRD ke DPRD untuk dibahas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah terhadap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahun 2024 dan seterusnya.	
		Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya* ***harus segera menetapkan*** *Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*		
		Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp71.488.274.358,69 atau 67,89% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp105.302.908.633 yang diuraikan antara lain :		
		1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp15.241.255.509 atau 66,92% dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.776.715.953.		
		2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.148.389.700 atau 31,69% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.623.788.885.		
		Terhadap alokasi Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Tahun Anggaran 2023.		
		Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		
		c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
		Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp4.324.065.836 bertambah sebesar Rp508.144.271 atau 12% menjadi sebesar Rp4.832.210.107.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp4.324.065.836 bertambah sebesar Rp508.144.271 atau 12% menjadi sebesar Rp4.832.210.107,- dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.	Pemerintah Kabupaten Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum ada memiliki BUMD, hanya ada berupa penyertaan modal ke Badan/Lembaga/Pihak Ketiga yang jumlah sebesar Rp.28.952.000.000,- dengan rincian sbb: 1. PT. BPD Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari sebesar Rp.27.352.000.000,- 2. PT. Bailerung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp.1.500.000.000,- 3. PT. BPR Pulau Punjung sebesar Rp.100.000.000,-
		Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi : 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah. 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu. 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan. 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan. 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.		
		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai *(performance based)*, atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.		
		Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.		
		d. **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**		
		Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp70.117.549.000 bertambah sebesar Rp7.969.544.333 atau 11% menjadi sebesar Rp78.087.093.333, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Peruhahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp70.117.549.000 bertambah sebesar Rp7.969.544.333 atau 11% menjadi sebesar Rp78.087.093.333, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah	Kedepaannya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tetap mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4)

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :		
		1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan semula sebesar Rp1.592.500.000 berkurang sebesar Rp(992.500.000) atau (62%) menjadi sebesar Rp600.000.000.		
		2) Jasa Giro semula sebesar Rp1.220.000.000 berkurang sebesar Rp(600.000.000) atau (49%) menjadi sebesar Rp620.000.000.		
		3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp2.900.000.000 berkurang sebesar Rp(600.000.000) atau (21%) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.		
		4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain semula sebesar Rp1.740.000.000 berkurang sebesar Rp(1.140.000.000) atau (66%) menjadi sebesar Rp600.000.000.		
		5) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp370.000.000 bertambah sebesar Rp4.890.788.959 atau 1.322% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.260.788.959.		
		6) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp54.801.063.000 bertambah sebesar Rp4.974.446.142 atau 9% menjadi sebesar Rp59.775.509.142.		
		2. Pendapatan Transfer		
		Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp812.206.674 bertambah sebesar Rp14.682.625.553 atau	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat perbedaan jumlah pendapatan Pendapatan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		2% menjadi sebesar Rp826.889.300.269 atau 87,94% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.	Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer antara Ranperda yang diajukan untuk evaluasi dengan Ranperda yang disampaikan setelah evaluasi. Perbedaan itu terjadi pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat awalnya saat Ranperda yang diajukan untuk evaluasi sebesar Rp.759.342.458.907,- dan pada saat Ranperda disampaikan setelah evaluasi menjadi sebesar Rp.760.881.250.907,- atau betambah sebesar Rp.1.539.062.000,-. Penambahan ini didasari dengan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana pada PMK tersebut Kabupaten Dharmasraya mendapat tambahan belanja dari alokasi kinerja Pemerintah Desa sebanyak 11 (sebelas) nagari masing-masing sebesar Rp.139.642.000,- dimana tambahan alokasi Dana Desa tersebut belum masuk dalam Ranperda yang diajukan sewaktu evaluasi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp760.965.265.000 berkurang sebesar Rp(83.744.093) atau 0,01% menjadi sebesar Rp760.881.520.907 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut : 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp.699.414.449.000 berkurang sebesar Rp(1.622.806.093) atau (0,23%) menjadi sebesar Rp697.791.642.907 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan : a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp22.020.936.000 bertambah sebesar Rp4.399.000 atau 0,01% menjadi sebesar Rp22.025.335.000. b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp489.147.384.000. c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp60.509.917.000.	Transfer Pemerintah Pusat ***telah mempedomani*** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.
		Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan:		
		a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
		Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp760.965.265.000 berkurang sebesar Rp(1.622.806.093) atau 0,21% menjadi sebesar Rp759.342.458.907 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :		
		2) Dana Perimbangan semula sebesar Rp.699.414.449.000 berkurang sebesar Rp(1.622.806.093) atau (0,23%) menjadi sebesar Rp697.791.642.907 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan : 5. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp22.020.936.000 bertambah sebesar Rp4.399.000 atau 0,01% menjadi sebesar Rp22.025.335.000. 6. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp489.147.384.000. 7. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp60.509.917.000. 8. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp127.736.212.000 berkurang sebesar Rp(1.627.205.093) atau (1%) menjadi sebesar Rp126.109.006.907. 3) Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal tetap sebesar Rp8.601.217.000. 4) Dana Desa tetap sebesar Rp52.949.599.000.		
		Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Dharmasraya sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :	d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp127.736.212.000 berkurang sebesar Rp(1.627.205.093) atau (1%) menjadi sebesar Rp126.109.006.907. 3. Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal tetap sebesar Rp.8.601.217.000.- 4. Dana Desa tetap sebesar Rp.54.488.661.000,-	

Tabel 3

Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp) APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemenkeu	selisih
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH				-
PENDAPATAN TRANSFER				-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**760.985.265.000**	**759.342.458.907**	**707.877.452.000**	**1.484.803.093**
Dana Perimbangan	**699.414.449.000**	**697.791.642.907**	**699.276.345.000**	**1.484.803.093**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**22.020.936.000**	**22.020.335.000**	**22.020.335.000**	-
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.824.005.000	8.824.005.000	8.824.005.000	-
DBH (PPh Pasal 21	4.750.324.000	4.750.324.000	4.750.324.000	-
DBH (Cukai Hasil Tembakau (CHT)	59.333.000	42.632.000	42.632.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dan Gas Bumi	51.780.000	51.780.000	51.780.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.154.119.000	1.154.119.000	1.154.119.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pertanian dan Kehutanan Lainnya				-
Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Daya Alam (SDA) Pertanian Subsektor_Others_Penalty	5.400.868.000	5.400.869.000	5.400.869.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	531.646.000	531.646.000	531.646.000	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.239.961.000	1.239.961.000	1.239.961.000	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	**489.147.384.000**	**489.147.384.000**	**489.147.384.000**	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.147.384.000	489.147.384.000	489.147.384.000	-
- DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya	300.805.012.000	300.805.012.000	300.805.012.000	-
- DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	188.342.372.000	188.342.372.000	188.342.372.000	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**60.508.917.000**	**60.509.917.000**	**60.367.314.000**	**- 142.603.000**
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	1.429.139.000	1.429.139.000	1.429.139.000	-
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	1.036.814.000	1.036.814.000	1.036.814.000	-
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	9.229.379.000	9.229.379.000	9.229.379.000	-
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Pengalokasian Daerah	10.670.023.000	10.670.023.000	10.670.023.000	-
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Pengawas Pengadaan Imunisasi Mandiri	1.430.879.000	1.430.879.000	1.430.879.000	-
DAK Fisik Bidang Jalan Pendidikan Konektivitas Daerah	15.337.884.000	15.337.884.000	15.195.281.000	142.603.000
DAK Kesehatan Penyediaan Rumah	137.107.000	137.107.000	137.107.000	
DAK Pengurusan Dalam Kesehatan	10.376.697.000	10.376.697.000	10.376.697.000	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**127.736.212.000**	**126.109.006.907**	**127.736.212.000**	**1.627.205.093**
DAK Non Fisik BOS Reguler	33.476.300.000	33.476.300.000	33.476.300.000	23.236.508
DAK Non Fisik BOS Kinerja	1.430.000.000	1.430.000.000	1.430.000.000	-
DAK Non Fisik TPG PNSD	56.319.009.000	56.319.009.000	56.319.009.000	-
DAK Non Fisik Tambahan Guru PNSD	750.601.000	750.601.000	750.601.000	-
DAK Non Fisik TKG PNSD	2.751.640.000	2.751.640.000	2.751.640.000	-
DAK Non Fisik BOP PAUD	3.971.400.000	3.422.600.000	3.971.400.000	451.200.000
DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.006.800.000	1.006.800.000	1.006.800.000	
DAK Non Fisik BOKIS Bantuan Operasional Kesehatan	6.043.076.000	6.043.076.000	6.043.076.000	-
DAK Non Fisik BOKIS Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000	402.648.000	402.648.000	-
DAK Non Fisik BOKIS Akreditasi Puskesmas	13.946.876.000	13.307.111.998	13.946.876.000	1.432.764.002
DAK Non Fisik BOKIS Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.851.017.000	3.396.336.100	3.851.017.000	432.780.900
DAK Non Fisik PK3UKM	420.375.000	403.675.400	420.375.000	16.699.600
DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal	511.300.000	511.082.000	511.300.000	218.000
DAK NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	307.307.492	438.800.000	131.292.508
DAK Non Fisik Dana Kehutanan Pangan Dan Perkebunan	879.375.000	876.835.000	879.375.000	2.540.000
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal	**8.601.217.000**	**8.601.217.000**	**8.601.217.000**	-
Dana Desa	**54.949.999.000**	**54.949.999.000**	**54.949.999.000**	-
Dana Otsenmi khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	-	-

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus mempedomani*** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.		
		b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
		Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp51.241.409.716 bertambah sebesar Rp16.305.431.646 atau 32% menjadi sebesar Rp67.546.841.362 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil diuraikan hanya pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp51.241.409.716 bertambah sebesar Rp16.305.431.646 atau 32% menjadi sebesar Rp67.546.841.362 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil diuraikan hanya pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak.	
		3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
		Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.800.000.000 berkurang sebesar Rp(600.000.000) atau (16%) menjadi sebesar Rp3.200.000.000.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.800.000.000 berkurang sebesar Rp(600.000.000) atau (16%) menjadi sebesar	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			Rp3.200.000.000.	
		C. Kebijakan Belanja Daerah		
		Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.029.378.138.553 berkurang sebesar Rp(48.649.282.468) atau turun (5%) menjadi sebesar Rp980.728.856.085.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat perbedaan jumlah belanja daerah antara Ranperda yang diajukan untuk evaluasi dengan Ranperda yang disampaikan setelah evaluasi. Perbedaan itu terjadi Belanja Bantuan Keuangan awalnya saat Ranperda yang diajukan untuk evaluasi sebesar Rp. 106.699.574.000,- dan pada saat Ranperda disampaikan setelah evaluasi menjadi sebesar Rp. 108.235.636.000,- atau betambah sebesar Rp.1.539.062.000,-. Penambahan ini karena adanya penambahan Pendapatan dari alokasi kinerja Pemerintah Desa sebanyak 11 (sebelas) nagari masing-masing sebesar Rp.139.642.000 yang didasari PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga sehingga akan menambah belanja pada Bantuan Keuangan Nagari sebesar penambahan pendapatan tersebut. Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.029.378.138.553 berkurang sebesar Rp(47.110.220.468) atau turun (0,05%) menjadi sebesar Rp.982.267.918.085.	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penetapan alokasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan *dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan* sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan ***setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan*** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.755.317.832 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:		

<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Tabel 4
Belanja Daerah
<table>
<tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah (Rp)</th><th colspan="2">Bertambah/(Berkurang)</th></tr>
<tr><th>Sebelum Perubahan</th><th>Setelah</th><th>(Rp)</th><th>%</th></tr>
<tr><td>BELANJA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>BELANJA OPERASI</td><td>766.159.260.882</td><td>714.463.937.180</td><td>(51.695.323.702)</td><td>7 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Pegawai</td><td>471.538.672.736</td><td>414.618.723.717</td><td>(56.919.949.019)</td><td>12 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Barang dan Jasa</td><td>280.817.797.266</td><td>282.111.928.563</td><td>1.294.131.317</td><td>0 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Hibah</td><td>13.802.790.880</td><td>17.732.284.880</td><td>3.930.494.000</td><td>28 %</td></tr>
<tr><td>BELANJA MODAL</td><td>151.236.483.671</td><td>152.365.898.157</td><td>1.129.414.486</td><td>1 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</td><td>38.340.791.768</td><td>42.233.951.093</td><td>3.893.159.325</td><td>10 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</td><td>45.417.466.354</td><td>55.300.497.264</td><td>9.783.030.910</td><td>22 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</td><td>61.568.056.460</td><td>51.343.724.700</td><td>(10.225.331.760)</td><td>17 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</td><td>5.208.742.689</td><td>2.889.318.700</td><td>(2.319.423.989)</td><td>45 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Modal Aset Lainnya</td><td>700.426.400</td><td>698.426.400</td><td>(2.000.000)</td><td>0 %</td></tr>
<tr><td>BELANJA TIDAK TERDUGA</td><td>1.000.000.000</td><td>4.154.380.709</td><td>3.154.380.709</td><td>315 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Tidak Terduga</td><td>1.000.000.000</td><td>4.154.380.709</td><td>3.154.380.709</td><td>315 %</td></tr>
<tr><td>BELANJA TRANSFER</td><td>110.982.394.000</td><td>109.744.640.039</td><td>(1.237.753.961)</td><td>1 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Bagi Hasil</td><td>2.632.820.000</td><td>3.045.066.039</td><td>412.246.039</td><td>16 %</td></tr>
<tr><td>Belanja Bantuan Keuangan</td><td>108.349.574.000</td><td>106.699.574.000</td><td>(1.650.000.000)</td><td>2 %</td></tr>
<tr><td>Jumlah Belanja</td><td>1.029.378.138.553</td><td>980.728.856.085</td><td>(48.649.282.468)</td><td>5 %</td></tr>
</table>
</td>
<td>
Tabel 4
Belanja Daerah
<table>
<tr><th rowspan="2">Kode</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah (Rp)</th><th colspan="2">Bertambah/(Berkurang)</th></tr>
<tr><th>Sebelum Perubahan</th><th>Setelah Perubahan</th><th>(Rp)</th><th>%</th></tr>
<tr><td>5</td><td>BELANJA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>BELANJA OPERASI</td><td>766.159.260.882</td><td>714.730.300.737</td><td>51.428.960.145</td><td>0,07</td></tr>
<tr><td>5.1.01</td><td>Belanja Pegawai</td><td>471.538.672.736</td><td>402.006.118.655</td><td>71.532.553.781</td><td>0,15</td></tr>
<tr><td>5.1.02</td><td>Belanja Barang dan Jasa</td><td>280.817.797.266</td><td>285.601.249.202</td><td>4.783.451.936</td><td>0,02</td></tr>
<tr><td>5.1.05</td><td>Belanja Hibah</td><td>13.802.790.880</td><td>29.122.932.580</td><td>15.320.141.700</td><td>1,11</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>BELANJA MODAL</td><td>151.236.483.671</td><td>152.416.828.609</td><td>1.180.344.938</td><td>0,01</td></tr>
<tr><td>5.2.02</td><td>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</td><td>38.340.791.768</td><td>41.343.977.663</td><td>3.003.185.897</td><td>0,08</td></tr>
<tr><td>5.2.03</td><td>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</td><td>45.417.466.354</td><td>56.200.220.019</td><td>10.782.753.665</td><td>0,24</td></tr>
<tr><td>5.2.04</td><td>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</td><td>61.568.056.460</td><td>51.343.724.700</td><td>10.225.331.760</td><td>0,17</td></tr>
<tr><td>5.2.05</td><td>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</td><td>5.208.742.689</td><td>2.828.979.825</td><td>2.380.262.864</td><td>0,46</td></tr>
<tr><td>5.2.06</td><td>Belanja Modal Aset Lainnya</td><td>700.426.400</td><td>698.426.400</td><td>2.000.000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>BELANJA TIDAK TERDUGA</td><td>1.000.000.000</td><td>4.154.380.709</td><td>3.154.380.709</td><td>3,15</td></tr>
<tr><td>5.3.01</td><td>Belanja Tidak Terduga</td><td>1.000.000.000</td><td>4.154.380.709</td><td>3.154.380.709</td><td>3,15</td></tr>
<tr><td>5.4</td><td>BELANJA TRANSFER</td><td>110.982.394.000</td><td>110.966.408.030</td><td>15.985.970</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5.4.01</td><td>Belanja Bagi Hasil</td><td>2.632.820.000</td><td>2.730.772.030</td><td>97.952.030</td><td>0,04</td></tr>
<tr><td>5.4.02</td><td>Belanja Bantuan Keuangan</td><td>108.349.574.000</td><td>108.235.636.000</td><td>113.938.000</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Belanja</td><td>1.029.378.138.553</td><td>982.367.918.080</td><td>47.110.220.468</td><td>0,05</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>I. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :</td>
<td>Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>a. SPM bidang Pendidikan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp17.117.495.055 bertambah sebesar Rp21.045.509.065 atau 123% menjadi sebesar Rp38.163.004.120 atau 12% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp314.177.638.158. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp17.117.495.055 bertambah sebesar Rp21.045.509.065 atau 123% menjadi sebesar Rp38.163.004.120 atau 12% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp314.177.638.158. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan semula sebesar Rp2.233.915.660 bertambah sebesar Rp12.990.672.000 atau 582% menjadi sebesar Rp15.224.587.660, agar alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian: a. Standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian b. Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar. c. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar d. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar. e. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar. f. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen dalam Penyediaan alokasi belanja untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan setidaknya mencapai angka **23,50%** dari Belanja Dinas Pendidikan (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Pendidikan Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
		1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan semula sebesar Rp2.233.915.660 bertambah sebesar Rp12.990.672.000 atau 582% menjadi sebesar Rp15.224.587.660, agar alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian:		
		a. standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.		
		b. Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.		
		c. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar		
		d. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.		
		e. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.		
		f. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.		
		II. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		menjadi semula sebesar Rp7.945.714.755 bertambah sebesar Rp3.203.118.085 atau 40% menjadi sebesar Rp11.148.832.840 agar alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi semula sebesar Rp7.945.714.755 bertambah sebesar Rp3.203.118.085 atau 40% menjadi sebesar Rp11.148.832.840 agar alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian : a. standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b. Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama. c. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama. d. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama. e. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama. b. f. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.	
		a. standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.		
		b. Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.		
		c. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.		
		d. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.		
		e. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.		
		f. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.		
		3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp5.839.214.640 bertambah sebesar Rp4.715.414.980 atau 81% menjadi sebesar Rp10.554.629.620, agar alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp5.839.214.640 bertambah sebesar Rp4.715.414.980 atau 81% menjadi sebesar Rp10.554.629.620, agar alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian : a. standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses,	
		a. standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		standar penilaian.	standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.	
		b. Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.	b. Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.	
		c. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.	c. c. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.	
		d. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.	d. d. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.	
		e. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.	e. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.	
		4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp1.098.650.000 bertambah sebesar Rp136.304.000 atau 12% menjadi sebesar Rp1.234.954.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian:	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp1.098.650.000 bertambah sebesar Rp136.304.000 atau 12% menjadi sebesar Rp1.234.954.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian:	
		a. standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.	a. standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.	
		b. Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).	b. Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).	
		c. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).	c. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).	
		d. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).	d. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).	
		e. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).	e. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).	
		f. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket	f. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		A, Paket B, dan Paket C).	(Paket A, Paket B, dan Paket C).	
		Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:		
		1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ***belum dianggarkan***, untuk itu agar alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ***belum dianggarkan***, untuk itu agar alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:		
		a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.		
		b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.		
		d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.		
		3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp12.543.000 bertambah sebesar Rp89.374.900 atau 713% menjadi sebesar Rp101.917.900, **harus digunakan** alokasi anggarannya untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp25.593.000 bertambah sebesar Rp2.518.925.800 atau 9.842% menjadi sebesar Rp2.544.518.800 **harus digunakan** alokasi anggarannya untuk menjamin:		
		a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.		
		b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.		
		d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.		
		5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD semula sebesar Rp10.000.000 bertambah sebesar Rp72.086.000 atau 721% menjadi sebesar Rp82.086.000, **agar digunakan** alokasi anggarannya untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan semula sebesar Rp30.000.000 bertambah sebesar Rp740.140.500 atau 2.467% menjadi sebesar Rp770.140.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :		
		a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.		
		b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.		
		c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.		
		d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).		
		7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan ***belum dianggarkan***, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tetap sebesar Rp10.000.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :		
		a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.		
		b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.		
		c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.		
		d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.		
		Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:		
		1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.		
		2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.		
		3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
		Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.		
		Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Bidang Pendidikan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.		
		b. SPM Kesehatan		
		Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp1.354.875.725 berkurang sebesar Rp(18.886.300) atau (1%) menjadi sebesar Rp1.335.989.425 atau 2% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp80.542.502.416 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp1.354.875.725 berkurang sebesar Rp(18.886.300) atau (1%) menjadi	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen dalam penyediaan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan setidaknya mencapai angka

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :	sebesar Rp1.335.989.425 atau 2% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp80.542.502.416 agar ditingkatkan alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut : 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tetap sebesar Rp43.995.500 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp210.879.900 berkurang sebesar Rp(18.885.300) atau 9% menjadi sebesar Rp191.993.600,- 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp180.000.000 berkurang sebesar Rp(1.000) menjadi sebesar Rp179.999.000 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tetap sebesar Rp51.800.000 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar tetap sebesar Rp43.003.400 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif tetap sebesar Rp60.000.000 7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut tetap sebesar Rp39.000.200 8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tetap sebesar Rp164.520.000 9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	**2,04%** dari Belanja Dinas Kesehatan (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Kesehatan.
		1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tetap sebesar Rp43.995.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :		
		a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.		
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.		
		c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :		
		(1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)		
		(2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).		
		2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp210.879.900 berkurang sebesar Rp(18.885.300) atau 9% menjadi sebesar Rp191.993.600, agar alokasi anggarannya diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		tersebut untuk: :	Penderita Diabetes Melitus tetap sebesar Rp320.047.725	
		a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.	10. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat tetap sebesar Rp50.000.000	
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.	11. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis tetap sebesar Rp135.330.000	
		c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.	12. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV tetap sebesar Rp56.300.000	
		3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp180.000.000 berkurang sebesar Rp(1.000) menjadi sebesar Rp179.999.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :	Guna diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari	
		a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.	1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.	
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.	2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.	
		c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :	3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.	
		(1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal	4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.	
		(2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).	5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.	
		4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tetap	6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.	
			7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.	
			8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.	
			9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		sebesar Rp51.800.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :	yang mendapatkan layanan kesehatan 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.	
		a) Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.		
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.		
		c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :		
		(1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi		
		(2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).		
		5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar tetap sebesar Rp43.003.400 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:		
		a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.		
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.		
		c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi:		
		(1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera		
		(2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.		
		6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif tetap sebesar Rp60.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :		
		a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).		
		b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.		
		c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :		
		(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.		
		(2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.		
		(3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.		
		7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut tetap sebesar Rp39.000.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :		
		a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).		
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.		
		c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.		
		(2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.		
		d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.		
		8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tetap sebesar Rp164.520.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan kegiatan tersebut untuk :		
		a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.		
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.		
		c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:		
		(1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.		
		(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat		
		(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.		
		9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus tetap sebesar Rp320.047.725, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.		
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.		
		c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :		
		(1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan		
		(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi		
		(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.		
		10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat tetap sebesar Rp50.000.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :		
		a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.		
		b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.		
		c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:		
		(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		(2) Edukasi.		
		(3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.		
		(4) Edukasi kepatuhan minum obat.		
		(5) Melakukan rujukan jika diperlukan.		
		11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis tetap sebesar Rp135.330.000 alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :		
		a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.		
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.		
		c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :		
		(1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		(2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.		
		(3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.		
		(4) Melakukan rujukan jika diperlukan.		
		12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV tetap sebesar Rp56.300.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :		
		a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.		
		b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.		
		c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi		
		(1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan		
		(2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun		
		(3) Melakukan rujukan jika diperlukan		
		Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:		
		1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.		
		2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.		
		3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.		
		4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.		
		5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.		
		6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.		
		7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.		
		8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.		
		9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		
		10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		
		11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan		
		12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		
		Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.		
		c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp4.102.380.000 berkurang sebesar Rp(136.476.200) atau (3%) menjadi sebesar Rp3.965.903.800 atau 5% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.026.967.826. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp4.102.380.000 berkurang sebesar Rp(136.476.200) atau (3%) menjadi sebesar Rp3.965.903.800 atau 5% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.026.967.826. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.481.338.000 berkurang sebesar Rp(77.591.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp1.403.747.000 2. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp2.621.042.000 berkurang sebesar Rp(58.885.200) atau (2%) menjadi sebesar Rp2.562.156.800	
		1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.481.338.000 berkurang sebesar Rp(77.591.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp1.403.747.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.		
		2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp2.621.042.000 berkurang sebesar Rp(58.885.200) atau (2%) menjadi sebesar Rp2.562.156.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :	Guna diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :	
		1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	1. 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	
		2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	2. 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	
		Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Sudah Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
		d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
		Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp148.746.600 berkurang sebesar Rp(120.138.000) atau (81%) menjadi sebesar Rp28.608.600 atau 1% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.499.644.800 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp148.746.600 berkurang sebesar Rp(120.138.000) atau (81%) menjadi sebesar Rp28.608.600 atau 1% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.499.644.800 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen dalam penyediaan Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat setidaknya mencapai angka 3,89% dari Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).
		1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp45.808.600 berkurang sebesar Rp(29.930.000) atau (65%) menjadi sebesar Rp15.878.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp45.808.600	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.	berkurang sebesar Rp(29.930.000) atau (65%) menjadi sebesar Rp15.878.600 2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp34.428.000 berkurang sebesar Rp(24.698.000) atau (66%) menjadi sebesar Rp12.730.000 3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp61.615.000 berkurang sebesar Rp(61.615.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya : a. Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah. b. Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah. c. Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU. 4. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp3.895.000	
		2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp34.428.000 berkurang sebesar Rp(24.698.000) atau (66%) menjadi sebesar Rp12.730.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.		
		3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp61.615.000 berkurang sebesar Rp(61.615.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :		
		a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.		
		b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.		
		c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		huni, pembangunan rumah khusus + PSU.	berkurang sebesar Rp(3.895.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0 Guna diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari: 1. 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. 2. 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.	
		4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp3.895.000 berkurang sebesar Rp(3.895.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0 untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.		
		Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :		
		1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.		
		Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.		
		Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.		
		e. SPM Trantibumlinmas		
		1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp542.475.700 bertambah sebesar Rp237.624.400 atau 44% menjadi sebesar Rp780.100.100 atau 9% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.705.171.950. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :	1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp542.475.700 bertambah sebesar Rp237.624.400 atau 44% menjadi sebesar Rp780.100.100 atau 9% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.705.171.950. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni : a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota semula sebesar Rp52.475.000 berkurang sebesar Rp(31.110.600) atau (%) menjadi sebesar Rp21.364.400, b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp284.134.100 bertambah sebesar Rp277.450.900 atau 98% menjadi sebesar Rp561.585.000, c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp205.866.600 berkruang sebesar Rp(8.715.900) atau (4%)	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen dalam penyediaan Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Trantibumlinmas setidaknya mencapai angka 34,86% dari Belanja Urusan Trantibumlinmas (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota dalam APBD Perubahan Tahun 2022).
		a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota semula sebesar Rp52.475.000 berkurang sebesar Rp(31.110.600) atau (%) menjadi sebesar Rp21.364.400, untuk itu **agar dialokasikan anggaran yang mencukupi** serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).		
		b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp284.134.100 bertambah sebesar Rp277.450.900 atau 98% menjadi sebesar Rp561.585.000, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukkannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp205.866.600 berkruang sebesar Rp(8.715.900) atau (4%) menjadi sebesar Rp197.150.700, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.	menjadi sebesar Rp197.150.700, 2. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp1.366.994.700 bertambah sebesar Rp294.983.000 atau 22% menjadi sebesar Rp1.661.977.700 atau 21% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.820.229.976. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni: a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp477.400.000 berkurang sebesar Rp(28.502.000) atau (6%) menjadi sebesar Rp448.898.000, b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran semula sebesar Rp39.860.000 bertambah sebesar Rp2.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp41.860.000 c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia **belum dianggarkan**	
		2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp1.366.994.700 bertambah sebesar Rp294.983.000 atau 22% menjadi sebesar Rp1.661.977.700 atau 21% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.820.229.976. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :		
		a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp477.400.000 berkurang sebesar Rp(28.502.000) atau (6%) menjadi sebesar Rp448.898.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.		
		b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Kebakaran semula sebesar Rp39.860.000 bertambah sebesar Rp2.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp41.860.000, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.	3. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum semula sebesar Rp359.734.000 bertambah sebesar Rp52.750.000 atau 15% menjadi sebesar Rp412.484.000 atau 5% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.820.229.976. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni : a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar semula semula sebesar Rp359.734.000 bertambah sebesar Rp52.750.000 atau 15% menjadi sebesar Rp412.484.000, b. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota **belum dianggarkan** c. Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM	
		c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia **belum dianggarkan**, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi, Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.		
		3. Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum semula sebesar Rp359.734.000 bertambah sebesar Rp52.750.000 atau 15% menjadi sebesar Rp412.484.000 atau 5% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.820.229.976. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :		
		a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar semula semula sebesar Rp359.734.000 bertambah sebesar Rp52.750.000 atau 15% menjadi sebesar Rp412.484.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.	Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Guna diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untukKabupaten/kota yaitu: 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.	
		b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota **belum dianggarkan**, untuk itu agar dialokasikan anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.		
		Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.		
		Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untukKabupaten/kota yaitu: 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.		
		Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.		
		Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Trantibumlinmas belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Trantibumlinmas dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.		
		f. SPM Sosial		
		Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp398.252.200 bertambah sebesar Rp1.176.060.700 atau 295% menjadi sebesar Rp1.574.312.900 atau 26% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp6.173.491.650. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Peru bahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp398.252.200 bertambah sebesar Rp1.176.060.700 atau 295% menjadi sebesar Rp1.574.312.900 atau 26% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp6.173.491.650. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen dalam penyediaan Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Trantibumlinmas setidaknya mencapai angka 34,86% dari Belanja Urusan Trantibumlinmas (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota dalam APBD Perubahan Tahun 2022). Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen dalam penyediaan Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Sosial setidaknya mencapai angka 8,63% dari Belanja Urusan Sosial
		1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp235.949.600 bertambah sebesar Rp1.211.930.100 atau 514% menjadi sebesar Rp1.447.879.700, alokasi anggarannya untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :	Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni : 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp235.949.600 bertambah sebesar Rp1.211.930.100 atau 514% menjadi sebesar Rp1.447.879.700, alokasi anggarannya untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :	(rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota dalam APBD Perubahan Tahun 2022).
		a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.	a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.	
		b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	
		c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan	
		d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar,		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan.	dasarnya d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan. 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp162.302.600 berkurang sebesar Rp(35.869.400) atau (22%) menjadi sebesar Rp126.433.200 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa: a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan	
		2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp162.302.600 berkurang sebesar Rp(35.869.400) atau (22%) menjadi sebesar Rp126.433.200 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :		
		a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.		
		b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial.		
		Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :		
		1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti. 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	psikososial. b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial. Guna diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari : a) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. b) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. c) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti. d) 100% warga negara/ gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. e) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.	
		Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.		
		Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Sosial belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Sosial dimaksud.		
		3. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.		
		Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum. **Sehingga Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengalihkan alokasi belanja dari DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023**		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		untuk memenuhi kebutuhan pencapaian SPM.		
		II. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Tentang Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 untuk 7 (tujuh) Prioritas Nasional dengan total nilai sebesar Rp.980.728.856.085	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen dalam penyediaan Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Sosial setidaknya mencapai angka 8,63% dari Belanja Urusan Sosial (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota dalam APBD Perubahan Tahun 2022). *Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional*
		Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :		
		Tabel 5		
		Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut

No	Prioritas Nasional		P-APBD 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**		**488.321.787.643**	**49,79**
	a.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1)	-	-
	b.	Peningkatan Ketahanan/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2)	1.403.747.000	0,14
	c.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)	1.945.179.800	0,20
	d.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4)	293.203.700	0,03
	e.	Pengutuan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5)	379.264.600	0,04
	f.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	3.113.310.750	0,32
	g.	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Pengutan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7)	-	-
	h.	Pengutan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	481.187.052.093	49,06
2.	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**		**1.627.122.800**	**0,17**
	a.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	733.509.000	0,07
	b.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	863.573.800	0,09
	c.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	30.010.000	0,00
3.	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**		**235.018.279.512**	**23,96**
	a.	Pengelolaan Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1)	495.440.600	0,05
	b.	Pengutan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2)	6.481.249.100	0,66
	c.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)	122.776.411.501	12,52
	d.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)	98.351.509.869	10,03
	e.	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	1.663.578.600	0,17
	f.	Pengutanan Kesetaraan (PP6)	41.597.000	0,00
	g.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7)	5.208.592.842	0,53
4.	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**		**163.829.091.004**	**16,70**
	a.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)	150.381.713.179	15,33
	b.	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Menguatkan Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mengupayakan Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)	10.871.817.151	1,11
	c.	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3)	36.560.000	0,00
	d.	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)	2.537.300.700	0,26
5.	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**		**77.364.504.646**	**7,88**
	a.	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	7.621.696.820	0,78
	b.	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	526.279.080	0,05
	c.	Infrastruktur Perkotaan (PP3)	68.995.299.766	7,04
	d.	Energi dan Ketenagalistrikan (PP4)	111.180.000	0,01
	e.	Transformasi Digital (PP5)	10.040.000	0,00
6.	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**		**8.972.152.300**	**0,91**
	a.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	1.205.492.600	0,12
	b.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	7.750.666.700	0,79
	c.	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	15.993.000	0,00
7.	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**		**5.095.768.180**	**0,52**
	a.	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	3.489.821.180	0,36
	b.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2)	-	-
	c.	Penegakan Hukum Nasional (PP3)	-	-
	d.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	1.561.103.800	0,16
	e.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5)	644.833.200	0,07
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		980.728.856.085	100,00
	Total Belanja Daerah		980.728.856.085	

Dukungan Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ***sudah selaras*** dengan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas nasional sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.		
		Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.		
		Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mempedomani sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:		
		a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.		
		b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.		
		c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan		
		e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.		
		III. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat		
		Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut:	Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar RP.982.267.918.085,00. sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah	*Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan prioritas provinsi Tahun 2022* sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
		Tabel 6		
		Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan		
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Prioritas Pembangunan		
		Provinsi Sumatera Barat		

<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Prioritas Provinsi</th><th>Perubahan APBD 2023</th><th>Rasio Terhadap Belanja Daerah</th></tr>
<tr><th>(Rp)</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</td><td>4.151.965.450</td><td>0,42</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital</td><td>3.530.614.100</td><td>0,36</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan</td><td>547.264.200</td><td>0,06</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</td><td>79.094.207.646</td><td>8,12</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing</td><td>241.850.044.992</td><td>24,66</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah</td><td>15.343.746.931</td><td>1,56</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas</td><td>635.711.012.766</td><td>64,82</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</td><td>980.728.856.085</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Belanja Daerah</td><td>980.728.856.085</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td rowspan="3">terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar RP.982.267.918.085,00 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.</td>
<td rowspan="3">Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan prioritas provinsi Tahun 2022.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">IV. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :
Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023
<table>
<tr><th>No</th><th>Prioritas Daerah</th><th>Perubahan APBD 2023</th><th>Rasio Terhada Belanja Daera</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(Rp)</td><td>(%)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pemerataan pembangunan infrastrukur;</td><td>79.089.739.746</td><td>8,0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mewujudkan ekonomi daerah yang maju;</td><td>6.374.679.550</td><td>0,6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Memajukan pendidikan yang berkarakter;</td><td>98.409.002.469</td><td>10,0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;</td><td>123.796.702.001</td><td>12,6</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;</td><td>637.678.618.746</td><td>65,0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pembangunan yang berkelanjutan;</td><td>17.957.540.500</td><td>1,8</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Membangkitkan identitas daerah;</td><td>16.419.960.373</td><td>1,6</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Membangun berbasis nagari.</td><td>1.002.612.700</td><td>0,1</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Belanja Daerah</td><td>980.728.856.085</td><td>100,0</td></tr>
</table>
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja</td><td>Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 8 (delapan) prioritas Daerah Tahun 2023 sebesar RP.982.267.918.085,00 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023</td><td>Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan prioritas provinsi Tahun 2022 sesuai Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.</td></tr>
</table>

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.		
		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.		
		V. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
		a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan	Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp328.875.458.137 atau 31,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.029.378.138.553 menjadi sebesar Rp342.560.147.169 atau 34,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar RP.982.267.918.085,00	
		Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp328.875.458.137 atau 31,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.029.378.138.553 menjadi sebesar Rp342.560.147.169 atau 34,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp980.728.856.085, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut		
		Tabel 8		
		Alokasi Fungsi Pendidikan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut

NO	Komponen Perhitunhan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1	2	3	4	5
1	**a. Urusan Bidang Pendidikan:**	**306.247.201.000**	**314.177.638.158**	**5.930.437.158**
	1) Belanja Operasi:	285.530.051.488	275.289.532.594	- 10.240.518.894
	a. belanja pegawai;	246.287.482.876	222.213.590.597	- 24.073.892.279
	b. belanja barang dan jasa;	34.068.168.612	43.620.441.997	9.552.273.385
	c. belanja hibah;	5.174.400.000	9.455.500.000	4.281.100.000
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	22.717.149.512	38.888.105.564	16.170.956.052
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.758.614.048	11.911.106.624	6.152.492.576
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.118.330.975	24.203.780.240	12.085.449.265
	c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	4.840.204.489	2.773.218.700	- 2.066.985.789
	d Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	**7.165.037.465**	**11.204.796.381**	**4.039.758.916**
	1) Belanja Operasi:	7.165.037.465	11.095.732.881	3.930.695.416
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	6.075.037.465	10.090.732.881	4.015.695.416
	c. belanja hibah;	1.090.000.000	1.005.000.000	- 85.000.000
	2) Belanja Modal;	-	109.063.500	109.063.500
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	**11.931.502.300**	**12.481.207.288**	**549.704.988**
	1) Belanja Operasi:	1.061.979.300	1.430.957.388	368.978.088
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	1.061.979.300	1.430.957.388	368.978.088
	2) Belanja Modal;	10.869.523.000	11.050.249.900	180.726.900
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	**1.531.717.372**	**4.696.505.342**	**3.164.787.970**
	1) Belanja Operasi:	1.531.717.372	4.661.005.342	3.129.287.970
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	1.261.717.372	2.541.611.342	1.279.893.970
	c. belanja hibah;	270.000.000	2.119.394.000	1.849.394.000
	d. belanja bantuan sosial.			-
	2) Belanja Modal;	-	35.500.000	35.500.000
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	-	-	-
2	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)**	**328.875.458.137**	**342.560.147.169**	**13.684.689.032**
3	**Total Belanja Daerah**	**1.029.378.138.553**	**980.728.856.085**	**- 48.649.282.468**
4	**Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%**	**31,95**	**34,93**	

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.		
		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus *mempertahankan secara terus menerus dan konsisten* dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.		
		Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.		
		Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:		
		1) standar isi. 2) Standar proses 3) standar kompetensi lulusan 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan 5) standar sarana dan prasarana 6) standar pengelolaan 7) standar pembiayaan.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		8) standar penilaian pendidikan		
		b. Alokasi Anggaran Kesehatan		
		Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp231.708.039.379 atau 31,99% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp724.277.475.372 berkurang sebesar Rp(4.553.711.212) menjadi sebesar Rp227.154.328.167 atau 32,64% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp695.938.795.113 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :	Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp231.708.039.379 atau 31,99% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp724.277.475.372 berkurang sebesar Rp(4.553.711.212) menjadi sebesar Rp227.154.328.167 atau 32,64% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp695.938.795.113	
		Tabel 9		
		Alokasi Anggaran Kesehatan		

NO	Komponen Perhitunhan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selsisih
1	2	3	4	5
1	**a. Urusan bidang Kesehatan:**	228.530.337.379	223.991.626.167	- 4.538.711.212
	1) Belanja Operasi:	187.684.100.250	185.294.285.709	- 2.389.814.541
	a. belanja pegawai;	112.482.947.919	103.710.150.664	- 8.772.797.255
	b. belanja barang dan jasa;	75.201.152.331	81.584.135.045	6.382.982.714
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	40.846.237.129	38.697.340.458	- 2.148.896.671
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.824.360.680	22.844.002.209	- 1.980.358.471
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.428.831.849	14.398.831.849	- 30.000.000
	c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	824.080.000	756.080.000	- 68.000.000
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.538.200		- 68.538.200
	e.Belanja Modal Aset Lainnya	700.426.400	698.426.400	- 2.000.000

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut

NO	Komponen Perbiburhan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1	2	3	4	5
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	4.160.587.000	4.142.317.000	- 18.270.000
	1 Belgian Kesra Sekretariat Daerah	100.000.000	100.000.000	-
	2 Sub Kegiatan 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Biaya Hentar Spiritual	100.000.000	100.000.000	-
	Belgian Umum Sekretariat Daerah	60.000.000	45.000.000	- 15.000.000
	Sub Kegiatan 4.01.01.2.11.07 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	45.000.000	- 15.000.000
	3 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.000.587.000	3.997.317.000	- 3.270.000
	Sub Kegiatan 2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Dalam Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.02.13 Penyalahan dan Pengevaluasi Data Keluarga	55.200.000	55.200.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.02.2.02.15 Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	66.000.000	66.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	80.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Mesa Cetak dan Elektronik serta Media Lain	150.000.000	150.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Kegiatan Operasional Program KBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Pos Lokakarya (Poslok)	143.000.000	143.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	529.650.000	529.650.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KBPK	80.000.000	80.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.02.01 Penyediaan IHP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	28.000.000	28.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	104.000.000	104.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.700.000	20.700.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesarban Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	815.167.000	815.167.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.03.06 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000	14.100.000	-
	Sub Kegiatan 32.14.03.2.04.03 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	9.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.03.2.04.02 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB.	418.500.000	418.500.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.04.2.01.02 Pengelolaan Sarana Pelayanan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	360.000.000	360.000.000	-
	Sub Kegiatan 2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	39.985.000	36.715.000	- 3.270.000
	Sub Kegiatan 2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	913.500.000	913.500.000	-
	Sub Kegiatan 1.03.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas pada PPID	109.383.000	109.383.000	-
2	**Anggaran Kesehatan (a+b)**	**232.690.934.379**	**228.133.943.167**	**- 4.556.981.212**
3	**Total Belanja Daerah**	**1.029.378.138.553**	**980.738.856.085**	**- 48.640.282.468**
4	**Gaji ASN**	**305.100.063.181**	**284.790.060.972**	**- 20.310.402.209**
5	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)**	**724.277.475.372**	**695.948.795.113**	**- 28.330.680.259**
6	**Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%**	**32,13**	**32,78**	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		C. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting		
		Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan ***prevalensi stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita semula sebesar Rp6.879.779.700 berkurang sebesar Rp(40.538.400) atau 0,59% menjadi sebesar Rp6.806.678.100 atau 0,66% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp1.029.378.138.553.	Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan ***prevalensi stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita semula sebesar Rp6.879.779.700 berkurang sebesar Rp(40.538.400) atau 0,59% menjadi sebesar Rp6.806.678.100 atau 0,66% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp1.029.378.138.553	
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		penunjang fungsi perencanaan.		
		Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp6.806.678.100 atau sekitar 0,66% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, kabupaten/kota agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.		
		Alokasi anggaran untuk penanganan stunting setidaknya mencapai angka 1,32% dari APBD Kabupaten/Kota (rata-rata porsi penganggaran penanganan stunting Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).		
		d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3	
		Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp348.393.686.418 atau 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp870.984.216.046, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
		Tabel 10		
		Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	RAPBD 2023	Selsisih
1	Total Belanja Daerah	1.029.378.138.553	980.728.856.085	- 48.649.282.468
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a belanja bagi hasil	2.632.820.000	3.045.066.039	412.246.039
	b bantuan keuangan	108.349.574.000	106.699.574.000	- 1.650.000.000
	c jumah (a+b)	110.982.394.000	109.744.640.039	- 1.237.753.961
3	Selsih (1-2)	918.395.744.553	870.984.216.046	- 47.411.528.507
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selsih)	367.358.297.821	348.393.686.418	- 18.964.611.403

		Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp465.766.265.531, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Tabel 11		
		Format Perhitungan Belanja Infrasrtuktur Daerah		
		<table><tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2" rowspan="2">KOMPONEN PERHITUNGAN</th><th colspan="3">Jumlah</th></tr><tr><th>APBD 2023</th><th>RAPBD 2023</th><th>Selisih</th></tr><tr><td>1.</td><td>a</td><td>Belanja Modal:</td><td>359.183.174.779</td><td>332.345.557.661</td><td>- 26.837.617.118</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1) tanah;</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2) peralatan dan mesin;</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>3) bangunan dan gedung;</td><td>45.417.466.354</td><td>55.200.497.264</td><td>9.783.030.910</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4) jalan, jaringan, dan irigasi;</td><td>61.569.056.460</td><td>51.343.724.700</td><td>- 10.225.331.760</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5) aset tetap lainnya;</td><td>5.208.742.689</td><td>2.889.318.700</td><td>- 2.319.423.989</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6) aset lainnya.</td><td>700.426.400</td><td>698.426.400</td><td>- 2.000.000</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>Belanja Pemeliharaan</td><td>9.085.882.720</td><td>8.987.848.990</td><td>- 98.033.730</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah 1 = (a + b)</td><td></td><td>368.269.057.499</td><td>341.333.406.651</td><td>- 26.935.650.848</td></tr><tr><td>2.</td><td>a</td><td>Belanja Hibah;</td><td>13.802.790.880</td><td>17.733.284.880</td><td>3.930.494.000</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>Belanja Bantuan Sosial;</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>Belanja Bantuan Keuangan.</td><td>108.349.574.000</td><td>106.699.574.000</td><td>- 1.650.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah 2 = (a + b + c)</td><td></td><td>122.152.364.880</td><td>124.432.858.880</td><td>2.280.494.000</td></tr><tr><td>3.</td><td colspan="2">Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)</td><td>490.421.422.379</td><td>465.766.265.531</td><td>- 24.655.156.848</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang penggunannya bersifat umum dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2023</td><td>53%</td><td>53%</td><td></td></tr></table>		
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***sudah memenuhi*** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.		
		Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk tetap konsisten secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan		
		Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (termasuk beanja gaji) semula sebesar Rp8.799.958.200 atau 0,86% dari total belanja daerah sebesar Rp1.029.378.138.553 berkurang sebesar Rp(2.836.243.300) atau (32,23%) menjadi sebesar Rp5.963.714.900 atau 0,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp980.728.856.085.	Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 alokasi anggaran untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (termasuk beanja gaji) semula sebesar Rp.8.799.958.200 atau 0,86% dari total belanja daerah sebesar Rp1.029.378.138.553 berkurang sebesar Rp(3.053.221.300) atau (34,70%) menjadi sebesar Rp.5.746.736.900 atau 0,59% dari total belanja daerah sebesar Rp.982.267.918.085. Alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan di luar belanja gaji pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.746.736.900 memang ***Belum memenuhi*** yaitu sekurang-kurangnya **0,75%** (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp.982.267.918.085, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Hal ini di sebabkan karena beban APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 cukup berat sekali, disamping harus mengurangi defisit pada APBD awal sebesar Rp.114.029.344.163,- juga pemenuhan belanja Hibah Pilkada Tahun 2024 yang dibebankan dalam APBD TA. 2023 sebesar 40% dari kebutuhan dana untuk KPU dan Bawaslu.	Kedepan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang penyusnan APBD akan menjadi perhartian dalam pengalokasian anggaran untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan di luar belanja gaji pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yaitu sekurang-kurangnya **0,75%** (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya ***harus berupaya memenuhi alokasi anggaran*** *untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, sekurang-kurangnya 1% (satupersen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.*		
		Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :		
		1) Kegiatan pengawasan, yaitu : a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Reviu Laporan Keuangan; e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.	Dari Alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.746.736.900, melihat jumlah pegawai Inspektora Kabupaten Dharmasraya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang sudah termasuk didalamnya auditor sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, dari dana yang tersedia tersebut sudah mencukupi anggaran untuk penguatan dan pengawasan pada Inspetorat Kabupaten Dharmasraya yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Bupati Nomor 900/1096/SP-BUP/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana terlampir.	
		2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.		
		Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
		Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya semula sebesar Rp1.525.604.000 berkurang sebesar Rp(424.157.000) atau (27,80%) menjadi sebesar Rp895.661.425 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuia pada kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN.	Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya semula sebesar Rp1.525.604.000 berkurang sebesar Rp(293.978.575) atau (19.26%) menjadi sebesar Rp1.231.625.425 atau 0,13% dari total belanja daerah sebesar Rp.982.267.918.085 yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya pada BKPSDM Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.231.625.425 memang ***Belum memenuhi*** yaitu sekurang-kurangnya **0,16%** (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sebesar Rp.982.267.918.085, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Hal ini di sebabkan karena beban APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 cukup berat sekali, disamping harus mengurangi defisit pada APBD awal sebesar Rp.114.029.344.163,- juga pemenuhan belanja Hibah	Kedepan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang penyusnan APBD akan menjadi perhartian dalam pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah pada BKPSDM Kabupaten Dharmasraya sebagaimana ditegaskan dalam ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***belum memenuhi*** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk dapat memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk:		
		Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		1) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		2) Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Dharmasraya dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***tidak diperkenankan*** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Pilkada Tahun 2024 yang dibebankan dalam APBD TA. 2023 sebesar 40% dari kebutuhan dana untuk KPU dan Bawaslu. Dari alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.231.625.425 atau 0,13% dari total belanja daerah sebesar Rp.982.267.918.085 sudah mencukupi untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Bupati Nomor 900/1095/SP-BUP/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana terlampir	
		Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :		
		VI. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Dharmasraya semula sebesar Rp900.000.000 berkurang sebesar Rp(117.395.000) atau 13,04% menjadi sebesar Rp782.605.000 atau 0,08% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Dharmasraya semula sebesar Rp900.000.000 berkurang sebesar Rp(117.395.000) atau 13,04% menjadi sebesar Rp782.605.000 atau 0,08% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	***konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
		a. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Dharmasraya sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Kepala Daerah di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp424.000.200 bertambah sebesar Rp125.906.000 atau 30% menjadi sebesar Rp549.906.200 atau 0,06% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Dharmasraya sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Kepala Daerah di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp424.000.200 bertambah sebesar Rp125.906.000 atau 30% menjadi sebesar Rp549.906.200 atau 0,06% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	***Pemerintah Kabupaten Dharmasraya konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran*** dimaksud ***yang memadai*** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		b. ***Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran*** dimaksud ***yang memadai*** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp19.993.000 bertambah sebesar Rp17.098.000 atau 85,52% menjadi sebesar Rp37.091.000,00 atau 0,003% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.	Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp19.993.000 bertambah sebesar Rp17.098.000 atau 85,52% menjadi sebesar Rp37.091.000,00 atau 0,003% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.	
		c. Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang***	Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran***	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	***yang memadai*** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
		Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp426.527.514.383 atau 98,17% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp434.477.826.740 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini ***sudah memenuhi*** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.	Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp426.527.514.383 atau 98,17% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp434.477.826.740 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini ***sudah memenuhi*** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.	persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
		d. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).		
		e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tetap sebesar Rp752.875.000 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.		
		f. Proporsi alokasi anggaran rincian objek belanja pada masing-masing ***sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran*** yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		target kinerja kegiatan ***harus diformulasikan kembali*** alokasi rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan dimaksud sehingga penggunaan APBD lebih fokus terhadap keluaran yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
		VII. Belanja Operasi		
		Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp766.159.260.882 berkuang sebesar Rp(51.695.323.702) atau (7%) menjadi sebesar Rp714.463.937.180 atau 72,85% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp980.728.856.085, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp766.159.260.882 berkuang sebesar Rp(50.856.278.245) atau (7%) menjadi sebesar Rp715.202.982.737 atau 73% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.982.297.818.085,- merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: Belanja Pegawai semula sebesar Rp471.538.672.736 berkurang sebesar Rp(70.956.871.781) menjadi sebesar Rp400.578.800.955 atau 41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.982.297.818.085, Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp305.120.042.181 berkurang sebesar Rp(34.511.349.273) atau (11%) menjadi sebesar Rp270.608.692.908 atau 29% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen untuk terhadap Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sesuai maksud butir D.16.a.1)j)(1), butir D.16.a.1)j)(2), butir D.16.a.1)j)(3) dan butir D.16.a.1)j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		Belanja Pegawai semula sebesar Rp471.538.672.736 berkurang sebesar Rp(56.919.949.019) menjadi sebesar Rp414.618.723.717 atau 42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :		
		a. Belanja Gaji dan Tunjangan		
		1) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp305.120.042.181 berkurang sebesar Rp(20.329.981.209) atau (7%) menjadi sebesar Rp284.790.060.972 atau 29% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1)j)(1), butir D.16.a.1)j)(2), butir D.16.a.1)j)(3) dan butir D.16.a.1)j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1)j)(1), butir D.16.a.1)j)(2), butir D.16.a.1)j)(3) dan butir D.16.a.1)j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
		Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen untuk terhadap Penyediaan anggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1)j)(5) dan butir D.16.a.1)j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp19.776.319.540 berkurang sebesar Rp(659.845.972) atau (3%) menjadi sebesar Rp19.116.473.568.	a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp19.776.319.540 berkurang sebesar Rp(659.845.972) atau (3%) menjadi sebesar Rp19.116.473.568.	
		b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp530.679.373 berkurang sebesar Rp(27.092.420) atau (5%) menjadi sebesar Rp503.586.953.	b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp530.679.373 berkurang sebesar Rp(27.092.420) atau (5%) menjadi sebesar Rp503.586.953.	
		c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.576.192.716 berkurang sebesar Rp(143.792.754) atau (9%) menjadi sebesar Rp1.432.399.962.	c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.576.192.716 berkurang sebesar Rp(143.792.754) atau (9%) menjadi sebesar Rp1.432.399.962.	
		d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp59.547.306 berkurang sebesar Rp(4.580.562) atau (8%) menjadi sebesar Rp54.966.744.	d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp59.547.306 berkurang sebesar Rp(4.580.562) atau (8%) menjadi sebesar Rp54.966.744.	
		e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD menjadi semula sebesar Rp2.386.800 berkurang sebesar Rp(10.790) atau (0,45%) menjadi sebesar Rp2.376.000.	e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD menjadi semula sebesar Rp2.386.800 berkurang sebesar Rp(10.790) atau (0,45%) menjadi sebesar Rp2.376.000.	
		f) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula sebesar Rp2.983.500 berkurang sebesar Rp(13.498) atau (0,45%) menjadi sebesar Rp2.970.002.	f) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula sebesar	
		g) Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1)j)(5) dan butir D.16.a.1)j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Rp2.983.500 berkurang sebesar Rp(13.498) atau (0,45%) menjadi sebesar Rp2.970.002. b) g) Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1)j)(5) dan butir D.16.a.1)j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
		3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen untuk terhadap Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan Belanja Dana Operasional Pimpinan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
		a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp9.228.604.730 berkurang sebesar Rp(240.660.000) atau (3%) menjadi sebesar Rp8.987.944.730.		
		(1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp2.457.000.000 berkuang sebesar Rp(189.000.000) atau (8%) menjadi sebesar Rp2.268.000.000.		
		(2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp570.000.000.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		(3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp2.364.617.606 berkurang sebesar Rp(181.504.812) atau (8%) menjadi sebesar Rp2.183.112.764.		
		(4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp4.422.600.000 berkurang sebesar Rp(340.200.000) atau (8%) menjadi sebesar Rp4.082.400.000.		
		b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp120.000.000 berkurang sebesar Rp(9.000.000) atau (8%) menjadi sebesar Rp111.000.000;		
		Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.		
		4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, *sudah sesuai* dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas *50 milyar* sampai dengan *150 milyar*	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen untuk* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala
		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, *sudah sesuai* dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas *50 milyar* sampai dengan *150 milyar* dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000* dan *paling tinggi sebesar 0,40%*. Selanjutnya		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.	dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000* dan *paling tinggi sebesar 0,40%*. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.	Daerah Kabupaten/Kota
		5) Tambahan Penghasilan ASN		
		Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp67.711.861.410 berkurang sebesar Rp(37.909.868.269) atau (56%) menjadi sebesar Rp29.801.993.141 atau 3% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp67.711.861.410 berkurang sebesar Rp(37.909.868.269) atau (56%) menjadi sebesar Rp29.801.993.141 atau 3% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN. Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 engan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen untuk* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya semula sebesar Rp64.725.914.465 berkurang sebesar Rp(1.954.202.259) atau (3%) menjadi sebesar Rp62.771.712.206.		
		Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 engan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1)j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1)j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
		7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap sebesar Rp56.319.009.000.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023: Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap sebesar Rp56.319.009.000., Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD tetap sebesar Rp2.270.640.000., Belanja Tamsil Guru PNSD tetap sebesar Rp752.601.000. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1)j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen untuk terhadap Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen terhadap Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dengan mempedomani butir D.16.a.1)j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak.
		8) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD tetap sebesar Rp2.270.640.000.		
		9) Belanja Tamsil Guru PNSD tetap sebesar Rp752.601.000.		
		Untuk poin 7) s.d p) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1)j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
		10) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :		
		a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp1.138.955.798 bertambah sebesar Rp53.633.260 atau 4,7% menjadi sebesar Rp1.192.589.058 atau atau 5% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD 2023 tentang Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Insentif bersumber dari

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.851.781.411 diuraikan sebagai berikut :	Rp1.138.955.798 bertambah sebesar Rp53.633.260 atau 4,7% menjadi sebesar Rp1.192.589.058 atau atau 5% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.851.781.411 dan Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp212.625.613 berkurang sebesar Rp(34.748.343) menjadi sebesar Rp164.968.732 atau 5% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.455.938.885 *Alokasi insentif atas pemungutan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp776.385.798 bertambah sebesar Rp109.592.010 atau 14% menjadi sebesar Rp885.977.808.		
		(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp362.570.000 berkurang sebesar Rp(55.958.750) atau (15%) menjadi sebesar Rp306.611.250.		
		b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp212.625.613 berkurang sebesar Rp(34.748.343) menjadi sebesar Rp164.968.732 atau 5% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.455.938.885 diuraikan sebagai berikut :		
		(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp99.038.667 berkurang sebesar Rp(6.454.269) atau (7%) menjadi sebesar Rp92.584.398.		
		(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp113.586.946 berkurang sebesar Rp(41.202.612) atau (36%) menjadi sebesar Rp72.384.334.		
		Alokasi insentif atas pemungutan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		
		Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		11) Belanja Honorarium semula sebesar Rp3.829.440.000 berkurang sebesar Rp(1.760.540.000) atau (46%) menjadi sebesar Rp2.068.900.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Belanja Honorarium semula sebesar Rp3.829.440.000 berkurang sebesar Rp(1.760.540.000) atau (46%) menjadi sebesar Rp2.068.900.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp3.130.250.000 berkurang sebesar Rp(1.449.850.000) atau (46%) menjadi sebesar Rp1.680.400.000. b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp682.390.000 berkurang sebesar Rp(305.890.000) atau (45%) menjadi sebesar Rp376.500.000. c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp16.800.000 berkurang sebesar Rp(4.800.000) atau (29%) menjadi sebesar Rp12.000.000. Telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Belanja Honorarium yang penganggarannya sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp355.276.473.717 atau 36% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023..
		a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp3.130.250.000 berkurang sebesar Rp(1.449.850.000) atau (46%) menjadi sebesar Rp1.680.400.000.		
		b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp682.390.000 berkurang sebesar Rp(305.890.000) atau (45%) menjadi sebesar Rp376.500.000.		
		c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp16.800.000 berkurang sebesar Rp(4.800.000) atau (29%) menjadi sebesar Rp12.000.000.		
		Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
		Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp355.276.473.717 atau 36% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Belum memenuhi *ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah* ***maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD****. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir* D.16.a.1)(e)(f)(g) *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.*		
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		b. Belanja Barang dan Jasa		
		Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp280.817.797.266 bertambah sebesar Rp1.294.131.317 atau 0,46% menjadi sebesar Rp282.111.928.583 atau 28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp280.817.797.266 bertambah sebesar Rp4.783.451.935 atau 2% menjadi sebesar Rp285.601.248.202 atau 29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja dan Jasa yang penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan
		Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :		
		1) Belanja Barang semula sebesar Rp78.713.433.533 berkurang sebesar Rp(9.987.928.411) atau (13%) menjadi sebesar Rp68.725.505.052 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula sebesar Rp2.718.454.300 bertambah sebesar Rp211.308.200 atau 8% menjadi sebesar Rp2.929.762.500.	nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
		b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula sebesar Rp1.308.215.800 bertambah sebesar Rp26.827.250 atau 2% menjadi sebesar Rp1.335.043.050.		
		c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp42.194.841.578 berkudang sebesar Rp(19.031.621.006) atau (45%) menjadi sebesar Rp23.163.220.572.		
		d) Belanja Barang untuk Djual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula sebesar Rp2.683.851.395 bertambah sebesar Rp1.486.149.285 atau 55% menjadi sebesar Rp4.170.000.680.		
		e) Belanja Natura dan Pakan-Natura semula sebesar Rp1.094.252.500 bertambah sebesar Rp304.926.000 atau 28% menjadi sebesar Rp1.399.178.500.		
		f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp7.903.999.000 bertambah sebesar Rp2.109.208.000 atau 27% menjadi sebesar Rp10.013.207.000.		
		g) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan semula sebesar Rp2.983.136.000 bertambah sebesar Rp319.867.000 atau 11% menjadi sebesar Rp3.303.003.000.		
		Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas,		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
		Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		2) Belanja Jasa semula sebesar Rp81.256.736.534 berkurang sebesar Rp(3.230.213.347) atau (4%) menjadi sebesar Rp78.026.523.187 yang antara lain diuraikan :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Belanja Jasa semula sebesar Rp81.256.736.534 berkurang sebesar Rp(3.230.213.347) atau (4%) menjadi sebesar Rp78.026.523.187 Penganggarannya telah mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja dan Jasa Kantor mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
		a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp62.751.452.584 berkurang sebesar Rp(4.862.897.310) atau (8%) menjadi sebesar Rp57.888.555.274 yang diuraikan antara lain :		
		1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp2.688.500.000 bertambah sebesar Rp42.500.000 atau 2% menjadi sebesar Rp2.731.000.000.		
		2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp1.782.980.000 berkurang sebesar Rp(361.340.000) datau (20%) menjadi sebesar Rp1.421.640.000.		
		Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya *dilakukan*		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		Nomor 84 Tahun 2022.
		1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp3.977.050.000 berkurang sebesar Rp(786.425.500) atau (20%) menjadi sebesar Rp3.190.624.500.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Belanja Jasa Kantor terkoreksi dengan rincian antara lain untuk: 1. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp3.977.050.000 berkurang sebesar Rp(786.425.500) atau (20%) menjadi sebesar Rp3.190.624.500. 2. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp4.515.200.000 bertambah sebesar Rp42.500.000 atau 2% menjadi sebesar Rp2.731.000.000. 3. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp3.020.730.000 berkurang sebesar Rp(159.870.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp2.860.860.000. 4. 4) Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp12.916.270.000 berkurang sebesar Rp(1.435.034.400) atau (11%) menjadi sebesar	
		2) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp4.515.200.000 bertambah sebesar Rp42.500.000 atau 2% menjadi sebesar Rp2.731.000.000.		
		3) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp3.020.730.000 berkurang sebesar Rp(159.870.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp2.860.860.000.		
		4) Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp12.916.270.000 berkurang sebesar Rp(1.435.034.400) atau (11%) menjadi sebesar Rp11.481.235.600.		
		Harus dibatasi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah ***dilarang*** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.	Rp11.481.235.600. Sudah harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah	
		Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.		
		Apabila peruntukkannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***tidak diperkenankan*** *untuk mengalokasikan* anggaran *tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*		
		1) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan semula sebesar Rp883.250.000 bertambah sebesar Rp402.850.000 atau 46% menjadi sebesar Rp1.286.100.000.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 1. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan semula sebesar Rp883.250.000 bertambah sebesar Rp402.850.000 atau 46% menjadi sebesar Rp1.286.100.000. 2. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp978.400.000 bertambah sebesar Rp352.370.000 atau 36% menjadi sebesar Rp1.330.770.000.Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp1.492.850.000 berkurang sebesar Rp(257.600.000) atau (17%)	
		2) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp978.400.000 bertambah sebesar Rp352.370.000 atau 36% menjadi sebesar Rp1.330.770.000.Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp1.492.850.000 berkurang sebesar Rp(257.600.000) atau (17%) menjadi sebesar Rp1.235.250.000.		
		Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	menjadi sebesar Rp1.235.250.000. yang Penganggarannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022	
		b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp11.490.863.950 bertambah sebesar Rp1.150.119.538 atau 10% menjadi sebesar Rp12.640.983.488 yang diuraikan antara lain :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp11.490.863.950 bertambah sebesar Rp1.150.119.538 atau 10% menjadi sebesar Rp12.640.983.488 yang diuraikan antara lain : (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa semula sebesar Rp960.000.000 bertambah sebesar Rp150.000.000 atau 16% menjadi sebesar Rp1.110.000.000. (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp9.454.099.200 bertambah sebesar Rp1.148.624.400 atau 12% menjadi sebesar Rp10.602.723.600. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN dengan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa semula sebesar Rp960.000.000 bertambah sebesar Rp150.000.000 atau 16% menjadi sebesar Rp1.110.000.000.		
		(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp9.454.099.200 bertambah sebesar Rp1.148.624.400 atau 12% menjadi sebesar Rp10.602.723.600.		
		Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp249.051.000 bertambah sebesar Rp1.426.728 atau 1% menjadi sebesar Rp250.477.728. (4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp311.313.750 bertambah sebesar Rp355.410 atau 0,11% menjadi sebesar Rp311.669.160. Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
		(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp249.051.000 bertambah sebesar Rp1.426.728 atau 1% menjadi sebesar Rp250.477.728.		
		(4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp311.313.750 bertambah sebesar Rp355.410 atau 0,11% menjadi sebesar Rp311.669.160.		
		Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.		
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Belanja	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Sewa Peralatan dan
		(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp2.548.813.000 bertambah sebesar Rp771.445.000 atau 30%		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		menjadi sebesar Rp3.320.258.000.	Sewa terkoreksi dengan rincian sbb: (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp2.548.813.000 bertambah sebesar Rp771.445.000 atau 30% menjadi sebesar Rp3.320.258.000. (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.407.879.000 berkurang sebesar Rp(157.500.000) atau (11%) menjadi sebesar Rp1.250.379.000. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.	Mesin dan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dengan mempedomani Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
		(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.407.879.000 berkurang sebesar Rp(157.500.000) atau (11%) menjadi sebesar Rp1.250.379.000.		
		Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.*		
		Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
		Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.		
		d) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp100.000.000 bertambah sebesar Rp647.000.000 atau 647% menjadi sebesar Rp747.000.000.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi terkoreksi dengan rincian sbb:	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menganggarkan Belanja		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp100.000.000 bertambah sebesar Rp647.000.000 atau 647% menjadi sebesar Rp747.000.000. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
		e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp1.764.728.000 bertambah sebesar Rp414.619.425 atau 23% menjadi sebesar Rp2.179.347.425.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp1.764.728.000 bertambah sebesar Rp414.619.425 atau 23% menjadi sebesar Rp2.179.347.425. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana
		Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.		
		4. Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		mempertimbangkan aspek- aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.	maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.
		3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp9.085.882.720 berkurang sebesar Rp(98.033.730) atau (1%) menjadi sebesar Rp8.987.848.990 yang diuraikan pada :	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp9.085.882.720 berkurang sebesar Rp(98.033.730) atau (1%) menjadi sebesar Rp8.987.848.990 yang diuraikan pada : a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp5.713.490.000 berkurang sebesar Rp(357.865.000) atau (6%) menjadi sebesar Rp5.355.625.000. b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp527.282.720 bertambah sebesar Rp160.256.270 atau 30% menjadi sebesar Rp6870538.990. c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp2.845.110.000 bertambah sebesar Rp99.575.000 menjadi sebesar Rp2.944.685.000. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
		a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp5.713.490.000 berkurang sebesar Rp(357.865.000) atau (6%) menjadi sebesar Rp5.355.625.000.		
		b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp527.282.720 bertambah sebesar Rp160.256.270 atau 30% menjadi sebesar Rp6870538.990.		
		c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp2.845.110.000 bertambah sebesar Rp99.575.000 menjadi sebesar Rp2.944.685.000.		
		Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
		Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Tahun 2022.	Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp49.672.371.000 bertambah sebesar Rp8.096.398.750 atau 16% menjadi sebesar Rp57.768.769.750 yang diuraikan pada : a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp48.778.232.000 bertambah sebesar Rp8.794.436.750 atau 18% menjadi sebesar Rp57.572.668.750. b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp894.139.000 berkurang sebesar Rp(698.038.000) atau (78%) menjadi sebesar Rp196.101.000.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat perbedaan jumlah Belanja Perjalanan Dinas antara Ranperda yang diajukan saat evaluasi Gubernur dengan Ranperda yang disampaikan setelah evaluasi Gubernur. Besarnya Belanja Perjalanan Dinas pada Ranperda yang diajukan saat evaluasi Gubernur sebesar Rp.57.768.769.750,- bertambah sebesar Rp3.029.176.000,- atau 5,24% menjadi sebesar Rp60.797.845.750,- pada Ranperda yang disampaikan setelah evaluasi Gubernur yang diuraikan pada beberapa OPD diantaranya: 1. Sekretariat DPRD, Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp19.954.996.848 bertambah sebesar Rp1.575.012.152 atau 7,32% menjadi sebesar Rp21.530.009.000,- Penambahan Belanja Perjalanan Dinas ini digunakan untuk : a. Penyusunan dan Pembahas Progam Pembentukan Peraturan Daerah sebesar Rp.914.000.000,- b. Kunjugan kerja dalam daerah sebesar Rp.178.000.000,- c. Pendalamam tugas DPRD sebesar Rp.483.012.152,- 2. Sekretariat Daerah, Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.6.073.336.200 bertambah sebesar Rp.330.916.800 atau 5,17% menjadi sebesar Rp.6.404.253.000,- Penambahan Belanja Perjalanan Dinas ini digunakan untuk penyelenggaraan Rapat	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Belanja Perjalanan Dinas dengan mempedomani butir D.16.a.2)c)(4)Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya alokasi Belanja Perjalanan Dinas ***dirasionalkan*** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar *menghitung kembali dan mengefisiensikan alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud,* sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Dharmasraya untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak.	Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Monitoring dan evaluasi terhadap Proses Pelaksanaan E-Katalog dan Pelaksanaan Proyek Peningkatan Layanan Infrastruktur PJU. 3. Bapppeda, Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.929.224.000 bertambah sebesar Rp.121.445.000 atau 11,56% menjadi sebesar Rp.1.050.669.000,- Penambahan Belanja Perjalanan Dinas ini digunakan untuk kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045. 4. BKD, Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.2.125.046.000 bertambah sebesar Rp.182.590.000 atau 7,91% menjadi sebesar Rp.2.307.636.000,- Penambahan Belanja Perjalanan Dinas ini digunakan untuk Penyelarasan Ranperda PDRD dengan Kemendari, Bimtek Penggunaan aplikasi persediaan dan pelelangan BMD. 5. BKPSDM, Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.896.831.000 bertambah sebesar Rp.107.765.000 atau 10,73% menjadi sebesar Rp.1.004.596.000,- Penambahan Belanja Perjalanan Dinas ini digunakan untuk Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Pengelolaan Assessment Center dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. 6. Dinas PUPR, Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.1.138.760.680 bertambah sebesar Rp.145.457.320.000 atau 11,33% menjadi sebesar Rp.1.284.218.000,- Penyelengaraan Bangunan Gedung dan Kosultasi ke Kementerian. 7. Dinas PUPR, Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.1.138.760.680 bertambah sebesar Rp.145.457.320.000 atau 11,33% menjadi sebesar	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			Rp.1.284.218.000,- Penyelengaraan Bangunan Gedung dan Kosultasi ke Kementerian. 8. Dinas Budparpora, Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.2.447.190.790 bertambah sebesar Rp.95.075.210 atau 3,74% menjadi sebesar Rp.2.542.266.000,- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rekreasi. Jadi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp49.672.371.000 bertambah sebesar Rp.11.125.574.750 atau 22% menjadi sebesar Rp.60.797.945.750 yang diuraikan pada : a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp48.778.232.000 bertambah sebesar Rp.11.373.612.750 atau 23% menjadi sebesar Rp.60.151.844.750. b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp.894.139.000 berkurang sebesar Rp(248.038.000) atau (28%) menjadi sebesar Rp.646.101.000. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas tersebut sudah memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta sudah disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiata Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.	
		Selanjutnya, penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri ***agar tidak dianggarkan*** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ***kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah*** Kabupaten Dharmasraya, antara lain telah memiliki perjanjian	Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan semula sebesar Rp.894.139.000 berkurang sebesar Rp(248.038.000) atau (28%) menjadi sebesar Rp.646.101.000,- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.	ini digunakan Bupati Dharmasraya untuk kunjungan kerja ke Luar Negeri dalam rangka TOT Pertanian dan Mitigasi Bencana ke Jepang dan study banding ke Jerman dalam rangka implementasi pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan pelayanan publik dari perspektif negara Jerman yang dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.	
		5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp145.600.000 bertambah sebesar Rp40.200.000 atau 28% menjadi sebesar Rp185.800.000 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada : a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp145.600.000 bertambah sebesar Rp16.200.000 atau 11% menjadi sebesar Rp161.800.000. b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp24.000.000. c) Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp145.600.000 bertambah sebesar Rp40.200.000 atau 28% menjadi sebesar Rp185.800.000 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada : a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp145.600.000 bertambah sebesar Rp16.200.000 atau 11% menjadi sebesar Rp161.800.000. b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp24.000.000. c) Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. yang pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen terhadap Penyediaan anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain atau Masyarakat yang pelaksanaanya dengan mempedomani Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
		Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran yang tercantum pada : 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp26.159.614.412 berkurang sebesar Rp(1.095.306.765) atau (4%) menjadi sebesar Rp25.064.307.647. 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp4.152.681.099 berkurang sebesar Rp(741.128.224) atau (18%) menjadi sebesar Rp3.411.552.875. 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp4.840.204.489 berkurang sebesar Rp(2.066.985.789) atau (43%) menjadi sebesar Rp2.773.218.700.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah menetapkan : Alokasi Pendapatan BOS sebesar Rp34.885.090.472 yang didasari oleh Perpres Nomor 130 Tahun Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut : 1. BOS Reguler sebesar Rp. 33.435.090.472,- 2. BOS Kinerja sebesar Rp. 1.450.000.000,- Jumlah Rp. 34.885.090.472,- Alokasi Belanja BOS sebesar Rp. 35.266.579.222 dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp. 24.851.441.210 2. Belanja Peralatan Mesin BOS Rp. 3.745.258.187 3. Belanja Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 2.652.379.825 4. Belanja Hibah BOS Rp. 4.017.500.000 Jumlah Rp. 35.266.579.222 Selisih Pendapatan Belanja BOS dengan Pendapatan BOS = 34.885.090.472- 35.266.579.222 = Rp.381.388.750,- Selisih Pendapatan Belanja BOS dengan Pendapatan BOS sebesar Rp.381.388.750 merupakan SiLPA BOS Tahun 2022 yang merupakan hasil audited terhadap LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 yang harus dianggarkan kembali sesuai akun dan nama sekolahnya pada Perubahan APBD TA.2023.	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap penyediaan alokasi anggaran BOS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		Alokasi Belanja BOS sebesar Rp31.249.079.222 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp4.017.500.000 menjadi sebesar Rp35.266.579.222 ***tidak sama*** dengan alokasi target DAK Non Fisik	Alokasi Belanja BOS sebesar Rp31.249.079.222 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp4.017.500.000 menjadi sebesar Rp35.266.579.222 ***sudah sama*** dengan alokasi	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.885.090.472, ***tidak sesuai*** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. *Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar* ***melakukan penghitungan ulang*** *dan menganggarkan Belanja BOS sesuai dengan pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2023 atau* ***memberikan penjelasan*** *bila ketidaksesuaian ini karena memanfaatkan sisa dana BOS tahun sebelumnya.*	target DAK Non Fisik BOS sebesar Rp. 34.885.090.472 ditambah SiLPA BOS Tahun 2023 sebesar Rp.381.388.750 menjadi sebesar Rp.35.266.579.222 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, ***sudah sesuai*** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
		Penyediaan anggaran yang tercantum pada : 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp21.118.339.569 bertambah sebesar Rp4.049.574.967 atau 19% menjadi sebesar Rp25.167.914.536. 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp35.784.159.067 bertambah sebesar Rp7.569.014.890 atau 21% menjadi sebesar Rp43.353.173.957. 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp4.292.950.680 berkruang sebesar Rp(1.980.358.471) atau (46%) menjadi sebesar Rp2.312.592.209. 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp250.000.000 berkurang sebesar Rp(30.000.000) atau (12%) menjadi sebesar Rp220.000.000. 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD semula sebesar Rp4.840.204.489 berkurang sebesar Rp(2.066.985.769) atau (43%) menjadi sebesar Rp2.773.218.700, Belanja BLUD sebesar Rp73.826.899.402 ***lebih besar*** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.775.509.142. Untuk itu ***agar diberikan penjelasan*** penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak bertentangan dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah menetapkan : Alokasi Pendapatan BLUD dan Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.68.373.171.374 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan BLUD sebesar Rp.59.775.509.142,- 2. Pendapatan Kapitasi JKN Rp. 8.597.662.232,- Jumlah Rp.68.373.171.374,- Alokasi Belanja BLUD sebesar Rp. 71.942.107.102 dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai BLUD Rp. 25.267.914.536 2. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 43.253.173.957 3. Belanja Peralatan Mesin BLUD Rp. 2.312.592.209 4. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 220.000.000 5. Jalan, Irigasi, Jaringan BLUD Rp 190.000.000 6. Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD Rp. 698.426.400 Jumlah Rp. 71.942.107.102 Selisih Belanja BLUD dengan Pendapatan BLUD = 71.942.107.102 - 68.373.171.374 = Rp.3.568.935.728,- Selisih Pendapatan Belanja BLUD dengan Pendapatan Belanja BLUD sebesar Rp.3.568.935.728 merupakan SiLPA	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap penyediaan alokasi anggaran BLUD BOS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.	BLUD Tahun 2022 yang merupakan hasil audited terhadap LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 yang harus dianggarkan kembali sesuai akunnya pada Perubahan APBD TA.2023. Alokasi Belanja BLUD sebesar Rp.71.942.107.102 ***sudah sama*** dengan alokasi target Pendapatan BLUD sebesar Rp.68.373.171.374 ditambah dengan SiLPA BLUD Tahun 2023 sebesar Rp.3.568.935.728 menjadi sebesar Rp.71.942.107.102 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, ***sudah sesuai*** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.	peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.
		d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp13.802.790.880 bertambah sebesar Rp3.930.494.000 atau 28% menjadi sebesar Rp17.733.284.880 atau 1,8% dari total belanja daerah sebesar Rp980.728.856.085 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada : 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tetap sebesar Rp1.500.000.000. 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp11.414.400.000 bertambah sebesar Rp2.994.000	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp13.802.790.880 bertambah sebesar Rp3.930.494.000 atau 28% menjadi sebesar Rp17.733.284.880 atau 1,8% dari total belanja daerah sebesar Rp980.728.856.085 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada : 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tetap sebesar Rp1.500.000.000.	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		atau (0,02%) menjadi sebesar Rp11.417.394.000. 3) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp90.000.000 bertambah sebesar Rp3.927.500.000 atau 4.364% menjadi sebesar Rp4.017.500.000. 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp798.390.880.	2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp11.414.400.000 bertambah sebesar Rp2.994.000 atau (0,02%) menjadi sebesar Rp11.417.394.000. 3) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp90.000.000 bertambah sebesar Rp3.927.500.000 atau 4.364% menjadi sebesar Rp4.017.500.000. 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp798.390.880. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya	
		Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.		
		Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial ***dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan*** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Dharmasraya baru sebesar Rp46.729.796.545 atau 5% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.	fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Dharmasraya baru sebesar Rp46.729.796.545 atau 5% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus	
		Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.		
		Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.		
		Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp798.390.880 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp798.390.880 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
		Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA, 2024. Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.1.000.000.000 dan untuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.500.000.000.	Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya telah menyepakati sebagaimana Surat Pernyataan Bupati Nomor 900/1097/SP-BUP/2023 terlampir yang menyatakan bahwa besaran kebutuhan belanja Hibah Pilkada Tahun kepada KPU dan Bawaslu sebesar Rp.33.529.155.000,- dengan rincian sbb: 1. Hibah KPU sebesar Rp. 21.529.155.000 ,- 2. Hibah Bawaslu sebesar Rp. 11.000.000.000,- Jumlah Rp. 33.529.155.000,- Dalam Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Dalam Lampiran III Peraturan Bupati	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *sudah memenuhi* porsi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menganggarkan dalam APBD TA

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilukada serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dan 2024, Bupati dan DPRD Kabupaten Dharmasraya ***belum memenuhi*** **porsi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini**	Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023 telah menganggarkan belanja hibah Pilkada Tahun 2024 kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar 40% dari total kebutuhan sebesar Rp.13.011.662.000,- dengan rincian sbb : 1. Hibah KPU 40% x 21.529.155.000 = Rp.8.611.662.000,- 2. Hibah Bawaslu 40% x 11.000.000.000 = Rp.4.400.000.000,- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dan 2024 sudah memenuhi porsi alokasi hibah Pilkada Tahun 2024 kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.	2023 sebesar 40% dari total Dana Hibah yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu.
		8. Belanja Modal		
		Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp151.236.483.671 bertambah sebesar Rp1.129.414.486 atau 1% menjadi sebesar Rp152.365.898.157 atau 15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, ***harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022***.	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp151.236.483.671 bertambah sebesar Rp1.180.344.938 atau 1% menjadi sebesar Rp152.416.828.609 atau 16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.982.267.918.085, harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Modal dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir ***D.16.b.1)*** dan butir ***D.16.b.3)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
		Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir ***D.16.b.1)*** dan butir ***D.16.b.3)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	tercantum pada : 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp38.340.791.768 bertambah sebesar Rp3.005.185.897 atau 8% menjadi sebesar Rp41.345.977.665 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain : 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp2.510.000.000 bertambah sebesar Rp245.009.200 atau 10% menjadi sebesar Rp2.755.009.200. 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp5.461.855.949 bertambah sebesar Rp754.878.800 atau 14% menjadi sebesar Rp6.216.734.749. 4) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp1.525.700.000 bertambah sebesar Rp5.408.531.400 atau 354% menjadi sebesar Rp6.934.231.400. 5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp45.417.466.354 bertambah sebesar Rp9.783.030.910 atau 22% menjadi sebesar Rp55.200.497.264 antara lain dengan rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp.44.804.966.354 bertambah sebesar Rp7.432.727.250 atau 17% menjadi sebesar Rp51.595.631.204. 6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp61.569.056.460 berkurang sebesar Rp(10.225.331.760) atau (17%) menjadi sebesar Rp51.343.724.700 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek : 7) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp47.329.878.060 berkurang sebesar Rp(7.633.533.560) atau (16%) menjadi sebesar	
		Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Dharmasraya sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir ***D.16.b.9)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.		
		Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :		
		a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp38.340.791.768 bertambah sebesar Rp3.893.139.328 atau 10% menjadi sebesar Rp42.233.931.093 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :		
		Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp2.510.000.000 bertambah sebesar Rp245.009.200 atau 10% menjadi sebesar Rp2.755.009.200.		
		a. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp5.461.855.949 bertambah sebesar Rp754.878.800 atau 14%		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		menjadi sebesar Rp6.216.734.749.	Rp39.696.344.500.	
		1) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp1.525.700.000 bertambah sebesar Rp5.408.531.400 atau 354% menjadi sebesar Rp6.934.231.400.	8) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp13.531.738.400 berkurang sebesar Rp(2.572.570.200) atau (19%) menjadi sebesar Rp10.959.168.200.	
		2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp45.417.466.354 bertambah sebesar Rp9.783.030.910 atau 22% menjadi sebesar Rp55.200.497.264 antara lain dengan rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp.44.804.966.354 bertambah sebesar Rp7.432.727.250 atau 17% menjadi sebesar Rp51.595.631.204.	Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
		3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp61.569.056.460 berkurang sebesar Rp(10.225.331.760) atau (17%) menjadi sebesar Rp51.343.724.700 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :	Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.	
		b. Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp47.329.878.060 berkurang sebesar Rp(7.633.533.560) atau (16%) menjadi sebesar Rp39.696.344.500.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.	
		c. Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp13.531.738.400 berkurang sebesar Rp(2.572.570.200) atau (19%) menjadi sebesar Rp10.959.168.200.	Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11	
		Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, *dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya*, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
		Penganggaran belanja modal dilakukan *sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah* berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.	Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tetap sebesar Rp18.871.145.000. 2) Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp78.770.000 bertambah sebesar Rp174.085.000 atau 221% menjadi sebesar Rp252.855.000. dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. Terhadap rencana penambahan Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD TA.2023 harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini agar ditinjau kembali sehingga penambahan belanja modal hanya dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat dipastikan selesai pada akhir tahun.	
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.		
		Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.		
		Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:		
		a) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tetap sebesar Rp18.871.145.000.		
		b) Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp78.770.000 bertambah sebesar Rp174.085.000 atau 221% menjadi sebesar Rp252.855.000.		
		dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.		
		Terhadap rencana penambahan Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD TA.2023 harus mempertimbangkan waktu		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini ***agar ditinjau kembali*** *sehingga penambahan belanja modal hanya dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat dipastikan selesai pada akhir tahun.*		
		i. Belanja Tidak Terduga		
		Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000 bertambah sebesar Rp3.154.380.709 atau 315% menjadi sebesar Rp4.154.380.709 atau 0,42% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000 bertambah sebesar Rp3.154.380.709 atau 315% menjadi sebesar Rp4.154.380.709 atau 0,42% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk ***dihitung kembali*** dan disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir ***D.16.c.*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir ***D.16.c.*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
		Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk ***dihitung kembali*** dan disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir ***D.16.c.*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp110.982.394.000 berkurang sebesar Rp(1.237.753.961) atau (1%) menjadi sebesar Rp109.744.604.039 atau 11,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut : a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp2.632.820.000 bertambah sebesar Rp412.246.039 menjadi sebesar Rp3.045.066.039 atau 11,25% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.051.781.411 diuraikan dengan rincian obyek: 1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp2.240.643.000 bertambah sebesar Rp412.246.039 menjadi sebesar Rp2.715.122.141 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 11,38% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.851.781.411. 2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp392.177.000 berkurang sebesar Rp(62.233.102) menjadi sebesar Rp329.943.898 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 10% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.200.000.000.	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp.110.982.394.000 berkurang sebesar Rp(15.985.970) atau (0,01) menjadi sebesar Rp.110.966.408.030,- atau 11,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.982.267.918.085 yang diuraikan sebagai berikut : a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp2.632.820.000 bertambah sebesar Rp.97.952.030 menjadi sebesar Rp2.730.772.030 atau 3,72% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.307.720.296 diuraikan dengan rincian obyek: 1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp2.240.643.000 bertambah sebesar Rp.144.455.880 menjadi sebesar Rp2.385.098.880 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 11,38% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.850.981.411.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen terhadap Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8)

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. a. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp108.349.574.000 berkurang sebesar Rp(1.650.000.000) menjadi sebesar Rp106.699.574.000 atau 10,88% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp52.949.599.000, sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp53.749.975.000. b. Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut ***sudah memenuhi*** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp511.172.719.000 yaitu sebesar Rp51.117.271.900, atau terdapat selisih lebih sebesar Rp2.632.703.100.	2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp.392.177.000 berkurang sebesar Rp(46.503.850) menjadi sebesar Rp345.673.150 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 10% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.456.738.888	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen terhadap Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		4. Kebijakan Pembiayaan		
		Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tentang Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan. Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp114.029.344.163 berkurang sebesar Rp(72.116.812.083) atau (63%) menjadi sebesar Rp41.912.532.080. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan tetap sebesar Rp1.500.000.000 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk	
		Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp114.029.344.163 berkurang sebesar Rp(72.116.812.083) atau (63%) menjadi sebesar Rp41.912.532.080.		
		Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan tetap sebesar Rp1.500.000.000 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.		
		Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.		
		Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		
		Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	pembentukkan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
IV	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS**			
		A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD		
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ***belum*** konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **belum konsisten** pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan	Pemerintah Kabupaten akan lebih konsisten dalam pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
		B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD		
		Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.	Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jumlah program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan APBD 2023 melebihi dari Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan KUA-PPAS	Pemerintah Kabupaten akan lebih memperhatikan terkait kesesuaian Jumlah Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada RPJMD. Perubahan RKPD, Perubahan KUA_PPAS dan Perubahan APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
		Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :		

<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tabel 12
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS
<table>
<tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>RPJMD</th><th>P - RKPD</th><th>P - KUA-PPAS</th><th>P - APBD</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Jumlah Program</td><td>133 program</td><td>188 program</td><td>181 program</td><td>184 program</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Jumlah Kegiatan</td><td>-</td><td>420 kegiatan</td><td>406 kegiatan</td><td>410 kegiatan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jumlah Sub Kegiatan</td><td>-</td><td>1008 sub kegiatan</td><td>967 Sub kegiatan</td><td>972 Sub kegiatan</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</td><td>1.088.383.416.778</td><td>1.027.106.486.442</td><td>1.019.193.043.650</td><td>980.728.856.085</td></tr>
</table></td><td rowspan="3">Tahun 2023. Kelebihan ini disebabkan karena adanya penambahan program/kegiatan/sub kegiatan akibat perubahan Juknis DAK dan DAU Peruntukan. Disamping itu terjadi perubahan jumlah pagu pada P. APBD 2023 dimana pada pengajuan Ranperda P APBD untuk evaluasi sebesar Rp.980.728.856.085,- setelah dievakuasi mejadi sebesar 982.267.918.085,- atau bertambah sebesar Rp.1.539.062.000,-

Penambahan ini didasari dengan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana pada PMK tersebut Kabupaten Dharmasraya mendapat tambahan belanja dari alokasi kinerja Pemerintah Desa sebanyak 11 (sebelas) nagari masing-masing sebesar Rp.139.642.000,- dimana tambahan alokasi Dana Desa tersebut belum masuk dalam Ranperda yang diajukan sewaktu evaluasi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS
<table>
<tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>RPJMD</th><th>P - RKPD</th><th>P - KUA-PPAS</th><th>P - APBD</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Jumlah Program</td><td>133 program</td><td>188 program</td><td>181 program</td><td>184 program</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Jumlah Kegiatan</td><td>-</td><td>420 kegiatan</td><td>406 kegiatan</td><td>410 kegiatan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jumlah Sub Kegiatan</td><td>-</td><td>1008 sub kegiatan</td><td>967 Sub kegiatan</td><td>972 Sub kegiatan</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</td><td>1.088.383.416.778</td><td>1.027.106.486.442</td><td>1.019.193.043.650</td><td>982.267.918.085</td></tr>
</table></td><td rowspan="3">Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Jumlah program sebanyak 184 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD TA. 2023 belum sesuai namun tidak melebihi jumlah program dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 181. Jumlah kegiatan sebanyak 410 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD TA. 2023 belum sesuai namun tidak melebihi jumlah kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 420. Jumlah sub kegiatan sebanyak 972 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD TA. 2023 belum sesuai namun tidak melebihi jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 1008.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.088.383.416.778 sama dengan total pagu anggaran Prubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2022. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran 8 Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.019.193.043.650 sama dengan total nilai PPAS sesuai</td></tr>
</table>

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran Perubahan RKPD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp(46.377.630.357) atau (4,26)% dari pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp(38.464.187.565) atau 3,77% dari nilai PPAS Tahun 2023.	Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.088.383.416.778 sama dengan total pagu anggaran Prubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2022. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran 8 Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.019.193.043.650 sama dengan total nilai PPAS sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran Perubahan RKPD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp(46.377.630.357) atau (4,26)% dari pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp(38.464.187.565) atau 3,77% dari nilai PPAS Tahun 2023. Untuk itu agar deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Untuk itu, agar deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk lebih konsisten dengan dokumen RKPD serta KUA-PPAS Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Selain itu penambahan kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD hanya diperkenankan sepanjang memenuhi kriteria darurat atau	
		Untuk itu agar deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.		
		Untuk itu, agar deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.		
		Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk lebih konsisten dengan dokumen RKPD serta KUA-PPAS Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.		
		Selain itu penambahan kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD ***hanya diperkenankan*** *sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.*		
		Berdasarkan Tabel 11 di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Bupati Dharmasraya dengan RKPD serta KUA dan PPAS, terdapat sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, KUA dan PPAS tetapi tidak tercantum dalam RKPD, antara lain pada :	mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	
		1. Dinas Pangan, antara lain pada sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
		2. Dinas Kependudukan dan Capil, antara lain pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 terkait Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 terkait inkonsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.	
		Untuk itu, ***terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan*** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 terkait Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 terkait masih terdapat ***program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan*** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.	
		Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah		

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Kabupaten Dharmasraya dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
V	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD**			
		Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :		
		A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 184 program, ***tidak sama dan melebihi*** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 133 program, sehingga diduga ada penambahan program baru diluar yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 terkait Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 terkait Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 184 program, memang ***tidak sama dan melebihi*** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 133 program, sehingga diduga ada penambahan program baru diluar yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya.	
		B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.088.383.416.778 ***lebih tinggi*** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp980.728.856.085. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp107.654.560.693 atau **9,89%** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 terkait Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.088.383.416.778 memang ***lebih tinggi*** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp980.728.856.085. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			Rp107.654.560.693 atau **9,89%** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.	
		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	emerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 akan *terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.*	
		Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memperhatikan:		
		A. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 terkait Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, memastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan	
		B. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 terkait Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya akan menyesuaikan program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
VI	LAIN-LAIN			
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :		
		A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 terkait Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 terkait Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD ***sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan***, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD ***sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan***, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
		D. Alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah ***dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023*** berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.1)e)(1)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 Alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah ***akan mencantumkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023*** berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.1)e)(1)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
		E. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/*5252*/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasaraya agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memenuhi Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasaraya agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 sesusai dengan Surat Edaran	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		APBD TA. 2023. Bila ketentuan ***tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti*** maka ***nomor register untuk penetapan Perda Perubahan APBD tidak akan diberikan.*** Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Pasaman menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register Perda Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.	Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/*5252*/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023	
		F. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.	Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan Perubahan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		G. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah ***dilarang*** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.	Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan menindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin
		H. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 TPahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.	

No	Uraian	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		I. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan segera melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 serta untuk menjamin tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.	

BUPATI DHARMASRAYA
Selaku
PIHAK PERTAMA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,
Selaku
PIHAK KEDUA

PARYANTO, SH
KETUA

Ir. H. ABI GUNAWAN, MM
WAKIL KETUA

ADE SUDARMAN, S.Pd
WAKIL KETUA

BUPATI DHARMASRAYA

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 900/ 1095/SP-BUP/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN
Jabatan	: Bupati Dharmasraya
Alamat	: Jln. Lintas Sumatera Km.2 Pulau Punjung

dengan ini menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.1.231.625.425,00 atau 0,13% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.982.267.918.085,00 sudah mencukupi untuk anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelengara Pemerintah Daerah.

Demikanlah Surat Penyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

Pulau Punjung, 19 Oktober 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

BUPATI DHARMASRAYA

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 900/1096/SP-BUP/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN
Jabatan	: Bupati Dharmasraya
Alamat	: Jln. Lintas Sumatera Km.2 Pulau Punjung

dengan ini menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk pengawasan pada Inspketorat Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.5.746.736.900,00 atau 0,59% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.982.267.918.085,00 dengan pertimbangan bahwa jumlah pegawai pada Inspektorat sebanyak 33 orang sudah termasuk didalamnya auditor sebanyak 27 orang, dari dana yang tersedia tersebut sudah mencukupi anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya.

Demikanlah Surat Penyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

Pulau Punjung, 19 Oktober 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

BUPATI DHARMASRAYA

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 900/1097/SP-BUP/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN
Jabatan	: Bupati Dharmasraya
Alamat	: Jln. Lintas Sumatera Km.2 Pulau Punjung

sesuai hasil kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya terhadap penyediaan dana Pilkada Tahun 2024 dalam APBD TA. 2023 dan APBD TA. 2024 Kabupaten Dharmasraya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hibah Pilkada Tahun 2024 untuk KPU Rp. 21.529.155.000,-
2. Hibah Pilkada Tahun 2024 untuk Bawaslu Rp. 11.000.000.000,-

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kabupaten Dharasraya telah menganggarkan dana Pilkada Tahun 2024 dalam Perubahan APBD TA. 2023 sebesar 40% dari rencana kebutuhan dana yang sudah disepakti yaitu sebesar RP.13.011.662.000,- rincian sebagai sebagai berikut :

1. Hibah KPU sebesar 40 % x 21.529.155.000 = Rp. 8.611.662.000,-
2. Hibah Bawaslu sebesar 40% x 11.000.000.000 = Rp. 4.400.000.000,-

Jumlah = Rp.13.011.662.000,-

Demikanlah Surat Penyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

Pulau Punjung, 19 Oktober 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN			HAL
1	Batang Tubuh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023			1-17
2	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;		1-2
3	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;		1-10
4	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;		
		1.01.0.00.0.00.01	DINAS PENDIDIKAN	1-6
		1.02.0.00.0.00.01	DINAS KESEHATAN	1-8
		1.02.0.00.0.00.01	RSUD SUNGAI RUMBAI	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS KOTO BESAR	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS KOTO BARU	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS TIUMANG	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS PADANG LAWEH	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS SITIUNG I	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS TIMPEH	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS SITIUNG II	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS SILAGO	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS SUNGAI DAREH	1-1
		1.02.0.00.0.00.01	PUSKESMAS SIALANG	1-1

1.02.0.00.0.00.01	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1-1
1.02.0.00.0.00.01	RSUD SUNGAI DAREH	1-2
1.03.0.00.0.00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1-6
1.04.2.10.0.00.01	DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1-5
1.05.0.00.0.00.01	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1-4
1.05.0.00.0.00.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1-4
1.06.2.08.2.14.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1-10
2.09.3.25.0.00.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	1-4
2.11.0.00.0.00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1-5
2.12.0.00.0.00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1-4
2.13.0.00.0.00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1-4
2.15.0.00.0.00.01	DINAS PERHUBUNGAN	1-3
2.16.2.20.2.21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1-4
2.17.3.30.3.31.01	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,MENENGAH,DAN PERDAGANGAN	1-5
2.18.0.00.0.00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1-4
2.22.3.26.2.19.01	DINAS KEBUDAYAAN,PERIWISATA,PEMUDA,DAN OLAH RAGA	1-6
2.23.2.24.0.00.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1-4
2.27.0.00.0.00.01	DINAS PERTANIAN	1-5
3.32.2.07.0.00.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1-4
4.01.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DAERAH	1-7
4.02.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DPRD	1-4
5.01.5.05.0.00.01	BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1-5
5.02.0.00.0.00.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	1-7
5.03.5.04.0.00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1-5
6.01.0.00.0.00.01	INSPEKTORAT KABUPATEN	1-5
7.01.0.00.0.00.01	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	1-4
7.01.0.00.0.00.02	KECAMATAN SITIUNG	1-4
7.01.0.00.0.00.03	KECAMATAN KOTO BARU	1-4

		7.01.0.00.0.00.04	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	1-4
		7.01.0.00.0.00.05	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	1-3
		7.01.0.00.0.00.06	KECAMATAN TIMPEH	1-3
		7.01.0.00.0.00.07	KECAMATAN KOTO SALAK	1-3
		7.01.0.00.0.00.08	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	1-3
		7.01.0.00.0.00.09	KECAMATAN KOTO BESAR	1-4
		7.01.0.00.0.00.10	KECAMATAN PADANG LAWEH	1-4
		7.01.0.00.0.00.11	KECAMATAN TIUMANG	1-4
		8.01.0.00.1.00.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1-5
5	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan, Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;		1-97
6	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;		1-6
7	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;		1-7
8	Lampiran VII	Singkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;		1-9
9	Lampiran VIII	Singkroisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;		1-97
10	Lampiran IX	Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;		1-14
11	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;		1-1
12	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;		1-2
13	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;		1-1
14	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap dan Aset Lain-lain ;		1-2
15	Lamoitan XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Selesai dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan		1-2
16	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan		1-1
17	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah; dan		1-1
18	Lampiran XVII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah		1-15

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2023

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nommor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dan Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya TA 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 96);

12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-105-2023 tentang perkiraan dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencana dan penganggaran yang beisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.029.378.138.553,00 berkurang sejumlah Rp47.110.220.468,00 sehingga menjadi Rp982.267.918.085,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan daerah				
	a. semula	Rp.	916.848.794.390,00		
	b. bertambah	Rp.	25.006.591.615,00		
	jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp.	941.855.386.005,00
2.	Belanja daerah				
	a. semula	Rp.	1.029.378.138.553,00		
	b. berkurang	Rp.	(47.110.220.468,00)		
	jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp.	982.267.918.085,00
3.	Pembiayaan daerah				
	a. penerimaan pembiayaan				
	1) semula	Rp.	114.029.344.163,00		
	2) berkurang	Rp.	(72.116.812.083,00)		
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp.	41.912.532.080,00
	b. pengeluaran pembiayaan				
	1) semula	Rp.	1.500.000.000,00		
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp.	1.500.000.000,00
	jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp.	40.412.532.080,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	pendapatan asli daerah				
	1) semula	Rp.	100.842.119.674,00		
	2) bertambah	Rp.	9.384.904.062,00		
	jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp.	110.227.023.736,00
b.	pendapatan transfer				
	1) semula	Rp.	812.206.674.716,00		
	2) bertambah	Rp.	16.221.687.553,00		
	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp.	828.428.362.269,00
c.	lain- lain pendapatan daerah yang sah				
	1) semula	Rp.	3.800.000.000,00		
	2) berkurang	Rp.	(600.000.000,00)		
	jumlah lain- lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp.	3.200.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	pajak daerah;				
	1) semula	Rp.	22.776.715.953,00		
	2) bertambah	Rp.	1.074.265.458,00		
	jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp.	23.850.981.411,00
b.	retribusi daerah				
	1) semula	Rp.	3.623.788.885,00		
	2) berkurang	Rp.	(167.050.000,00)		
	jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp.	3.456.738.885,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
	1) semula	Rp.	4.324.065.836,00		
	2) bertambah	Rp.	508.144.271,00		
	jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp.	4.832.210.107,00

d. lain- lain pendapatan asli daerah yang sah

1)	semula	Rp.	70.117.549.000,00	
2)	bertambah	Rp.	7.969.544.333,00	
	jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 78.087.093.333,00

(2). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan Transfer pemerintah pusat

1)	semula	Rp.	760.965.265.000,00	
2)	berkurang	Rp.	(83.744.093,00)	
	jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp. 760.881.520.907,00

b. pendapatan Transfer antar daerah

1)	semula	Rp.	51.241.409.716,00	
2)	bertambah	Rp.	16.305.431.646,00	
	jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp. 67.546.841.362,00

(3) .Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah

1)	semula	Rp.	3.800.000.000,00	
2)	berkurang	Rp.	(600.000.000,00)	
	jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 3.200.000.000,00

b. dana darurat

1)	semula	Rp.	0,00	
2)	bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. 0,00

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1)	semula	Rp.	0,00	
2)	bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU			Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	belanja operasional;			
	1) semula	Rp.	766.159.260.882,00	
	2) berkurang	Rp.	(51.428.960.145,00)	
	jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp. 714.730.300.737,00
b.	belanja modal;			
	1) semula	Rp.	151.236.483.671,00	
	2) bertambah	Rp.	1.180.344.938,00	
	jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 152.416.828.609,00
c.	belanja tak terduga;			
	1) semula	Rp.	1.000.000.000,00	
	2) bertambah	Rp.	3.154.380.709,00	
	jumlah belanja tak terduga setelah perubahan			Rp. 4.154.380.709,00
d.	belanja transfer;			
	1) semula	Rp.	110.982.394.000,00	
	2) berkurang	Rp.	(15.985.970,00)	
	jumlah belanja transfer setelah perubahan			Rp. 110.966.408.030,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	belanja Pegawai			
	1) semula	Rp.	471.538.672.736,00	
	2) berkurang	Rp.	(71.771.797.781,00)	
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 399.766.874.955,00
b.	belanja barang dan jasa			
	1) semula	Rp.	280.817.797.266,00	
	2) bertambah	Rp.	5.022.695.936,00	
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 285.840.493.202,00

c.	belanja bunga					
	1) semula	Rp.	0.00			
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
	jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp.		
d.	belanja subsidi					
	1) semula	Rp.	0.00			
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
	jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp.		0.00
e.	belanja hibah					
	1) semula	Rp.	13.802.790.880,00			
	2) bertambah	Rp.	15.320.141.700,00			
	jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp.		29.122.932.580,00
f.	belanja bantuan sosial					
	1) semula	Rp.	0.00			
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp.		0.00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a.	belanja modal tanah					
	1) semula	Rp.	0.00			
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp.		0.00
b.	belanja modal peralatan dan mesin					
	1) semula	Rp.	38.340.791.768,00			
	2) bertambah	Rp.	3.005.185.897,00			
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp.		41.345.977.665,00
c.	belanja modal bangunan dan gedung					
	1) semula	Rp.	45.417.466.354,00			
	2) bertambah	Rp.	10.782.753.665,00			
	jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp.		56.200.220.019,00

d.	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi				
	1) semula	Rp.	61.569.056.460,00		
	2) berkurang	Rp.	(10.225.331.760,00)		
	jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan			Rp.	51.343.724.700,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya				
	1) semula	Rp.	5.208.742.689,00		
	2) berkurang	Rp.	(2.380.262.864,00)		
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp.	2.828.479.825,00
f.	belanja modal aset lainnya				
	1) semula	Rp.	700.426.400,00		
	2) berkurang	Rp.	(2.000.000,00)		
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp.	698.426.400,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tak terduga yaitu :

	1) semula	Rp.	1.000.000.000,00		
	2) bertambah	Rp.	3.154.380.709,00		
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp.	4.154.380.709,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a.	belanja bagi hasil				
	1) semula	Rp.	2.632.820.000,00		
	2) bertambah	Rp.	97.952.030,00		
	jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp.	2.730.772.030,00
b.	belanja Bantuan Keuangan				
	1) semula	Rp.	108.349.574.000,00		
	2) berkurang	Rp.	(113.938.000,00)		
	jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp.	108.235.636.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	penerimaan pembiayaan				
	1) semula	Rp.	114.029.344.163,00		
	2) berkurang	Rp.	(72.116.812.083),00)		
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp.	41.912.532.080,00
b.	pengeluaran pembiayaan				
	1) semula	Rp.	1.500.000.000.00		
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	Rp.	1.500.000.000.00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a.	sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya				
	1) semula	Rp.	114.029.344.163,00		
	2) serkurang	Rp.	(72.116.812.083,00)		
	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp.	41.912.532.080,00
b.	pencairan dana cadangan				
	1) semula	Rp.	0.00		
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00		
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp.	0.00
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
	1) semula	Rp.	0.00		
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00		
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp.	0.00

d.	penerimaan pinjaman daerah					
	1) semula	Rp.	0.00			
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
	jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.		0.00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjamam daerah					
	1) semula	Rp.	0.00			
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
	jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjamam daerah setelah perubahan			Rp.		0.00
f.	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	1) semula	Rp.	0.00			
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
	jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp.		0.00,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a.	pembentukan dana cadangan					
	1) semula	Rp.	0.00			
	2) berkurang/(berkurang)	Rp.	0.00			
	jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp.		0.00
b.	penyertaan modal daerah					
	1) semula	Rp.	1.500.000.000.00			
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
	jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			Rp.		1.500.000.000.00
c.	pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo					
	1) semula	Rp.	0.00			

2)	bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00		
	jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp.	0.00
d.	pemberian pinjaman daerah				
1)	semula	Rp.	0.00		
2)	bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00		
	jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0.00
e.	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
1)	semula	Rp.	0.00		
2)	bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00		
	jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan			Rp.	0.00

Pasal 9

1.Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.	Lampiran I	:	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	:	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	:	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan :
4.	Lampiran IV	:	rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

5.	Lampiran V	:	rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.	Lampiran VI	:	rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan spm;
7.	Lampiran VII	:	sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	:	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	:	Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.	Lampiran X	:	Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per Jabatan;
11.	Lampiran XI	:	Daftar Piutang Daerah;
12.	Lampiran XII	:	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.	Lampiran XIII	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-lain;
14.	Lampiran XIV	:	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Selesai dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15	Lampiran XV	:	Daftar Dana Cadangan;
16	Lampiran XVI	:	Daftar Pinjaman Daerah, dan
17.	Lampiran XVII	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tahun 2023.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan PeraturanBupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 25 Oktober 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA,

HENDRISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR: 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT : 10/78/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Adanya perubahan asumsi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh berubahnya besaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Adanya perubahan pendapatan disebabkan dari perubahan target pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat (dana perimbangan) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah yang disebabkan oleh berubahnya besaran Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa (DD), serta berubahnya besaran Silpa tahun sebelumnya.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, alokasi perubahan/pergeseran anggaran antar instansi di tahun 2023 lebih dominan disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaanya Tahun 2023, dimana PMK tersebut diterbitkan setelah APBD Tahun 2023 ditetapkan mejadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya, untuk mengakomodir Alokasi DAU Peruntukan telah dilakukan pada pergesaran Pertama terhadap Penjabaran APBD Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 dan kemudian akan dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2023. Besaran SiLPA tahun anggaran 2022 merupakan besaran SiLPA yang digunakan di tahun anggaran 2023 setelah dilakukannya audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
4. Adanya penganggaran kembali dana DAK Fisik Jalan mendukung Konektivitas Daerah tahun 2022 yang dilanjutkan pekerjaannya tahun 2023 dengan penambahan waktu dengan menganggarkan kembali pada akun belanja yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Keadaan darurat yang merupakan situasi kondisi yang tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba, mengganggu kegiatan yang sifatnya perlu segera ditanggulangi.
6. Keadaan luar biasa yang merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 113

LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100.842.119.674**	**110.227.023.736**	**9.384.904.062**	**9 %**
4.1.01	Pajak Daerah	22.776.715.953	23.850.981.411	1.074.265.458	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	3.623.788.885	3.456.738.885	(167.050.000)	5 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836	4.832.210.107	508.144.271	12 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	70.117.549.000	78.087.093.333	7.969.544.333	11 %
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**812.206.674.716**	**828.428.362.269**	**16.221.687.553**	**2 %**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	760.965.265.000	760.881.520.907	(83.744.093)	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.241.409.716	67.546.841.362	16.305.431.646	32 %
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.800.000.000**	**3.200.000.000**	**(600.000.000)**	**16 %**
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.800.000.000	3.200.000.000	(600.000.000)	16 %
	Jumlah Pendapatan	**916.848.794.390**	**941.855.386.005**	**25.006.591.615**	**3 %**
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**766.159.260.882**	**714.730.300.737**	**(51.428.960.145)**	**7 %**
5.1.01	Belanja Pegawai	471.538.672.736	399.766.874.955	(71.771.797.781)	15 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.817.797.266	285.840.493.202	5.022.695.936	2 %
5.1.05	Belanja Hibah	13.802.790.880	29.122.932.580	15.320.141.700	111 %
5.2	**BELANJA MODAL**	**151.236.483.671**	**152.416.828.609**	**1.180.344.938**	**1 %**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.340.791.768	41.345.977.665	3.005.185.897	8 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.417.466.354	56.200.220.019	10.782.753.665	24 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.569.056.460	51.343.724.700	(10.225.331.760)	17 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.208.742.689	2.828.479.825	(2.380.262.864)	46 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	700.426.400	698.426.400	(2.000.000)	0 %
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000**	**4.154.380.709**	**3.154.380.709**	**315 %**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	4.154.380.709	3.154.380.709	315 %
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**110.982.394.000**	**110.966.408.030**	**(15.985.970)**	**0 %**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.632.820.000	2.730.772.030	97.952.030	4 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.349.574.000	108.235.636.000	(113.938.000)	0 %
	Jumlah Belanja	**1.029.378.138.553**	**982.267.918.085**	**(47.110.220.468)**	**5 %**
	Total Surplus/(Defisit)	**(112.529.344.163)**	**(40.412.532.080)**	**72.116.812.083**	**-64 %**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114.029.344.163	41.912.532.080	(72.116.812.083)	63 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.029.344.163	41.912.532.080	(72.116.812.083)	63 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	114.029.344.163	41.912.532.080	(72.116.812.083)	63 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	112.529.344.163	40.412.532.080	(72.116.812.083)	64 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**56.729.001.885**	**550.508.523.170**	**135.327.540.331**	**0**	**0**	**685.836.063.501**	**61.720.348.027**	**498.195.103.028**	**137.243.035.809**	**0**	**0**	**635.438.138.837**
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**45.750.000**	**285.530.051.488**	**22.717.149.512**	**0**	**0**	**308.247.201.000**	**45.750.000**	**265.121.159.580**	**38.523.134.756**	**0**	**0**	**303.644.294.336**
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	45.750.000	285.530.051.488	22.717.149.512	0	0	308.247.201.000	45.750.000	265.121.159.580	38.523.134.756	0	0	303.644.294.336
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**54.869.743.000**	**188.104.100.250**	**40.851.237.129**	**0**	**0**	**228.955.337.379**	**59.851.089.142**	**181.533.387.093**	**38.702.340.458**	**0**	**0**	**220.235.727.551**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	58.680.000	86.741.384.900	2.054.627.000	0	0	88.796.011.900	58.680.000	75.515.277.416	2.054.627.000	0	0	77.569.904.416
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	6.500.000.000	6.960.573.600	884.426.400	0	0	7.845.000.000	6.600.000.000	6.427.439.742	884.426.400	0	0	7.311.866.142
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas sungai Rumbai	330.000.000	2.026.325.600	39.000.000	0	0	2.065.325.600	260.000.000	2.118.476.541	34.050.000	0	0	2.152.526.541
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Koto Besar	140.080.000	2.023.112.916	15.000.000	0	0	2.038.112.916	98.000.000	2.227.738.105	17.000.000	0	0	2.244.738.105
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Sungai Limau	220.640.000	1.626.126.000	43.700.000	0	0	1.669.826.000	168.085.000	1.510.787.745	13.000.000	0	0	1.523.787.745
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Koto Baru	478.178.000	2.604.231.800	58.538.200	0	0	2.662.770.000	613.566.500	3.075.521.720	98.538.200	0	0	3.174.059.920
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tiumang	76.335.000	1.334.108.800	10.000.000	0	0	1.344.108.800	100.000.000	1.545.312.525	30.000.000	0	0	1.575.312.525
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Padang Laweh	231.000.000	1.229.484.500	20.000.000	0	0	1.249.484.500	165.515.700	1.192.555.758	15.000.000	0	0	1.207.555.758
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Sitiung I	495.955.100	2.036.262.300	90.000.000	0	0	2.126.262.300	480.728.608	2.310.905.000	70.000.000	0	0	2.380.905.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Timpeh	196.380.000	1.569.615.000	10.000.000	0	0	1.579.615.000	216.380.000	1.608.931.718	10.000.000	0	0	1.618.931.718
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Gunung Medan	121.000.000	1.426.790.000	17.000.000	0	0	1.443.790.000	125.000.000	1.475.792.534	6.000.000	0	0	1.481.792.534
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sitiung II	104.692.500	1.437.951.500	62.160.000	0	0	1.500.111.500	138.452.600	1.363.862.998	62.160.000	0	0	1.626.022.998
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Beringin Sakti	43.500.000	902.829.700	15.000.000	0	0	917.829.700	54.145.800	966.313.930	14.820.000	0	0	981.133.930

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Silago	245.570.400	1.643.378.400	26.000.000	0	0	1.669.378.400	258.033.934	1.744.638.142	29.000.000	0	0	1.773.638.142
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Sungai Dareh	167.232.000	2.401.313.384	141.560.680	0	0	2.542.874.064	167.232.000	2.859.241.539	130.050.000	0	0	2.989.291.539
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Sialang	75.500.000	1.207.214.000	10.000.000	0	0	1.217.214.000	55.369.000	1.398.463.103	25.000.000	0	0	1.423.463.103
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	Laboratorium Kesehatan Daerah	275.000.000	420.000.000	5.000.000	0	0	425.000.000	275.000.000	394.090.750	5.000.000	0	0	399.090.750
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	45.010.000.000	70.513.397.850	37.349.224.849	0	0	107.862.622.699	50.016.900.000	73.598.037.827	35.203.668.858	0	0	108.801.706.685
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**1.608.230.485**	**47.662.952.696**	**64.195.759.630**	**0**	**0**	**111.858.712.326**	**1.608.230.485**	**31.576.161.291**	**52.389.332.895**	**0**	**0**	**83.965.494.186**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.608.230.485	47.662.952.696	64.195.759.630	0	0	111.858.712.326	1.608.230.485	31.576.161.291	52.389.332.895	0	0	83.965.494.186
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**205.278.400**	**13.083.765.970**	**533.894.060**	**0**	**0**	**13.617.660.030**	**215.278.400**	**3.969.955.500**	**505.118.500**	**0**	**0**	**4.475.074.000**
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	205.278.400	13.083.765.970	533.894.060	0	0	13.617.660.030	215.278.400	3.969.955.500	505.118.500	0	0	4.475.074.000
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**0**	**11.369.287.066**	**6.159.000.000**	**0**	**0**	**17.528.287.066**	**0**	**10.696.944.914**	**6.258.609.200**	**0**	**0**	**16.955.554.114**
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	8.982.876.766	0	0	0	8.982.876.766	0	8.203.885.164	0	0	0	8.203.885.164

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	2.386.410.300	6.159.000.000	0	0	8.545.410.300	0	2.493.059.750	6.258.609.200	0	0	8.751.668.950
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**0**	**4.758.365.700**	**870.500.000**	**0**	**0**	**5.628.865.700**	**0**	**5.297.494.650**	**864.500.000**	**0**	**0**	**6.161.994.650**
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	4.758.365.700	870.500.000	0	0	5.628.865.700	0	5.297.494.650	864.500.000	0	0	6.161.994.650
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.647.500.000**	**62.026.160.347**	**12.089.761.740**	**0**	**0**	**74.115.922.087**	**1.387.500.000**	**61.037.229.573**	**11.938.714.300**	**0**	**0**	**72.975.943.873**
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**0**	**273.197.400**	**0**	**0**	**0**	**273.197.400**	**0**	**430.697.600**	**0**	**0**	**0**	**430.697.600**
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0	273.197.400	0	0	0	273.197.400	0	430.697.600	0	0	0	430.697.600
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**0**	**1.330.576.000**	**0**	**0**	**0**	**1.330.576.000**	**0**	**1.388.446.600**	**0**	**0**	**0**	**1.388.446.600**
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1.330.576.000	0	0	0	1.330.576.000	0	1.388.446.600	0	0	0	1.388.446.600
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN**	**265.000.000**	**4.525.459.000**	**0**	**0**	**0**	**4.525.459.000**	**105.000.000**	**3.577.830.850**	**0**	**0**	**0**	**3.577.830.850**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			BIDANG PANGAN												
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Perikanan	265.000.000	4.525.459.000	0	0	0	4.525.459.000	105.000.000	3.577.830.850	0	0	0	3.577.830.850
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**0**	**165.000.000**	**0**	**0**	**0**	**165.000.000**	**0**	**116.655.200**	**0**	**0**	**0**	**116.655.200**
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	165.000.000	0	0	0	165.000.000	0	116.655.200	0	0	0	116.655.200
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**400.000.000**	**4.938.508.950**	**71.770.000**	**0**	**0**	**5.010.278.950**	**300.000.000**	**4.507.926.040**	**125.730.000**	**0**	**0**	**4.633.656.040**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000	4.938.508.950	71.770.000	0	0	5.010.278.950	300.000.000	4.507.926.040	125.730.000	0	0	4.633.656.040
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**0**	**4.282.149.850**	**156.600.000**	**0**	**0**	**4.438.749.850**	**0**	**3.719.107.350**	**73.707.440**	**0**	**0**	**3.792.814.790**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	4.282.149.850	156.600.000	0	0	4.438.749.850	0	3.719.107.350	73.707.440	0	0	3.792.814.790
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**0**	**5.227.842.590**	**101.500.000**	**0**	**0**	**5.329.342.590**	**0**	**4.619.833.650**	**101.500.000**	**0**	**0**	**4.721.333.650**
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	5.227.842.590	101.500.000	0	0	5.329.342.590	0	4.619.833.650	101.500.000	0	0	4.721.333.650
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**	**0**	**3.891.002.000**	**0**	**0**	**0**	**3.891.002.000**	**0**	**3.887.732.000**	**0**	**0**	**0**	**3.887.732.000**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			KELUARGA BERENCANA												
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	3.891.002.000	0	0	0	3.891.002.000	0	3.887.732.000	0	0	0	3.887.732.000
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**352.500.000**	**6.615.064.050**	**230.279.660**	**0**	**0**	**6.845.343.710**	**352.500.000**	**5.645.843.600**	**265.779.660**	**0**	**0**	**5.911.623.260**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	352.500.000	6.615.064.050	230.279.660	0	0	6.845.343.710	352.500.000	5.645.843.600	265.779.660	0	0	5.911.623.260
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**500.000.000**	**5.097.904.770**	**59.500.000**	**0**	**0**	**5.157.404.770**	**500.000.000**	**4.947.016.872**	**33.200.000**	**0**	**0**	**4.980.216.872**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000	5.097.904.770	59.500.000	0	0	5.157.404.770	500.000.000	4.947.016.872	33.200.000	0	0	4.980.216.872
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**130.000.000**	**3.988.872.650**	**58.647.000**	**0**	**0**	**4.047.519.650**	**130.000.000**	**3.488.880.450**	**40.800.000**	**0**	**0**	**3.529.680.450**
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	130.000.000	3.988.872.650	58.647.000	0	0	4.047.519.650	130.000.000	3.488.880.450	40.800.000	0	0	3.529.680.450
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**0**	**4.078.098.750**	**521.942.080**	**0**	**0**	**4.600.040.830**	**0**	**3.455.814.550**	**55.671.040**	**0**	**0**	**3.511.485.590**
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	4.078.098.750	521.942.080	0	0	4.600.040.830	0	3.455.814.550	55.671.040	0	0	3.511.485.590

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**0**	**3.537.117.372**	**0**	**0**	**0**	**3.537.117.372**	**0**	**4.656.287.142**	**53.312.760**	**0**	**0**	**4.709.599.902**
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	3.537.117.372	0	0	0	3.537.117.372	0	4.656.287.142	53.312.760	0	0	4.709.599.902
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**0**	**149.937.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**169.937.000**	**0**	**54.558.400**	**20.000.000**	**0**	**0**	**74.558.400**
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	149.937.000	20.000.000	0	0	169.937.000	0	54.558.400	20.000.000	0	0	74.558.400
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**0**	**25.056.600**	**0**	**0**	**0**	**25.056.600**	**0**	**17.186.000**	**0**	**0**	**0**	**17.186.000**
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	25.056.600	0	0	0	25.056.600	0	17.186.000	0	0	0	17.186.000
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**0**	**9.656.280.515**	**0**	**0**	**0**	**9.656.280.515**	**0**	**13.154.229.281**	**118.763.500**	**0**	**0**	**13.272.992.781**
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	9.656.280.515	0	0	0	9.656.280.515	0	13.154.229.281	118.763.500	0	0	13.272.992.781
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**0**	**4.099.200.950**	**10.869.523.000**	**0**	**0**	**14.968.723.950**	**0**	**3.300.075.388**	**11.050.249.900**	**0**	**0**	**14.350.325.288**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	4.099.200.950	10.869.523.000	0	0	14.968.723.950	0	3.300.075.388	11.050.249.900	0	0	14.350.325.288
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**0**	**144.891.900**	**0**	**0**	**0**	**144.891.900**	**0**	**69.108.600**	**0**	**0**	**0**	**69.108.600**
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan	0	144.891.900	0	0	0	144.891.900	0	69.108.600	0	0	0	69.108.600

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			dan Kearsipan												
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**37.480.000**	**28.084.260.350**	**106.000.000**	**0**	**0**	**28.190.260.350**	**93.780.000**	**21.350.993.100**	**75.000.000**	**0**	**0**	**21.425.993.100**
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**0**	**340.852.100**	**0**	**0**	**0**	**340.852.100**	**0**	**293.203.700**	**0**	**0**	**0**	**293.203.700**
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Perikanan	0	340.852.100	0	0	0	340.852.100	0	293.203.700	0	0	0	293.203.700
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**0**	**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000.000**	**0**	**542.218.600**	**5.500.000**	**0**	**0**	**547.718.600**
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	542.218.600	5.500.000	0	0	547.718.600
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**23.500.000**	**22.560.080.800**	**71.500.000**	**0**	**0**	**22.631.580.800**	**79.800.000**	**16.590.197.250**	**51.500.000**	**0**	**0**	**16.641.697.250**
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	23.500.000	22.560.080.800	71.500.000	0	0	22.631.580.800	79.800.000	16.590.197.250	51.500.000	0	0	16.641.697.250
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**0**	**139.998.600**	**0**	**0**	**0**	**139.998.600**	**0**	**110.429.300**	**0**	**0**	**0**	**110.429.300**
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	139.998.600	0	0	0	139.998.600	0	110.429.300	0	0	0	110.429.300
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**0**	**594.711.400**	**0**	**0**	**0**	**594.711.400**	**0**	**361.204.100**	**0**	**0**	**0**	**361.204.100**
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	594.711.400	0	0	0	594.711.400	0	361.204.100	0	0	0	361.204.100
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**13.980.000**	**4.198.617.450**	**34.500.000**	**0**	**0**	**4.233.117.450**	**13.980.000**	**3.453.740.150**	**18.000.000**	**0**	**0**	**3.471.740.150**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000	4.198.617.450	34.500.000	0	0	4.233.117.450	13.980.000	3.453.740.150	18.000.000	0	0	3.471.740.150
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**75.000.000**	**69.865.249.468**	**1.835.150.000**	**0**	**0**	**71.700.399.468**	**95.000.000**	**75.016.545.035**	**1.844.438.500**	**0**	**0**	**76.860.983.535**
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**75.000.000**	**33.331.513.936**	**1.741.650.000**	**0**	**0**	**35.073.163.936**	**95.000.000**	**34.477.470.416**	**1.823.438.500**	**0**	**0**	**36.300.908.916**
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	75.000.000	33.331.513.936	1.741.650.000	0	0	35.073.163.936	95.000.000	34.477.470.416	1.823.438.500	0	0	36.300.908.916
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**	**0**	**36.533.735.532**	**93.500.000**	**0**	**0**	**36.627.235.532**	**0**	**40.539.074.619**	**21.000.000**	**0**	**0**	**40.560.074.619**
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	36.533.735.532	93.500.000	0	0	36.627.235.532	0	40.539.074.619	21.000.000	0	0	40.560.074.619
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**858.343.942.505**	**23.415.814.207**	**287.628.000**	**1.000.000.000**	**110.982.394.000**	**135.685.836.207**	**878.544.137.978**	**21.561.859.121**	**465.200.000**	**4.154.380.709**	**110.966.408.030**	**137.147.847.860**
5	**01**		**PERENCANAAN**	**0**	**4.354.365.850**	**102.500.000**	**0**	**0**	**4.456.865.850**	**0**	**3.660.583.350**	**102.500.000**	**0**	**0**	**3.763.083.350**
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	0	4.354.365.850	102.500.000	0	0	4.456.865.850	0	3.660.583.350	102.500.000	0	0	3.763.083.350
5	**02**		**KEUANGAN**	**858.343.942.505**	**12.525.730.861**	**163.128.000**	**1.000.000.000**	**110.982.394.000**	**124.671.252.861**	**878.544.137.978**	**12.137.888.700**	**340.700.000**	**4.154.380.709**	**110.966.408.030**	**127.599.377.439**
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan Daerah	858.343.942.505	12.525.730.861	163.128.000	1.000.000.000	110.982.394.000	124.671.252.861	878.544.137.978	12.137.888.700	340.700.000	4.154.380.709	110.966.408.030	127.599.377.439
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**	**0**	**5.371.819.396**	**22.000.000**	**0**	**0**	**5.393.819.396**	**0**	**4.343.799.771**	**22.000.000**	**0**	**0**	**4.365.799.771**
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	5.371.819.396	22.000.000	0	0	5.393.819.396	0	4.343.799.771	22.000.000	0	0	4.365.799.771
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**0**	**1.012.724.000**	**0**	**0**	**0**	**1.012.724.000**	**0**	**891.477.000**	**0**	**0**	**0**	**891.477.000**
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1.012.724.000	0	0	0	1.012.724.000	0	891.477.000	0	0	0	891.477.000

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**0**	**151.174.100**	**0**	**0**	**0**	**151.174.100**	**0**	**528.110.300**	**0**	**0**	**0**	**528.110.300**
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	0	151.174.100	0	0	0	151.174.100	0	528.110.300	0	0	0	528.110.300
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**0**	**7.575.404.600**	**1.224.553.600**	**0**	**0**	**8.799.958.200**	**0**	**5.163.132.900**	**604.500.000**	**0**	**0**	**5.767.632.900**
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**	**0**	**7.575.404.600**	**1.224.553.600**	**0**	**0**	**8.799.958.200**	**0**	**5.163.132.900**	**604.500.000**	**0**	**0**	**5.767.632.900**
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Kabupaten	0	7.575.404.600	1.224.553.600	0	0	8.799.958.200	0	5.163.132.900	604.500.000	0	0	5.767.632.900
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**15.870.000**	**19.302.021.160**	**365.850.000**	**0**	**0**	**19.667.871.160**	**14.620.000**	**15.753.381.600**	**245.940.000**	**0**	**0**	**15.999.321.600**
7	**01**		**KECAMATAN**	**15.870.000**	**19.302.021.160**	**365.850.000**	**0**	**0**	**19.667.871.160**	**14.620.000**	**15.753.381.600**	**245.940.000**	**0**	**0**	**15.999.321.600**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000	2.186.759.150	35.500.000	0	0	2.222.259.150	3.000.000	1.999.090.500	0	0	0	1.999.090.500
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sitiung	1.460.000	2.043.615.400	50.800.000	0	0	2.094.415.400	1.460.000	1.560.858.100	62.300.000	0	0	1.623.158.100
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Koto Baru	1.500.000	2.145.860.000	31.500.000	0	0	2.177.360.000	1.500.000	1.722.265.400	31.500.000	0	0	1.753.765.400
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Sungai Rumbai	3.250.000	1.693.188.500	26.000.000	0	0	1.719.188.500	3.250.000	1.374.423.950	0	0	0	1.374.423.950
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Sembilan Koto	1.750.000	1.676.972.050	22.000.000	0	0	1.698.972.050	1.750.000	1.207.875.600	19.290.000	0	0	1.227.165.600
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Timpeh	1.660.000	1.520.281.810	27.500.000	0	0	1.547.781.810	1.660.000	1.335.023.400	27.500.000	0	0	1.362.523.400
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Koto Salak	0	1.495.071.900	18.200.000	0	0	1.513.271.900	0	1.228.133.500	0	0	0	1.228.133.500
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Asam Jujuhan	0	1.315.074.400	0	0	0	1.315.074.400	0	1.029.221.900	0	0	0	1.029.221.900
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Koto Besar	2.000.000	2.077.717.350	40.400.000	0	0	2.118.117.350	2.000.000	1.795.377.700	40.400.000	0	0	1.835.777.700
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Padang Laweh	0	1.407.358.950	99.950.000	0	0	1.507.308.950	0	1.215.320.250	59.450.000	0	0	1.274.770.250
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tiumang	1.250.000	1.740.121.650	14.000.000	0	0	1.754.121.650	0	1.285.791.300	5.500.000	0	0	1.291.291.300
8			**UNSUR PEMERINTAHAN**	**0**	**5.381.827.580**	**0**	**0**	**0**	**5.381.827.580**	**0**	**16.652.056.380**	**0**	**0**	**0**	**16.652.056.380**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			UMUM												
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**0**	**5.381.827.580**	**0**	**0**	**0**	**5.381.827.580**	**0**	**16.652.056.380**	**0**	**0**	**0**	**16.652.056.380**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5.381.827.580	0	0	0	5.381.827.580	0	16.652.056.380	0	0	0	16.652.056.380
			TOTAL	916.848.794.390	766.159.260.882	151.236.483.671	1.000.000.000	110.982.394.000	1.029.378.138.553	941.855.386.005	714.730.300.737	152.416.828.609	4.154.380.709	140.866.408.030	982.267.918.085

Bupati Dharmasraya

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PENDIDIKAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**45.750.000**	**45.750.000**	**0**	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	45.750.000	45.750.000	0	
Jumlah Pendapatan		**45.750.000**	**45.750.000**	**0**	
0 00 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**308.247.201.000**	**303.644.294.336**	**(4.602.906.664)**	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**54.850.179.244**	**86.063.207.582**	**31.213.028.338**	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**26.555.549.360**	**40.441.393.059**	**13.885.843.699**	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	672.234.360	13.317.906.380	12.645.672.020	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	0	2.058.997.920	2.058.997.920	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01	Belanja Pegawai	0	31.500.000	31.500.000	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.027.497.920	2.027.497.920	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	672.234.360	11.258.908.460	10.586.674.100	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3.084.700.000	3.084.700.000	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	672.234.360	8.174.208.460	7.501.974.100	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.561.681.300	1.906.681.280	344.999.980	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	0	4.943.400	4.943.400	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.943.400	4.943.400	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2	BELANJA MODAL	1.561.681.300	1.901.737.880	340.056.580	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000	129.000.000	4.000.000	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.436.681.300	1.772.737.880	336.056.580	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	167.132.700	167.132.700	0	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2	BELANJA MODAL	167.132.700	167.132.700	0	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.132.700	137.132.700	0	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000	30.000.000	0	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	16.506.000	670.000	(15.836.000)	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1	BELANJA OPERASI	16.506.000	670.000	(15.836.000)	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.506.000	670.000	(15.836.000)	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22.000.000	2.462.000	(19.538.000)	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1	BELANJA OPERASI	22.000.000	2.462.000	(19.538.000)	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	2.462.000	(19.538.000)	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15.980.000	9.934.000	(6.046.000)	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1	BELANJA OPERASI	15.980.000	9.934.000	(6.046.000)	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000	9.934.000	(6.046.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.100.015.000	25.036.606.699	936.591.699	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1			BELANJA OPERASI	18.287.629.412	20.525.137.886	2.237.508.474	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.287.629.412	17.258.337.886	(1.029.291.526)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	05		Belanja Hibah	0	3.266.800.000	3.266.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2			BELANJA MODAL	5.812.385.588	4.511.468.813	(1.300.916.775)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.802.181.099	2.589.503.488	(212.677.611)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.010.204.489	1.921.965.325	(1.088.239.164)	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**21.366.694.644**	**34.040.725.403**	**12.674.030.759**	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.582.380.489	12.881.590.040	10.299.209.551	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1			BELANJA OPERASI	940.000.000	4.657.208.476	3.717.208.476	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	3.907.208.476	3.847.208.476	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	05		Belanja Hibah	880.000.000	750.000.000	(130.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2			BELANJA MODAL	1.642.380.489	8.224.381.564	6.582.001.075	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.343.800.249	3.029.300.249	1.685.500.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	298.580.240	5.195.081.315	4.896.501.075	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.885.578.755	8.501.326.140	615.747.385	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1			BELANJA OPERASI	0	4.330.000	4.330.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	4.330.000	4.330.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2			BELANJA MODAL	7.885.578.755	8.496.996.140	611.417.385	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.885.578.755	8.496.996.140	611.417.385	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	18.314.400	3.170.000	(15.144.400)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1			BELANJA OPERASI	18.314.400	3.170.000	(15.144.400)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.314.400	3.170.000	(15.144.400)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22.000.000	1.070.000	(20.930.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1			BELANJA OPERASI	22.000.000	1.070.000	(20.930.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	1.070.000	(20.930.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	39					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.543.000	101.917.900	89.374.900	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1			BELANJA OPERASI	12.543.000	101.917.900	89.374.900	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.543.000	101.917.900	89.374.900	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.593.000	2.643.878.800	2.618.285.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1			BELANJA OPERASI	25.593.000	2.643.878.800	2.618.285.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	25.593.000	2.643.878.800	2.618.285.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.820.285.000	9.907.772.523	(912.512.477)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1			BELANJA OPERASI	7.639.785.000	8.021.603.324	381.818.324	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.639.785.000	7.360.903.324	(278.881.676)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	05		Belanja Hibah	0	660.700.000	660.700.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	2			BELANJA MODAL	3.180.500.000	1.886.169.199	(1.294.330.801)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.350.500.000	1.155.754.699	(194.745.301)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.830.000.000	730.414.500	(1.099.585.500)	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**5.901.135.240**	**10.554.289.120**	**4.653.153.880**	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	98.580.240	1.436.711.920	1.338.131.680	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	0	641.648.800	641.648.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	641.648.800	641.648.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	2			BELANJA MODAL	98.580.240	795.063.120	696.482.880	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.580.240	795.063.120	696.482.880	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.669.134.000	2.674.818.800	1.005.684.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	80.000.000	1.501.084.000	1.421.084.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	1.501.084.000	1.501.084.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	05		Belanja Hibah	80.000.000	0	(80.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2			BELANJA MODAL	1.589.134.000	1.173.734.800	(415.399.200)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	541.860.800	541.860.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.589.134.000	631.874.000	(957.260.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09					Pengadaan Perlengkapan PAUD	61.920.600	0	(61.920.600)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	1			BELANJA OPERASI	61.920.600	0	(61.920.600)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	61.920.600	0	(61.920.600)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.971.400.000	5.173.774.000	1.202.374.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	5	1			BELANJA OPERASI	3.971.400.000	5.173.774.000	1.202.374.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	531.600.000	1.300.374.000	768.774.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	5	1	05		Belanja Hibah	3.439.800.000	3.873.400.000	433.600.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	15					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	10.000.000	82.086.000	72.086.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000	82.086.000	72.086.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	15	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	82.086.000	72.086.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30.000.000	769.800.000	739.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1			BELANJA OPERASI	30.000.000	769.800.000	739.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	769.800.000	739.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	60.100.400	417.098.400	356.998.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1			BELANJA OPERASI	60.100.400	417.098.400	356.998.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	60.100.400	417.098.400	356.998.000	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.026.800.000**	**1.026.800.000**	**0**	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.006.800.000	1.006.800.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10	5	1			BELANJA OPERASI	1.006.800.000	1.006.800.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	232.200.000	232.200.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10	5	1	05		Belanja Hibah	774.600.000	774.600.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	14					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	10.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	14	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	15					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	10.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**25.190.000**	**225.190.000**	**200.000.000**	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**25.190.000**	**225.190.000**	**200.000.000**	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.190.000	225.190.000	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	25.190.000	225.190.000	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	25.190.000	225.190.000	200.000.000	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**81.850.000**	**231.850.000**	**150.000.000**	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**					**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**81.850.000**	**231.850.000**	**150.000.000**	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81.850.000	231.850.000	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	81.850.000	231.850.000	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	81.850.000	231.850.000	150.000.000	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**253.289.981.756**	**217.124.046.754**	**(36.165.935.002)**	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**246.287.482.876**	**211.563.531.274**	**(34.723.951.602)**	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	246.287.482.876	211.563.531.274	(34.723.951.602)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	246.287.482.876	211.563.531.274	(34.723.951.602)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	246.287.482.876	211.563.531.274	(34.723.951.602)	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**314.581.200**	**212.403.300**	**(102.177.900)**	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000	5.991.000	(1.209.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	7.200.000	5.991.000	(1.209.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.200.000	5.991.000	(1.209.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	39.335.000	(10.665.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	50.000.000	39.335.000	(10.665.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	39.335.000	(10.665.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.499.400	8.994.400	(4.505.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.499.400	8.994.400	(4.505.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.499.400	8.994.400	(4.505.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	19.000.000	(8.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.000.000	19.000.000	(8.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	19.000.000	(8.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.839.800	45.708.500	(11.131.300)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	56.839.800	45.708.500	(11.131.300)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	56.839.800	45.708.500	(11.131.300)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.042.000	93.374.400	(66.667.600)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	160.042.000	93.374.400	(66.667.600)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	160.042.000	93.374.400	(66.667.600)	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.537.875.600**	**5.198.070.100**	**(1.339.805.500)**	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000	143.000.000	(3.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	146.000.000	143.000.000	(3.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	146.000.000	143.000.000	(3.000.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.020.000	5.120.000	(3.900.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	9.020.000	5.120.000	(3.900.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.020.000	5.120.000	(3.900.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.378.855.600	5.047.950.100	(1.330.905.500)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	6.378.855.600	5.047.950.100	(1.330.905.500)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.378.855.600	5.047.950.100	(1.330.905.500)	
1	**01**	**1.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.042.080**	**150.042.080**	**0**	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.500.000	42.500.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	42.500.000	42.500.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	42.500.000	42.500.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.542.080	107.542.080	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2			BELANJA MODAL	107.542.080	107.542.080	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.542.080	107.542.080	0	
	Jumlah Belanja	**308.247.201.000**	**303.644.294.336**	**(4.602.906.664)**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(308.201.451.000)**	**(303.598.544.336)**	**4.602.906.664**	
0 00 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KESEHATAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**58.680.000**	**58.680.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	58.680.000	58.680.000	0	
	Jumlah Pendapatan	**58.680.000**	**58.680.000**	**0**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**88.796.011.900**	**77.569.904.416**	**(11.226.107.484)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**19.060.225.400**	**19.945.463.900**	**885.238.500**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.941.908.400**	**5.933.845.500**	**(8.062.900)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.001.000	50.001.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2	BELANJA MODAL	50.001.000	50.001.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.001.000	50.001.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000	491.945.100	(8.054.900)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1	BELANJA OPERASI	83.360.000	75.305.100	(8.054.900)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.360.000	75.305.100	(8.054.900)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2	BELANJA MODAL	416.640.000	416.640.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000	300.000.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.640.000	116.640.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.587.986.000	1.587.986.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2	BELANJA MODAL	1.587.986.000	1.587.986.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.587.986.000	1.587.986.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.446.173.000	1.446.173.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1	BELANJA OPERASI	1.446.173.000	1.446.173.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.446.173.000	1.446.173.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.275.094.000	2.275.094.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1	BELANJA OPERASI	2.275.094.000	2.275.094.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.275.094.000	2.275.094.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	82.654.400	82.646.400	(8.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1	BELANJA OPERASI	82.654.400	82.646.400	(8.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.654.400	82.646.400	(8.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**13.013.052.000**	**13.957.203.600**	**944.151.600**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.995.500	43.995.500	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	43.995.500	43.995.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	43.995.500	43.995.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210.878.900	191.993.600	(18.885.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	210.878.900	191.993.600	(18.885.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	210.878.900	191.993.600	(18.885.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	180.000.000	179.999.000	(1.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	180.000.000	179.999.000	(1.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	179.999.000	(1.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51.800.000	51.800.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1			BELANJA OPERASI	51.800.000	51.800.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	51.800.000	51.800.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.003.400	43.003.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	43.003.400	43.003.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	43.003.400	43.003.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60.000.000	60.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1			BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.000.200	39.000.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	39.000.200	39.000.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	39.000.200	39.000.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	164.520.000	164.520.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1			BELANJA OPERASI	164.520.000	164.520.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	164.520.000	164.520.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	320.047.725	320.047.725	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1			BELANJA OPERASI	320.047.725	320.047.725	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	320.047.725	320.047.725	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000	50.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1			BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	135.330.000	135.330.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1			BELANJA OPERASI	135.330.000	135.330.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	135.330.000	135.330.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	56.300.000	56.300.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1			BELANJA OPERASI	56.300.000	56.300.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	56.300.000	56.300.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	400.000.000	0	(400.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1			BELANJA OPERASI	400.000.000	0	(400.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	0	(400.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.210.000	28.210.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5	1			BELANJA OPERASI	28.210.000	28.210.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.210.000	28.210.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	406.872.000	386.397.000	(20.475.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	1			BELANJA OPERASI	406.872.000	386.397.000	(20.475.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	406.872.000	386.397.000	(20.475.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56.060.000	56.060.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5	1			BELANJA OPERASI	56.060.000	56.060.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	56.060.000	56.060.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	351.776.000	351.776.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5	1			BELANJA OPERASI	351.776.000	351.776.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	351.776.000	351.776.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.170.000	87.170.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1			BELANJA OPERASI	87.170.000	87.170.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	87.170.000	87.170.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.500.000.000	10.624.852.800	1.124.852.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5	1			BELANJA OPERASI	9.500.000.000	10.624.852.800	1.124.852.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.500.000.000	10.624.852.800	1.124.852.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	180.000.000	138.660.100	(41.339.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5	1			BELANJA OPERASI	180.000.000	138.660.100	(41.339.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	138.660.100	(41.339.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	280.515.000	580.515.000	300.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1			BELANJA OPERASI	280.515.000	580.515.000	300.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	280.515.000	580.515.000	300.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	82.840.000	82.840.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1			BELANJA OPERASI	82.840.000	82.840.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	82.840.000	82.840.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	61.100.000	61.100.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1			BELANJA OPERASI	61.100.000	61.100.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.100.000	61.100.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	223.633.275	223.633.275	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1		BELANJA OPERASI	223.633.275	223.633.275	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	223.633.275	223.633.275	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**105.265.000**	**54.414.800**	**(50.850.200)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	105.265.000	54.414.800	(50.850.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	105.265.000	54.414.800	(50.850.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.265.000	54.414.800	(50.850.200)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.529.998.000**	**1.762.597.000**	**232.599.000**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**143.385.000**	**0**	**(143.385.000)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	143.385.000	0	(143.385.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	143.385.000	0	(143.385.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	143.385.000	0	(143.385.000)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**128.419.000**	**271.804.000**	**143.385.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	104.839.000	0	(104.839.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	104.839.000	0	(104.839.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.839.000	0	(104.839.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.580.000	271.804.000	248.224.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	23.580.000	271.804.000	248.224.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.580.000	271.804.000	248.224.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.258.194.000**	**1.490.793.000**	**232.599.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.258.194.000	1.490.793.000	232.599.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.258.194.000	1.490.793.000	232.599.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.258.194.000	1.490.793.000	232.599.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**402.648.000**	**402.648.000**	**0**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**83.690.000**	**83.690.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.690.000	83.690.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	83.690.000	83.690.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	83.690.000	83.690.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.03**	**00**					**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**318.958.000**	**318.958.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	318.958.000	318.958.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	318.958.000	318.958.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	318.958.000	318.958.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**170.000.000**	**170.000.000**	**0**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.02**	**00**					**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**98.520.000**	**0**	**(98.520.000)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	98.520.000	0	(98.520.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	98.520.000	0	(98.520.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	98.520.000	0	(98.520.000)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.03**	**00**					**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**71.480.000**	**170.000.000**	**98.520.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	71.480.000	170.000.000	98.520.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	71.480.000	170.000.000	98.520.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	71.480.000	170.000.000	98.520.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**67.633.140.500**	**55.289.195.516**	**(12.343.944.984)**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**357.991.200**	**46.247.000**	**(311.744.200)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	357.991.200	46.247.000	(311.744.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	357.991.200	46.247.000	(311.744.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	357.991.200	46.247.000	(311.744.200)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63.303.550.200**	**51.629.232.728**	**(11.674.317.472)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.166.180.500	51.608.234.128	(11.557.946.372)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	63.166.180.500	51.608.234.128	(11.557.946.372)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	62.866.180.500	51.608.234.128	(11.257.946.372)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	0	(300.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	98.664.900	14.406.000	(84.258.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	98.664.900	14.406.000	(84.258.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	98.664.900	14.406.000	(84.258.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.900.000	0	(25.900.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	25.900.000	0	(25.900.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000	0	(25.900.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.804.800	6.592.600	(6.212.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	12.804.800	6.592.600	(6.212.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.804.800	6.592.600	(6.212.200)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**62.358.000**	**18.448.900**	**(43.909.100)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	03				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	27.427.000	11.768.600	(15.658.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	27.427.000	11.768.600	(15.658.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.427.000	11.768.600	(15.658.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12.031.000	6.680.300	(5.350.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	12.031.000	6.680.300	(5.350.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.031.000	6.680.300	(5.350.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	05				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.900.000	0	(22.900.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	22.900.000	0	(22.900.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000	0	(22.900.000)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**140.003.700**	**48.069.800**	**(91.933.900)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	03				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.600.000	0	(3.600.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.600.000	0	(3.600.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000	0	(3.600.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.247.200	6.337.900	(3.909.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	10.247.200	6.337.900	(3.909.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.247.200	6.337.900	(3.909.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	05				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.366.500	4.266.200	(3.100.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.366.500	4.266.200	(3.100.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.366.500	4.266.200	(3.100.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.030.000	27.598.600	(72.431.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.030.000	27.598.600	(72.431.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.030.000	27.598.600	(72.431.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.011.000	8.117.100	(3.893.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1		BELANJA OPERASI	12.011.000	8.117.100	(3.893.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.011.000	8.117.100	(3.893.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.749.000	1.750.000	(4.999.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1		BELANJA OPERASI	6.749.000	1.750.000	(4.999.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.749.000	1.750.000	(4.999.000)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**218.590.900**	**247.523.500**	**28.932.600**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.190.500	4.190.500	(3.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	7.190.500	4.190.500	(3.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.190.500	4.190.500	(3.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	34.479.000	(1.521.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	36.000.000	34.479.000	(1.521.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	34.479.000	(1.521.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.480.000	13.370.500	(109.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.480.000	13.370.500	(109.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.480.000	13.370.500	(109.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.020.000	10.537.000	(16.483.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.020.000	10.537.000	(16.483.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.020.000	10.537.000	(16.483.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.905.000	34.375.000	(1.530.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	35.905.000	34.375.000	(1.530.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	35.905.000	34.375.000	(1.530.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.995.400	150.571.500	51.576.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	98.995.400	150.571.500	51.576.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	98.995.400	150.571.500	51.576.100	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.498.146.500**	**3.247.173.588**	**(250.972.912)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.998.900	84.949.000	(25.049.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	109.998.900	84.949.000	(25.049.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	109.998.900	84.949.000	(25.049.900)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.600.000	10.600.000	(3.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.600.000	10.600.000	(3.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.600.000	10.600.000	(3.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.370.547.600	3.147.624.588	(222.923.012)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	3.370.547.600	3.147.624.588	(222.923.012)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.370.547.600	3.147.624.588	(222.923.012)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.500.000**	**52.500.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	12.500.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	12.500.000	12.500.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.500.000	12.500.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	40.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
										Jumlah Belanja	**88.796.011.900**	**77.569.904.416**	**(11.226.107.484)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(88.737.331.900)**	**(77.511.224.416)**	**11.226.107.484**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

LAMPIRAN III

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

RSUD SUNGAI RUMBAI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.600.000.000	6.600.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	6.600.000.000	6.600.000.000	0	
										Jumlah Pendapatan	6.600.000.000	6.600.000.000	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0001	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	7.845.000.000	7.311.866.142	(533.133.858)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.245.000.000	709.800.000	(535.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.245.000.000	709.800.000	(535.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	32					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.245.000.000	709.800.000	(535.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	32	5	1			BELANJA OPERASI	1.050.000.000	514.800.000	(535.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	32	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000	514.800.000	(535.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	32	5	2			BELANJA MODAL	195.000.000	195.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	32	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.000.000	195.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.600.000.000	6.602.066.142	2.066.142	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	00					Peningkatan Pelayanan BLUD	6.600.000.000	6.602.066.142	2.066.142	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	01					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.600.000.000	6.602.066.142	2.066.142	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	01	5	1			BELANJA OPERASI	5.910.573.600	5.912.639.742	2.066.142	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	01	5	1	01		Belanja Pegawai	978.400.000	903.900.000	(74.500.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.932.173.600	5.008.739.742	76.566.142	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	01	5	2			BELANJA MODAL	689.426.400	689.426.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	01	5	2	06		Belanja Modal Aset Lainnya	689.426.400	689.426.400	0	
										Jumlah Belanja	7.845.000.000	7.311.866.142	(533.133.858)	
										Total Surplus/(Defisit)	(1.245.000.000)	(711.866.142)	533.133.858	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0001	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas sungai Rumbai

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**330.000.000**	**260.000.000**	**(70.000.000)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	330.000.000	260.000.000	(70.000.000)	
Jumlah Pendapatan		**330.000.000**	**260.000.000**	**(70.000.000)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.065.325.600**	**2.152.526.541**	**87.200.941**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.199.378.600**	**1.199.378.600**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.199.378.600**	**1.199.378.600**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.199.378.600	1.199.378.600	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	1.199.378.600	1.199.378.600	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.199.378.600	1.199.378.600	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**865.947.000**	**953.147.941**	**87.200.941**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**865.947.000**	**953.147.941**	**87.200.941**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	865.947.000	953.147.941	87.200.941	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	826.947.000	919.097.941	92.150.941	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	404.706.376	504.706.376	100.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	422.240.624	414.391.565	(7.849.059)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	39.000.000	34.050.000	(4.950.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000	34.050.000	(4.950.000)	
Jumlah Belanja		**2.065.325.600**	**2.152.526.541**	**87.200.941**	
Total Surplus/(Defisit)		**(1.735.325.600)**	**(1.892.526.541)**	**(157.200.941)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS KOTO BESAR

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Koto Besar

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.080.000	98.000.000	(42.080.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	140.080.000	98.000.000	(42.080.000)	
										Jumlah Pendapatan	140.080.000	98.000.000	(42.080.000)	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0003	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.038.112.916	2.244.738.105	206.625.189	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.324.738.000	1.324.738.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.324.738.000	1.324.738.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	33					Operasional Pelayanan Puskesmas	1.324.738.000	1.324.738.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	33	5	1			BELANJA OPERASI	1.324.738.000	1.324.738.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	33	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.324.738.000	1.324.738.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	713.374.916	920.000.105	206.625.189	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	2.10	00					Peningkatan Pelayanan BLUD	713.374.916	920.000.105	206.625.189	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	2.10	01					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	713.374.916	920.000.105	206.625.189	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	2.10	01	5	1			BELANJA OPERASI	698.374.916	903.000.105	204.625.189	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	2.10	01	5	1	01		Belanja Pegawai	247.800.000	308.835.000	61.035.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	2.10	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	450.574.916	594.165.105	143.590.189	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	2.10	01	5	2			BELANJA MODAL	15.000.000	17.000.000	2.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	2.10	01	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000	17.000.000	10.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	2.10	01	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.000.000	0	(8.000.000)	
										Jumlah Belanja	2.038.112.916	2.244.738.105	206.625.189	
										Total Surplus/(Defisit)	(1.898.032.916)	(2.146.738.105)	(248.705.189)	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0003	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS SUNGAI LIMAU

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Sungai Limau

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**220.640.000**	**168.085.000**	**(52.555.000)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	220.640.000	168.085.000	(52.555.000)	
	Jumlah Pendapatan	**220.640.000**	**168.085.000**	**(52.555.000)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.669.826.000**	**1.523.787.745**	**(146.038.255)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.100.086.000**	**1.100.086.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.100.086.000**	**1.100.086.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.100.086.000	1.100.086.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	1.100.086.000	1.100.086.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.086.000	1.100.086.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**569.740.000**	**423.701.745**	**(146.038.255)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**569.740.000**	**423.701.745**	**(146.038.255)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	569.740.000	423.701.745	(146.038.255)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	526.040.000	410.701.745	(115.338.255)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	144.700.000	124.700.000	(20.000.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	381.340.000	286.001.745	(95.338.255)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	43.700.000	13.000.000	(30.700.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.700.000	13.000.000	(30.700.000)	
	Jumlah Belanja	**1.669.826.000**	**1.523.787.745**	**(146.038.255)**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.449.186.000)**	**(1.355.702.745)**	**93.483.255**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS KOTO BARU

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Koto Baru

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**478.178.000**	**613.566.500**	**135.388.500**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	478.178.000	613.566.500	135.388.500	
	Jumlah Pendapatan	**478.178.000**	**613.566.500**	**135.388.500**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.662.770.000**	**3.174.059.920**	**511.289.920**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**709.960.000**	**1.227.325.000**	**517.365.000**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**709.960.000**	**1.227.325.000**	**517.365.000**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	709.960.000	1.227.325.000	517.365.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	709.960.000	1.227.325.000	517.365.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	709.960.000	1.227.325.000	517.365.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.952.810.000**	**1.946.734.920**	**(6.075.080)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.952.810.000**	**1.946.734.920**	**(6.075.080)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.952.810.000	1.946.734.920	(6.075.080)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.894.271.800	1.848.196.720	(46.075.080)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	649.600.115	709.600.115	60.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.244.671.685	1.138.596.605	(106.075.080)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	58.538.200	98.538.200	40.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	98.538.200	98.538.200	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	58.538.200	0	(58.538.200)	
	Jumlah Belanja	**2.662.770.000**	**3.174.059.920**	**511.289.920**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(2.184.592.000)**	**(2.560.493.420)**	**(375.901.420)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS TIUMANG

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Tiumang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**76.335.000**	**100.000.000**	**23.665.000**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	76.335.000	100.000.000	23.665.000	
	Jumlah Pendapatan	**76.335.000**	**100.000.000**	**23.665.000**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.344.108.800**	**1.575.312.525**	**231.203.725**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.005.580.000**	**1.005.580.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.005.580.000**	**1.005.580.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.005.580.000	1.005.580.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	1.005.580.000	1.005.580.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.580.000	1.005.580.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**338.528.800**	**569.732.525**	**231.203.725**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**338.528.800**	**569.732.525**	**231.203.725**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	338.528.800	569.732.525	231.203.725	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	328.528.800	539.732.525	211.203.725	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	152.700.000	229.200.000	76.500.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	175.828.800	310.532.525	134.703.725	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000	30.000.000	20.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	30.000.000	30.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	0	(10.000.000)	
	Jumlah Belanja	**1.344.108.800**	**1.575.312.525**	**231.203.725**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.267.773.800)**	**(1.475.312.525)**	**(207.538.725)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS PADANG LAWEH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Padang Laweh

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**231.000.000**	**165.515.700**	**(65.484.300)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	231.000.000	165.515.700	(65.484.300)	
	Jumlah Pendapatan	**231.000.000**	**165.515.700**	**(65.484.300)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.249.484.500**	**1.207.555.758**	**(41.928.742)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**802.484.500**	**802.484.500**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**802.484.500**	**802.484.500**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	802.484.500	802.484.500	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	802.484.500	802.484.500	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	802.484.500	802.484.500	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**447.000.000**	**405.071.258**	**(41.928.742)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**447.000.000**	**405.071.258**	**(41.928.742)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	447.000.000	405.071.258	(41.928.742)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	427.000.000	390.071.258	(36.928.742)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	152.000.000	138.100.000	(13.900.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	251.971.258	(23.028.742)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)	
	Jumlah Belanja	**1.249.484.500**	**1.207.555.758**	**(41.928.742)**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.018.484.500)**	**(1.042.040.058)**	**(23.555.558)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS SITIUNG I

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Sitiung I

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**495.955.100**	**480.728.608**	**(15.226.492)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	495.955.100	480.728.608	(15.226.492)	
	Jumlah Pendapatan	**495.955.100**	**480.728.608**	**(15.226.492)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.126.262.300**	**2.380.905.000**	**254.642.700**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.080.905.000**	**1.080.905.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.080.905.000**	**1.080.905.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.080.905.000	1.080.905.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.905.000	1.080.905.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.905.000	1.080.905.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.045.357.300**	**1.300.000.000**	**254.642.700**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.045.357.300**	**1.300.000.000**	**254.642.700**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.045.357.300	1.300.000.000	254.642.700	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	955.357.300	1.230.000.000	274.642.700	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	400.000.000	561.000.000	161.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	555.357.300	669.000.000	113.642.700	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	90.000.000	70.000.000	(20.000.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000	70.000.000	(20.000.000)	
	Jumlah Belanja	**2.126.262.300**	**2.380.905.000**	**254.642.700**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.630.307.200)**	**(1.900.176.392)**	**(269.869.192)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS TIMPEH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Timpeh

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**196.380.000**	**216.380.000**	**20.000.000**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	196.380.000	216.380.000	20.000.000	
	Jumlah Pendapatan	**196.380.000**	**216.380.000**	**20.000.000**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.579.615.000**	**1.618.931.718**	**39.316.718**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.002.375.000**	**1.002.375.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.002.375.000**	**1.002.375.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.002.375.000	1.002.375.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	1.002.375.000	1.002.375.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.375.000	1.002.375.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**577.240.000**	**616.556.718**	**39.316.718**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**577.240.000**	**616.556.718**	**39.316.718**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	577.240.000	616.556.718	39.316.718	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	567.240.000	606.556.718	39.316.718	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	204.764.000	268.217.769	63.453.769	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	362.476.000	338.338.949	(24.137.051)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000	10.000.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	0	
	Jumlah Belanja	**1.579.615.000**	**1.618.931.718**	**39.316.718**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.383.235.000)**	**(1.402.551.718)**	**(19.316.718)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS GUNUNG MEDAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Gunung Medan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**121.000.000**	**125.000.000**	**4.000.000**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	121.000.000	125.000.000	4.000.000	
	Jumlah Pendapatan	**121.000.000**	**125.000.000**	**4.000.000**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.443.790.000**	**1.481.792.534**	**38.002.534**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**801.790.000**	**801.790.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**801.790.000**	**801.790.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	801.790.000	801.790.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	801.790.000	801.790.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	801.790.000	801.790.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**642.000.000**	**680.002.534**	**38.002.534**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**642.000.000**	**680.002.534**	**38.002.534**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	642.000.000	680.002.534	38.002.534	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	625.000.000	674.002.534	49.002.534	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	282.400.000	337.176.000	54.776.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	342.600.000	336.826.534	(5.773.466)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	17.000.000	6.000.000	(11.000.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000	6.000.000	(11.000.000)	
	Jumlah Belanja	**1.443.790.000**	**1.481.792.534**	**38.002.534**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.322.790.000)**	**(1.356.792.534)**	**(34.002.534)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS SITIUNG II

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Situng II

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**104.692.500**	**138.452.600**	**33.760.100**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	104.692.500	138.452.600	33.760.100	
	Jumlah Pendapatan	**104.692.500**	**138.452.600**	**33.760.100**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.500.111.500**	**1.626.022.998**	**125.911.498**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**802.591.000**	**802.591.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**802.591.000**	**802.591.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	802.591.000	802.591.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	802.591.000	802.591.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	802.591.000	802.591.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**697.520.500**	**823.431.998**	**125.911.498**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**697.520.500**	**823.431.998**	**125.911.498**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	697.520.500	823.431.998	125.911.498	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	635.360.500	761.271.998	125.911.498	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	282.435.564	283.206.983	771.419	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	352.924.936	478.065.015	125.140.079	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	62.160.000	62.160.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.160.000	62.160.000	0	
	Jumlah Belanja	**1.500.111.500**	**1.626.022.998**	**125.911.498**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.395.419.000)**	**(1.487.570.398)**	**(92.151.398)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS BERINGIN SAKTI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Beringin Sakti

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**43.500.000**	**54.145.800**	**10.645.800**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	43.500.000	54.145.800	10.645.800	
	Jumlah Pendapatan	**43.500.000**	**54.145.800**	**10.645.800**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**917.829.700**	**981.133.930**	**63.304.230**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**699.104.700**	**699.104.700**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**699.104.700**	**699.104.700**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	699.104.700	699.104.700	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	699.104.700	699.104.700	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	699.104.700	699.104.700	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**218.725.000**	**282.029.230**	**63.304.230**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**218.725.000**	**282.029.230**	**63.304.230**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	218.725.000	282.029.230	63.304.230	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	203.725.000	267.209.230	63.484.230	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	74.800.000	127.800.000	53.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	128.925.000	139.409.230	10.484.230	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	15.000.000	14.820.000	(180.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	14.820.000	(180.000)	
	Jumlah Belanja	**917.829.700**	**981.133.930**	**63.304.230**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(874.329.700)**	**(926.988.130)**	**(52.658.430)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS SILAGO

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Silago

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**245.570.400**	**258.033.934**	**12.463.534**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	245.570.400	258.033.934	12.463.534	
	Jumlah Pendapatan	**245.570.400**	**258.033.934**	**12.463.534**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.669.378.400**	**1.773.638.142**	**104.259.742**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**906.351.000**	**906.319.000**	**(32.000)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**906.351.000**	**906.319.000**	**(32.000)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	906.351.000	906.319.000	(32.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	906.351.000	906.319.000	(32.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	906.351.000	906.319.000	(32.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**763.027.400**	**867.319.142**	**104.291.742**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**763.027.400**	**867.319.142**	**104.291.742**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	763.027.400	867.319.142	104.291.742	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	737.027.400	838.319.142	101.291.742	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	394.400.000	450.642.140	56.242.140	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	342.627.400	387.677.002	45.049.602	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	26.000.000	29.000.000	3.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	20.000.000	5.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	11.000.000	9.000.000	(2.000.000)	
	Jumlah Belanja	**1.669.378.400**	**1.773.638.142**	**104.259.742**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.423.808.000)**	**(1.515.604.208)**	**(91.796.208)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS SUNGAI DAREH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Sungai Dareh

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**167.232.000**	**167.232.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	167.232.000	167.232.000	0	
Jumlah Pendapatan		**167.232.000**	**167.232.000**	**0**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.542.874.064**	**2.989.291.539**	**446.417.475**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.199.140.064**	**1.199.136.000**	**(4.064)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.199.140.064**	**1.199.136.000**	**(4.064)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.199.140.064	1.199.136.000	(4.064)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	1.199.140.064	1.199.136.000	(4.064)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.199.140.064	1.199.136.000	(4.064)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.343.734.000**	**1.790.155.539**	**446.421.539**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.343.734.000**	**1.790.155.539**	**446.421.539**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.343.734.000	1.790.155.539	446.421.539	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.202.173.320	1.660.105.539	457.932.219	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	624.333.514	867.922.864	243.589.350	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	577.839.806	792.182.675	214.342.869	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	141.560.680	130.050.000	(11.510.680)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.560.680	130.050.000	(11.510.680)	
Jumlah Belanja		**2.542.874.064**	**2.989.291.539**	**446.417.475**	
Total Surplus/(Defisit)		**(2.375.642.064)**	**(2.822.059.539)**	**(446.417.475)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PUSKESMAS SIALANG

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Puskesmas Sialang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**75.500.000**	**55.369.000**	**(20.131.000)**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	75.500.000	55.369.000	(20.131.000)	
	Jumlah Pendapatan	**75.500.000**	**55.369.000**	**(20.131.000)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.217.214.000**	**1.423.463.103**	**206.249.103**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**794.805.000**	**794.805.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**794.805.000**	**794.805.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	794.805.000	794.805.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	794.805.000	794.805.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	794.805.000	794.805.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**422.409.000**	**628.658.103**	**206.249.103**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**422.409.000**	**628.658.103**	**206.249.103**	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	422.409.000	628.658.103	206.249.103	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	412.409.000	603.658.103	191.249.103	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	237.800.000	300.961.988	63.161.988	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	174.609.000	302.696.115	128.087.115	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000	25.000.000	15.000.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	25.000.000	15.000.000	
	Jumlah Belanja	**1.217.214.000**	**1.423.463.103**	**206.249.103**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.141.714.000)**	**(1.368.094.103)**	**(226.380.103)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Laboratorium Kesehatan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	275.000.000	275.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	275.000.000	275.000.000	0	
										Jumlah Pendapatan	275.000.000	275.000.000	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0017	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	425.000.000	399.090.750	(25.909.250)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	150.000.000	124.090.750	(25.909.250)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	124.090.750	(25.909.250)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	34					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	150.000.000	124.090.750	(25.909.250)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	34	5	1			BELANJA OPERASI	145.000.000	119.090.750	(25.909.250)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	34	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	145.000.000	119.090.750	(25.909.250)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	34	5	2			BELANJA MODAL	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	34	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	275.000.000	275.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	01	2.10	00					Peningkatan Pelayanan BLUD	275.000.000	275.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	01	2.10	01					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	275.000.000	275.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	01	2.10	01	5	1			BELANJA OPERASI	275.000.000	275.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	01	2.10	01	5	1	01		Belanja Pegawai	137.500.000	137.500.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	01	2.10	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	137.500.000	137.500.000	0	
										Jumlah Belanja	425.000.000	399.090.750	(25.909.250)	
										Total Surplus/(Defisit)	(150.000.000)	(124.090.750)	25.909.250	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0017	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

RSUD SUNGAI DAREH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**45.010.000.000**	**50.016.900.000**	**5.006.900.000**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	10.000.000	16.900.000	6.900.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	45.000.000.000	50.000.000.000	5.000.000.000	
Jumlah Pendapatan		**45.010.000.000**	**50.016.900.000**	**5.006.900.000**	
0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**107.862.622.699**	**108.801.706.685**	**939.083.986**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**79.226.694.849**	**85.885.194.051**	**6.658.499.202**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**33.026.694.849**	**33.026.694.849**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	14.128.830.849	14.128.830.849	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2	BELANJA MODAL	14.128.830.849	14.128.830.849	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.128.830.849	14.128.830.849	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	449.440.000	449.440.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 2	BELANJA MODAL	449.440.000	449.440.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	449.440.000	449.440.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.448.424.000	18.448.424.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2	BELANJA MODAL	18.448.424.000	18.448.424.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.448.424.000	18.448.424.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**46.200.000.000**	**52.858.499.202**	**6.658.499.202**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.200.000.000	0	(1.200.000.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	0	(1.200.000.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000	0	(1.200.000.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	45.000.000.000	52.858.499.202	7.858.499.202	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1	BELANJA OPERASI	40.677.470.000	50.681.525.193	10.004.055.193	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 01	Belanja Pegawai	15.750.000.000	19.014.445.301	3.264.445.301	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.927.470.000	31.667.079.892	6.739.609.892	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2	BELANJA MODAL	4.322.530.000	2.176.974.009	(2.145.555.991)	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.822.530.000	1.766.974.009	(2.055.555.991)	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000	220.000.000	(30.000.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000	190.000.000	(60.000.000)	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**28.635.927.850**	**22.916.512.634**	**(5.719.415.216)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**28.635.927.850**	**22.916.512.634**	**(5.719.415.216)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.635.927.850	22.916.512.634	(5.719.415.216)	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.635.927.850	22.916.512.634	(5.719.415.216)	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	28.635.927.850	22.916.512.634	(5.719.415.216)	
									Jumlah Belanja	**107.862.622.699**	**108.801.706.685**	**939.083.986**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(62.852.622.699)**	**(58.784.806.685)**	**4.067.816.014**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISSA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.608.230.485**	**1.608.230.485**	**0**	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	1.608.230.485	1.608.230.485	0	
	Jumlah Pendapatan	**1.608.230.485**	**1.608.230.485**	**0**	
0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**111.858.712.326**	**83.965.494.186**	**(27.893.218.140)**	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**7.782.350.400**	**5.034.180.020**	**(2.748.170.380)**	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.604.469.400**	**1.606.303.020**	**(1.998.166.380)**	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	265.410.000	23.001.670	(242.408.330)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	44.962.000	16.501.670	(28.460.330)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01	Belanja Pegawai	12.550.000	0	(12.550.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.412.000	16.501.670	(15.910.330)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2	BELANJA MODAL	220.448.000	6.500.000	(213.948.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.500.000	6.500.000	0	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	213.948.000	0	(213.948.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.339.059.400	1.583.301.350	(1.755.758.050)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 1	BELANJA OPERASI	105.509.000	64.022.150	(41.486.850)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 1 01	Belanja Pegawai	57.400.000	50.700.000	(6.700.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.109.000	13.322.150	(34.786.850)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2	BELANJA MODAL	3.233.550.400	1.519.279.200	(1.714.271.200)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000	1.000.000	0	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.232.550.400	1.518.279.200	(1.714.271.200)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4.177.881.000**	**3.427.877.000**	**(750.004.000)**	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.479.573.000	2.229.073.000	(250.500.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1	BELANJA OPERASI	170.973.000	170.373.000	(600.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01	Belanja Pegawai	52.150.000	52.150.000	0	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	118.823.000	118.223.000	(600.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2	BELANJA MODAL	2.308.600.000	2.058.700.000	(249.900.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000	8.500.000	0	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.300.100.000	2.050.200.000	(249.900.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.698.308.000	1.198.804.000	(499.504.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1	BELANJA OPERASI	79.808.000	74.755.000	(5.053.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	1	01	Belanja Pegawai	17.200.000	17.200.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.608.000	57.555.000	(5.053.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	2		BELANJA MODAL	1.618.500.000	1.124.049.000	(494.451.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.618.500.000	1.124.049.000	(494.451.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.481.338.000**	**1.403.747.000**	**(77.591.000)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.481.338.000**	**1.403.747.000**	**(77.591.000)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	244.704.000	230.104.000	(14.600.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	244.704.000	230.104.000	(14.600.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	244.704.000	230.104.000	(14.600.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	19				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.236.634.000	1.173.643.000	(62.991.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	19	5	1		BELANJA OPERASI	1.236.634.000	1.173.643.000	(62.991.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	19	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.236.634.000	1.173.643.000	(62.991.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**33.450.000**	**33.450.000**	**0**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**33.450.000**	**33.450.000**	**0**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07				Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	33.450.000	33.450.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	33.450.000	33.450.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.450.000	33.450.000	0	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**2.621.042.000**	**2.562.156.800**	**(58.885.200)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.621.042.000**	**2.562.156.800**	**(58.885.200)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.429.707.000	2.417.707.000	(12.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.429.707.000	2.417.707.000	(12.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	7.000.000	7.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.422.707.000	2.410.707.000	(12.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	14				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	128.725.000	90.469.800	(38.255.200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	14	5	1		BELANJA OPERASI	128.725.000	90.469.800	(38.255.200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	128.725.000	90.469.800	(38.255.200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	16				Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	62.610.000	53.980.000	(8.630.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	16	5	1		BELANJA OPERASI	62.610.000	53.980.000	(8.630.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.610.000	53.980.000	(8.630.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**08**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**24.265.564.115**	**11.662.087.945**	**(12.603.476.170)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**08**	**2.01**	**00**					**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**24.265.564.115**	**11.662.087.945**	**(12.603.476.170)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01					Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	499.219.000	308.570.100	(190.648.900)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	476.719.000	308.570.100	(168.148.900)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	476.719.000	308.570.100	(168.148.900)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	22.500.000	0	(22.500.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000	0	(22.500.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	03					Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	143.396.000	100.000.000	(43.396.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	143.396.000	100.000.000	(43.396.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	143.396.000	100.000.000	(43.396.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12					Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23.622.949.115	11.253.517.845	(12.369.431.270)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5	1			BELANJA OPERASI	13.774.816.265	2.927.239.150	(10.847.577.115)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5	1	01		Belanja Pegawai	99.600.000	64.700.000	(34.900.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.675.216.265	2.862.539.150	(10.812.677.115)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5	2			BELANJA MODAL	9.848.132.850	8.326.278.695	(1.521.854.155)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000.000	1.992.500.000	(7.500.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.848.132.850	6.333.778.695	(1.514.354.155)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**10**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**58.200.716.631**	**49.520.087.421**	**(8.680.629.210)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**10**	**2.01**	**00**					**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**58.200.716.631**	**49.520.087.421**	**(8.680.629.210)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18					Rehabilitasi Jembatan	1.164.305.000	1.240.155.000	75.850.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18	5	1			BELANJA OPERASI	1.164.305.000	1.215.155.000	50.850.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.164.305.000	1.215.155.000	50.850.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18	5	2			BELANJA MODAL	0	25.000.000	25.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	25.000.000	25.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05					Pembangunan Jalan	51.772.447.631	41.821.005.921	(9.951.441.710)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	8.659.563.631	7.508.142.421	(1.151.421.210)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	1	01		Belanja Pegawai	73.410.000	0	(73.410.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.586.153.631	7.508.142.421	(1.078.011.210)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	2			BELANJA MODAL	43.112.884.000	34.312.863.500	(8.800.020.500)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.112.884.000	34.312.863.500	(8.800.020.500)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09					Rehabilitasi Jalan	1.551.864.000	1.544.564.000	(7.300.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5	1			BELANJA OPERASI	1.551.864.000	1.519.564.000	(32.300.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.551.864.000	1.519.564.000	(32.300.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5	2			BELANJA MODAL	0	25.000.000	25.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	25.000.000	25.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12					Pembangunan Jembatan	3.712.100.000	4.914.362.500	1.202.262.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	2			BELANJA MODAL	3.712.100.000	4.914.362.500	1.202.262.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.712.100.000	4.914.362.500	1.202.262.500	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**11**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**416.323.380**	**57.103.200**	**(359.220.180)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**11**	**2.01**	**00**					**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**416.323.380**	**57.103.200**	**(359.220.180)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04					Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	416.323.380	57.103.200	(359.220.180)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	396.079.000	57.103.200	(338.975.800)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	396.079.000	57.103.200	(338.975.800)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	2			BELANJA MODAL	20.244.380	0	(20.244.380)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.244.380	0	(20.244.380)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**12**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**7.514.048.000**	**5.642.540.400**	**(1.871.507.600)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**12**	**2.03**	**00**					**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**5.573.200.000**	**5.500.000.000**	**(73.200.000)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	5.573.200.000	5.500.000.000	(73.200.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	5.573.200.000	5.500.000.000	(73.200.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.573.200.000	5.500.000.000	(73.200.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**12**	**2.04**	**00**					**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1.940.848.000**	**142.540.400**	**(1.798.307.600)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.940.848.000	142.540.400	(1.798.307.600)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.938.448.000	142.540.400	(1.795.907.600)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.938.448.000	142.540.400	(1.795.907.600)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5	2			BELANJA MODAL	2.400.000	0	(2.400.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.400.000	0	(2.400.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.543.879.800**	**8.050.141.400**	**(1.493.738.400)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**31.705.000**	**16.711.000**	**(14.994.000)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.705.000	16.711.000	(14.994.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	31.705.000	16.711.000	(14.994.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	31.705.000	16.711.000	(14.994.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.718.532.700**	**3.950.372.000**	**(768.160.700)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.718.532.700	3.950.372.000	(768.160.700)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.718.532.700	3.950.372.000	(768.160.700)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	4.718.532.700	3.950.372.000	(768.160.700)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**379.851.000**	**310.239.500**	**(69.611.500)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.498.000	4.498.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.498.000	4.498.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.498.000	4.498.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	57.545.000	21.545.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	36.000.000	35.545.000	(455.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	35.545.000	(455.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2			BELANJA MODAL	0	22.000.000	22.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	22.000.000	22.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.497.000	9.920.500	(3.576.500)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.497.000	9.920.500	(3.576.500)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.497.000	9.920.500	(3.576.500)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	18.000.000	(9.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.000.000	18.000.000	(9.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	18.000.000	(9.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.000.000	19.000.000	(17.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	36.000.000	19.000.000	(17.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	19.000.000	(17.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.856.000	201.276.000	(61.580.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	262.856.000	201.276.000	(61.580.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	262.856.000	201.276.000	(61.580.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**253.731.000**	**57.115.000**	**(196.616.000)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.731.000	57.115.000	(196.616.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1			BELANJA OPERASI	157.331.000	1.815.000	(155.516.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	157.331.000	1.815.000	(155.516.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	96.400.000	55.300.000	(41.100.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.400.000	55.300.000	(41.100.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.888.304.100**	**2.738.473.900**	**(149.830.200)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.998.500	549.998.300	(200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	549.998.500	549.998.300	(200)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	549.998.500	549.998.300	(200)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.334.305.600	2.185.475.600	(148.830.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	2.334.305.600	2.185.475.600	(148.830.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.334.305.600	2.185.475.600	(148.830.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.271.756.000**	**977.230.000**	**(294.526.000)**	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.560.000	444.560.000	0	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	444.560.000	444.560.000	0	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	444.560.000	444.560.000	0	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	827.196.000	532.670.000	(294.526.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	827.196.000	532.670.000	(294.526.000)	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	827.196.000	532.670.000	(294.526.000)	
Jumlah Belanja		**111.858.712.326**	**83.965.494.186**	**(27.893.218.140)**	
Total Surplus/(Defisit)		**(110.250.481.841)**	**(82.357.263.701)**	**27.893.218.140**	
0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	205.278.400	215.278.400	10.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	205.278.400	215.278.400	10.000.000	
										Jumlah Pendapatan	205.278.400	215.278.400	10.000.000	
0	00	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.617.660.030	4.475.074.000	(9.142.586.030)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	301.444.400	171.949.500	(129.494.900)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.808.600	16.178.600	(29.630.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	01					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.808.600	16.178.600	(29.630.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	45.808.600	16.178.600	(29.630.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	45.808.600	16.178.600	(29.630.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02	00					Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	37.428.000	12.730.000	(24.698.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02	01					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	37.428.000	12.730.000	(24.698.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	37.428.000	12.730.000	(24.698.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.428.000	12.730.000	(24.698.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	00					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	61.615.000	0	(61.615.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	04					Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	61.615.000	0	(61.615.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1			BELANJA OPERASI	61.615.000	0	(61.615.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	61.615.000	0	(61.615.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.04	00					Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.895.000	0	(3.895.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.04	02					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.895.000	0	(3.895.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	3.895.000	0	(3.895.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.895.000	0	(3.895.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.05	00					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	152.697.800	143.040.900	(9.656.900)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.05	01					Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	152.697.800	143.040.900	(9.656.900)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1			BELANJA OPERASI	152.697.800	143.040.900	(9.656.900)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	152.697.800	143.040.900	(9.656.900)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.801.782.500	76.740.300	(3.725.042.200)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.01	00					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	27.856.000	24.946.000	(2.910.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.01	02					Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	27.856.000	24.946.000	(2.910.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	27.856.000	24.946.000	(2.910.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.856.000	24.946.000	(2.910.000)	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**100.219.600**	**51.632.800**	**(48.586.800)**	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	01					Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	69.628.600	35.312.600	(34.316.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	69.628.600	35.312.600	(34.316.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	69.628.600	35.312.600	(34.316.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	03					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	30.591.000	16.320.200	(14.270.800)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	30.591.000	16.320.200	(14.270.800)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	30.591.000	16.320.200	(14.270.800)	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**					**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**3.673.706.900**	**161.500**	**(3.673.545.400)**	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	06					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3.673.706.900	161.500	(3.673.545.400)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	06	5	1			BELANJA OPERASI	3.673.706.900	161.500	(3.673.545.400)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	06	5	1	01		Belanja Pegawai	53.900.000	0	(53.900.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.619.806.900	161.500	(3.619.645.400)	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**157.821.000**	**157.821.000**	**0**	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**					**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**157.821.000**	**157.821.000**	**0**	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	01					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	157.821.000	157.821.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	157.821.000	157.821.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	500.000	0	(500.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	157.321.000	157.821.000	500.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**6.885.136.710**	**1.700.245.360**	**(5.184.891.350)**	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**					**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**6.885.136.710**	**1.700.245.360**	**(5.184.891.350)**	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.885.136.710	1.700.245.360	(5.184.891.350)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	6.380.242.650	1.231.126.860	(5.149.115.790)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	01		Belanja Pegawai	93.900.000	11.400.000	(82.500.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.286.342.650	1.219.726.860	(5.066.615.790)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	2			BELANJA MODAL	504.894.060	469.118.500	(35.775.560)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	504.894.060	469.118.500	(35.775.560)	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.471.475.420**	**2.368.317.840**	**(103.157.580)**	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.659.108.700**	**1.463.874.000**	**(195.234.700)**	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.659.108.700	1.463.874.000	(195.234.700)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.659.108.700	1.463.874.000	(195.234.700)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.659.108.700	1.463.874.000	(195.234.700)	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**201.753.900**	**295.178.300**	**93.424.400**	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.099.000	5.685.000	(2.414.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	8.099.000	5.685.000	(2.414.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.099.000	5.685.000	(2.414.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.569.000	47.569.000	7.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	40.569.000	47.569.000	7.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	40.569.000	47.569.000	7.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.496.000	15.837.200	2.341.200	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.496.000	15.837.200	2.341.200	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.496.000	15.837.200	2.341.200	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.980.000	39.980.000	13.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	26.980.000	39.980.000	13.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	26.980.000	39.980.000	13.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.609.900	35.109.900	3.500.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	31.609.900	35.109.900	3.500.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	31.609.900	35.109.900	3.500.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.000.000	150.997.200	69.997.200	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	81.000.000	150.997.200	69.997.200	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	81.000.000	150.997.200	69.997.200	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**29.000.000**	**36.000.000**	**7.000.000**	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.07	05					Pengadaan Mebel	7.000.000	7.000.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2			BELANJA MODAL	7.000.000	7.000.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000	7.000.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	29.000.000	7.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	22.000.000	29.000.000	7.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000	29.000.000	7.000.000	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**463.574.100**	**417.917.800**	**(45.656.300)**	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.866.300	0	(23.866.300)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	23.866.300	0	(23.866.300)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.866.300	0	(23.866.300)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.707.800	414.917.800	(20.790.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	435.707.800	414.917.800	(20.790.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	435.707.800	414.917.800	(20.790.000)	
1	**04**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.038.720**	**155.347.740**	**37.309.020**	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.590.000	7.270.000	(5.320.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	12.590.000	7.270.000	(5.320.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.590.000	7.270.000	(5.320.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.750.000	38.750.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	38.750.000	38.750.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	38.750.000	38.750.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000	6.100.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	6.100.000	6.100.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.100.000	6.100.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.598.720	103.227.740	42.629.020	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	60.598.720	103.227.740	42.629.020	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	60.598.720	103.227.740	42.629.020	
2	**10**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**165.000.000**	**116.655.200**	**(48.344.800)**	
2	**10**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**72.500.000**	**34.586.800**	**(37.913.200)**	
2	**10**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**72.500.000**	**34.586.800**	**(37.913.200)**	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	06	2.01	03					Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	72.500.000	34.586.800	(37.913.200)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	72.500.000	34.586.800	(37.913.200)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	72.500.000	34.586.800	(37.913.200)	
2	**10**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**09**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**92.500.000**	**82.068.400**	**(10.431.600)**	
2	**10**	**1.04.2.10.0.00.01.0000**	**09**	**2.01**	**00**					**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**92.500.000**	**82.068.400**	**(10.431.600)**	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	09	2.01	02					Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	92.500.000	82.068.400	(10.431.600)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	92.500.000	82.068.400	(10.431.600)	
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000	82.068.400	(10.431.600)	
	Jumlah Belanja	**13.782.660.030**	**4.591.729.200**	**(9.190.930.830)**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(13.577.381.630)**	**(4.376.450.800)**	**9.200.930.830**	
0 00 1.04.2.10.0.00.01.0000 00 0.0u 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**8.982.876.766**	**8.203.885.164**	**(778.991.602)**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**476.869.000**	**572.701.000**	**95.832.000**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**359.734.000**	**416.686.000**	**56.952.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	273.870.000	360.542.000	86.672.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	273.870.000	360.542.000	86.672.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	273.870.000	360.542.000	86.672.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkaitan Hak Asasi Manusia	77.864.000	48.144.000	(29.720.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	77.864.000	48.144.000	(29.720.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.864.000	48.144.000	(29.720.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8.000.000	8.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	8.000.000	8.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	8.000.000	0	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**117.135.000**	**156.015.000**	**38.880.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12.567.000	12.567.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.567.000	12.567.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.567.000	12.567.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	104.568.000	143.448.000	38.880.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	104.568.000	143.448.000	38.880.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.568.000	143.448.000	38.880.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**550.110.000**	**523.608.000**	**(26.502.000)**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**477.400.000**	**448.898.000**	**(28.502.000)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	477.400.000	448.898.000	(28.502.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	477.400.000	448.898.000	(28.502.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	477.400.000	448.898.000	(28.502.000)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**11.490.000**	**11.490.000**	**0**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	11.490.000	11.490.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.490.000	11.490.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.490.000	11.490.000	0	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.03**	**00**				**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**21.360.000**	**21.360.000**	**0**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	21.360.000	21.360.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.360.000	21.360.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000	21.360.000	0	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.04**	**00**				**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**39.860.000**	**41.860.000**	**2.000.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	39.860.000	41.860.000	2.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	39.860.000	41.860.000	2.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.860.000	41.860.000	2.000.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.955.897.766**	**7.107.576.164**	**(848.321.602)**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.442.715.870**	**2.865.569.000**	**(577.146.870)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.442.715.870	2.865.569.000	(577.146.870)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.442.715.870	2.865.569.000	(577.146.870)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.442.715.870	2.865.569.000	(577.146.870)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**183.883.200**	**241.178.300**	**57.295.100**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.452.000	5.452.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.452.000	5.452.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.452.000	5.452.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.448.000	30.048.000	600.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.448.000	30.048.000	600.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.448.000	30.048.000	600.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.772.400	13.972.400	200.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	13.772.400	13.972.400	200.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.772.400	13.972.400	200.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	27.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.000.000	27.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	27.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.204.600	27.488.700	284.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	27.204.600	27.488.700	284.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.204.600	27.488.700	284.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.006.200	137.217.200	56.211.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	81.006.200	137.217.200	56.211.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	81.006.200	137.217.200	56.211.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.106.544.696**	**3.780.514.864**	**(326.029.832)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.551.096	37.550.464	(632)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	37.551.096	37.550.464	(632)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.551.096	37.550.464	(632)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.064.993.600	3.738.964.400	(326.029.200)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	4.064.993.600	3.738.964.400	(326.029.200)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.064.993.600	3.738.964.400	(326.029.200)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**222.754.000**	**220.314.000**	**(2.440.000)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.250.000	12.250.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	12.250.000	12.250.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.250.000	12.250.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.234.000	200.234.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	200.234.000	200.234.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	200.234.000	200.234.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.270.000	7.830.000	(2.440.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	10.270.000	7.830.000	(2.440.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.270.000	7.830.000	(2.440.000)	
										Jumlah Belanja	**8.982.876.766**	**8.203.885.164**	**(778.991.602)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Total Surplus/(Defisit)	(8.982.876.766)	(8.203.885.164)	778.991.602	
0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**8.545.410.300**	**8.751.668.950**	**206.258.650**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**6.692.579.200**	**7.055.716.100**	**363.136.900**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**52.475.000**	**27.364.400**	**(25.110.600)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	52.475.000	27.364.400	(25.110.600)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	52.475.000	27.364.400	(25.110.600)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.475.000	27.364.400	(25.110.600)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**6.384.604.100**	**6.812.057.000**	**427.452.900**	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	01				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	36.685.000	22.826.000	(13.859.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	36.685.000	22.826.000	(13.859.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.685.000	22.826.000	(13.859.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	28.565.000	352.758.000	324.193.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	28.565.000	352.758.000	324.193.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.565.000	352.758.000	324.193.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	37.981.000	25.556.000	(12.425.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	37.981.000	25.556.000	(12.425.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.981.000	25.556.000	(12.425.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	154.650.000	154.259.200	(390.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	74.650.000	74.650.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.650.000	74.650.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	5	2		BELANJA MODAL	80.000.000	79.609.200	(390.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000	79.609.200	(390.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	07				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	6.100.470.000	6.250.472.000	150.002.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	50.470.000	100.472.000	50.002.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.470.000	100.472.000	50.002.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	07	5	2		BELANJA MODAL	6.050.000.000	6.150.000.000	100.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	07	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.050.000.000	6.150.000.000	100.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	09				Penyusunan Rencana Kontijensi	1.768.100	18.100	(1.750.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.768.100	18.100	(1.750.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.768.100	18.100	(1.750.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	10				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24.485.000	6.167.700	(18.317.300)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	24.485.000	6.167.700	(18.317.300)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.485.000	6.167.700	(18.317.300)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**205.866.600**	**216.294.700**	**10.428.100**	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01				Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	109.585.000	109.584.200	(800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	109.585.000	109.584.200	(800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.585.000	109.584.200	(800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	02				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.605.000	21.924.000	18.319.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.605.000	21.924.000	18.319.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.605.000	21.924.000	18.319.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	03				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	37.125.000	34.775.000	(2.350.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	37.125.000	34.775.000	(2.350.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.125.000	34.775.000	(2.350.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	41.228.000	50.011.500	8.783.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	41.228.000	50.011.500	8.783.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.228.000	50.011.500	8.783.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	05				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.323.600	0	(14.323.600)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	14.323.600	0	(14.323.600)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.323.600	0	(14.323.600)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.04**	**00**				**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**49.633.500**	**0**	**(49.633.500)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.04	02				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	25.454.000	0	(25.454.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.454.000	0	(25.454.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.454.000	0	(25.454.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.04	03				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	24.179.500	0	(24.179.500)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	24.179.500	0	(24.179.500)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.179.500	0	(24.179.500)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.852.831.100**	**1.695.952.850**	**(156.878.250)**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**861.528.700**	**733.787.000**	**(127.741.700)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	861.528.700	733.787.000	(127.741.700)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	861.528.700	733.787.000	(127.741.700)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	861.528.700	733.787.000	(127.741.700)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**265.891.200**	**259.154.250**	**(6.736.950)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.577.000	2.577.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.577.000	2.577.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.577.000	2.577.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.352.000	77.886.450	1.534.450	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	47.352.000	48.886.450	1.534.450	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.352.000	48.886.450	1.534.450	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2			BELANJA MODAL	29.000.000	29.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.000.000	29.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.500.000	36.910.000	(30.590.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	67.500.000	36.910.000	(30.590.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	67.500.000	36.910.000	(30.590.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.470.300	29.491.600	21.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	29.470.300	29.491.600	21.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	29.470.300	29.491.600	21.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.991.900	112.289.200	22.297.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	89.991.900	112.289.200	22.297.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	89.991.900	112.289.200	22.297.300	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**587.051.200**	**552.651.600**	**(34.399.600)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.999.600	18.190.000	190.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	17.999.600	18.190.000	190.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	17.999.600	18.190.000	190.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	7.500.000	500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	7.000.000	7.500.000	500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.500.000	500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.051.600	526.961.600	(35.090.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	562.051.600	526.961.600	(35.090.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	562.051.600	526.961.600	(35.090.000)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**138.360.000**	**150.360.000**	**12.000.000**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.360.000	90.360.000	12.000.000	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	78.360.000	90.360.000	12.000.000	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.360.000	90.360.000	12.000.000	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	0	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	0	
Jumlah Belanja		**8.545.410.300**	**8.751.668.950**	**206.258.650**	
Total Surplus/(Defisit)		**(8.545.410.300)**	**(8.751.668.950)**	**(206.258.650)**	
0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0 00 1.06.2.08.2.14.01.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**5.628.865.700**	**6.161.994.650**	**533.128.950**	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**231.498.900**	**129.104.000**	**(102.394.900)**	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 00	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**231.498.900**	**129.104.000**	**(102.394.900)**	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	179.063.000	101.768.500	(77.294.500)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	179.063.000	101.768.500	(77.294.500)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	179.063.000	101.768.500	(77.294.500)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.435.900	27.335.500	(25.100.400)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	52.435.900	27.335.500	(25.100.400)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.435.900	27.335.500	(25.100.400)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 0.00 00	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**550.949.600**	**1.762.879.700**	**1.211.930.100**	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 00	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**235.949.600**	**1.447.879.700**	**1.211.930.100**	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	34.823.400	19.753.700	(15.069.700)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	34.823.400	19.753.700	(15.069.700)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.823.400	19.753.700	(15.069.700)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	15.146.900	10.823.600	(4.323.300)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	15.146.900	10.823.600	(4.323.300)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.146.900	10.823.600	(4.323.300)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	24.715.000	3.500.000	(21.215.000)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	24.715.000	3.500.000	(21.215.000)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.715.000	3.500.000	(21.215.000)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.022.200	700.000	(12.322.200)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	13.022.200	700.000	(12.322.200)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.022.200	700.000	(12.322.200)	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	24.234.400	1.296.289.900	1.272.055.500	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	24.234.400	1.296.289.900	1.272.055.500	
1 06 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.234.400	1.296.289.900	1.272.055.500	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	06				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	22.566.900	22.566.900	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	22.566.900	22.566.900	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.566.900	22.566.900	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	07				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.020.900	160.000	(3.860.900)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	4.020.900	160.000	(3.860.900)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.900	160.000	(3.860.900)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	08				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.294.700	57.792.200	43.497.500	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	14.294.700	57.792.200	43.497.500	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.294.700	57.792.200	43.497.500	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	09				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	14.116.900	3.036.900	(11.080.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	14.116.900	3.036.900	(11.080.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.116.900	3.036.900	(11.080.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	10				Pemberian Layanan Kedaruratan	25.594.200	8.037.500	(17.556.700)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	25.594.200	8.037.500	(17.556.700)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.594.200	8.037.500	(17.556.700)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	11				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.524.700	2.296.000	(14.228.700)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	16.524.700	2.296.000	(14.228.700)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.524.700	2.296.000	(14.228.700)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	12				Pemberian Layanan Rujukan	26.889.400	22.923.000	(3.966.400)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	26.889.400	22.923.000	(3.966.400)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.889.400	22.923.000	(3.966.400)	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**315.000.000**	**315.000.000**	**0**	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.02	08				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	315.000.000	315.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	315.000.000	315.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.02	08	5	1	05	Belanja Hibah	315.000.000	315.000.000	0	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**41.381.300**	**22.001.200**	**(19.380.100)**	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**05**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**41.381.300**	**22.001.200**	**(19.380.100)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	05	2.02	03					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	41.381.300	22.001.200	(19.380.100)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	05	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	41.381.300	22.001.200	(19.380.100)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	05	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	41.381.300	22.001.200	(19.380.100)	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**162.302.600**	**126.433.200**	**(35.869.400)**	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**162.302.600**	**126.433.200**	**(35.869.400)**	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	01					Penyediaan Makanan	104.508.800	101.008.800	(3.500.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	104.508.800	101.008.800	(3.500.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	104.508.800	101.008.800	(3.500.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	02					Penyediaan Sandang	15.400.000	15.400.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	15.400.000	15.400.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.400.000	15.400.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	03					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.936.900	5.364.400	(15.572.500)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	20.936.900	5.364.400	(15.572.500)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.936.900	5.364.400	(15.572.500)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	04					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.700.000	4.660.000	(8.040.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	12.700.000	4.660.000	(8.040.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.700.000	4.660.000	(8.040.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	05					Pelayanan Dukungan Psikososial	8.756.900	0	(8.756.900)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	8.756.900	0	(8.756.900)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.756.900	0	(8.756.900)	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.642.733.300**	**4.121.576.550**	**(521.156.750)**	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.517.466.300**	**1.988.353.000**	**(529.113.300)**	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.517.466.300	1.988.353.000	(529.113.300)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.517.466.300	1.988.353.000	(529.113.300)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.517.466.300	1.988.353.000	(529.113.300)	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**209.460.300**	**277.932.300**	**68.472.000**	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	9.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	9.000.000	9.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	9.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.997.000	55.887.000	12.890.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	42.997.000	55.887.000	12.890.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	42.997.000	55.887.000	12.890.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.390.600	16.300.600	2.910.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.390.600	16.300.600	2.910.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.390.600	16.300.600	2.910.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	30.000.000	3.000.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.000.000	30.000.000	3.000.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	30.000.000	3.000.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.069.900	39.279.900	3.210.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	36.069.900	39.279.900	3.210.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.069.900	39.279.900	3.210.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.002.800	127.464.800	46.462.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	81.002.800	127.464.800	46.462.000	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	81.002.800	127.464.800	46.462.000	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**870.500.000**	**864.500.000**	**(6.000.000)**	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	820.000.000	820.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	02	5	2			BELANJA MODAL	820.000.000	820.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	820.000.000	820.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	05					Pengadaan Mebel	6.000.000	0	(6.000.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	05	5	2			BELANJA MODAL	6.000.000	0	(6.000.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000	0	(6.000.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.500.000	44.500.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	44.500.000	44.500.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.500.000	44.500.000	0	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**882.266.700**	**829.681.250**	**(52.585.450)**	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.392.900	64.903.750	(12.489.150)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	77.392.900	64.903.750	(12.489.150)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	77.392.900	64.903.750	(12.489.150)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.873.800	760.777.500	(40.096.300)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	800.873.800	760.777.500	(40.096.300)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	800.873.800	760.777.500	(40.096.300)	
1	**06**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**163.040.000**	**161.110.000**	**(1.930.000)**	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.500.000	31.500.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	31.500.000	31.500.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000	31.500.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.100.000	105.000.000	(100.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	105.100.000	105.000.000	(100.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.100.000	105.000.000	(100.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.440.000	4.610.000	(1.830.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.440.000	4.610.000	(1.830.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.440.000	4.610.000	(1.830.000)	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.330.576.000**	**1.388.446.600**	**57.870.600**	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**730.291.000**	**739.729.000**	**9.438.000**	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**45.121.000**	**29.959.000**	**(15.162.000)**	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.01	03				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	45.121.000	29.959.000	(15.162.000)	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	45.121.000	29.959.000	(15.162.000)	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.121.000	29.959.000	(15.162.000)	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**685.170.000**	**709.770.000**	**24.600.000**	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.03	01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	685.170.000	709.770.000	24.600.000	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	685.170.000	709.770.000	24.600.000	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	685.170.000	709.770.000	24.600.000	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**61.759.200**	**57.789.200**	**(3.970.000)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**61.759.200**	**57.789.200**	**(3.970.000)**	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.373.000	5.403.000	(3.970.000)	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.373.000	5.403.000	(3.970.000)	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.373.000	5.403.000	(3.970.000)	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	52.386.200	52.386.200	0	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	52.386.200	52.386.200	0	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.386.200	52.386.200	0	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**85.525.000**	**66.409.600**	**(19.115.400)**	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**06**	**2.02**	**00**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**85.525.000**	**66.409.600**	**(19.115.400)**	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.02	03				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.525.000	66.409.600	(19.115.400)	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	85.525.000	66.409.600	(19.115.400)	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.525.000	66.409.600	(19.115.400)	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**453.000.800**	**524.518.800**	**71.518.000**	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**07**	**2.01**	**00**				**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**147.762.000**	**224.852.000**	**77.090.000**	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.01	01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	38.062.000	115.152.000	77.090.000	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	38.062.000	115.152.000	77.090.000	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.062.000	115.152.000	77.090.000	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	109.700.000	109.700.000	0	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	109.700.000	109.700.000	0	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.700.000	109.700.000	0	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**07**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**230.642.800**	**225.070.800**	**(5.572.000)**	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.02	01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.525.000	22.953.000	(5.572.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	28.525.000	22.953.000	(5.572.000)	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.525.000	22.953.000	(5.572.000)	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.02	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	202.117.800	202.117.800	0	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	202.117.800	202.117.800	0	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	202.117.800	202.117.800	0	
2	**08**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**07**	**2.03**	**00**					**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**74.596.000**	**74.596.000**	**0**	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.03	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000	74.596.000	0	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	74.596.000	74.596.000	0	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	74.596.000	74.596.000	0	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**3.891.002.000**	**3.887.732.000**	**(3.270.000)**	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**185.400.000**	**185.400.000**	**0**	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**185.400.000**	**185.400.000**	**0**	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	09					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	09	5	1			BELANJA OPERASI	64.200.000	64.200.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	64.200.000	64.200.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	12					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	55.200.000	55.200.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	12	5	1			BELANJA OPERASI	55.200.000	55.200.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	55.200.000	55.200.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	13					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	66.000.000	66.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	13	5	1			BELANJA OPERASI	66.000.000	66.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	66.000.000	66.000.000	0	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.392.117.000**	**2.392.117.000**	**0**	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**982.650.000**	**982.650.000**	**0**	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	01					Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	80.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	80.000.000	80.000.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	04					Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	150.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	150.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	06					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	143.000.000	143.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	143.000.000	143.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	143.000.000	143.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	07					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	529.650.000	529.650.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	529.650.000	529.650.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	529.650.000	529.650.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	08					Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	80.000.000	80.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**132.000.000**	**132.000.000**	**0**	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	01					Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	28.000.000	28.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	28.000.000	28.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.000.000	28.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	04					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	104.000.000	104.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	04	5	1			BELANJA OPERASI	104.000.000	104.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	104.000.000	104.000.000	0	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**					**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**849.967.000**	**849.967.000**	**0**	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	01					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.700.000	20.700.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	20.700.000	20.700.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.700.000	20.700.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	03					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	815.167.000	815.167.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	03	5	1			BELANJA OPERASI	815.167.000	815.167.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	815.167.000	815.167.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	08					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000	14.100.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	08	5	1			BELANJA OPERASI	14.100.000	14.100.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.100.000	14.100.000	0	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**03**	**2.04**	**00**					**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**427.500.000**	**427.500.000**	**0**	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.04	02					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	9.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	9.000.000	9.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	9.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.04	03					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	418.500.000	418.500.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.04	03	5	1			BELANJA OPERASI	418.500.000	418.500.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.04	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	418.500.000	418.500.000	0	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.313.485.000**	**1.310.215.000**	**(3.270.000)**	
2	**14**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**					**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1.313.485.000**	**1.310.215.000**	**(3.270.000)**	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	02					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	360.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	360.000.000	360.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	360.000.000	360.000.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	03					Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	39.985.000	36.715.000	(3.270.000)	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	39.985.000	36.715.000	(3.270.000)	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	39.985.000	36.715.000	(3.270.000)	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	05					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	913.500.000	913.500.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	913.500.000	913.500.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	913.500.000	913.500.000	0	
										Jumlah Belanja	**10.850.443.700**	**11.438.173.250**	**587.729.550**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(10.850.443.700)**	**(11.438.173.250)**	**(587.729.550)**	
0	**00**	**1.06.2.08.2.14.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01 Dinas Pangan dan Perikanan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**265.000.000**	**105.000.000**	**(160.000.000)**	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	265.000.000	105.000.000	(160.000.000)	
	Jumlah Pendapatan	**265.000.000**	**105.000.000**	**(160.000.000)**	
0 00 2.09.3.25.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**4.525.459.000**	**3.577.830.850**	**(947.628.150)**	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 0.00 00	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**219.580.400**	**263.608.000**	**44.027.600**	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.01 00	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**59.270.600**	**60.777.400**	**1.506.800**	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25.889.600	19.487.600	(6.402.000)	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	25.889.600	19.487.600	(6.402.000)	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.889.600	19.487.600	(6.402.000)	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	33.381.000	41.289.800	7.908.800	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	33.381.000	41.289.800	7.908.800	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.381.000	41.289.800	7.908.800	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.02 00	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**0**	**55.000.000**	**55.000.000**	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	55.000.000	55.000.000	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	0	55.000.000	55.000.000	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	55.000.000	55.000.000	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.04 00	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**160.309.800**	**147.830.600**	**(12.479.200)**	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.413.000	6.349.800	(3.063.200)	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.413.000	6.349.800	(3.063.200)	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.413.000	6.349.800	(3.063.200)	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.896.800	141.480.800	(9.416.000)	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1	BELANJA OPERASI	150.896.800	141.480.800	(9.416.000)	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.896.800	141.480.800	(9.416.000)	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 04 0.00 00	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**216.097.000**	**159.277.000**	**(56.820.000)**	
2 09 2.09.3.25.0.00.01.0000 04 2.02 00	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**216.097.000**	**159.277.000**	**(56.820.000)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01 Dinas Pangan dan Perikanan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.02	02				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.097.000	159.277.000	(56.820.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	216.097.000	159.277.000	(56.820.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	216.097.000	159.277.000	(56.820.000)	
2	**09**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**35.026.200**	**21.676.600**	**(13.349.600)**	
2	**09**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**35.026.200**	**21.676.600**	**(13.349.600)**	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01	04				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.026.200	21.676.600	(13.349.600)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	35.026.200	21.676.600	(13.349.600)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.026.200	21.676.600	(13.349.600)	
2	**09**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.054.755.400**	**3.133.269.250**	**(921.486.150)**	
2	**09**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.990.594.350**	**2.019.405.000**	**(971.189.350)**	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.990.594.350	2.019.405.000	(971.189.350)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.990.594.350	2.019.405.000	(971.189.350)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.990.594.350	2.019.405.000	(971.189.350)	
2	**09**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**249.175.600**	**338.963.050**	**89.787.450**	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.642.500	1.970.500	(1.672.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.642.500	1.970.500	(1.672.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.642.500	1.970.500	(1.672.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.585.000	70.206.000	4.621.000	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	65.585.000	70.206.000	4.621.000	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.585.000	70.206.000	4.621.000	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.173.700	6.204.950	(968.750)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.173.700	6.204.950	(968.750)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.173.700	6.204.950	(968.750)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.018.000	28.620.000	(11.398.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	40.018.000	28.620.000	(11.398.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.018.000	28.620.000	(11.398.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.720.400	17.653.400	(7.067.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	24.720.400	17.653.400	(7.067.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.720.400	17.653.400	(7.067.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01 Dinas Pangan dan Perikanan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.036.000	214.308.200	106.272.200	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	108.036.000	214.308.200	106.272.200	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	108.036.000	214.308.200	106.272.200	
2	**09**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**734.050.450**	**695.686.200**	**(38.364.250)**	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.525.000	2.280.000	(245.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.525.000	2.280.000	(245.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.525.000	2.280.000	(245.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.923.650	49.424.400	(499.250)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	49.923.650	49.424.400	(499.250)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	49.923.650	49.424.400	(499.250)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	681.601.800	643.981.800	(37.620.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	681.601.800	643.981.800	(37.620.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	681.601.800	643.981.800	(37.620.000)	
2	**09**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.935.000**	**79.215.000**	**(1.720.000)**	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.775.000	22.775.000	0	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	22.775.000	22.775.000	0	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.775.000	22.775.000	0	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000	51.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	51.000.000	51.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	51.000.000	51.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.160.000	5.440.000	(1.720.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	7.160.000	5.440.000	(1.720.000)	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.160.000	5.440.000	(1.720.000)	
3	**25**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**340.852.100**	**293.203.700**	**(47.648.400)**	
3	**25**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**268.606.700**	**246.826.900**	**(21.779.800)**	
3	**25**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**04**	**2.04**	**00**					**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**268.606.700**	**246.826.900**	**(21.779.800)**	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.04	02					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.336.000	74.260.000	(15.076.000)	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	89.336.000	74.260.000	(15.076.000)	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	89.336.000	74.260.000	(15.076.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01 Dinas Pangan dan Perikanan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.04	03				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	179.270.700	172.566.900	(6.703.800)	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	179.270.700	172.566.900	(6.703.800)	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	179.270.700	172.566.900	(6.703.800)	
3	**25**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**27.049.000**	**23.403.200**	**(3.645.800)**	
3	**25**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**27.049.000**	**23.403.200**	**(3.645.800)**	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01	01				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	27.049.000	23.403.200	(3.645.800)	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.049.000	23.403.200	(3.645.800)	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.049.000	23.403.200	(3.645.800)	
3	**25**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**45.196.400**	**22.973.600**	**(22.222.800)**	
3	**25**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**06**	**2.03**	**00**				**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**45.196.400**	**22.973.600**	**(22.222.800)**	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	06	2.03	01				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.196.400	22.973.600	(22.222.800)	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	06	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	45.196.400	22.973.600	(22.222.800)	
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	06	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.196.400	22.973.600	(22.222.800)	
									Jumlah Belanja	**4.866.311.100**	**3.871.034.550**	**(995.276.550)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(4.601.311.100)**	**(3.766.034.550)**	**835.276.550**	
0	**00**	**2.09.3.25.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**400.000.000**	**300.000.000**	**(100.000.000)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	400.000.000	300.000.000	(100.000.000)	
										Jumlah Pendapatan	**400.000.000**	**300.000.000**	**(100.000.000)**	
0	**00**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**5.010.278.950**	**4.633.656.040**	**(376.622.910)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**210.088.000**	**185.874.000**	**(24.214.000)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**28.663.200**	**16.612.000**	**(12.051.200)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	28.663.200	16.612.000	(12.051.200)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	28.663.200	16.612.000	(12.051.200)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.663.200	16.612.000	(12.051.200)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**181.424.800**	**169.262.000**	**(12.162.800)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	181.424.800	169.262.000	(12.162.800)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	181.424.800	169.262.000	(12.162.800)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	181.424.800	169.262.000	(12.162.800)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**412.328.200**	**363.819.200**	**(48.509.000)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**383.312.400**	**338.806.400**	**(44.506.000)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	320.570.000	288.560.000	(32.010.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	256.800.000	170.830.000	(85.970.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	256.800.000	170.830.000	(85.970.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	63.770.000	117.730.000	53.960.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.770.000	117.730.000	53.960.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	62.742.400	50.246.400	(12.496.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	62.742.400	50.246.400	(12.496.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	62.742.400	50.246.400	(12.496.000)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**29.015.800**	**25.012.800**	**(4.003.000)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	29.015.800	25.012.800	(4.003.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	29.015.800	25.012.800	(4.003.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.015.800	25.012.800	(4.003.000)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**128.229.400**	**140.459.200**	**12.229.800**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**128.229.400**	**140.459.200**	**12.229.800**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	128.229.400	140.459.200	12.229.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	125.229.400	137.459.200	12.229.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.229.400	137.459.200	12.229.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	3.000.000	3.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**15.993.000**	**15.993.000**	**0**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**15.993.000**	**15.993.000**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.993.000	15.993.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.993.000	15.993.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.993.000	15.993.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**51.145.400**	**37.651.000**	**(13.494.400)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**51.145.400**	**37.651.000**	**(13.494.400)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.675.200	16.537.200	(8.138.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	24.675.200	16.537.200	(8.138.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.200	16.537.200	(8.138.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.470.200	21.113.800	(5.356.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	26.470.200	21.113.800	(5.356.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.470.200	21.113.800	(5.356.400)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**9.891.800**	**6.284.200**	**(3.607.600)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**2.02**	**00**				**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**9.891.800**	**6.284.200**	**(3.607.600)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	9.891.800	6.284.200	(3.607.600)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.891.800	6.284.200	(3.607.600)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.891.800	6.284.200	(3.607.600)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**09**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**16.893.000**	**8.735.040**	**(8.157.960)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**09**	**2.01**	**00**				**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**16.893.000**	**8.735.040**	**(8.157.960)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16.893.000	8.735.040	(8.157.960)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.893.000	8.735.040	(8.157.960)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.893.000	8.735.040	(8.157.960)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**10**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**13.285.800**	**10.612.600**	**(2.673.200)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**10**	**2.01**	**00**				**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**13.285.800**	**10.612.600**	**(2.673.200)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	13.285.800	10.612.600	(2.673.200)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.285.800	10.612.600	(2.673.200)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.285.800	10.612.600	(2.673.200)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**11**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**597.992.000**	**648.543.600**	**50.551.600**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**11**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Sampah**	**597.992.000**	**648.543.600**	**50.551.600**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	565.189.000	615.740.600	50.551.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	565.189.000	615.740.600	50.551.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	565.189.000	615.740.600	50.551.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	32.803.000	32.803.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	32.803.000	32.803.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.803.000	32.803.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.554.432.350**	**3.215.684.200**	**(338.748.150)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.177.189.900**	**1.786.730.000**	**(390.459.900)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.177.189.900	1.786.730.000	(390.459.900)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.177.189.900	1.786.730.000	(390.459.900)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.177.189.900	1.786.730.000	(390.459.900)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**189.358.400**	**272.427.500**	**83.069.100**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.601.800	3.372.800	(229.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.601.800	3.372.800	(229.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.601.800	3.372.800	(229.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.298.000	39.148.000	2.850.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	36.298.000	39.148.000	2.850.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.298.000	39.148.000	2.850.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.499.700	13.654.200	154.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.499.700	13.654.200	154.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.499.700	13.654.200	154.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.999.000	31.833.000	4.834.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	26.999.000	31.833.000	4.834.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	26.999.000	31.833.000	4.834.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.954.300	18.857.900	(9.096.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	27.954.300	18.857.900	(9.096.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.954.300	18.857.900	(9.096.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.005.600	165.561.600	84.556.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	81.005.600	165.561.600	84.556.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	81.005.600	165.561.600	84.556.000	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	5.000.000	5.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	5.000.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.124.534.050**	**1.093.176.700**	**(31.357.350)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	6.000.000	2.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	6.000.000	2.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	6.000.000	2.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.876.650	55.877.300	10.000.650	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	45.876.650	55.877.300	10.000.650	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.876.650	55.877.300	10.000.650	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.050.000	10.320.000	1.270.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.050.000	10.320.000	1.270.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000	10.320.000	1.270.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.065.607.400	1.020.979.400	(44.628.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.065.607.400	1.020.979.400	(44.628.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.065.607.400	1.020.979.400	(44.628.000)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.350.000**	**58.350.000**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	16.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.500.000	16.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000	16.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.850.000	41.850.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	41.850.000	41.850.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.850.000	41.850.000	0	
									Jumlah Belanja	**5.010.278.950**	**4.633.656.040**	**(376.622.910)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(4.610.278.950)**	**(4.333.656.040)**	**276.622.910**	
0	**00**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.438.749.850**	**3.792.814.790**	**(645.935.060)**	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**91.597.000**	**52.157.600**	**(39.439.400)**	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**11.915.000**	**3.041.600**	**(8.873.400)**	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	11.915.000	3.041.600	(8.873.400)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	11.915.000	3.041.600	(8.873.400)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.915.000	3.041.600	(8.873.400)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**79.682.000**	**49.116.000**	**(30.566.000)**	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16.092.000	14.629.000	(1.463.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	16.092.000	14.629.000	(1.463.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.092.000	14.629.000	(1.463.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	35.000.000	27.400.000	(7.600.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	35.000.000	27.400.000	(7.600.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	27.400.000	(7.600.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	28.590.000	7.087.000	(21.503.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	28.590.000	7.087.000	(21.503.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.590.000	7.087.000	(21.503.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**29.342.000**	**229.731.000**	**200.389.000**	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**12.650.000**	**2.540.000**	**(10.110.000)**	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	12.650.000	2.540.000	(10.110.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	12.650.000	2.540.000	(10.110.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000	2.540.000	(10.110.000)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**16.692.000**	**227.191.000**	**210.499.000**	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	16.692.000	227.191.000	210.499.000	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	16.692.000	227.191.000	210.499.000	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.692.000	227.191.000	210.499.000	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**43.244.000**	**28.152.000**	**(15.092.000)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.03**	**00**					**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**23.202.000**	**17.116.000**	**(6.086.000)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01					Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.692.000	12.236.000	(4.456.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	16.692.000	12.236.000	(4.456.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.692.000	12.236.000	(4.456.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	03					Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.510.000	4.880.000	(1.630.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	03	5	1			BELANJA OPERASI	6.510.000	4.880.000	(1.630.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.510.000	4.880.000	(1.630.000)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.04**	**00**					**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**20.042.000**	**11.036.000**	**(9.006.000)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03					Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	20.042.000	11.036.000	(9.006.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	5	1			BELANJA OPERASI	20.042.000	11.036.000	(9.006.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.042.000	11.036.000	(9.006.000)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.274.566.850**	**3.482.774.190**	**(791.792.660)**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.973.600**	**14.334.600**	**(5.639.000)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.973.600	14.334.600	(5.639.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	16.973.600	14.334.600	(2.639.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.973.600	14.334.600	(2.639.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	2			BELANJA MODAL	3.000.000	0	(3.000.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	0	(3.000.000)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.763.740.800**	**2.169.810.000**	**(593.930.800)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.763.740.800	2.169.810.000	(593.930.800)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.763.740.800	2.169.810.000	(593.930.800)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.763.740.800	2.169.810.000	(593.930.800)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**19.350.000**	**7.870.000**	**(11.480.000)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.350.000	7.870.000	(11.480.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1			BELANJA OPERASI	19.350.000	7.870.000	(11.480.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.350.000	7.870.000	(11.480.000)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**736.801.650**	**696.414.550**	**(40.387.100)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.062.750	7.272.750	(1.790.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	9.062.750	7.272.750	(1.790.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.062.750	7.272.750	(1.790.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.584.000	368.209.400	(68.374.600)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	436.584.000	368.209.400	(68.374.600)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	436.584.000	368.209.400	(68.374.600)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.262.000	16.301.000	(3.961.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	20.262.000	16.301.000	(3.961.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.262.000	16.301.000	(3.961.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.057.000	25.030.000	2.973.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	22.057.000	25.030.000	2.973.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.057.000	25.030.000	2.973.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.835.900	279.601.400	30.765.500	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	248.835.900	279.601.400	30.765.500	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	248.835.900	279.601.400	30.765.500	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**153.600.000**	**5.000.000**	**(148.600.000)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05					Pengadaan Mebel	26.600.000	0	(26.600.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2			BELANJA MODAL	26.600.000	0	(26.600.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.600.000	0	(26.600.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.000.000	5.000.000	(122.000.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	127.000.000	5.000.000	(122.000.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.000.000	5.000.000	(122.000.000)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**453.688.600**	**405.087.600**	**(48.601.000)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000	2.305.000	(1.845.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.150.000	2.305.000	(1.845.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.150.000	2.305.000	(1.845.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.580.000	91.544.000	(6.036.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	97.580.000	91.544.000	(6.036.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	97.580.000	91.544.000	(6.036.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.958.600	311.238.600	(40.720.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	351.958.600	311.238.600	(40.720.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	351.958.600	311.238.600	(40.720.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**127.412.200**	**184.257.440**	**56.845.240**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.634.400	16.500.000	(6.134.400)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	22.634.400	16.500.000	(6.134.400)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.634.400	16.500.000	(6.134.400)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.117.800	64.000.000	(6.117.800)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	70.117.800	64.000.000	(6.117.800)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	70.117.800	64.000.000	(6.117.800)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.660.000	35.050.000	390.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	34.660.000	35.050.000	390.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	34.660.000	35.050.000	390.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	68.707.440	68.707.440	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2			BELANJA MODAL	0	68.707.440	68.707.440	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	68.707.440	68.707.440	
										Jumlah Belanja	**4.438.749.850**	**3.792.814.790**	**(645.935.060)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(4.438.749.850)**	**(3.792.814.790)**	**645.935.060**	
0	**00**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.329.342.590**	**4.721.333.650**	**(608.008.940)**	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**34.413.200**	**30.010.000**	**(4.403.200)**	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**34.413.200**	**30.010.000**	**(4.403.200)**	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15.027.200	14.138.800	(888.400)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	15.027.200	14.138.800	(888.400)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.027.200	14.138.800	(888.400)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	19.386.000	15.871.200	(3.514.800)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	19.386.000	15.871.200	(3.514.800)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.386.000	15.871.200	(3.514.800)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**723.834.000**	**733.539.000**	**9.705.000**	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**723.834.000**	**733.539.000**	**9.705.000**	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	170.402.000	196.888.000	26.486.000	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	170.402.000	196.888.000	26.486.000	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.402.000	196.888.000	26.486.000	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	30.739.200	0	(30.739.200)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	30.739.200	0	(30.739.200)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.739.200	0	(30.739.200)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	84.786.600	67.001.600	(17.785.000)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	84.786.600	67.001.600	(17.785.000)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.786.600	67.001.600	(17.785.000)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	37.906.200	70.149.400	32.243.200	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	37.906.200	70.149.400	32.243.200	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.906.200	70.149.400	32.243.200	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	400.000.000	399.500.000	(500.000)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	400.000.000	399.500.000	(500.000)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	399.500.000	(500.000)	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA**	**990.233.200**	**863.573.800**	**(126.659.400)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**990.233.200**	**863.573.800**	**(126.659.400)**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	900.000.000	782.605.000	(117.395.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	900.000.000	782.605.000	(117.395.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000	782.605.000	(117.395.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	44.996.200	44.996.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	44.996.200	44.996.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.996.200	44.996.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	27.596.000	21.796.000	(5.800.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	27.596.000	21.796.000	(5.800.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.596.000	21.796.000	(5.800.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	17.641.000	14.176.600	(3.464.400)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	17.641.000	14.176.600	(3.464.400)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.641.000	14.176.600	(3.464.400)	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.580.862.190**	**3.094.210.850**	**(486.651.340)**	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.741.500.650**	**2.108.175.000**	**(633.325.650)**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.741.500.650	2.108.175.000	(633.325.650)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.741.500.650	2.108.175.000	(633.325.650)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.741.500.650	2.108.175.000	(633.325.650)	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**245.529.350**	**387.158.850**	**141.629.500**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.593.000	3.593.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.593.000	3.593.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.593.000	3.593.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.057.000	35.860.000	(197.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	36.057.000	35.860.000	(197.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.057.000	35.860.000	(197.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.493.550	11.493.650	(1.999.900)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.493.550	11.493.650	(1.999.900)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.493.550	11.493.650	(1.999.900)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	27.450.000	450.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.000.000	27.450.000	450.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	27.450.000	450.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.088.000	25.134.200	(1.953.800)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	27.088.000	25.134.200	(1.953.800)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.088.000	25.134.200	(1.953.800)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.297.800	283.628.000	145.330.200	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	138.297.800	283.628.000	145.330.200	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	138.297.800	283.628.000	145.330.200	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**101.500.000**	**101.500.000**	**0**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05					Pengadaan Mebel	44.000.000	44.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2			BELANJA MODAL	44.000.000	44.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.000.000	44.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.500.000	57.500.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	57.500.000	57.500.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.500.000	57.500.000	0	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**390.580.190**	**363.099.000**	**(27.481.190)**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.019.790	37.914.400	(1.105.390)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	39.019.790	37.914.400	(1.105.390)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	39.019.790	37.914.400	(1.105.390)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.560.400	321.184.600	(26.375.800)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	347.560.400	321.184.600	(26.375.800)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	347.560.400	321.184.600	(26.375.800)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101.752.000**	**134.278.000**	**32.526.000**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	16.500.000	4.000.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	12.500.000	16.500.000	4.000.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.500.000	16.500.000	4.000.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.482.000	104.508.000	25.026.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	79.482.000	104.508.000	25.026.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	79.482.000	104.508.000	25.026.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.770.000	13.270.000	3.500.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	9.770.000	13.270.000	3.500.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.770.000	13.270.000	3.500.000	
										Jumlah Belanja	**5.329.342.590**	**4.721.333.650**	**(608.008.940)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(5.329.342.590)**	**(4.721.333.650)**	**608.008.940**	
0	**00**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERHUBUNGAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**352.500.000**	**352.500.000**	**0**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	352.500.000	352.500.000	0	
									Jumlah Pendapatan	**352.500.000**	**352.500.000**	**0**	
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**6.845.343.710**	**5.911.623.260**	**(933.720.450)**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**536.744.660**	**526.379.060**	**(10.365.600)**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**232.851.660**	**251.583.860**	**18.732.200**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	189.188.660	188.985.060	(203.600)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	41.909.000	41.705.400	(203.600)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.909.000	41.705.400	(203.600)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	147.279.660	147.279.660	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.279.660	147.279.660	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	43.663.000	62.598.800	18.935.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	43.663.000	62.598.800	18.935.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.663.000	62.598.800	18.935.800	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.05**	**00**				**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**179.071.000**	**149.441.000**	**(29.630.000)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179.071.000	149.441.000	(29.630.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5	1		BELANJA OPERASI	179.071.000	149.441.000	(29.630.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	179.071.000	149.441.000	(29.630.000)	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.08**	**00**				**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**124.822.000**	**125.354.200**	**532.200**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	124.822.000	125.354.200	532.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	124.822.000	125.354.200	532.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.822.000	125.354.200	532.200	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.308.599.050**	**5.385.244.200**	**(923.354.850)**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.906.863.450**	**2.180.938.000**	**(725.925.450)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.906.863.450	2.180.938.000	(725.925.450)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.906.863.450	2.180.938.000	(725.925.450)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.906.863.450	2.180.938.000	(725.925.450)	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**169.652.400**	**233.538.600**	**63.886.200**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.601.000	1.715.000	(1.886.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.601.000	1.715.000	(1.886.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.601.000	1.715.000	(1.886.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.001.000	21.101.000	(5.900.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	27.001.000	21.101.000	(5.900.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.001.000	21.101.000	(5.900.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.500.000	6.370.800	(7.129.200)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.500.000	6.370.800	(7.129.200)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	6.370.800	(7.129.200)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	17.400.000	(9.600.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.000.000	17.400.000	(9.600.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	17.400.000	(9.600.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.002.400	10.317.600	(3.684.800)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	14.002.400	10.317.600	(3.684.800)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.002.400	10.317.600	(3.684.800)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.548.000	176.634.200	92.086.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	84.548.000	176.634.200	92.086.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	84.548.000	176.634.200	92.086.200	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**83.000.000**	**118.500.000**	**35.500.000**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.000.000	118.500.000	35.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	83.000.000	118.500.000	35.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.000.000	118.500.000	35.500.000	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.947.853.200**	**2.565.037.600**	**(382.815.600)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	2.750.000	(1.250.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	2.750.000	(1.250.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	2.750.000	(1.250.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	180.000.000	10.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	170.000.000	180.000.000	10.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	170.000.000	180.000.000	10.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.773.853.200	2.382.287.600	(391.565.600)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.773.853.200	2.382.287.600	(391.565.600)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.773.853.200	2.382.287.600	(391.565.600)	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**201.230.000**	**287.230.000**	**86.000.000**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	17.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	17.500.000	17.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000	17.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.740.000	261.740.000	92.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	169.740.000	261.740.000	92.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	169.740.000	261.740.000	92.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.990.000	7.990.000	(6.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	13.990.000	7.990.000	(6.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.990.000	7.990.000	(6.000.000)	
									Jumlah Belanja	**6.845.343.710**	**5.911.623.260**	**(933.720.450)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(6.492.843.710)**	**(5.559.123.260)**	**933.720.450**	
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	500.000.000	500.000.000	0	
									Jumlah Pendapatan	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	
0	**00**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**5.157.404.770**	**4.980.216.872**	**(177.187.898)**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.395.539.600**	**1.451.014.200**	**55.474.600**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.395.539.600**	**1.451.014.200**	**55.474.600**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	224.461.000	224.750.000	289.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	224.461.000	224.750.000	289.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	224.461.000	224.750.000	289.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06				Pelayanan Informasi Publik	66.936.600	49.121.800	(17.814.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	66.936.600	49.121.800	(17.814.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.936.600	49.121.800	(17.814.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	07				Layanan Hubungan Media	763.300.000	1.006.789.600	243.489.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	763.300.000	1.006.789.600	243.489.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	763.300.000	1.006.789.600	243.489.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	74.619.000	18.349.600	(56.269.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	74.619.000	18.349.600	(56.269.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.619.000	18.349.600	(56.269.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	10				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	85.303.000	39.840.600	(45.462.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	85.303.000	39.840.600	(45.462.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.303.000	39.840.600	(45.462.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	13				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180.920.000	112.162.600	(68.757.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	121.420.000	78.962.600	(42.457.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.420.000	78.962.600	(42.457.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	13	5	2		BELANJA MODAL	59.500.000	33.200.000	(26.300.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	13	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.500.000	33.200.000	(26.300.000)	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**74.461.000**	**35.531.200**	**(38.929.800)**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**74.461.000**	**35.531.200**	**(38.929.800)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	74.461.000	35.531.200	(38.929.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	74.461.000	35.531.200	(38.929.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	74.461.000	35.531.200	(38.929.800)	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.687.404.170**	**3.493.671.472**	**(193.732.698)**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.271.851.850**	**1.903.883.000**	**(367.968.850)**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.271.851.850	1.903.883.000	(367.968.850)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.271.851.850	1.903.883.000	(367.968.850)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.271.851.850	1.903.883.000	(367.968.850)	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**176.765.200**	**159.192.400**	**(17.572.800)**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.599.000	634.000	(2.965.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.599.000	634.000	(2.965.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.599.000	634.000	(2.965.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.139.000	20.656.000	(7.483.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	28.139.000	20.656.000	(7.483.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.139.000	20.656.000	(7.483.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.009.900	2.820.300	(7.189.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	10.009.900	2.820.300	(7.189.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.009.900	2.820.300	(7.189.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.006.000	10.574.000	(16.432.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.006.000	10.574.000	(16.432.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.006.000	10.574.000	(16.432.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.004.500	13.324.500	(13.680.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	27.004.500	13.324.500	(13.680.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.004.500	13.324.500	(13.680.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.006.800	111.183.600	30.176.800	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	81.006.800	111.183.600	30.176.800	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	81.006.800	111.183.600	30.176.800	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.183.787.120**	**1.375.596.072**	**191.808.952**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	1.200.000	(2.800.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	1.200.000	(2.800.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	1.200.000	(2.800.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	681.887.520	921.886.472	239.998.952	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	681.887.520	921.886.472	239.998.952	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	681.887.520	921.886.472	239.998.952	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.030.000	1.690.000	(7.340.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	9.030.000	1.690.000	(7.340.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.030.000	1.690.000	(7.340.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.869.600	450.819.600	(38.050.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	488.869.600	450.819.600	(38.050.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	488.869.600	450.819.600	(38.050.000)	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.000.000**	**55.000.000**	**0**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000	55.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	55.000.000	55.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	55.000.000	0	
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**169.937.000**	**74.558.400**	**(95.378.600)**	
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**169.937.000**	**74.558.400**	**(95.378.600)**	
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**169.937.000**	**74.558.400**	**(95.378.600)**	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	03					Membangun Metadata Statistik Sektoral	50.000.400	11.398.400	(38.602.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	50.000.400	11.398.400	(38.602.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.000.400	11.398.400	(38.602.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	119.936.600	63.160.000	(56.776.600)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	99.936.600	43.160.000	(56.776.600)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	99.936.600	43.160.000	(56.776.600)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	2			BELANJA MODAL	20.000.000	20.000.000	0	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**25.056.600**	**17.186.000**	**(7.870.600)**	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**25.056.600**	**17.186.000**	**(7.870.600)**	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**25.056.600**	**17.186.000**	**(7.870.600)**	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.056.600	17.186.000	(7.870.600)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : Z.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Z.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	25.056.600	17.186.000	(7.870.600)	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.056.600	17.186.000	(7.870.600)	
	Jumlah Belanja	**5.352.398.370**	**5.071.961.272**	**(280.437.098)**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(4.852.398.370)**	**(4.571.961.272)**	**280.437.098**	
0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KOPERASI ,USAHA KECIL , MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**130.000.000**	**130.000.000**	**0**	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	50.000.000	50.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	80.000.000	80.000.000	0	
										Jumlah Pendapatan	**130.000.000**	**130.000.000**	**0**	
0	**00**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**4.047.519.650**	**3.529.680.450**	**(517.839.200)**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**55.119.000**	**37.129.000**	**(17.990.000)**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**					**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**55.119.000**	**37.129.000**	**(17.990.000)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.01	01					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	55.119.000	37.129.000	(17.990.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	55.119.000	37.129.000	(17.990.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	55.119.000	37.129.000	(17.990.000)	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**157.778.000**	**157.777.800**	**(200)**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**					**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**157.778.000**	**157.777.800**	**(200)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	2.01	01					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	157.778.000	157.777.800	(200)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	157.778.000	157.777.800	(200)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	157.778.000	157.777.800	(200)	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**297.472.700**	**281.191.100**	**(16.281.600)**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**07**	**2.01**	**00**					**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**297.472.700**	**281.191.100**	**(16.281.600)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	02					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	34.880.700	18.599.100	(16.281.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	34.880.700	18.599.100	(16.281.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	34.880.700	18.599.100	(16.281.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	04					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	262.592.000	262.592.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	262.592.000	262.592.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	262.592.000	262.592.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.537.149.950**	**3.053.582.550**	**(483.567.400)**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.282.763.350**	**1.878.500.000**	**(404.263.350)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.282.763.350	1.878.500.000	(404.263.350)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.282.763.350	1.878.500.000	(404.263.350)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.282.763.350	1.878.500.000	(404.263.350)	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**180.786.100**	**220.407.800**	**39.621.700**	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.390.400	2.484.000	(2.906.400)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.390.400	2.484.000	(2.906.400)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.390.400	2.484.000	(2.906.400)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	15.796.000	(11.204.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	27.000.000	15.796.000	(11.204.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	15.796.000	(11.204.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.967.200	5.180.200	(7.787.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	12.967.200	5.180.200	(7.787.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.967.200	5.180.200	(7.787.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	13.931.000	(13.069.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	27.000.000	13.931.000	(13.069.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	13.931.000	(13.069.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.007.200	22.956.500	(4.050.700)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	27.007.200	22.956.500	(4.050.700)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.007.200	22.956.500	(4.050.700)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.421.300	160.060.100	78.638.800	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	81.421.300	160.060.100	78.638.800	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.421.300	160.060.100	78.638.800	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**46.200.000**	**40.800.000**	**(5.400.000)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.200.000	40.800.000	(5.400.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	46.200.000	40.800.000	(5.400.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.200.000	40.800.000	(5.400.000)	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**904.053.500**	**833.444.750**	**(70.608.750)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	5.300.000	1.300.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	5.300.000	1.300.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	5.300.000	1.300.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.998.700	236.702.750	(3.295.950)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	239.998.700	236.702.750	(3.295.950)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	239.998.700	236.702.750	(3.295.950)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	660.054.800	591.442.000	(68.612.800)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	660.054.800	591.442.000	(68.612.800)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	660.054.800	591.442.000	(68.612.800)	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**123.347.000**	**80.430.000**	**(42.917.000)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	12.500.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	12.500.000	12.500.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.500.000	12.500.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000	53.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	53.000.000	53.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	53.000.000	53.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	14.930.000	330.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	14.600.000	14.930.000	330.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.600.000	14.930.000	330.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.247.000	0	(43.247.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	30.800.000	0	(30.800.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	30.800.000	0	(30.800.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	09	5	2			BELANJA MODAL	12.447.000	0	(12.447.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.447.000	0	(12.447.000)	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**139.998.600**	**110.429.300**	**(29.569.300)**	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**27.738.800**	**26.985.500**	**(753.300)**	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**27.738.800**	**26.985.500**	**(753.300)**	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	02					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.738.800	26.985.500	(753.300)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	27.738.800	26.985.500	(753.300)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.738.800	26.985.500	(753.300)	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**17.150.600**	**14.611.500**	**(2.539.100)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**04**	**2.02**	**00**					**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**17.150.600**	**14.611.500**	**(2.539.100)**	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.02	01					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.150.600	14.611.500	(2.539.100)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	17.150.600	14.611.500	(2.539.100)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	17.150.600	14.611.500	(2.539.100)	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**95.109.200**	**68.832.300**	**(26.276.900)**	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**95.109.200**	**68.832.300**	**(26.276.900)**	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	01					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	67.891.100	49.714.300	(18.176.800)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	67.891.100	49.714.300	(18.176.800)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	67.891.100	49.714.300	(18.176.800)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	02					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	27.218.100	19.118.000	(8.100.100)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	27.218.100	19.118.000	(8.100.100)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.218.100	19.118.000	(8.100.100)	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**584.711.400**	**361.204.100**	**(233.507.300)**	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**584.270.000**	**351.707.700**	**(232.562.300)**	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**584.270.000**	**351.707.700**	**(232.562.300)**	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02	2.01	04					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	28.116.000	24.168.000	(3.948.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	28.116.000	24.168.000	(3.948.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.116.000	24.168.000	(3.948.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02	2.01	05					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	556.154.000	327.539.700	(228.614.300)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	556.154.000	327.539.700	(228.614.300)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	556.154.000	327.539.700	(228.614.300)	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**10.441.400**	**9.496.400**	**(945.000)**	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**10.441.400**	**9.496.400**	**(945.000)**	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	01					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.441.400	9.496.400	(945.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.441.400	9.496.400	(945.000)	
3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.441.400	9.496.400	(945.000)	
	Jumlah Belanja	**4.782.229.650**	**4.001.313.850**	**(780.915.800)**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(4.652.229.650)**	**(3.871.313.850)**	**780.915.800**	
0 00 2.17.3.30.3.31.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**0**	**0**	**0**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	0	0	0	
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.600.040.830**	**3.511.485.590**	**(1.088.555.240)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**399.998.000**	**399.998.000**	**0**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**399.998.000**	**399.998.000**	**0**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	399.998.000	399.998.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	399.998.000	399.998.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	399.998.000	399.998.000	0	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**143.986.000**	**109.987.000**	**(33.999.000)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**					**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**143.986.000**	**109.987.000**	**(33.999.000)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	85.445.000	68.149.000	(17.296.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	85.445.000	68.149.000	(17.296.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	85.445.000	68.149.000	(17.296.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8.523.000	6.843.000	(1.680.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	8.523.000	6.843.000	(1.680.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.523.000	6.843.000	(1.680.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	50.018.000	34.995.000	(15.023.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	50.018.000	34.995.000	(15.023.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.018.000	34.995.000	(15.023.000)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**511.300.000**	**511.300.000**	**0**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**					**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**511.300.000**	**511.300.000**	**0**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	285.300.000	285.300.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	285.300.000	285.300.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	285.300.000	285.300.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	226.000.000	226.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	226.000.000	226.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	226.000.000	226.000.000	0	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**35.296.000**	**31.386.000**	**(3.910.000)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**35.296.000**	**31.386.000**	**(3.910.000)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.296.000	31.386.000	(3.910.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	35.296.000	31.386.000	(3.910.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.296.000	31.386.000	(3.910.000)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.509.460.830**	**2.458.814.590**	**(1.050.646.240)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.125.137.550**	**1.460.568.000**	**(664.569.550)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.125.137.550	1.460.568.000	(664.569.550)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.125.137.550	1.460.568.000	(664.569.550)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.125.137.550	1.460.568.000	(664.569.550)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**310.142.000**	**439.893.200**	**129.751.200**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.400.100	4.400.100	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.400.100	4.400.100	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.100	4.400.100	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.233.000	70.746.000	18.513.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	52.233.000	70.746.000	18.513.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.233.000	70.746.000	18.513.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.258.000	19.009.800	1.751.800	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	17.258.000	19.009.800	1.751.800	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.258.000	19.009.800	1.751.800	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.700.000	35.420.000	11.720.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	23.700.000	35.420.000	11.720.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000	35.420.000	11.720.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.996.100	20.812.300	(13.183.800)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	33.996.100	20.812.300	(13.183.800)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.996.100	20.812.300	(13.183.800)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.554.800	289.505.000	110.950.200	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	178.554.800	289.505.000	110.950.200	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	178.554.800	289.505.000	110.950.200	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**414.400.000**	**1.900.000**	**(412.500.000)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	414.400.000	1.900.000	(412.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	414.400.000	1.900.000	(412.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.400.000	1.900.000	(212.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000	0	(200.000.000)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**513.239.200**	**462.182.350**	**(51.056.850)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.074.200	92.597.350	(18.476.850)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	111.074.200	92.597.350	(18.476.850)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	111.074.200	92.597.350	(18.476.850)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.660.000	27.160.000	(6.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	33.660.000	27.160.000	(6.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.660.000	27.160.000	(6.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.505.000	338.425.000	(26.080.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	364.505.000	338.425.000	(26.080.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	364.505.000	338.425.000	(26.080.000)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**146.542.080**	**94.271.040**	**(52.271.040)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	14.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.000.000	14.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	14.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	26.500.000	1.500.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	26.500.000	1.500.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	26.500.000	1.500.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.542.080	53.771.040	(53.771.040)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	107.542.080	53.771.040	(53.771.040)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.542.080	53.771.040	(53.771.040)	
									Jumlah Belanja	**4.600.040.830**	**3.511.485.590**	**(1.088.555.240)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(4.600.040.830)**	**(3.511.485.590)**	**1.088.555.240**	
0	**00**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	00	2.22.3.26.2.19.01.0000	00	0.00	00	5				**BELANJA**				
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	00	0.00	00					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**3.537.117.372**	**4.709.599.902**	**1.172.482.530**	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	0.00	00					**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**460.006.000**	**460.006.000**	**0**	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	00					**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**460.006.000**	**460.006.000**	**0**	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50.006.000	50.006.000	0	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	50.006.000	50.006.000	0	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.006.000	50.006.000	0	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	06					Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	410.000.000	410.000.000	0	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	410.000.000	410.000.000	0	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	90.000.000	0	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	06	5	1	05		Belanja Hibah	320.000.000	320.000.000	0	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	0.00	00					**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**3.027.104.372**	**3.974.465.902**	**947.361.530**	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	00					**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**552.089.472**	**1.055.076.392**	**502.986.920**	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	552.089.472	1.055.076.392	502.986.920	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	552.089.472	1.055.076.392	502.986.920	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03	5	1	01		Belanja Pegawai	5.400.000	13.100.000	7.700.000	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	546.689.472	1.041.976.392	495.286.920	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.02	00					**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.245.010.000**	**1.326.886.400**	**81.876.400**	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.02	03					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.245.010.000	1.326.886.400	81.876.400	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	1.245.010.000	1.306.386.400	61.376.400	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	245.010.000	524.006.700	278.996.700	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	1.000.000.000	782.379.700	(217.620.300)	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	0	20.500.000	20.500.000	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	20.500.000	20.500.000	
2	**19**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**03**	**2.05**	**00**				**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**1.230.004.900**	**1.592.503.110**	**362.498.210**	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.05	03				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.230.004.900	1.592.503.110	362.498.210	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.230.004.900	1.559.690.350	329.685.450	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	280.004.900	659.690.350	379.685.450	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.05	03	5	1	05	Belanja Hibah	950.000.000	900.000.000	(50.000.000)	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.05	03	5	2		BELANJA MODAL	0	32.812.760	32.812.760	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.05	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	32.812.760	32.812.760	
2	**19**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**50.007.000**	**275.128.000**	**225.121.000**	
2	**19**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**50.007.000**	**275.128.000**	**225.121.000**	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	04	2.01	03				Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	50.007.000	275.128.000	225.121.000	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	04	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	50.007.000	275.128.000	225.121.000	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	04	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.007.000	275.128.000	225.121.000	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**9.656.280.515**	**13.272.992.781**	**3.616.712.266**	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**4.555.562.165**	**6.924.167.275**	**2.368.605.110**	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.955.411.765**	**5.949.243.575**	**1.993.831.810**	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.955.411.765	5.949.243.575	1.993.831.810	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.955.411.765	5.929.243.575	1.973.831.810	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	22.500.000	58.300.000	35.800.000	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.137.911.765	5.055.943.575	1.918.031.810	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	795.000.000	815.000.000	20.000.000	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	0	20.000.000	20.000.000	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	20.000.000	20.000.000	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**600.150.400**	**974.923.700**	**374.773.300**	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.03	01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	600.150.400	974.923.700	374.773.300	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	600.150.400	951.460.200	351.309.800	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	415.150.400	846.460.200	431.309.800	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.03	01	5	1	05	Belanja Hibah	185.000.000	105.000.000	(80.000.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.03	01	5	2		BELANJA MODAL	0	23.463.500	23.463.500	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.03	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	23.463.500	23.463.500	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**1.541.548.200**	**3.359.194.856**	**1.817.646.656**	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.541.548.200**	**3.359.194.856**	**1.817.646.656**	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	01				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	88.257.200	234.602.600	146.345.400	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	88.257.200	234.602.600	146.345.400	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	88.257.200	234.602.600	146.345.400	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.453.291.000	3.124.592.256	1.671.301.256	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.453.291.000	3.049.292.256	1.596.001.256	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.343.291.000	2.839.292.256	1.496.001.256	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	110.000.000	210.000.000	100.000.000	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	0	75.300.000	75.300.000	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	58.500.000	58.500.000	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	16.800.000	16.800.000	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**76.116.800**	**76.116.800**	**0**	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**76.116.800**	**76.116.800**	**0**	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	76.116.800	76.116.800	0	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	76.116.800	76.116.800	0	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.116.800	76.116.800	0	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.483.053.350**	**2.913.513.850**	**(569.539.500)**	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.468.743.050**	**2.012.291.000**	**(456.452.050)**	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.468.743.050	2.012.291.000	(456.452.050)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.468.743.050	2.012.291.000	(456.452.050)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.468.743.050	2.012.291.000	(456.452.050)	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**189.020.200**	**112.491.550**	**(76.528.650)**	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.514.400	3.324.850	(1.189.550)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.514.400	3.324.850	(1.189.550)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.514.400	3.324.850	(1.189.550)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	14.981.000	(12.019.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	27.000.000	14.981.000	(12.019.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	14.981.000	(12.019.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.500.800	5.777.900	(7.722.900)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.500.800	5.777.900	(7.722.900)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.500.800	5.777.900	(7.722.900)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	18.540.000	(8.460.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.000.000	18.540.000	(8.460.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	18.540.000	(8.460.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.000.000	7.933.600	(19.066.400)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	27.000.000	7.933.600	(19.066.400)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	7.933.600	(19.066.400)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.005.000	61.934.200	(28.070.800)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	90.005.000	61.934.200	(28.070.800)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	90.005.000	61.934.200	(28.070.800)	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**773.790.100**	**737.231.300**	**(36.558.800)**	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.405.700	145.407.100	5.001.400	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	140.405.700	145.407.100	5.001.400	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	140.405.700	145.407.100	5.001.400	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.490.000	9.770.000	(3.720.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.490.000	9.770.000	(3.720.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.490.000	9.770.000	(3.720.000)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	615.894.400	580.054.200	(35.840.200)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	615.894.400	580.054.200	(35.840.200)	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	615.894.400	580.054.200	(35.840.200)	
2	**22**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**51.500.000**	**51.500.000**	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Pemerintahan Daerah				
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000	13.500.000	0	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.500.000	13.500.000	0	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	13.500.000	0	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	38.000.000	0	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	38.000.000	38.000.000	0	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000	38.000.000	0	
3	**26**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**250.000.000**	**547.718.600**	**297.718.600**	
3	**26**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**67.962.000**	**57.097.000**	**(10.865.000)**	
3	**26**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**67.962.000**	**57.097.000**	**(10.865.000)**	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	02				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	67.962.000	57.097.000	(10.865.000)	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	67.962.000	57.097.000	(10.865.000)	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.962.000	57.097.000	(10.865.000)	
3	**26**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**145.832.000**	**147.970.000**	**2.138.000**	
3	**26**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**145.832.000**	**147.970.000**	**2.138.000**	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	02				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	145.832.000	147.970.000	2.138.000	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	145.832.000	147.970.000	2.138.000	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	145.832.000	147.970.000	2.138.000	
3	**26**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**36.206.000**	**342.651.600**	**306.445.600**	
3	**26**	**2.22.3.26.2.19.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**36.206.000**	**342.651.600**	**306.445.600**	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	36.206.000	342.651.600	306.445.600	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	36.206.000	337.151.600	300.945.600	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.206.000	337.151.600	300.945.600	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	0	5.500.000	5.500.000	
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	5.500.000	5.500.000	
									Jumlah Belanja	**13.443.397.887**	**18.530.311.283**	**5.086.913.396**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Total Surplus/(Defisit)	**(13.443.397.887)**	**(18.530.311.283)**	**(5.086.913.396)**	
0 00 2.22.3.26.2.19.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**14.968.723.950**	**14.350.325.288**	**(618.398.662)**	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**11.144.472.000**	**11.721.091.388**	**576.619.388**	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**858.120.000**	**1.318.889.108**	**460.769.108**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	734.800.000	967.442.900	232.642.900	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	64.777.000	92.693.000	27.916.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	1.450.000	0	(1.450.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.327.000	92.693.000	29.366.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	670.023.000	874.749.900	204.726.900	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	670.023.000	874.749.900	204.726.900	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	123.320.000	351.446.208	228.126.208	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	123.320.000	351.446.208	228.126.208	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.600.000	1.600.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	123.320.000	349.846.208	226.526.208	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10.286.352.000**	**10.402.202.280**	**115.850.280**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.275.152.000	10.319.957.880	44.805.880	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	175.152.000	219.957.880	44.805.880	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	16.050.000	3.300.000	(12.750.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.102.000	216.657.880	57.555.880	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	10.100.000.000	10.100.000.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.100.000.000	10.100.000.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	04				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	11.200.000	82.244.400	71.044.400	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	11.200.000	82.244.400	71.044.400	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000	82.244.400	71.044.400	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.824.251.950**	**2.629.233.900**	**(1.195.018.050)**	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.019.721.650**	**1.864.218.000**	**(1.155.503.650)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.019.721.650	1.864.218.000	(1.155.503.650)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.019.721.650	1.864.218.000	(1.155.503.650)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	3.019.721.650	1.864.218.000	(1.155.503.650)	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**220.195.300**	**209.570.900**	**(10.624.400)**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.164.800	5.070.800	(4.094.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	9.164.800	5.070.800	(4.094.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.164.800	5.070.800	(4.094.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.372.000	17.097.000	(12.275.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	29.372.000	17.097.000	(12.275.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	29.372.000	17.097.000	(12.275.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.103.500	25.969.100	(3.134.400)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	29.103.500	25.969.100	(3.134.400)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	29.103.500	25.969.100	(3.134.400)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.491.000	27.150.000	1.659.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	25.491.000	27.150.000	1.659.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	25.491.000	27.150.000	1.659.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.670.000	14.620.000	(10.050.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	24.670.000	14.620.000	(10.050.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.670.000	14.620.000	(10.050.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.394.000	119.664.000	17.270.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	102.394.000	119.664.000	17.270.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	102.394.000	119.664.000	17.270.000	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99.500.000**	**75.500.000**	**(24.000.000)**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	05					Pengadaan Mebel	42.500.000	22.500.000	(20.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2			BELANJA MODAL	42.500.000	22.500.000	(20.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.500.000	22.500.000	(20.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.000.000	53.000.000	(4.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	57.000.000	53.000.000	(4.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.000.000	53.000.000	(4.000.000)	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**292.015.000**	**314.335.000**	**22.320.000**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.200.000	1.200.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	1.200.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.212.000	37.212.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	37.212.000	37.212.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.212.000	37.212.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.603.000	275.923.000	22.320.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	253.603.000	275.923.000	22.320.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	253.603.000	275.923.000	22.320.000	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**192.820.000**	**165.610.000**	**(27.210.000)**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.500.000	17.500.000	(6.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	23.500.000	17.500.000	(6.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.500.000	17.500.000	(6.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.090.000	59.040.000	(9.050.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	68.090.000	59.040.000	(9.050.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	68.090.000	59.040.000	(9.050.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.430.000	4.270.000	(12.160.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	16.430.000	4.270.000	(12.160.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.430.000	4.270.000	(12.160.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.800.000	84.800.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	84.800.000	84.800.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	84.800.000	84.800.000	0	
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**144.891.900**	**69.108.600**	**(75.783.300)**	
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**144.891.900**	**69.108.600**	**(75.783.300)**	
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**110.997.000**	**39.918.900**	**(71.078.100)**	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01					Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	41.496.000	30.850.800	(10.645.200)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	41.496.000	30.850.800	(10.645.200)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	41.496.000	30.850.800	(10.645.200)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02					Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	23.432.000	0	(23.432.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	23.432.000	0	(23.432.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.432.000	0	(23.432.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	46.069.000	9.068.100	(37.000.900)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	46.069.000	9.068.100	(37.000.900)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	46.069.000	9.068.100	(37.000.900)	
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**33.894.900**	**29.189.700**	**(4.705.200)**	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.03	01					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	33.894.900	29.189.700	(4.705.200)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	33.894.900	29.189.700	(4.705.200)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	33.894.900	29.189.700	(4.705.200)	
										Jumlah Belanja	**15.113.615.850**	**14.419.433.888**	**(694.181.962)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(15.113.615.850)**	**(14.419.433.888)**	**694.181.962**	
0	**00**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERTANIAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**23.500.000**	**79.800.000**	**56.300.000**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	23.500.000	25.800.000	2.300.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	0	54.000.000	54.000.000	
										Jumlah Pendapatan	**23.500.000**	**79.800.000**	**56.300.000**	
0	**00**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**22.631.580.800**	**16.641.697.250**	**(5.989.883.550)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.090.451.650**	**1.375.011.550**	**(715.440.100)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**35.373.000**	**22.413.000**	**(12.960.000)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	35.373.000	22.413.000	(12.960.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	35.373.000	22.413.000	(12.960.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	35.373.000	22.413.000	(12.960.000)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**691.376.500**	**639.476.400**	**(51.900.100)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	225.522.500	107.861.000	(117.661.500)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	225.522.500	107.861.000	(117.661.500)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	225.522.500	107.861.000	(117.661.500)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	358.253.000	436.204.400	77.951.400	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	358.253.000	436.204.400	77.951.400	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	01		Belanja Pegawai	1.200.000	0	(1.200.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	357.053.000	436.204.400	79.151.400	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	107.601.000	95.411.000	(12.190.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	107.601.000	95.411.000	(12.190.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	102.601.000	95.411.000	(7.190.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	05		Belanja Hibah	5.000.000	0	(5.000.000)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**188.552.150**	**184.452.150**	**(4.100.000)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02					Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	188.552.150	184.452.150	(4.100.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	188.552.150	184.452.150	(4.100.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	188.552.150	184.452.150	(4.100.000)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.06**	**00**				**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.175.150.000**	**528.670.000**	**(646.480.000)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.175.150.000	528.670.000	(646.480.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.175.150.000	528.670.000	(646.480.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	01	Belanja Pegawai	950.000	0	(950.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.174.200.000	528.670.000	(645.530.000)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**3.776.039.100**	**1.251.132.000**	**(2.524.907.100)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**58.887.000**	**0**	**(58.887.000)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	58.887.000	0	(58.887.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	58.887.000	0	(58.887.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.887.000	0	(58.887.000)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**3.717.152.100**	**1.251.132.000**	**(2.466.020.100)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	148.273.200	1.130.000	(147.143.200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	148.273.200	1.130.000	(147.143.200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.000.000	0	(3.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	145.273.200	1.130.000	(144.143.200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.568.878.900	1.250.002.000	(2.318.876.900)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.568.878.900	1.250.002.000	(2.318.876.900)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	46.500.000	0	(46.500.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.522.378.900	1.250.002.000	(2.272.376.900)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**859.972.500**	**850.290.500**	**(9.682.000)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**107.097.500**	**97.415.500**	**(9.682.000)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	107.097.500	97.415.500	(9.682.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	107.097.500	97.415.500	(9.682.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.097.500	97.415.500	(9.682.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**752.875.000**	**752.875.000**	**0**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	752.875.000	752.875.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	752.875.000	752.875.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	752.875.000	752.875.000	0	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**15.200.000**	**3.260.000**	**(11.940.000)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**15.200.000**	**3.260.000**	**(11.940.000)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.200.000	3.260.000	(11.940.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.200.000	3.260.000	(11.940.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000	3.260.000	(11.940.000)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**692.077.500**	**647.067.400**	**(45.010.100)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**692.077.500**	**647.067.400**	**(45.010.100)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	528.677.000	507.250.900	(21.426.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	528.677.000	507.250.900	(21.426.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	528.677.000	507.250.900	(21.426.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	163.400.500	139.816.500	(23.584.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	163.400.500	139.816.500	(23.584.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.400.500	139.816.500	(23.584.000)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.197.840.050**	**12.514.935.800**	**(2.682.904.250)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.975.776.250**	**10.273.303.000**	**(2.702.473.250)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.975.776.250	10.273.303.000	(2.702.473.250)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.975.776.250	10.273.303.000	(2.702.473.250)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	12.975.776.250	10.273.303.000	(2.702.473.250)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**320.496.800**	**437.467.300**	**116.970.500**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.198.800	7.198.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.198.800	7.198.800	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.198.800	7.198.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.550.000	68.568.000	10.018.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	58.550.000	68.568.000	10.018.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	58.550.000	68.568.000	10.018.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.394.000	16.419.500	3.025.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.394.000	16.419.500	3.025.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.394.000	16.419.500	3.025.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000	39.000.000	(3.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	42.000.000	39.000.000	(3.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	42.000.000	39.000.000	(3.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.155.000	28.605.000	(2.550.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	31.155.000	28.605.000	(2.550.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	31.155.000	28.605.000	(2.550.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.199.000	277.676.000	109.477.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	168.199.000	277.676.000	109.477.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	168.199.000	277.676.000	109.477.000	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**71.500.000**	**51.500.000**	**(20.000.000)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.500.000	51.500.000	(20.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	71.500.000	51.500.000	(20.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.500.000	51.500.000	(20.000.000)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.501.277.000**	**1.423.875.500**	**(77.401.500)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.000.000	57.298.500	(10.701.500)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	68.000.000	57.298.500	(10.701.500)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	68.000.000	57.298.500	(10.701.500)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.429.277.000	1.362.577.000	(66.700.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.429.277.000	1.362.577.000	(66.700.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.429.277.000	1.362.577.000	(66.700.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**328.790.000**	**328.790.000**	**0**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	14.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	14.000.000	14.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	14.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.580.000	299.580.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	299.580.000	299.580.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	299.580.000	299.580.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.210.000	15.210.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	15.210.000	15.210.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.210.000	15.210.000	0	
										Jumlah Belanja	**22.631.580.800**	**16.641.697.250**	**(5.989.883.550)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(22.608.080.800)**	**(16.561.897.250)**	**6.046.183.550**	
0	**00**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**13.980.000**	**13.980.000**	**0**	
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	13.980.000	13.980.000	0	
	Jumlah Pendapatan	**13.980.000**	**13.980.000**	**0**	
0 00 3.32.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**273.197.400**	**430.697.600**	**157.500.200**	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**69.077.000**	**25.763.000**	**(43.314.000)**	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 02 2.01 00	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**69.077.000**	**25.763.000**	**(43.314.000)**	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	69.077.000	25.763.000	(43.314.000)	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	69.077.000	25.763.000	(43.314.000)	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.077.000	25.763.000	(43.314.000)	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 03 0.00 00	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**40.667.200**	**284.379.000**	**243.711.800**	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 00	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**40.667.200**	**284.379.000**	**243.711.800**	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	40.667.200	284.379.000	243.711.800	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	40.667.200	284.379.000	243.711.800	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.667.200	284.379.000	243.711.800	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 04 0.00 00	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**119.186.200**	**104.878.600**	**(14.307.600)**	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 00	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**46.674.000**	**33.139.200**	**(13.534.800)**	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	46.674.000	33.139.200	(13.534.800)	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	46.674.000	33.139.200	(13.534.800)	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.674.000	33.139.200	(13.534.800)	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 00	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**72.512.200**	**71.739.400**	**(772.800)**	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	72.512.200	71.739.400	(772.800)	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	72.512.200	71.739.400	(772.800)	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.512.200	71.739.400	(772.800)	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 05 0.00 00	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**44.267.000**	**15.677.000**	**(28.590.000)**	
2 07 3.32.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 00	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**19.512.800**	**10.977.000**	**(8.535.800)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.01	03					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	19.512.800	10.977.000	(8.535.800)	
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	19.512.800	10.977.000	(8.535.800)	
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.512.800	10.977.000	(8.535.800)	
2	**07**	**3.32.2.07.0.00.01.0000**	**05**	**2.02**	**00**					**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**24.754.200**	**4.700.000**	**(20.054.200)**	
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.02	01					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.754.200	4.700.000	(20.054.200)	
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	24.754.200	4.700.000	(20.054.200)	
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.754.200	4.700.000	(20.054.200)	
3	**32**	**3.32.2.07.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**4.233.117.450**	**3.471.740.150**	**(761.377.300)**	
3	**32**	**3.32.2.07.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.233.117.450**	**3.471.740.150**	**(761.377.300)**	
3	**32**	**3.32.2.07.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.700.000**	**1.442.000**	**(4.258.000)**	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.700.000	1.442.000	(4.258.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	5.700.000	1.442.000	(4.258.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.700.000	1.442.000	(4.258.000)	
3	**32**	**3.32.2.07.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.395.758.250**	**2.713.290.000**	**(682.468.250)**	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.395.758.250	2.713.290.000	(682.468.250)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.395.758.250	2.713.290.000	(682.468.250)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	3.395.758.250	2.713.290.000	(682.468.250)	
3	**32**	**3.32.2.07.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**230.482.100**	**220.040.650**	**(10.441.450)**	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.554.500	2.085.250	(6.469.250)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	8.554.500	2.085.250	(6.469.250)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.554.500	2.085.250	(6.469.250)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.256.000	28.025.500	(19.230.500)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	47.256.000	28.025.500	(19.230.500)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.256.000	28.025.500	(19.230.500)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.321.000	12.914.000	(14.407.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	27.321.000	12.914.000	(14.407.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.321.000	12.914.000	(14.407.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.875.000	12.651.000	(11.224.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	23.875.000	12.651.000	(11.224.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000	12.651.000	(11.224.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.475.600	164.364.900	40.889.300	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	123.475.600	164.364.900	40.889.300	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	123.475.600	164.364.900	40.889.300	
3	**32**	**3.32.2.07.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34.500.000**	**18.000.000**	**(16.500.000)**	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	18.000.000	(16.500.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	34.500.000	18.000.000	(16.500.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.500.000	18.000.000	(16.500.000)	
3	**32**	**3.32.2.07.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**516.797.100**	**473.527.500**	**(43.269.600)**	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.999.300	56.999.300	0	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	56.999.300	56.999.300	0	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.999.300	56.999.300	0	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.797.800	416.528.200	(43.269.600)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	459.797.800	416.528.200	(43.269.600)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	459.797.800	416.528.200	(43.269.600)	
3	**32**	**3.32.2.07.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.880.000**	**45.440.000**	**(4.440.000)**	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000	4.000.000	0	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000	36.000.000	0	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	36.000.000	36.000.000	0	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	36.000.000	0	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.880.000	5.440.000	(4.440.000)	
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	9.880.000	5.440.000	(4.440.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.880.000	5.440.000	(4.440.000)	
	Jumlah Belanja	**4.506.314.850**	**3.902.437.750**	**(603.877.100)**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(4.492.334.850)**	**(3.888.457.750)**	**603.877.100**	
0 00 3.32.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIAT DAERAH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**75.000.000**	**95.000.000**	**20.000.000**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	75.000.000	95.000.000	20.000.000	
									Jumlah Pendapatan	**75.000.000**	**95.000.000**	**20.000.000**	
0	**00**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**SEKRETARIAT DAERAH**	**35.073.163.936**	**36.300.908.916**	**1.227.744.980**	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**7.013.399.100**	**7.170.111.400**	**156.712.300**	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Administrasi Tata Pemerintahan**	**643.436.100**	**402.518.600**	**(240.917.500)**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01				Penataan Administrasi Pemerintahan	106.299.900	91.380.200	(14.919.700)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	106.299.900	91.380.200	(14.919.700)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	106.299.900	91.380.200	(14.919.700)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	381.784.200	183.634.600	(198.149.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	344.284.200	164.134.600	(180.149.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	344.284.200	164.134.600	(180.149.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	37.500.000	19.500.000	(18.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.500.000	19.500.000	(18.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	155.352.000	127.503.800	(27.848.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	155.352.000	127.503.800	(27.848.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	155.352.000	127.503.800	(27.848.200)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**6.063.400.000**	**6.391.969.000**	**328.569.000**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.965.667.000	6.381.849.000	416.182.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.965.667.000	6.381.849.000	416.182.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.350.667.000	3.876.849.000	526.182.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	05	Belanja Hibah	2.615.000.000	2.505.000.000	(110.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	53.003.000	5.670.000	(47.333.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	53.003.000	5.670.000	(47.333.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.003.000	5.670.000	(47.333.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	44.730.000	4.450.000	(40.280.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	44.730.000	4.450.000	(40.280.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	44.730.000	4.450.000	(40.280.000)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**249.999.000**	**273.233.400**	**23.234.400**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	84.127.900	128.714.300	44.586.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	84.127.900	128.714.300	44.586.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	84.127.900	128.714.300	44.586.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02					Fasilitasi Bantuan Hukum	109.476.100	98.718.100	(10.758.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	109.476.100	98.718.100	(10.758.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	109.476.100	98.718.100	(10.758.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	56.395.000	45.801.000	(10.594.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1			BELANJA OPERASI	56.395.000	45.801.000	(10.594.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	56.395.000	45.801.000	(10.594.000)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**56.564.000**	**102.390.400**	**45.826.400**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	56.564.000	102.390.400	45.826.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1			BELANJA OPERASI	56.564.000	102.390.400	45.826.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	56.564.000	102.390.400	45.826.400	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**783.567.700**	**1.048.757.900**	**265.190.200**	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**151.689.000**	**181.910.000**	**30.221.000**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	21.576.000	14.453.000	(7.123.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	21.576.000	14.453.000	(7.123.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	21.576.000	14.453.000	(7.123.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	50.200.000	53.265.000	3.065.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	50.200.000	53.265.000	3.065.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.200.000	53.265.000	3.065.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	79.913.000	114.192.000	34.279.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	79.913.000	114.192.000	34.279.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	79.913.000	114.192.000	34.279.000	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**175.000.000**	**290.652.200**	**115.652.200**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	71.314.000	126.266.400	54.952.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	71.314.000	126.266.400	54.952.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	71.314.000	126.266.400	54.952.400	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51.517.000	51.517.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	51.517.000	51.517.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.517.000	51.517.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.169.000	112.868.800	60.699.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	52.169.000	112.868.800	60.699.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.169.000	112.868.800	60.699.800	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**400.297.600**	**526.354.600**	**126.057.000**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	172.710.600	282.242.600	109.532.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	172.710.600	282.242.600	109.532.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	01	Belanja Pegawai	105.780.000	114.450.000	8.670.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.930.600	167.792.600	100.862.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	165.908.800	174.933.800	9.025.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	165.908.800	174.933.800	9.025.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	165.908.800	174.933.800	9.025.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	61.678.200	69.178.200	7.500.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	61.678.200	69.178.200	7.500.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.678.200	69.178.200	7.500.000	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.04**	**00**				**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**56.581.100**	**49.841.100**	**(6.740.000)**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	29.545.100	27.825.100	(1.720.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	29.545.100	27.825.100	(1.720.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.545.100	27.825.100	(1.720.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	27.036.000	22.016.000	(5.020.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	27.036.000	22.016.000	(5.020.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.036.000	22.016.000	(5.020.000)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**27.276.197.136**	**28.082.039.616**	**805.842.480**	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.540.433.000**	**5.632.792.000**	**(2.907.641.000)**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.540.433.000	5.632.792.000	(2.907.641.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.540.433.000	5.632.792.000	(2.907.641.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	8.540.433.000	5.632.792.000	(2.907.641.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**235.000.000**	**235.000.000**	**0**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	235.000.000	235.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	235.000.000	235.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000	235.000.000	0	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.306.760.500**	**5.106.319.200**	**1.799.558.700**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	128.640.000	191.520.000	62.880.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	128.640.000	191.520.000	62.880.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	128.640.000	191.520.000	62.880.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.812.000	372.728.000	108.916.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	263.812.000	372.728.000	108.916.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	263.812.000	372.728.000	108.916.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.173.500	110.087.000	48.913.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	59.423.500	108.337.000	48.913.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.423.500	108.337.000	48.913.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	1.750.000	1.750.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.750.000	1.750.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.378.805.000	2.349.630.000	970.825.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.378.805.000	2.349.630.000	970.825.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.378.805.000	2.349.630.000	970.825.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.700.000	53.361.200	16.661.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	36.700.000	53.361.200	16.661.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.700.000	53.361.200	16.661.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.437.630.000	2.028.993.000	591.363.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.437.630.000	2.028.993.000	591.363.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.437.630.000	2.028.993.000	591.363.000	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.985.543.600**	**2.352.538.368**	**366.994.768**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	625.000.000	910.900.000	285.900.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	2		BELANJA MODAL	625.000.000	910.900.000	285.900.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	625.000.000	910.900.000	285.900.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.360.543.600	1.441.638.368	81.094.768	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1			BELANJA OPERASI	283.143.600	550.349.868	267.206.268	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	283.143.600	550.349.868	267.206.268	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	1.077.400.000	891.288.500	(186.111.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	649.400.000	876.288.500	226.888.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	428.000.000	0	(428.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	15.000.000	15.000.000	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.274.165.936**	**7.519.722.848**	**245.556.912**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.400.000	47.400.000	(3.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	50.400.000	47.400.000	(3.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.400.000	47.400.000	(3.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.442.043.336	1.522.285.248	80.241.912	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.442.043.336	1.522.285.248	80.241.912	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.442.043.336	1.522.285.248	80.241.912	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.663.200.000	1.967.850.000	304.650.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	1.663.200.000	1.967.850.000	304.650.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.663.200.000	1.967.850.000	304.650.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.118.522.600	3.982.187.600	(136.335.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	4.118.522.600	3.982.187.600	(136.335.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.118.522.600	3.982.187.600	(136.335.000)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.460.106.400**	**1.725.950.000**	**265.843.600**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.150.000	338.570.000	90.420.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	248.150.000	338.570.000	90.420.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	248.150.000	338.570.000	90.420.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.021.956.400	1.165.880.000	143.923.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.021.956.400	1.165.880.000	143.923.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.021.956.400	1.165.880.000	143.923.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.000.000	221.500.000	31.500.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	190.000.000	221.500.000	31.500.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	221.500.000	31.500.000	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.11**	**00**				**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**908.473.000**	**1.026.708.500**	**118.235.500**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	178.473.000	96.708.500	(81.764.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	1		BELANJA OPERASI	178.473.000	96.708.500	(81.764.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	1	01	Belanja Pegawai	178.473.000	96.708.500	(81.764.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	270.000.000	470.000.000	200.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	02	5	1		BELANJA OPERASI	270.000.000	470.000.000	200.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000	470.000.000	200.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	03				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	60.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	03	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04	5	1		BELANJA OPERASI	400.000.000	400.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04	5	1	01	Belanja Pegawai	400.000.000	400.000.000	0	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.12**	**00**				**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**16.325.000**	**16.325.000**	**0**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16.325.000	16.325.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.325.000	16.325.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.325.000	16.325.000	0	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.13**	**00**				**Penataan Organisasi**	**249.994.800**	**267.885.000**	**17.890.200**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	85.105.800	84.612.000	(493.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	1		BELANJA OPERASI	85.105.800	84.612.000	(493.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.105.800	84.612.000	(493.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	76.319.000	86.255.000	9.936.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1		BELANJA OPERASI	76.319.000	86.255.000	9.936.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.319.000	86.255.000	9.936.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	88.570.000	97.018.000	8.448.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1		BELANJA OPERASI	88.570.000	97.018.000	8.448.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	88.570.000	97.018.000	8.448.000	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.14**	**00**					**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**3.299.394.900**	**4.198.798.700**	**899.403.800**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01					Fasilitasi Keprotokolan	3.299.394.900	4.198.798.700	899.403.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.299.394.900	4.198.798.700	899.403.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.299.394.900	4.198.798.700	899.403.800	
										Jumlah Belanja	**35.073.163.936**	**36.300.908.916**	**1.227.744.980**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(34.998.163.936)**	**(36.205.908.916)**	**(1.207.744.980)**	
0	**00**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAU RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIAT DPRD

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**SEKRETARIAT DPRD**	**36.627.235.532**	**40.560.074.619**	**3.932.839.087**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**17.986.078.500**	**23.738.322.600**	**5.752.244.100**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**3.467.561.000**	**4.044.743.200**	**577.182.200**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.061.961.000	3.847.113.200	785.152.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.061.961.000	3.847.113.200	785.152.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.061.961.000	3.847.113.200	785.152.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	405.600.000	197.630.000	(207.970.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	405.600.000	197.630.000	(207.970.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	405.600.000	197.630.000	(207.970.000)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**3.338.705.500**	**2.533.852.400**	**(804.853.100)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Pembahasan KUA dan PPAS	669.956.000	461.744.600	(208.211.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	669.956.000	461.744.600	(208.211.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	669.956.000	461.744.600	(208.211.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	669.956.000	394.910.000	(275.046.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	669.956.000	394.910.000	(275.046.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	669.956.000	394.910.000	(275.046.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03				Pembahasan APBD	666.264.500	356.370.500	(309.894.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	666.264.500	356.370.500	(309.894.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	666.264.500	356.370.500	(309.894.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04				Pembahasan APBD Perubahan	666.264.500	662.842.700	(3.421.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	666.264.500	662.842.700	(3.421.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	666.264.500	662.842.700	(3.421.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	666.264.500	657.984.600	(8.279.900)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	666.264.500	657.984.600	(8.279.900)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	666.264.500	657.984.600	(8.279.900)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**2.461.790.000**	**2.960.853.000**	**499.063.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02				Pendalaman Tugas DPRD	1.890.370.000	2.102.033.000	211.663.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.890.370.000	2.102.033.000	211.663.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.890.370.000	2.102.033.000	211.663.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	571.420.000	858.820.000	287.400.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	571.420.000	858.820.000	287.400.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	571.420.000	858.820.000	287.400.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.05**	**00**				**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**8.718.022.000**	**14.198.874.000**	**5.480.852.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01				Kunjungan Kerja dalam Daerah	8.381.612.000	13.923.194.000	5.541.582.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.381.612.000	13.923.194.000	5.541.582.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.381.612.000	13.923.194.000	5.541.582.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03				Pelaksanaan Reses	336.410.000	275.680.000	(60.730.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	336.410.000	275.680.000	(60.730.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	336.410.000	275.680.000	(60.730.000)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.641.157.032**	**16.821.752.019**	**(1.819.405.013)**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.995.354.935**	**1.656.532.205**	**(338.822.730)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.995.354.935	1.656.532.205	(338.822.730)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.995.354.935	1.656.532.205	(338.822.730)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.995.354.935	1.656.532.205	(338.822.730)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**226.500.000**	**220.500.000**	**(6.000.000)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	226.500.000	220.500.000	(6.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	226.500.000	220.500.000	(6.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	226.500.000	220.500.000	(6.000.000)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.372.851.600**	**1.301.503.800**	**(71.347.800)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.930.000	27.930.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.930.000	27.930.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.930.000	27.930.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.122.000	276.025.000	(25.097.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	296.622.000	276.025.000	(20.597.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	296.622.000	276.025.000	(20.597.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	4.500.000	0	(4.500.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000	0	(4.500.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	155.675.100	120.758.700	(34.916.400)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	155.675.100	120.758.700	(34.916.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	155.675.100	120.758.700	(34.916.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.250.000	183.243.000	(55.007.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	238.250.000	183.243.000	(55.007.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	238.250.000	183.243.000	(55.007.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	284.492.900	252.664.100	(31.828.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	284.492.900	252.664.100	(31.828.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	284.492.900	252.664.100	(31.828.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.381.600	440.883.000	75.501.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	365.381.600	440.883.000	75.501.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	365.381.600	440.883.000	75.501.400	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**89.000.000**	**21.000.000**	**(68.000.000)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.000.000	21.000.000	(68.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	89.000.000	21.000.000	(68.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.000.000	21.000.000	(68.000.000)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.803.871.032**	**1.621.741.936**	**(182.129.096)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	382.467.032	317.465.936	(65.001.096)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	382.467.032	317.465.936	(65.001.096)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	382.467.032	317.465.936	(65.001.096)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.411.404.000	1.298.276.000	(113.128.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.411.404.000	1.298.276.000	(113.128.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.411.404.000	1.298.276.000	(113.128.000)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.009.794.300**	**498.935.300**	**(510.859.000)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	425.500.000	137.713.000	(287.787.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	425.500.000	137.713.000	(287.787.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	425.500.000	137.713.000	(287.787.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.660.000	108.500.000	(68.160.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	176.660.000	108.500.000	(68.160.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	176.660.000	108.500.000	(68.160.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.634.300	132.634.300	(175.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	307.634.300	132.634.300	(175.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	307.634.300	132.634.300	(175.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	120.088.000	20.088.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	120.088.000	20.088.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	120.088.000	20.088.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.15**	**00**				**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**11.807.885.165**	**11.211.338.778**	**(596.546.387)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.807.885.165	11.211.338.778	(596.546.387)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.807.885.165	11.211.338.778	(596.546.387)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	1	01	Belanja Pegawai	11.807.885.165	11.211.338.778	(596.546.387)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.16**	**00**				**Layanan Administrasi DPRD**	**335.900.000**	**290.200.000**	**(45.700.000)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	335.900.000	290.200.000	(45.700.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1		BELANJA OPERASI	335.900.000	290.200.000	(45.700.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	335.900.000	290.200.000	(45.700.000)	
									Jumlah Belanja	**36.627.235.532**	**40.560.074.619**	**3.932.839.087**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(36.627.235.532)**	**(40.560.074.619)**	**(3.932.839.087)**	
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**PERENCANAAN**	**4.456.865.850**	**3.763.083.350**	**(693.782.500)**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**588.102.200**	**607.025.300**	**18.923.100**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**534.758.700**	**588.842.100**	**54.083.400**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	139.958.100	89.834.500	(50.123.600)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	139.958.100	89.834.500	(50.123.600)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	139.958.100	89.834.500	(50.123.600)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	394.800.600	499.007.600	104.207.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	394.800.600	499.007.600	104.207.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	394.800.600	499.007.600	104.207.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**32.573.600**	**13.393.200**	**(19.180.400)**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	01					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	32.573.600	13.393.200	(19.180.400)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	32.573.600	13.393.200	(19.180.400)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	32.573.600	13.393.200	(19.180.400)	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**20.769.900**	**4.790.000**	**(15.979.900)**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	20.769.900	4.790.000	(15.979.900)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	20.769.900	4.790.000	(15.979.900)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.769.900	4.790.000	(15.979.900)	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**556.673.900**	**400.936.700**	**(155.737.200)**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**83.115.400**	**72.014.000**	**(11.101.400)**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.296.000	23.904.000	(5.392.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	29.296.000	23.904.000	(5.392.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	29.296.000	23.904.000	(5.392.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan	53.819.400	48.110.000	(5.709.400)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									RKPD)				
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	53.819.400	48.110.000	(5.709.400)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.819.400	48.110.000	(5.709.400)	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**77.170.000**	**32.669.000**	**(44.501.000)**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.014.000	12.664.000	(24.350.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	37.014.000	12.664.000	(24.350.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.014.000	12.664.000	(24.350.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.156.000	20.005.000	(20.151.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	40.156.000	20.005.000	(20.151.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.156.000	20.005.000	(20.151.000)	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**396.388.500**	**296.253.700**	**(100.134.800)**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	163.821.400	107.383.600	(56.437.800)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	163.821.400	107.383.600	(56.437.800)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.821.400	107.383.600	(56.437.800)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	194.993.100	180.844.100	(14.149.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	194.993.100	180.844.100	(14.149.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	194.993.100	180.844.100	(14.149.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	37.574.000	8.026.000	(29.548.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	37.574.000	8.026.000	(29.548.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.574.000	8.026.000	(29.548.000)	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.312.089.750**	**2.755.121.350**	**(556.968.400)**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.394.508.450**	**1.810.532.000**	**(583.976.450)**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.508.450	1.810.532.000	(583.976.450)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.394.508.450	1.810.532.000	(583.976.450)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.394.508.450	1.810.532.000	(583.976.450)	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**310.012.500**	**395.255.800**	**85.243.300**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.220.000	10.287.500	2.067.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	8.220.000	10.287.500	2.067.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.220.000	10.287.500	2.067.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.566.000	41.349.000	8.783.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	32.566.000	41.349.000	8.783.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	32.566.000	41.349.000	8.783.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.681.500	34.634.300	11.952.800	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	22.681.500	34.634.300	11.952.800	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.681.500	34.634.300	11.952.800	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.040.000	53.386.000	33.346.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	20.040.000	53.386.000	33.346.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.040.000	53.386.000	33.346.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.200.000	37.221.400	14.021.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	23.200.000	37.221.400	14.021.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.200.000	37.221.400	14.021.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.305.000	218.377.600	15.072.600	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	203.305.000	218.377.600	15.072.600	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	203.305.000	218.377.600	15.072.600	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**102.500.000**	**102.500.000**	**0**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.500.000	102.500.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	102.500.000	102.500.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.500.000	102.500.000	0	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**458.318.800**	**400.083.550**	**(58.235.250)**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.000.000	105.000.750	(9.999.250)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	115.000.000	105.000.750	(9.999.250)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	105.000.750	(9.999.250)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.380.000	15.880.000	5.500.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	10.380.000	15.880.000	5.500.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.380.000	15.880.000	5.500.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.938.800	274.202.800	(53.736.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	327.938.800	274.202.800	(53.736.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	327.938.800	274.202.800	(53.736.000)	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.750.000**	**46.750.000**	**0**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	22.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.000.000	22.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	22.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.750.000	24.750.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.750.000	24.750.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000	24.750.000	0	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**151.174.100**	**528.110.300**	**376.936.200**	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**151.174.100**	**528.110.300**	**376.936.200**	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**85.896.400**	**402.345.700**	**316.449.300**	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	13				Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	17.473.500	88.836.600	71.363.100	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	17.473.500	88.836.600	71.363.100	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.473.500	88.836.600	71.363.100	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	14				Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	68.422.900	313.509.100	245.086.200	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1		BELANJA OPERASI	68.422.900	313.509.100	245.086.200	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	68.422.900	313.509.100	245.086.200	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**65.277.700**	**125.764.600**	**60.486.900**	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	65.277.700	125.764.600	60.486.900	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	65.277.700	125.764.600	60.486.900	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.277.700	125.764.600	60.486.900	
									Jumlah Belanja	**4.608.039.950**	**4.291.193.650**	**(316.846.300)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Total Surplus/(Defisit)	**(4.608.039.950)**	**(4.291.193.650)**	**316.846.300**	
0 00 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN KEUANGAN DAERAH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**42.337.267.789**	**46.915.775.709**	**4.578.507.920**	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01	Pajak Daerah	22.776.715.953	23.850.981.411	1.074.265.458	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	0	55.000.000	55.000.000	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836	4.832.210.107	508.144.271	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	15.236.486.000	18.177.584.191	2.941.098.191	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**812.206.674.716**	**828.428.362.269**	**16.221.687.553**	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	760.965.265.000	760.881.520.907	(83.744.093)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.241.409.716	67.546.841.362	16.305.431.646	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.800.000.000**	**3.200.000.000**	**(600.000.000)**	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01	Pendapatan Hibah	3.800.000.000	3.200.000.000	(600.000.000)	
	Jumlah Pendapatan	**858.343.942.505**	**878.544.137.978**	**20.200.195.473**	
0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00	**KEUANGAN**	**124.671.252.861**	**127.599.377.439**	**2.928.124.578**	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**115.958.136.600**	**119.141.725.939**	**3.183.589.339**	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.919.400.000**	**1.875.504.000**	**(43.896.000)**	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	300.041.000	260.063.000	(39.978.000)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	300.041.000	260.063.000	(39.978.000)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.041.000	260.063.000	(39.978.000)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	262.800.000	200.193.000	(62.607.000)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	262.800.000	200.193.000	(62.607.000)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	262.800.000	200.193.000	(62.607.000)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	124.326.000	347.647.000	223.321.000	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	124.326.000	347.647.000	223.321.000	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.326.000	347.647.000	223.321.000	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	944.173.000	916.011.000	(28.162.000)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	944.173.000	916.011.000	(28.162.000)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	944.173.000	916.011.000	(28.162.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	288.060.000	151.590.000	(136.470.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	288.060.000	151.590.000	(136.470.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	288.060.000	151.590.000	(136.470.000)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**435.003.000**	**269.695.000**	**(165.308.000)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.557.000	51.995.000	(19.562.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	71.557.000	51.995.000	(19.562.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.557.000	51.995.000	(19.562.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	363.446.000	217.700.000	(145.746.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	363.446.000	217.700.000	(145.746.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	363.446.000	217.700.000	(145.746.000)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**465.844.000**	**499.782.200**	**33.938.200**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	64.012.000	157.584.400	93.572.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	64.012.000	157.584.400	93.572.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.012.000	157.584.400	93.572.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	163.036.000	118.659.000	(44.377.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	163.036.000	118.659.000	(44.377.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.036.000	118.659.000	(44.377.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	222.423.000	213.688.800	(8.734.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	222.423.000	213.688.800	(8.734.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	222.423.000	213.688.800	(8.734.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	11.565.000	5.042.000	(6.523.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	11.565.000	5.042.000	(6.523.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.565.000	5.042.000	(6.523.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4.808.000	4.808.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	1		BELANJA OPERASI	4.808.000	4.808.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.808.000	4.808.000	0	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**112.942.394.000**	**116.230.788.739**	**3.288.394.739**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	111.942.394.000	112.076.408.030	134.014.030	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1		BELANJA OPERASI	960.000.000	1.110.000.000	150.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	960.000.000	1.110.000.000	150.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	4		BELANJA TRANSFER	110.982.394.000	110.966.408.030	(15.985.970)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	4	01	Belanja Bagi Hasil	2.632.820.000	2.730.772.030	97.952.030	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	108.349.574.000	108.235.636.000	(113.938.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000	4.154.380.709	3.154.380.709	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	4.154.380.709	3.154.380.709	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	5	3	01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	4.154.380.709	3.154.380.709	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.05**	**00**				**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**195.495.600**	**265.956.000**	**70.460.400**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01				Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	15.497.000	15.497.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.497.000	15.497.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.497.000	15.497.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	179.998.600	250.459.000	70.460.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	79.998.600	151.159.000	71.160.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.998.600	151.159.000	71.160.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	2		BELANJA MODAL	100.000.000	99.300.000	(700.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000	99.300.000	(700.000)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**494.329.000**	**355.046.000**	**(139.283.000)**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**494.329.000**	**355.046.000**	**(139.283.000)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	55.810.000	38.754.600	(17.055.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	55.810.000	38.754.600	(17.055.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.810.000	38.754.600	(17.055.400)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05					Penatausahaan Barang Milik Daerah	122.891.000	84.318.000	(38.573.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	122.891.000	84.318.000	(38.573.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	122.891.000	84.318.000	(38.573.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06					Inventarisasi Barang Milik Daerah	67.930.000	44.755.600	(23.174.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	67.930.000	44.755.600	(23.174.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	67.930.000	44.755.600	(23.174.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	247.698.000	187.217.800	(60.480.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5	1			BELANJA OPERASI	247.698.000	127.217.800	(120.480.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	247.698.000	127.217.800	(120.480.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5	2			BELANJA MODAL	0	60.000.000	60.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	60.000.000	60.000.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**679.726.600**	**759.287.800**	**79.561.200**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**					**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**679.726.600**	**759.287.800**	**79.561.200**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	231.034.600	322.038.800	91.004.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	231.034.600	322.038.800	91.004.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	231.034.600	322.038.800	91.004.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	49.120.000	32.565.000	(16.555.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	49.120.000	32.565.000	(16.555.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	49.120.000	32.565.000	(16.555.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	182.122.000	135.000.000	(47.122.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	182.122.000	135.000.000	(47.122.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	182.122.000	135.000.000	(47.122.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	169.100.000	136.044.000	(33.056.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1			BELANJA OPERASI	169.100.000	136.044.000	(33.056.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	169.100.000	136.044.000	(33.056.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	48.350.000	133.640.000	85.290.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5	1			BELANJA OPERASI	48.350.000	133.640.000	85.290.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.350.000	133.640.000	85.290.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.539.060.661**	**7.343.317.700**	**(195.742.961)**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.077.153.611**	**5.226.794.900**	**(850.358.711)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.077.153.611	5.226.794.900	(850.358.711)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.077.153.611	5.226.794.900	(850.358.711)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	6.077.153.611	5.226.794.900	(850.358.711)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**626.655.400**	**945.974.500**	**319.319.100**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.500	11.889.500	(3.100.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.989.500	11.889.500	(3.100.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.989.500	11.889.500	(3.100.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.999.000	153.567.000	3.568.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	149.999.000	153.567.000	3.568.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.000	153.567.000	3.568.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.999.000	57.683.000	4.684.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	52.999.000	57.683.000	4.684.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.999.000	57.683.000	4.684.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.632.000	120.530.000	67.898.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	52.632.000	120.530.000	67.898.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.632.000	120.530.000	67.898.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	169.499.900	214.346.600	44.846.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	169.499.900	214.346.600	44.846.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	169.499.900	214.346.600	44.846.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.536.000	387.958.400	201.422.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	186.536.000	387.958.400	201.422.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.536.000	387.958.400	201.422.400	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**41.000.000**	**125.500.000**	**84.500.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	24.000.000	19.500.000	(4.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	24.000.000	19.500.000	(4.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000	19.500.000	(4.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	106.000.000	89.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	17.000.000	106.000.000	89.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000	106.000.000	89.000.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**699.023.650**	**934.820.300**	**235.796.650**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	11.000.000	(5.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.000.000	11.000.000	(5.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000	11.000.000	(5.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.600.000	390.547.500	197.947.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	192.600.000	356.775.500	164.175.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.600.000	356.775.500	164.175.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	2		BELANJA MODAL	0	33.772.000	33.772.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	33.772.000	33.772.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.403.200	77.683.200	30.280.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	47.403.200	77.683.200	30.280.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.403.200	77.683.200	30.280.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.020.450	455.589.600	12.569.150	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	443.020.450	455.589.600	12.569.150	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	443.020.450	455.589.600	12.569.150	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.228.000**	**110.228.000**	**15.000.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	16.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.500.000	16.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000	16.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.600.000	71.600.000	15.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	56.600.000	71.600.000	15.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.600.000	71.600.000	15.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.128.000	22.128.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	22.128.000	22.128.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.128.000	22.128.000	0	
									Jumlah Belanja	**124.671.252.861**	**127.599.377.439**	**2.928.124.578**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Total Surplus/(Defisit)	**733.672.689.644**	**750.944.760.539**	**17.272.070.895**	
0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**114.029.344.163**	**41.912.532.080**	**(72.116.812.083)**	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.029.344.163	41.912.532.080	(72.116.812.083)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**114.029.344.163**	**41.912.532.080**	**(72.116.812.083)**	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**0**	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KEPEGAWAIAN**	**5.393.819.396**	**4.365.799.771**	**(1.028.019.625)**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.200.899.000**	**1.083.209.425**	**(117.689.575)**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**235.064.000**	**325.701.000**	**90.637.000**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.000.000	12.948.000	(7.052.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	20.000.000	12.948.000	(7.052.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	12.948.000	(7.052.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	150.000.000	271.392.000	121.392.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	271.392.000	121.392.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	271.392.000	121.392.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	20.038.000	14.099.000	(5.939.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	20.038.000	14.099.000	(5.939.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.038.000	14.099.000	(5.939.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.032.000	16.282.000	(8.750.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	1			BELANJA OPERASI	25.032.000	16.282.000	(8.750.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	25.032.000	16.282.000	(8.750.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11					Pengelolaan Data Kepegawaian	19.994.000	10.980.000	(9.014.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1			BELANJA OPERASI	19.994.000	10.980.000	(9.014.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.994.000	10.980.000	(9.014.000)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Mutasi dan Promosi ASN**	**64.488.000**	**59.785.000**	**(4.703.000)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01					Pengelolaan Mutasi ASN	20.015.000	19.815.000	(200.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	20.015.000	19.815.000	(200.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.015.000	19.815.000	(200.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	44.473.000	39.970.000	(4.503.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	44.473.000	39.970.000	(4.503.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	44.473.000	39.970.000	(4.503.000)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Pengembangan Kompetensi ASN**	**726.957.000**	**542.979.425**	**(183.977.575)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	34.908.000	27.497.000	(7.411.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	34.908.000	27.497.000	(7.411.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	34.908.000	27.497.000	(7.411.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	02					Pengelolaan Assessment Center	157.486.000	168.361.000	10.875.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	157.486.000	168.361.000	10.875.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	157.486.000	168.361.000	10.875.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	03					Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	529.570.000	343.698.425	(185.871.575)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1			BELANJA OPERASI	529.570.000	343.698.425	(185.871.575)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	529.570.000	343.698.425	(185.871.575)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	4.993.000	3.423.000	(1.570.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1			BELANJA OPERASI	4.993.000	3.423.000	(1.570.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.993.000	3.423.000	(1.570.000)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**174.390.000**	**154.744.000**	**(19.646.000)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.418.000	4.058.000	(360.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	4.418.000	4.058.000	(360.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.418.000	4.058.000	(360.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	149.985.000	138.327.000	(11.658.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1			BELANJA OPERASI	149.985.000	138.327.000	(11.658.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	149.985.000	138.327.000	(11.658.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	19.987.000	12.359.000	(7.628.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1			BELANJA OPERASI	19.987.000	12.359.000	(7.628.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.987.000	12.359.000	(7.628.000)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.192.920.396**	**3.282.590.346**	**(910.330.050)**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**33.246.000**	**39.350.000**	**6.104.000**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.246.000	39.350.000	6.104.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	33.246.000	39.350.000	6.104.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	33.246.000	39.350.000	6.104.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.616.062.900**	**2.682.461.000**	**(933.601.900)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.616.062.900	2.682.461.000	(933.601.900)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.616.062.900	2.682.461.000	(933.601.900)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	3.616.062.900	2.682.461.000	(933.601.900)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**207.702.600**	**243.604.700**	**35.902.100**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.500	976.000	(3.524.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.500.500	976.000	(3.524.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.500.500	976.000	(3.524.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.053.000	38.670.000	(6.383.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	45.053.000	38.670.000	(6.383.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	45.053.000	38.670.000	(6.383.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.499.800	10.116.700	(3.383.100)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	13.499.800	10.116.700	(3.383.100)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.499.800	10.116.700	(3.383.100)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.681.000	24.142.000	(3.539.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	27.681.000	24.142.000	(3.539.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.681.000	24.142.000	(3.539.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.003.300	22.750.000	(13.253.300)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	36.003.300	22.750.000	(13.253.300)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.003.300	22.750.000	(13.253.300)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.965.000	146.950.000	65.985.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	80.965.000	146.950.000	65.985.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	80.965.000	146.950.000	65.985.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	22.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	22.000.000	22.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000	22.000.000	0	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**264.918.896**	**254.448.896**	**(10.470.000)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.840.496	50.840.496	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	50.840.496	50.840.496	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.840.496	50.840.496	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.078.400	199.608.400	(10.470.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	210.078.400	199.608.400	(10.470.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	210.078.400	199.608.400	(10.470.000)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.990.000**	**40.725.750**	**(8.264.250)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	14.108.250	(891.750)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	14.108.250	(891.750)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	14.108.250	(891.750)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.500.000	19.457.500	(1.042.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.500.000	19.457.500	(1.042.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000	19.457.500	(1.042.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.490.000	7.160.000	(6.330.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	13.490.000	7.160.000	(6.330.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.490.000	7.160.000	(6.330.000)	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.012.724.000**	**891.477.000**	**(121.247.000)**	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**1.012.724.000**	**891.477.000**	**(121.247.000)**	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**16.690.000**	**3.550.000**	**(13.140.000)**	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	01				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	16.690.000	3.550.000	(13.140.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.690.000	3.550.000	(13.140.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.690.000	3.550.000	(13.140.000)	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**996.034.000**	**887.927.000**	**(108.107.000)**	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	996.034.000	887.927.000	(108.107.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	996.034.000	887.927.000	(108.107.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	996.034.000	887.927.000	(108.107.000)	
									Jumlah Belanja	**6.406.543.396**	**5.257.276.771**	**(1.149.266.625)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(6.406.543.396)**	**(5.257.276.771)**	**1.149.266.625**	
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT DAERAH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kabupaten

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**INSPEKTORAT DAERAH**	**8.799.958.200**	**5.767.632.900**	**(3.032.325.300)**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**712.887.600**	**665.799.600**	**(47.088.000)**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**656.907.600**	**620.249.000**	**(36.658.600)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	64.660.000	177.381.200	112.721.200	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	64.660.000	177.381.200	112.721.200	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.660.000	177.381.200	112.721.200	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	93.718.000	62.451.000	(31.267.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	93.718.000	62.451.000	(31.267.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.718.000	62.451.000	(31.267.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03				Reviu Laporan Kinerja	53.280.000	36.901.000	(16.379.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	53.280.000	36.901.000	(16.379.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.280.000	36.901.000	(16.379.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04				Reviu Laporan Keuangan	85.000.000	68.752.000	(16.248.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	85.000.000	68.752.000	(16.248.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	68.752.000	(16.248.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05				Pengawasan Desa	128.489.600	132.666.800	4.177.200	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	128.489.600	132.666.800	4.177.200	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	128.489.600	132.666.800	4.177.200	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06				Kerja Sama Pengawasan Internal	136.620.000	88.538.200	(48.081.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	136.620.000	88.538.200	(48.081.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	136.620.000	88.538.200	(48.081.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	95.140.000	53.558.800	(41.581.200)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	95.140.000	53.558.800	(41.581.200)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.140.000	53.558.800	(41.581.200)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**55.980.000**	**45.550.600**	**(10.429.400)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55.980.000	45.550.600	(10.429.400)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	55.980.000	45.550.600	(10.429.400)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.980.000	45.550.600	(10.429.400)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kabupaten

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**690.212.400**	**501.570.200**	**(188.642.200)**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**145.160.000**	**97.675.400**	**(47.484.600)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	145.160.000	97.675.400	(47.484.600)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	145.160.000	97.675.400	(47.484.600)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	145.160.000	97.675.400	(47.484.600)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Pendampingan dan Asistensi**	**545.052.400**	**403.894.800**	**(141.157.600)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	260.997.400	200.496.400	(60.501.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	260.997.400	200.496.400	(60.501.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	260.997.400	200.496.400	(60.501.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	132.222.000	95.897.000	(36.325.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	132.222.000	95.897.000	(36.325.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	132.222.000	95.897.000	(36.325.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	151.833.000	107.501.400	(44.331.600)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	151.833.000	107.501.400	(44.331.600)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	151.833.000	107.501.400	(44.331.600)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.396.858.200**	**4.600.263.100**	**(2.796.595.100)**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**104.610.000**	**69.864.800**	**(34.745.200)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.610.000	69.864.800	(34.745.200)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	104.610.000	69.864.800	(34.745.200)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	104.610.000	69.864.800	(34.745.200)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.947.410.600**	**3.039.508.000**	**(1.907.902.600)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.947.410.600	3.039.508.000	(1.907.902.600)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.947.410.600	3.039.508.000	(1.907.902.600)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	4.947.410.600	3.039.508.000	(1.907.902.600)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**297.726.000**	**160.893.000**	**(136.833.000)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	297.726.000	160.893.000	(136.833.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kabupaten

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	297.726.000	160.893.000	(136.833.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	297.726.000	160.893.000	(136.833.000)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**445.970.000**	**317.084.600**	**(128.885.400)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.448.000	7.633.000	(5.815.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.448.000	7.633.000	(5.815.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.448.000	7.633.000	(5.815.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.418.000	45.485.000	(54.933.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.418.000	45.485.000	(54.933.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.418.000	45.485.000	(54.933.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.035.000	11.645.000	(54.390.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	14.735.000	11.645.000	(3.090.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.735.000	11.645.000	(3.090.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	51.300.000	0	(51.300.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.300.000	0	(51.300.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.870.000	33.160.000	(15.710.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	48.870.000	33.160.000	(15.710.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.870.000	33.160.000	(15.710.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.050.000	28.018.000	(8.032.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	36.050.000	28.018.000	(8.032.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.050.000	28.018.000	(8.032.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.680.000	(120.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.000	1.680.000	(120.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	1.680.000	(120.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.349.000	189.463.600	10.114.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	179.349.000	189.463.600	10.114.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	179.349.000	189.463.600	10.114.600	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**858.700.000**	**604.500.000**	**(254.200.000)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	645.000.000	604.500.000	(40.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	2		BELANJA MODAL	645.000.000	604.500.000	(40.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	645.000.000	604.500.000	(40.500.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kabupaten

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	20.900.000	0	(20.900.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	20.900.000	0	(20.900.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.900.000	0	(20.900.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.800.000	0	(192.800.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	192.800.000	0	(192.800.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.800.000	0	(192.800.000)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**347.888.000**	**328.412.700**	**(19.475.300)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	1.700.000	(2.300.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	1.700.000	(2.300.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	1.700.000	(2.300.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.625.000	96.373.700	1.748.700	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	94.625.000	96.373.700	1.748.700	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.625.000	96.373.700	1.748.700	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.650.000	12.990.000	(7.660.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	20.650.000	12.990.000	(7.660.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000	12.990.000	(7.660.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.613.000	217.349.000	(11.264.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	228.613.000	217.349.000	(11.264.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	228.613.000	217.349.000	(11.264.000)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**394.553.600**	**80.000.000**	**(314.553.600)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	16.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.000.000	16.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000	16.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000	64.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	64.000.000	64.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000	64.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	314.553.600	0	(314.553.600)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	314.553.600	0	(314.553.600)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kabupaten

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	314.553.600	0	(314.553.600)	
	Jumlah Belanja	**8.799.958.200**	**5.767.632.900**	**(3.032.325.300)**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(8.799.958.200)**	**(5.767.632.900)**	**3.032.325.300**	
0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN PULAU PUNJUNG

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Pulau Punjung

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	3.000.000	3.000.000	0	
										Jumlah Pendapatan	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**2.222.259.150**	**1.999.090.500**	**(223.168.650)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7.300.000**	**0**	**(7.300.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**7.300.000**	**0**	**(7.300.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.800.000	0	(6.800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1			BELANJA OPERASI	6.800.000	0	(6.800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.800.000	0	(6.800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	500.000	0	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	500.000	0	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**12.080.000**	**8.190.000**	**(3.890.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12.080.000**	**8.190.000**	**(3.890.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.080.000	8.190.000	(3.890.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	12.080.000	8.190.000	(3.890.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.080.000	8.190.000	(3.890.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.700.000**	**0**	**(2.700.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.02**	**00**					**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**2.700.000**	**0**	**(2.700.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.700.000	0	(2.700.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.700.000	0	(2.700.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Pulau Punjung

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.700.000	0	(2.700.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**10.540.000**	**4.200.000**	**(6.340.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**10.540.000**	**4.200.000**	**(6.340.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.540.000	4.200.000	(6.340.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	10.540.000	4.200.000	(6.340.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.540.000	4.200.000	(6.340.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.189.639.150**	**1.986.700.500**	**(202.938.650)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.862.127.950**	**1.661.796.000**	**(200.331.950)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.862.127.950	1.661.796.000	(200.331.950)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.862.127.950	1.661.796.000	(200.331.950)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.862.127.950	1.661.796.000	(200.331.950)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**103.150.700**	**140.924.000**	**37.773.300**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.887.600	1.713.400	(174.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.887.600	1.713.400	(174.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.887.600	1.713.400	(174.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.300.000	17.418.000	(882.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	18.300.000	17.418.000	(882.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.300.000	17.418.000	(882.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.100	7.917.600	(1.082.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	9.000.100	7.917.600	(1.082.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.000.100	7.917.600	(1.082.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	16.560.000	3.060.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	13.500.000	16.560.000	3.060.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	16.560.000	3.060.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.500.000	10.840.000	(2.660.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	13.500.000	10.840.000	(2.660.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	10.840.000	(2.660.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.963.000	86.475.000	39.512.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Pulau Punjung

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	46.963.000	86.475.000	39.512.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.963.000	86.475.000	39.512.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.500.000**	**0**	**(35.500.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.500.000	0	(35.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	35.500.000	0	(35.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.500.000	0	(35.500.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**173.360.500**	**168.980.500**	**(4.380.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.500.000	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	1.500.000	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.500.000	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	9.500.000	3.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	9.500.000	3.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	9.500.000	3.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.440.000	3.900.000	(540.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.440.000	3.900.000	(540.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000	3.900.000	(540.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.920.500	154.080.500	(6.840.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	160.920.500	154.080.500	(6.840.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	160.920.500	154.080.500	(6.840.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.500.000**	**15.000.000**	**(500.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000	11.000.000	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.500.000	11.000.000	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000	11.000.000	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	4.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
									Jumlah Belanja	**2.222.259.150**	**1.999.090.500**	**(223.168.650)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Pulau Punjung

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Total Surplus/(Defisit)	(2.219.259.150)	(1.996.090.500)	223.168.650	
0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	PEMBIAYAAN				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN SITIUNG

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sitiung

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.460.000**	**1.460.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.460.000	1.460.000	0	
										Jumlah Pendapatan	**1.460.000**	**1.460.000**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**2.094.415.400**	**1.623.158.100**	**(471.257.300)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**30.810.000**	**18.740.600**	**(12.069.400)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**30.810.000**	**18.740.600**	**(12.069.400)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.040.000	9.280.000	(5.760.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	01	5	1			BELANJA OPERASI	15.040.000	9.280.000	(5.760.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.040.000	9.280.000	(5.760.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	15.770.000	9.460.600	(6.309.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	15.770.000	9.460.600	(6.309.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.770.000	9.460.600	(6.309.400)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**15.446.200**	**9.381.600**	**(6.064.600)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**15.446.200**	**9.381.600**	**(6.064.600)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.446.200	9.381.600	(6.064.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	15.446.200	9.381.600	(6.064.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.446.200	9.381.600	(6.064.600)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**8.520.000**	**5.510.000**	**(3.010.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**2.02**	**00**					**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**8.520.000**	**5.510.000**	**(3.010.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.520.000	5.510.000	(3.010.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	8.520.000	5.510.000	(3.010.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sitiung

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.520.000	5.510.000	(3.010.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.600.000**	**12.107.000**	**(3.493.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**15.600.000**	**12.107.000**	**(3.493.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.600.000	12.107.000	(3.493.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	15.600.000	12.107.000	(3.493.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.600.000	12.107.000	(3.493.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.024.039.200**	**1.577.418.900**	**(446.620.300)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.694.298.900**	**1.231.871.000**	**(462.427.900)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.694.298.900	1.231.871.000	(462.427.900)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.694.298.900	1.231.871.000	(462.427.900)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.694.298.900	1.231.871.000	(462.427.900)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**130.655.400**	**145.223.000**	**14.567.600**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.170.500	2.937.400	(233.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.170.500	2.937.400	(233.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.170.500	2.937.400	(233.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.552.000	11.718.000	(8.834.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	20.552.000	11.718.000	(8.834.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.552.000	11.718.000	(8.834.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.176.200	6.063.700	(6.112.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	11.076.200	4.963.700	(6.112.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.076.200	4.963.700	(6.112.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	2			BELANJA MODAL	1.100.000	1.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.100.000	1.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000	20.310.000	3.810.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	16.500.000	20.310.000	3.810.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.500.000	20.310.000	3.810.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.054.700	11.830.500	(3.224.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	15.054.700	11.830.500	(3.224.200)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sitiung

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.054.700	11.830.500	(3.224.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.202.000	92.363.400	29.161.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	63.202.000	92.363.400	29.161.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.202.000	92.363.400	29.161.400	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.700.000**	**61.200.000**	**11.500.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	17.000.000	17.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	17.000.000	17.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000	17.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.700.000	44.200.000	11.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	32.700.000	44.200.000	11.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.700.000	44.200.000	11.500.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.284.900**	**114.024.900**	**(8.260.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.047.500	8.047.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	8.047.500	8.047.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.047.500	8.047.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.237.400	104.977.400	(7.260.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	112.237.400	104.977.400	(7.260.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	112.237.400	104.977.400	(7.260.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**27.100.000**	**25.100.000**	**(2.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	14.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.000.000	14.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	14.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	5.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sitiung

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.100.000	3.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	3.100.000	3.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000	3.100.000	0	
									Jumlah Belanja	**2.094.415.400**	**1.623.158.100**	**(471.257.300)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.092.955.400)**	**(1.621.698.100)**	**471.257.300**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN KOTO BARU

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Koto Baru

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	1.500.000	1.500.000	0	
									Jumlah Pendapatan	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.177.360.000**	**1.753.765.400**	**(423.594.600)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.510.000**	**1.670.000**	**(2.840.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4.510.000**	**1.670.000**	**(2.840.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.510.000	1.670.000	(2.840.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.510.000	1.670.000	(2.840.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000	1.670.000	(2.840.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000	12.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.000.000	12.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.510.000**	**1.010.000**	**(3.500.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**4.510.000**	**1.010.000**	**(3.500.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.510.000	1.010.000	(3.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.510.000	1.010.000	(3.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000	1.010.000	(3.500.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**13.620.000**	**7.120.000**	**(6.500.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	**13.620.000**	**7.120.000**	**(6.500.000)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Koto Baru

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Pengawasan Pemerintahan Desa				
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	02				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.620.000	7.120.000	(6.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.620.000	7.120.000	(6.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.620.000	7.120.000	(6.500.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.142.720.000**	**1.731.965.400**	**(410.754.600)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.713.624.000**	**1.318.592.000**	**(395.032.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.713.624.000	1.318.592.000	(395.032.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.713.624.000	1.318.592.000	(395.032.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.713.624.000	1.318.592.000	(395.032.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**103.595.200**	**108.282.200**	**4.687.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	1.105.000	(695.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.000	1.105.000	(695.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	1.105.000	(695.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	11.276.000	(6.724.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	18.000.000	11.276.000	(6.724.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	11.276.000	(6.724.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	5.498.000	(3.502.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.000.000	5.498.000	(3.502.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	5.498.000	(3.502.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	7.782.000	(5.718.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	13.500.000	7.782.000	(5.718.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	7.782.000	(5.718.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.500.000	7.280.000	(6.220.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	13.500.000	7.280.000	(6.220.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	7.280.000	(6.220.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.795.200	75.341.200	27.546.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	47.795.200	75.341.200	27.546.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.795.200	75.341.200	27.546.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**31.500.000**	**31.500.000**	**0**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Koto Baru

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02	5	2		BELANJA MODAL	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.500.000	11.500.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**276.000.800**	**255.591.200**	**(20.409.600)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.090.000	(910.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	1.090.000	(910.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.090.000	(910.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.466.000	5.426.400	(3.039.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	8.466.000	5.426.400	(3.039.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.466.000	5.426.400	(3.039.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.220.000	2.110.000	(2.110.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.220.000	2.110.000	(2.110.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000	2.110.000	(2.110.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.314.800	246.964.800	(14.350.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	261.314.800	246.964.800	(14.350.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	261.314.800	246.964.800	(14.350.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.000.000**	**18.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	14.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.000.000	14.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	14.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	4.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
									Jumlah Belanja	**2.177.360.000**	**1.753.765.400**	**(423.594.600)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.175.860.000)**	**(1.752.265.400)**	**423.594.600**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Koto Baru

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Sungai Rumbai

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.250.000**	**3.250.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	3.250.000	3.250.000	0	
										Jumlah Pendapatan	**3.250.000**	**3.250.000**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**1.719.188.500**	**1.374.423.950**	**(344.764.550)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.450.000**	**1.850.000**	**(2.600.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4.450.000**	**1.850.000**	**(2.600.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.04	01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.250.000	0	(2.250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.04	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.250.000	0	(2.250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.250.000	0	(2.250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.04	02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.200.000	1.850.000	(350.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.200.000	1.850.000	(350.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.200.000	1.850.000	(350.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**12.150.000**	**11.950.000**	**(200.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12.150.000**	**11.950.000**	**(200.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.150.000	11.950.000	(200.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	12.150.000	11.950.000	(200.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.150.000	11.950.000	(200.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.400.000**	**900.000**	**(1.500.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**04**	**2.02**	**00**					**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**2.400.000**	**900.000**	**(1.500.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.400.000	900.000	(1.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.400.000	900.000	(1.500.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Sungai Rumbai

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	900.000	(1.500.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.700.000**	**1.800.000**	**(900.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.700.000**	**1.800.000**	**(900.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.700.000	1.800.000	(900.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.700.000	1.800.000	(900.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.700.000	1.800.000	(900.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.697.488.500**	**1.357.923.950**	**(339.564.550)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.418.999.100**	**1.107.027.000**	**(311.972.100)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.999.100	1.107.027.000	(311.972.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.418.999.100	1.107.027.000	(311.972.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.418.999.100	1.107.027.000	(311.972.100)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97.518.800**	**117.855.350**	**20.336.550**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.600	1.800.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.800.600	1.800.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.800.600	1.800.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.657.000	13.120.000	(3.537.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	16.657.000	13.120.000	(3.537.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.657.000	13.120.000	(3.537.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.999.200	5.049.350	(3.949.850)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	8.999.200	5.049.350	(3.949.850)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.999.200	5.049.350	(3.949.850)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	11.950.000	(1.550.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	13.500.000	11.950.000	(1.550.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	11.950.000	(1.550.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.670.000	6.050.000	(2.620.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	8.670.000	6.050.000	(2.620.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.670.000	6.050.000	(2.620.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.892.000	79.885.400	31.993.400	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Sungai Rumbai

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	47.892.000	79.885.400	31.993.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.892.000	79.885.400	31.993.400	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**26.000.000**	**0**	**(26.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	0	(26.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	26.000.000	0	(26.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000	0	(26.000.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.370.600**	**118.841.600**	**(22.529.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.590.000	1.590.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.590.000	1.590.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.590.000	1.590.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.035.000	12.035.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	12.035.000	12.035.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.035.000	12.035.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.440.000	2.000.000	(2.440.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	4.440.000	2.000.000	(2.440.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.440.000	2.000.000	(2.440.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.305.600	103.216.600	(20.089.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	123.305.600	103.216.600	(20.089.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	123.305.600	103.216.600	(20.089.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.600.000**	**14.200.000**	**600.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000	9.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	9.000.000	9.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	9.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.600.000	5.200.000	600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	4.600.000	5.200.000	600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.600.000	5.200.000	600.000	
										Jumlah Belanja	**1.719.188.500**	**1.374.423.950**	**(344.764.550)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Sungai Rumbai

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Total Surplus/(Defisit)	(1.715.938.500)	(1.371.173.950)	344.764.550	
0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6	PEMBIAYAAN				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN SEMBILAN KOTO

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Sembilan Koto

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.750.000	1.750.000	0	
										Jumlah Pendapatan	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**1.698.972.050**	**1.227.165.600**	**(471.806.450)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.090.000**	**5.090.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.090.000**	**5.090.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.090.000	5.090.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	5.090.000	5.090.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.090.000	5.090.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.760.000**	**510.000**	**(2.250.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.02**	**00**					**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**2.760.000**	**510.000**	**(2.250.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.760.000	510.000	(2.250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.760.000	510.000	(2.250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.760.000	510.000	(2.250.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.800.000**	**880.000**	**(920.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.800.000**	**880.000**	**(920.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.800.000	880.000	(920.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.800.000	880.000	(920.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	880.000	(920.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.689.322.050**	**1.220.685.600**	**(468.636.450)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.394.934.950**	**924.741.000**	**(470.193.950)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.394.934.950	924.741.000	(470.193.950)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Sembilan Koto

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.394.934.950	924.741.000	(470.193.950)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.394.934.950	924.741.000	(470.193.950)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**110.140.300**	**124.697.800**	**14.557.500**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.803.000	1.673.000	(130.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.803.000	1.673.000	(130.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.803.000	1.673.000	(130.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.005.000	9.866.000	(8.139.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	18.005.000	9.866.000	(8.139.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.005.000	9.866.000	(8.139.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	5.857.800	(3.142.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.000.000	5.857.800	(3.142.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	5.857.800	(3.142.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	30.824.000	15.824.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	30.824.000	15.824.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	30.824.000	15.824.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.883.300	9.689.000	(5.194.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	14.883.300	9.689.000	(5.194.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.883.300	9.689.000	(5.194.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.449.000	66.788.000	15.339.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	51.449.000	66.788.000	15.339.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.449.000	66.788.000	15.339.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.000.000**	**19.290.000**	**(2.710.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	19.290.000	(2.710.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	22.000.000	19.290.000	(2.710.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000	19.290.000	(2.710.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.386.800**	**132.906.800**	**(8.480.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Sembilan Koto

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.003.000	6.003.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	6.003.000	6.003.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.003.000	6.003.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.383.800	125.903.800	(7.480.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	133.383.800	125.903.800	(7.480.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	133.383.800	125.903.800	(7.480.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.860.000**	**19.050.000**	**(1.810.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.250.000	3.250.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.250.000	3.250.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.250.000	3.250.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	14.000.000	1.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	13.000.000	14.000.000	1.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	14.000.000	1.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.610.000	1.800.000	(2.810.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	4.610.000	1.800.000	(2.810.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.610.000	1.800.000	(2.810.000)	
										Jumlah Belanja	**1.698.972.050**	**1.227.165.600**	**(471.806.450)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(1.697.222.050)**	**(1.225.415.600)**	**471.806.450**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN TIMPEH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Timpeh

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.660.000**	**1.660.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.660.000	1.660.000	0	
										Jumlah Pendapatan	**1.660.000**	**1.660.000**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**1.547.781.810**	**1.362.523.400**	**(185.258.410)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.450.000**	**3.300.000**	**(4.150.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**7.450.000**	**3.300.000**	**(4.150.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.450.000	3.300.000	(4.150.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	7.450.000	3.300.000	(4.150.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.450.000	3.300.000	(4.150.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**17.450.000**	**0**	**(17.450.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**17.450.000**	**0**	**(17.450.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.450.000	0	(17.450.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	17.450.000	0	(17.450.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	17.450.000	0	(17.450.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.522.881.810**	**1.359.223.400**	**(163.658.410)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.209.123.710**	**1.057.081.000**	**(152.042.710)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.209.123.710	1.057.081.000	(152.042.710)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.209.123.710	1.057.081.000	(152.042.710)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.209.123.710	1.057.081.000	(152.042.710)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**94.049.300**	**120.853.600**	**26.804.300**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.808.500	0	(1.808.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.808.500	0	(1.808.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.808.500	0	(1.808.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.645.600	13.021.800	(9.623.800)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Timpeh

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	22.645.600	13.021.800	(9.623.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.645.600	13.021.800	(9.623.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.316.000	2.000.000	(316.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.316.000	2.000.000	(316.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.316.000	2.000.000	(316.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.490.000	12.450.000	(1.040.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	13.490.000	12.450.000	(1.040.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.490.000	12.450.000	(1.040.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.184.200	6.016.800	(7.167.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	13.184.200	6.016.800	(7.167.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.184.200	6.016.800	(7.167.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.605.000	87.365.000	46.760.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	40.605.000	87.365.000	46.760.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.605.000	87.365.000	46.760.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**27.500.000**	**27.500.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.500.000	27.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	27.500.000	27.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000	27.500.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**167.768.800**	**130.788.800**	**(36.980.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.570.000	0	(1.570.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.570.000	0	(1.570.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.000	0	(1.570.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.875.000	3.875.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.875.000	3.875.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000	3.875.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.323.800	126.913.800	(35.410.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	162.323.800	126.913.800	(35.410.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	01	Belanja Pegawai	27.500.000	0	(27.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	134.823.800	126.913.800	(7.910.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Timpeh

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.440.000**	**23.000.000**	**(1.440.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000	13.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	13.500.000	13.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	13.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.500.000	6.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	6.500.000	6.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.500.000	6.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.440.000	3.000.000	(1.440.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	4.440.000	3.000.000	(1.440.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.440.000	3.000.000	(1.440.000)	
										Jumlah Belanja	**1.547.781.810**	**1.362.523.400**	**(185.258.410)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(1.546.121.810)**	**(1.360.863.400)**	**185.258.410**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN KOTO SALAK

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Koto Salak

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**1.513.271.900**	**1.228.133.500**	**(285.138.400)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.760.000**	**2.540.000**	**(1.220.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.760.000**	**2.540.000**	**(1.220.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.04	02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.760.000	2.540.000	(1.220.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	3.760.000	2.540.000	(1.220.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.760.000	2.540.000	(1.220.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9.120.000**	**7.200.000**	**(1.920.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9.120.000**	**7.200.000**	**(1.920.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.120.000	7.200.000	(1.920.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	9.120.000	7.200.000	(1.920.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.120.000	7.200.000	(1.920.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**8.860.000**	**3.580.000**	**(5.280.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8.860.000**	**3.580.000**	**(5.280.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.860.000	3.580.000	(5.280.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	8.860.000	3.580.000	(5.280.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.860.000	3.580.000	(5.280.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.491.531.900**	**1.214.813.500**	**(276.718.400)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.215.141.200**	**963.379.000**	**(251.762.200)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.215.141.200	963.379.000	(251.762.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.215.141.200	963.379.000	(251.762.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.215.141.200	963.379.000	(251.762.200)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**104.385.100**	**112.892.900**	**8.507.800**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Koto Salak

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.807.000	1.873.000	66.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.807.000	1.873.000	66.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.807.000	1.873.000	66.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.100.000	14.395.000	(3.705.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	18.100.000	14.395.000	(3.705.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.100.000	14.395.000	(3.705.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.035.000	6.324.600	(2.710.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	9.035.000	6.324.600	(2.710.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.035.000	6.324.600	(2.710.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	12.300.000	(1.200.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	13.500.000	12.300.000	(1.200.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	12.300.000	(1.200.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.655.100	7.441.300	(6.213.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	13.655.100	7.441.300	(6.213.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.655.100	7.441.300	(6.213.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.288.000	70.559.000	22.271.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	48.288.000	70.559.000	22.271.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.288.000	70.559.000	22.271.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**18.200.000**	**0**	**(18.200.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	05					Pengadaan Mebel	18.200.000	0	(18.200.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	05	5	2			BELANJA MODAL	18.200.000	0	(18.200.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.200.000	0	(18.200.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**134.975.600**	**121.681.600**	**(13.294.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.200.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.000.000	1.200.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.200.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.250.000	4.640.000	(2.610.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	7.250.000	4.640.000	(2.610.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.250.000	4.640.000	(2.610.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Koto Salak

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.725.600	115.841.600	(9.884.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	125.725.600	115.841.600	(9.884.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.725.600	115.841.600	(9.884.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.830.000**	**16.860.000**	**(1.970.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	3.750.000	(250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	3.750.000	(250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	3.750.000	(250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.830.000	3.110.000	(1.720.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.830.000	3.110.000	(1.720.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000	3.110.000	(1.720.000)	
									Jumlah Belanja	**1.513.271.900**	**1.228.133.500**	**(285.138.400)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.513.271.900)**	**(1.228.133.500)**	**285.138.400**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN ASAM JUJUHAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Asam Jujuhan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**1.315.074.400**	**1.029.221.900**	**(285.852.500)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**19.900.000**	**2.200.000**	**(17.700.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**02**	**2.04**	**00**					**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**19.900.000**	**2.200.000**	**(17.700.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.04	01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.600.000	0	(10.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.04	01	5	1			BELANJA OPERASI	10.600.000	0	(10.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.600.000	0	(10.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.04	02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.300.000	2.200.000	(7.100.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	9.300.000	2.200.000	(7.100.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.300.000	2.200.000	(7.100.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9.040.000**	**9.040.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9.040.000**	**9.040.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.040.000	9.040.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	9.040.000	9.040.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.040.000	9.040.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**10.420.000**	**0**	**(10.420.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**10.420.000**	**0**	**(10.420.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.420.000	0	(10.420.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	10.420.000	0	(10.420.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.420.000	0	(10.420.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.275.714.400**	**1.017.981.900**	**(257.732.500)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**972.433.500**	**695.574.000**	**(276.859.500)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	972.433.500	695.574.000	(276.859.500)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Asam Jujuhan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	972.433.500	695.574.000	(276.859.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	972.433.500	695.574.000	(276.859.500)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.896.400**	**134.443.400**	**14.547.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.753.000	2.498.000	(255.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.753.000	2.498.000	(255.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.753.000	2.498.000	(255.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.105.000	18.368.000	263.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	18.105.000	18.368.000	263.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.105.000	18.368.000	263.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.001.800	7.799.600	(1.202.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	9.001.800	7.799.600	(1.202.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.001.800	7.799.600	(1.202.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.129.000	23.178.000	(4.951.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	28.129.000	23.178.000	(4.951.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.129.000	23.178.000	(4.951.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.510.200	6.812.600	(6.697.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	13.510.200	6.812.600	(6.697.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.510.200	6.812.600	(6.697.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.397.400	75.787.200	27.389.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	48.397.400	75.787.200	27.389.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.397.400	75.787.200	27.389.800	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**161.024.500**	**154.714.500**	**(6.310.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.740.000	(260.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.000.000	1.740.000	(260.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.740.000	(260.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.002.500	5.002.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	5.002.500	5.002.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.002.500	5.002.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.022.000	147.972.000	(6.050.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	154.022.000	147.972.000	(6.050.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Asam Jujuhan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	154.022.000	147.972.000	(6.050.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.360.000**	**33.250.000**	**10.890.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	27.500.000	15.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.500.000	27.500.000	15.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000	27.500.000	15.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.250.000	5.250.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.250.000	5.250.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000	5.250.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.610.000	500.000	(4.110.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.610.000	500.000	(4.110.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000	500.000	(4.110.000)	
									Jumlah Belanja	**1.315.074.400**	**1.029.221.900**	**(285.852.500)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.315.074.400)**	**(1.029.221.900)**	**285.852.500**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN KOTO BESAR

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Koto Besar

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	2.000.000	2.000.000	0	
									Jumlah Pendapatan	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2,118.117.350**	**1.835.777.700**	**(282.339.650)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.200.000**	**3.200.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.200.000**	**3.200.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.04	01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.100.000	2.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.100.000	2.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000	2.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.04	02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.100.000	1.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.100.000	1.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000	1.100.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9.100.300**	**9.100.300**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9.100.300**	**9.100.300**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.100.300	9.100.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.100.300	9.100.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.300	9.100.300	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.790.000**	**4.790.000**	**(1.000.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**04**	**7.04**	**00**				**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	**5.790.000**	**4.790.000**	**(1.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	7.04	01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.790.000	4.790.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	7.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.790.000	4.790.000	(1.000.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Koto Besar

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	7.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.790.000	4.790.000	(1.000.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**11.610.000**	**9.610.000**	**(2.000.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**11.610.000**	**9.610.000**	**(2.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.610.000	9.610.000	(2.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	11.610.000	9.610.000	(2.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.610.000	9.610.000	(2.000.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.088.417.050**	**1.809.077.400**	**(279.339.650)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.660.190.200**	**1.354.425.000**	**(305.765.200)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.660.190.200	1.354.425.000	(305.765.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.660.190.200	1.354.425.000	(305.765.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.660.190.200	1.354.425.000	(305.765.200)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**117.311.050**	**150.336.600**	**33.025.550**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.034.400	2.040.150	(994.250)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.034.400	2.040.150	(994.250)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.034.400	2.040.150	(994.250)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.652.000	12.973.000	(1.679.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	13.752.000	12.073.000	(1.679.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.752.000	12.073.000	(1.679.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	2			BELANJA MODAL	900.000	900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000	900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.378.450	6.378.450	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	6.378.450	6.378.450	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.378.450	6.378.450	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.117.000	8.563.000	446.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	8.117.000	8.563.000	446.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.117.000	8.563.000	446.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.220.000	8.470.000	(1.750.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	10.220.000	8.470.000	(1.750.000)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Koto Besar

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.220.000	8.470.000	(1.750.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.909.200	111.912.000	37.002.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	74.909.200	111.912.000	37.002.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.909.200	111.912.000	37.002.800	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**39.500.000**	**39.500.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.500.000	39.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	39.500.000	39.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.500.000	39.500.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**140.571.800**	**133.971.800**	**(6.600.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.558.000	7.558.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.558.000	7.558.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.558.000	7.558.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.513.800	124.913.800	(6.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	131.513.800	124.913.800	(6.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	131.513.800	124.913.800	(6.600.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**130.844.000**	**130.844.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.750.000	3.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.750.000	3.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000	3.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000	5.110.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.110.000	5.110.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Koto Besar

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000	5.110.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.484.000	110.484.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	110.484.000	110.484.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.484.000	110.484.000	0	
									Jumlah Belanja	**2.118.117.350**	**1.835.777.700**	**(282.339.650)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.116.117.350)**	**(1.833.777.700)**	**282.339.650**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN PADANG LAWEH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Padang Laweh

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**1.507.308.950**	**1.274.770.250**	**(232.538.700)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**8.250.000**	**1.780.000**	**(6.470.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**8.250.000**	**1.780.000**	**(6.470.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.04	01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.460.000	1.080.000	(2.380.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.460.000	1.080.000	(2.380.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000	1.080.000	(2.380.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.04	02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.790.000	700.000	(4.090.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.790.000	700.000	(4.090.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000	700.000	(4.090.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.940.000**	**10.940.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.940.000**	**10.940.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.940.000	10.940.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.940.000	10.940.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.940.000	10.940.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.690.000**	**1.200.000**	**(3.490.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**4.690.000**	**1.200.000**	**(3.490.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04	2.02	01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.690.000	1.200.000	(3.490.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.690.000	1.200.000	(3.490.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000	1.200.000	(3.490.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**5.520.000**	**2.240.000**	**(3.280.000)**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Padang Laweh

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**5.520.000**	**2.240.000**	**(3.280.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	02				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.520.000	2.240.000	(3.280.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.520.000	2.240.000	(3.280.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000	2.240.000	(3.280.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.477.908.950**	**1.258.610.250**	**(219.298.700)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.139.242.150**	**947.231.000**	**(192.011.150)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.139.242.150	947.231.000	(192.011.150)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.139.242.150	947.231.000	(192.011.150)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.139.242.150	947.231.000	(192.011.150)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**110.124.400**	**132.956.850**	**22.832.450**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.500	1.539.750	(260.750)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.500	1.539.750	(260.750)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.500	1.539.750	(260.750)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.765.000	19.157.000	392.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	18.765.000	19.157.000	392.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.765.000	19.157.000	392.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.839.000	8.298.700	(1.540.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.839.000	8.298.700	(1.540.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.839.000	8.298.700	(1.540.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	13.670.000	(1.330.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	13.670.000	(1.330.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	13.670.000	(1.330.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.012.100	13.380.600	(1.631.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.012.100	13.380.600	(1.631.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.012.100	13.380.600	(1.631.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.707.800	76.910.800	27.203.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	49.707.800	76.910.800	27.203.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.707.800	76.910.800	27.203.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Padang Laweh

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99.950.000**	**59.450.000**	**(40.500.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	02	5	2		BELANJA MODAL	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	27.950.000	27.950.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	27.950.000	27.950.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.950.000	27.950.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.000.000	11.500.000	(40.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	52.000.000	11.500.000	(40.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.000.000	11.500.000	(40.500.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.342.400**	**101.722.400**	**(7.620.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.500.000	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	1.500.000	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.500.000	(500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.595.000	1.595.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.595.000	1.595.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000	1.595.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.747.400	98.627.400	(7.120.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	105.747.400	98.627.400	(7.120.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.747.400	98.627.400	(7.120.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.250.000**	**17.250.000**	**(2.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000	11.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.000.000	11.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000	11.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.750.000	4.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.750.000	4.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000	4.750.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Padang Laweh

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	1.500.000	(2.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.500.000	1.500.000	(2.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	1.500.000	(2.000.000)	
									Jumlah Belanja	**1.507.308.950**	**1.274.770.250**	**(232.538.700)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.507.308.950)**	**(1.274.770.250)**	**232.538.700**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN TIUMANG

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Tiumang

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.250.000**	**0**	**(1.250.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	1.250.000	0	(1.250.000)	
									Jumlah Pendapatan	**1.250.000**	**0**	**(1.250.000)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**1.754.121.650**	**1.291.291.300**	**(462.830.350)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**6.072.000**	**5.072.000**	**(1.000.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**6.072.000**	**5.072.000**	**(1.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.04	01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.900.000	900.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.900.000	900.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000	900.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.04	02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.172.000	4.172.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.172.000	4.172.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.172.000	4.172.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**11.260.000**	**11.260.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**11.260.000**	**11.260.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.02	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.260.000	11.260.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.260.000	11.260.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.260.000	11.260.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.480.000**	**3.480.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3.480.000**	**3.480.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.480.000	3.480.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Tiumang

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.480.000	3.480.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.480.000	3.480.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.510.000**	**1.360.000**	**(2.150.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.510.000**	**1.360.000**	**(2.150.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.510.000	1.360.000	(2.150.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16	5	1			BELANJA OPERASI	3.510.000	1.360.000	(2.150.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.510.000	1.360.000	(2.150.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.729.799.650**	**1.270.119.300**	**(459.680.350)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.420.044.250**	**962.213.000**	**(457.831.250)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.420.044.250	962.213.000	(457.831.250)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.420.044.250	962.213.000	(457.831.250)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.420.044.250	962.213.000	(457.831.250)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**106.223.400**	**120.324.300**	**14.100.900**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.853.500	1.853.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.853.500	1.853.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.853.500	1.853.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.530.000	18.530.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	18.530.000	18.530.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.530.000	18.530.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.274.200	10.274.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	10.274.200	10.274.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.274.200	10.274.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.550.000	12.290.000	(2.260.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	14.550.000	12.290.000	(2.260.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.550.000	12.290.000	(2.260.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.959.700	10.960.600	900	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	10.959.700	10.960.600	900	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Tiumang

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.959.700	10.960.600	900	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.056.000	66.416.000	16.360.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	50.056.000	66.416.000	16.360.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.056.000	66.416.000	16.360.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14.000.000**	**5.500.000**	**(8.500.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	5.500.000	(8.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	14.000.000	5.500.000	(8.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000	5.500.000	(8.500.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**176.092.000**	**169.252.000**	**(6.840.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.700.000	8.700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	8.700.000	8.700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.700.000	8.700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.392.000	158.552.000	(6.840.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	165.392.000	158.552.000	(6.840.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	165.392.000	158.552.000	(6.840.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.440.000**	**12.830.000**	**(610.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000	11.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	11.000.000	11.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.000.000	11.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000	1.830.000	(610.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	2.440.000	1.830.000	(610.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.440.000	1.830.000	(610.000)	
										Jumlah Belanja	**1.754.121.650**	**1.291.291.300**	**(462.830.350)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(1.752.871.650)**	**(1.291.291.300)**	**461.580.350**	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Tiumang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RIDKA

LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.381.827.580**	**16.652.056.380**	**11.270.228.800**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**1.186.069.600**	**1.142.020.300**	**(44.049.300)**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.186.069.600**	**1.142.020.300**	**(44.049.300)**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.174.273.200	1.133.156.700	(41.116.500)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.174.273.200	1.133.156.700	(41.116.500)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.174.273.200	1.133.156.700	(41.116.500)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11.796.400	8.863.600	(2.932.800)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	11.796.400	8.863.600	(2.932.800)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.796.400	8.863.600	(2.932.800)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**2.439.973.480**	**13.861.952.880**	**11.421.979.400**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**2.439.973.480**	**13.861.952.880**	**11.421.979.400**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.409.983.880	13.861.952.880	11.451.969.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.409.983.880	13.861.952.880	11.451.969.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.593.000	16.900.000	(59.693.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	2.333.390.880	13.845.052.880	11.511.662.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29.989.600	0	(29.989.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	29.989.600	0	(29.989.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.989.600	0	(29.989.600)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**34.983.000**	**75.251.000**	**40.268.000**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**34.983.000**	**75.251.000**	**40.268.000**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14.990.000	40.650.000	25.660.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	14.990.000	40.650.000	25.660.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.990.000	40.650.000	25.660.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	19.993.000	34.601.000	14.608.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	19.993.000	34.601.000	14.608.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.993.000	34.601.000	14.608.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**424.000.200**	**549.906.200**	**125.906.000**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**424.000.200**	**549.906.200**	**125.906.000**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	424.000.200	549.906.200	125.906.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	424.000.200	549.906.200	125.906.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	424.000.200	549.906.200	125.906.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.296.801.300**	**1.022.926.000**	**(273.875.300)**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**956.367.000**	**631.619.000**	**(324.748.000)**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	956.367.000	631.619.000	(324.748.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	956.367.000	631.619.000	(324.748.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	956.367.000	631.619.000	(324.748.000)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.309.000**	**202.861.700**	**61.552.700**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.802.600	1.802.600	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.802.600	1.802.600	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.802.600	1.802.600	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.499.000	25.259.000	2.760.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	22.499.000	25.259.000	2.760.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.499.000	25.259.000	2.760.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.002.600	8.418.600	(584.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.002.600	8.418.600	(584.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.002.600	8.418.600	(584.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.002.000	14.862.000	(3.140.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	18.002.000	14.862.000	(3.140.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.002.000	14.862.000	(3.140.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000	23.225.300	5.225.300	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	18.000.000	23.225.300	5.225.300	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	23.225.300	5.225.300	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.002.800	129.294.200	57.291.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	72.002.800	129.294.200	57.291.400	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	72.002.800	129.294.200	57.291.400	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**179.625.300**	**168.945.300**	**(10.680.000)**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.415.100	15.415.100	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	15.415.100	15.415.100	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.415.100	15.415.100	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.720.000	2.720.000	(1.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	3.720.000	2.720.000	(1.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.720.000	2.720.000	(1.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.490.200	148.810.200	(9.680.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	158.490.200	148.810.200	(9.680.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	158.490.200	148.810.200	(9.680.000)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.500.000**	**19.500.000**	**0**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000	1.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	18.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	18.000.000	18.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	18.000.000	0	
										Jumlah Belanja	**5.381.827.580**	**16.652.056.380**	**11.270.228.800**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(5.381.827.580)**	**(16.652.056.380)**	**(11.270.228.800)**	
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**550.508.523.170**	**135.327.540.331**	**0**	**0**	**685.836.063.501**	**498.195.103.028**	**137.243.035.809**	**0**	**0**	**635.438.138.837**	**(50.397.924.664)**
1	**01**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**285.530.051.488**	**22.717.149.512**	**0**	**0**	**308.247.201.000**	**265.121.159.580**	**38.523.134.756**	**0**	**0**	**303.644.294.336**	**(4.602.906.664)**
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000				Dinas Pendidikan	285.530.051.488	22.717.149.512	0	0	308.247.201.000	265.121.159.580	38.523.134.756	0	0	303.644.294.336	(4.602.906.664)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	253.182.439.676	107.542.080	0	0	253.289.981.756	217.016.504.674	107.542.080	0	0	217.124.046.754	(36.165.935.002)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	246.287.482.876	0	0	0	246.287.482.876	211.563.531.274	0	0	0	211.563.531.274	(34.723.951.602)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	246.287.482.876	0	0	0	246.287.482.876	211.563.531.274	0	0	0	211.563.531.274	(34.723.951.602)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.581.200	0	0	0	314.581.200	212.403.300	0	0	0	212.403.300	(102.177.900)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000	0	0	0	7.200.000	5.991.000	0	0	0	5.991.000	(1.209.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	0	0	0	50.000.000	39.335.000	0	0	0	39.335.000	(10.665.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.499.400	0	0	0	13.499.400	8.994.400	0	0	0	8.994.400	(4.505.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	19.000.000	0	0	0	19.000.000	(8.000.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.839.800	0	0	0	56.839.800	45.708.500	0	0	0	45.708.500	(11.131.300)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.042.000	0	0	0	160.042.000	93.374.400	0	0	0	93.374.400	(66.667.600)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.537.875.600	0	0	0	6.537.875.600	5.198.070.100	0	0	0	5.198.070.100	(1.339.805.500)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	(2.000.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000	0	0	0	146.000.000	143.000.000	0	0	0	143.000.000	(3.000.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.020.000	0	0	0	9.020.000	5.120.000	0	0	0	5.120.000	(3.900.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.378.855.600	0	0	0	6.378.855.600	5.047.950.100	0	0	0	5.047.950.100	(1.330.905.500)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.500.000	107.542.080	0	0	150.042.080	42.500.000	107.542.080	0	0	150.042.080	0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.500.000	0	0	0	42.500.000	42.500.000	0	0	0	42.500.000	0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	107.542.080	0	0	107.542.080	0	107.542.080	0	0	107.542.080	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	32.240.571.812	22.609.607.432	0	0	54.850.179.244	47.647.614.906	38.415.592.676	0	0	86.063.207.582	31.213.028.338
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.342.115.412	8.213.433.948	0	0	26.555.549.360	22.602.145.206	17.839.247.853	0	0	40.441.393.059	13.885.843.699
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	672.234.360	0	0	672.234.360	2.058.997.920	11.258.908.460	0	0	13.317.906.380	12.645.672.020
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0	1.561.681.300	0	0	1.561.681.300	4.943.400	1.901.737.880	0	0	1.906.681.280	344.999.980
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	0	167.132.700	0	0	167.132.700	0	167.132.700	0	0	167.132.700	0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	16.506.000	0	0	0	16.506.000	670.000	0	0	0	670.000	(15.836.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22.000.000	0	0	0	22.000.000	2.462.000	0	0	0	2.462.000	(19.538.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15.980.000	0	0	0	15.980.000	9.934.000	0	0	0	9.934.000	(6.046.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.287.629.412	5.812.385.588	0	0	24.100.015.000	20.525.137.886	4.511.468.813	0	0	25.036.606.699	936.591.699
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.658.235.400	12.708.459.244	0	0	21.366.694.644	15.433.178.500	18.607.546.903	0	0	34.040.725.403	12.674.030.759
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	940.000.000	1.642.380.489	0	0	2.582.380.489	4.657.208.476	8.224.381.564	0	0	12.881.590.040	10.299.209.551
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	7.885.578.755	0	0	7.885.578.755	4.330.000	8.496.996.140	0	0	8.501.326.140	615.747.385
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	18.314.400	0	0	0	18.314.400	3.170.000	0	0	0	3.170.000	(15.144.400)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22.000.000	0	0	0	22.000.000	1.070.000	0	0	0	1.070.000	(20.930.000)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.543.000	0	0	0	12.543.000	101.917.900	0	0	0	101.917.900	89.374.900
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.593.000	0	0	0	25.593.000	2.643.878.800	0	0	0	2.643.878.800	2.618.285.800
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.639.785.000	3.180.500.000	0	0	10.820.285.000	8.021.603.324	1.886.169.199	0	0	9.907.772.523	(912.512.477)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.213.421.000	1.687.714.240	0	0	5.901.135.240	8.585.491.200	1.968.797.920	0	0	10.554.289.120	4.653.153.880
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	98.580.240	0	0	98.580.240	641.648.800	795.063.120	0	0	1.436.711.920	1.338.131.680
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	80.000.000	1.589.134.000	0	0	1.669.134.000	1.501.084.000	1.173.734.800	0	0	2.674.818.800	1.005.684.800
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	61.920.600	0	0	0	61.920.600	0	0	0	0	0	(61.920.600)
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.971.400.000	0	0	0	3.971.400.000	5.173.774.000	0	0	0	5.173.774.000	1.202.374.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	10.000.000	0	0	0	10.000.000	82.086.000	0	0	0	82.086.000	72.086.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30.000.000	0	0	0	30.000.000	769.800.000	0	0	0	769.800.000	739.800.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	60.100.400	0	0	0	60.100.400	417.098.400	0	0	0	417.098.400	356.998.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.026.800.000	0	0	0	1.026.800.000	1.026.800.000	0	0	0	1.026.800.000	0
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.006.800.000	0	0	0	1.006.800.000	1.006.800.000	0	0	0	1.006.800.000	0
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	25.190.000	0	0	0	25.190.000	225.190.000	0	0	0	225.190.000	200.000.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.190.000	0	0	0	25.190.000	225.190.000	0	0	0	225.190.000	200.000.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.190.000	0	0	0	25.190.000	225.190.000	0	0	0	225.190.000	200.000.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	81.850.000	0	0	0	81.850.000	231.850.000	0	0	0	231.850.000	150.000.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81.850.000	0	0	0	81.850.000	231.850.000	0	0	0	231.850.000	150.000.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81.850.000	0	0	0	81.850.000	231.850.000	0	0	0	231.850.000	150.000.000
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**188.104.100.250**	**40.851.237.129**	**0**	**0**	**228.955.337.379**	**181.533.387.093**	**38.702.340.458**	**0**	**0**	**220.235.727.551**	**(8.719.609.828)**
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	86.741.384.900	2.054.627.000	0	0	88.796.011.900	75.515.277.416	2.054.627.000	0	0	77.569.904.416	(11.226.107.484)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.633.140.500	0	0	0	67.633.140.500	55.289.195.516	0	0	0	55.289.195.516	(12.343.944.984)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	357.991.200	0	0	0	357.991.200	46.247.000	0	0	0	46.247.000	(311.744.200)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	357.991.200	0	0	0	357.991.200	46.247.000	0	0	0	46.247.000	(311.744.200)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.303.550.200	0	0	0	63.303.550.200	51.629.232.728	0	0	0	51.629.232.728	(11.674.317.472)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	63.166.180.500	0	0	0	63.166.180.500	51.608.234.128	0	0	0	51.608.234.128	(11.557.946.372)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
							ASN											
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	98.664.900	0	0	0	98.664.900	14.406.000	0	0	0	14.406.000	(84.258.900)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.900.000	0	0	0	25.900.000	0	0	0	0	0	(25.900.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.804.800	0	0	0	12.804.800	6.592.600	0	0	0	6.592.600	(6.212.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.358.000	0	0	0	62.358.000	18.448.900	0	0	0	18.448.900	(43.909.100)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	27.427.000	0	0	0	27.427.000	11.768.600	0	0	0	11.768.600	(15.658.400)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12.031.000	0	0	0	12.031.000	6.680.300	0	0	0	6.680.300	(5.350.700)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.900.000	0	0	0	22.900.000	0	0	0	0	0	(22.900.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.003.700	0	0	0	140.003.700	48.069.800	0	0	0	48.069.800	(91.933.900)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0	0	0	0	(3.600.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.247.200	0	0	0	10.247.200	6.337.900	0	0	0	6.337.900	(3.909.300)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.366.500	0	0	0	7.366.500	4.266.200	0	0	0	4.266.200	(3.100.300)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.030.000	0	0	0	100.030.000	27.598.600	0	0	0	27.598.600	(72.431.400)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.011.000	0	0	0	12.011.000	8.117.100	0	0	0	8.117.100	(3.893.900)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.749.000	0	0	0	6.749.000	1.750.000	0	0	0	1.750.000	(4.999.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.590.900	0	0	0	218.590.900	247.523.500	0	0	0	247.523.500	28.932.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.190.500	0	0	0	7.190.500	4.190.500	0	0	0	4.190.500	(3.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	0	0	0	36.000.000	34.479.000	0	0	0	34.479.000	(1.521.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.480.000	0	0	0	13.480.000	13.370.500	0	0	0	13.370.500	(109.500)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.020.000	0	0	0	27.020.000	10.537.000	0	0	0	10.537.000	(16.483.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.905.000	0	0	0	35.905.000	34.375.000	0	0	0	34.375.000	(1.530.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.995.400	0	0	0	98.995.400	150.571.500	0	0	0	150.571.500	51.576.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.498.146.500	0	0	0	3.498.146.500	3.247.173.588	0	0	0	3.247.173.588	(250.972.912)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.998.900	0	0	0	109.998.900	84.949.000	0	0	0	84.949.000	(25.049.900)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.600.000	0	0	0	13.600.000	10.600.000	0	0	0	10.600.000	(3.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.370.547.600	0	0	0	3.370.547.600	3.147.624.588	0	0	0	3.147.624.588	(222.923.012)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.500.000	0	0	0	52.500.000	52.500.000	0	0	0	52.500.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	0	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.005.598.400	2.054.627.000	0	0	19.060.225.400	17.890.836.900	2.054.627.000	0	0	19.945.463.900	885.238.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.887.281.400	2.054.627.000	0	0	5.941.908.400	3.879.218.500	2.054.627.000	0	0	5.933.845.500	(8.062.900)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	50.001.000	0	0	50.001.000	0	50.001.000	0	0	50.001.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	83.360.000	416.640.000	0	0	500.000.000	75.305.100	416.640.000	0	0	491.945.100	(8.054.900)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	1.587.986.000	0	0	1.587.986.000	0	1.587.986.000	0	0	1.587.986.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	1.446.173.000	0	0	0	1.446.173.000	1.446.173.000	0	0	0	1.446.173.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.275.094.000	0	0	0	2.275.094.000	2.275.094.000	0	0	0	2.275.094.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	21		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	82.654.400	0	0	0	82.654.400	82.646.400	0	0	0	82.646.400	(8.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.013.052.000	0	0	0	13.013.052.000	13.957.203.600	0	0	0	13.957.203.600	944.151.600

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.995.500	0	0	0	43.995.500	43.995.500	0	0	0	43.995.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210.878.900	0	0	0	210.878.900	191.993.600	0	0	0	191.993.600	(18.885.300)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	180.000.000	0	0	0	180.000.000	179.999.000	0	0	0	179.999.000	(1.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51.800.000	0	0	0	51.800.000	51.800.000	0	0	0	51.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.003.400	0	0	0	43.003.400	43.003.400	0	0	0	43.003.400	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.000.200	0	0	0	39.000.200	39.000.200	0	0	0	39.000.200	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	164.520.000	0	0	0	164.520.000	164.520.000	0	0	0	164.520.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	320.047.725	0	0	0	320.047.725	320.047.725	0	0	0	320.047.725	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	135.330.000	0	0	0	135.330.000	135.330.000	0	0	0	135.330.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	56.300.000	0	0	0	56.300.000	56.300.000	0	0	0	56.300.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	0	(400.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.210.000	0	0	0	28.210.000	28.210.000	0	0	0	28.210.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	406.872.000	0	0	0	406.872.000	386.397.000	0	0	0	386.397.000	(20.475.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56.060.000	0	0	0	56.060.000	56.060.000	0	0	0	56.060.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	351.776.000	0	0	0	351.776.000	351.776.000	0	0	0	351.776.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.170.000	0	0	0	87.170.000	87.170.000	0	0	0	87.170.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.500.000.000	0	0	0	9.500.000.000	10.624.852.800	0	0	0	10.624.852.800	1.124.852.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	180.000.000	0	0	0	180.000.000	138.660.100	0	0	0	138.660.100	(41.339.900)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	280.515.000	0	0	0	280.515.000	580.515.000	0	0	0	580.515.000	300.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	82.840.000	0	0	0	82.840.000	82.840.000	0	0	0	82.840.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
							Imunisasi dan Pemberian Obat Massal											
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	61.100.000	0	0	0	61.100.000	61.100.000	0	0	0	61.100.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	223.633.275	0	0	0	223.633.275	223.633.275	0	0	0	223.633.275	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	105.265.000	0	0	0	105.265.000	54.414.800	0	0	0	54.414.800	(50.850.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	105.265.000	0	0	0	105.265.000	54.414.800	0	0	0	54.414.800	(50.850.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.529.998.000	0	0	0	1.529.998.000	1.762.597.000	0	0	0	1.762.597.000	232.599.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	143.385.000	0	0	0	143.385.000	0	0	0	0	0	(143.385.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	143.385.000	0	0	0	143.385.000	0	0	0	0	0	(143.385.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	128.419.000	0	0	0	128.419.000	271.804.000	0	0	0	271.804.000	143.385.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	104.839.000	0	0	0	104.839.000	0	0	0	0	0	(104.839.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.580.000	0	0	0	23.580.000	271.804.000	0	0	0	271.804.000	248.224.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.258.194.000	0	0	0	1.258.194.000	1.490.793.000	0	0	0	1.490.793.000	232.599.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.258.194.000	0	0	0	1.258.194.000	1.490.793.000	0	0	0	1.490.793.000	232.599.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	402.648.000	0	0	0	402.648.000	402.648.000	0	0	0	402.648.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.690.000	0	0	0	83.690.000	83.690.000	0	0	0	83.690.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.690.000	0	0	0	83.690.000	83.690.000	0	0	0	83.690.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	318.958.000	0	0	0	318.958.000	318.958.000	0	0	0	318.958.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	318.958.000	0	0	0	318.958.000	318.958.000	0	0	0	318.958.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	170.000.000	0	0	0	170.000.000	170.000.000	0	0	0	170.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.520.000	0	0	0	98.520.000	0	0	0	0	0	(98.520.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	98.520.000	0	0	0	98.520.000	0	0	0	0	0	(98.520.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.480.000	0	0	0	71.480.000	170.000.000	0	0	0	170.000.000	98.520.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	71.480.000	0	0	0	71.480.000	170.000.000	0	0	0	170.000.000	98.520.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001					Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	6.960.573.600	884.426.400	0	0	7.845.000.000	6.427.439.742	884.426.400	0	0	7.311.866.142	(533.133.858)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.910.573.600	689.426.400	0	0	6.600.000.000	5.912.639.742	689.426.400	0	0	6.602.066.142	2.066.142
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	5.910.573.600	689.426.400	0	0	6.600.000.000	5.912.639.742	689.426.400	0	0	6.602.066.142	2.066.142
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.910.573.600	689.426.400	0	0	6.600.000.000	5.912.639.742	689.426.400	0	0	6.602.066.142	2.066.142
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.050.000.000	195.000.000	0	0	1.245.000.000	514.800.000	195.000.000	0	0	709.800.000	(535.200.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000.000	195.000.000	0	0	1.245.000.000	514.800.000	195.000.000	0	0	709.800.000	(535.200.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.050.000.000	195.000.000	0	0	1.245.000.000	514.800.000	195.000.000	0	0	709.800.000	(535.200.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002					Puskesmas sungai Rumbai	2.026.325.600	39.000.000	0	0	2.065.325.600	2.118.476.541	34.050.000	0	0	2.152.526.541	87.200.941
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	826.947.000	39.000.000	0	0	865.947.000	919.097.941	34.050.000	0	0	953.147.941	87.200.941

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	KABUPATEN/KOTA											
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	826.947.000	39.000.000	0	0	865.947.000	919.097.941	34.050.000	0	0	953.147.941	87.200.941
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	826.947.000	39.000.000	0	0	865.947.000	919.097.941	34.050.000	0	0	953.147.941	87.200.941
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.199.378.600	0	0	0	1.199.378.600	1.199.378.600	0	0	0	1.199.378.600	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.199.378.600	0	0	0	1.199.378.600	1.199.378.600	0	0	0	1.199.378.600	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.199.378.600	0	0	0	1.199.378.600	1.199.378.600	0	0	0	1.199.378.600	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Koto Besar	2.023.112.916	15.000.000	0	0	2.038.112.916	2.227.738.105	17.000.000	0	0	2.244.738.105	206.625.189
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	698.374.916	15.000.000	0	0	713.374.916	903.000.105	17.000.000	0	0	920.000.105	206.625.189
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	698.374.916	15.000.000	0	0	713.374.916	903.000.105	17.000.000	0	0	920.000.105	206.625.189
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	698.374.916	15.000.000	0	0	713.374.916	903.000.105	17.000.000	0	0	920.000.105	206.625.189
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.324.738.000	0	0	0	1.324.738.000	1.324.738.000	0	0	0	1.324.738.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.324.738.000	0	0	0	1.324.738.000	1.324.738.000	0	0	0	1.324.738.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.324.738.000	0	0	0	1.324.738.000	1.324.738.000	0	0	0	1.324.738.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Sungai Limau	1.626.126.000	43.700.000	0	0	1.669.826.000	1.310.787.745	13.000.000	0	0	1.523.787.745	(146.038.255)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	526.040.000	43.700.000	0	0	569.740.000	410.701.745	13.000.000	0	0	423.701.745	(146.038.255)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	526.040.000	43.700.000	0	0	569.740.000	410.701.745	13.000.000	0	0	423.701.745	(146.038.255)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	526.040.000	43.700.000	0	0	569.740.000	410.701.745	13.000.000	0	0	423.701.745	(146.038.255)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.100.086.000	0	0	0	1.100.086.000	1.100.086.000	0	0	0	1.100.086.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.100.086.000	0	0	0	1.100.086.000	1.100.086.000	0	0	0	1.100.086.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.100.086.000	0	0	0	1.100.086.000	1.100.086.000	0	0	0	1.100.086.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Koto Baru	2.604.231.800	58.538.200	0	0	2.662.770.000	3.075.521.720	98.538.200	0	0	3.174.059.920	511.289.920
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.894.271.800	58.538.200	0	0	1.952.810.000	1.848.196.720	98.538.200	0	0	1.946.734.920	(6.075.080)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.894.271.800	58.538.200	0	0	1.952.810.000	1.848.196.720	98.538.200	0	0	1.946.734.920	(6.075.080)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.894.271.800	58.538.200	0	0	1.952.810.000	1.848.196.720	98.538.200	0	0	1.946.734.920	(6.075.080)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	709.960.000	0	0	0	709.960.000	1.227.325.000	0	0	0	1.227.325.000	517.365.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	709.960.000	0	0	0	709.960.000	1.227.325.000	0	0	0	1.227.325.000	517.365.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	709.960.000	0	0	0	709.960.000	1.227.325.000	0	0	0	1.227.325.000	517.365.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006					Puskesmas Tiumang	1.334.108.800	10.000.000	0	0	1.344.108.800	1.545.312.525	30.000.000	0	0	1.575.312.525	231.203.725
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	328.528.800	10.000.000	0	0	338.528.800	539.732.525	30.000.000	0	0	569.732.525	231.203.725
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	328.528.800	10.000.000	0	0	338.528.800	539.732.525	30.000.000	0	0	569.732.525	231.203.725
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	328.528.800	10.000.000	0	0	338.528.800	539.732.525	30.000.000	0	0	569.732.525	231.203.725
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.005.580.000	0	0	0	1.005.580.000	1.005.580.000	0	0	0	1.005.580.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.005.580.000	0	0	0	1.005.580.000	1.005.580.000	0	0	0	1.005.580.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.005.580.000	0	0	0	1.005.580.000	1.005.580.000	0	0	0	1.005.580.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007					Puskesmas Padang Laweh	1.229.484.500	20.000.000	0	0	1.249.484.500	1.192.555.758	15.000.000	0	0	1.207.555.758	(41.928.742)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	427.000.000	20.000.000	0	0	447.000.000	390.071.258	15.000.000	0	0	405.071.258	(41.928.742)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	427.000.000	20.000.000	0	0	447.000.000	390.071.258	15.000.000	0	0	405.071.258	(41.928.742)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	427.000.000	20.000.000	0	0	447.000.000	390.071.258	15.000.000	0	0	405.071.258	(41.928.742)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	802.484.500	0	0	0	802.484.500	802.484.500	0	0	0	802.484.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	802.484.500	0	0	0	802.484.500	802.484.500	0	0	0	802.484.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	802.484.500	0	0	0	802.484.500	802.484.500	0	0	0	802.484.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008					Puskesmas Sitiung I	2.036.262.300	90.000.000	0	0	2.126.262.300	2.310.905.000	70.000.000	0	0	2.380.905.000	254.642.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	955.357.300	90.000.000	0	0	1.045.357.300	1.230.000.000	70.000.000	0	0	1.300.000.000	254.642.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	955.357.300	90.000.000	0	0	1.045.357.300	1.230.000.000	70.000.000	0	0	1.300.000.000	254.642.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	955.357.300	90.000.000	0	0	1.045.357.300	1.230.000.000	70.000.000	0	0	1.300.000.000	254.642.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.080.905.000	0	0	0	1.080.905.000	1.080.905.000	0	0	0	1.080.905.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.080.905.000	0	0	0	1.080.905.000	1.080.905.000	0	0	0	1.080.905.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.080.905.000	0	0	0	1.080.905.000	1.080.905.000	0	0	0	1.080.905.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009				Puskesmas Timpeh	1.569.615.000	10.000.000	0	0	1.579.615.000	1.608.931.718	10.000.000	0	0	1.618.931.718	39.316.718
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	567.240.000	10.000.000	0	0	577.240.000	606.556.718	10.000.000	0	0	616.556.718	39.316.718
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	567.240.000	10.000.000	0	0	577.240.000	606.556.718	10.000.000	0	0	616.556.718	39.316.718
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	567.240.000	10.000.000	0	0	577.240.000	606.556.718	10.000.000	0	0	616.556.718	39.316.718
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.002.375.000	0	0	0	1.002.375.000	1.002.375.000	0	0	0	1.002.375.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.002.375.000	0	0	0	1.002.375.000	1.002.375.000	0	0	0	1.002.375.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.002.375.000	0	0	0	1.002.375.000	1.002.375.000	0	0	0	1.002.375.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010				Puskesmas Gunung Medan	1.426.790.000	17.000.000	0	0	1.443.790.000	1.475.792.534	6.000.000	0	0	1.481.792.534	38.002.534
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	625.000.000	17.000.000	0	0	642.000.000	674.002.534	6.000.000	0	0	680.002.534	38.002.534
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	625.000.000	17.000.000	0	0	642.000.000	674.002.534	6.000.000	0	0	680.002.534	38.002.534
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	625.000.000	17.000.000	0	0	642.000.000	674.002.534	6.000.000	0	0	680.002.534	38.002.534
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	801.790.000	0	0	0	801.790.000	801.790.000	0	0	0	801.790.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	801.790.000	0	0	0	801.790.000	801.790.000	0	0	0	801.790.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	801.790.000	0	0	0	801.790.000	801.790.000	0	0	0	801.790.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011				Puskesmas Situng II	1.437.951.500	62.160.000	0	0	1.500.111.500	1.563.862.998	62.160.000	0	0	1.626.022.998	125.911.498
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	635.360.500	62.160.000	0	0	697.520.500	761.271.998	62.160.000	0	0	823.431.998	125.911.498
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	635.360.500	62.160.000	0	0	697.520.500	761.271.998	62.160.000	0	0	823.431.998	125.911.498
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	635.360.500	62.160.000	0	0	697.520.500	761.271.998	62.160.000	0	0	823.431.998	125.911.498
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	802.591.000	0	0	0	802.591.000	802.591.000	0	0	0	802.591.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	802.591.000	0	0	0	802.591.000	802.591.000	0	0	0	802.591.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	802.591.000	0	0	0	802.591.000	802.591.000	0	0	0	802.591.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012				Puskesmas Beringin Sakti	902.829.700	15.000.000	0	0	917.829.700	966.313.930	14.820.000	0	0	981.133.930	63.304.230
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	203.725.000	15.000.000	0	0	218.725.000	267.209.230	14.820.000	0	0	282.029.230	63.304.230
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	203.725.000	15.000.000	0	0	218.725.000	267.209.230	14.820.000	0	0	282.029.230	63.304.230
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	203.725.000	15.000.000	0	0	218.725.000	267.209.230	14.820.000	0	0	282.029.230	63.304.230
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	699.104.700	0	0	0	699.104.700	699.104.700	0	0	0	699.104.700	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	699.104.700	0	0	0	699.104.700	699.104.700	0	0	0	699.104.700	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	699.104.700	0	0	0	699.104.700	699.104.700	0	0	0	699.104.700	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013				Puskesmas Silago	1.643.378.400	26.000.000	0	0	1.669.378.400	1.744.638.142	29.000.000	0	0	1.773.638.142	104.259.742
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	737.027.400	26.000.000	0	0	763.027.400	838.319.142	29.000.000	0	0	867.319.142	104.291.742
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	737.027.400	26.000.000	0	0	763.027.400	838.319.142	29.000.000	0	0	867.319.142	104.291.742
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	737.027.400	26.000.000	0	0	763.027.400	838.319.142	29.000.000	0	0	867.319.142	104.291.742
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	906.351.000	0	0	0	906.351.000	906.319.000	0	0	0	906.319.000	(32.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	906.351.000	0	0	0	906.351.000	906.319.000	0	0	0	906.319.000	(32.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	906.351.000	0	0	0	906.351.000	906.319.000	0	0	0	906.319.000	(32.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014				Puskesmas Sungai Dareh	2.401.313.384	141.560.680	0	0	2.542.874.064	2.859.241.539	130.050.000	0	0	2.989.291.539	446.417.475
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.202.173.320	141.560.680	0	0	1.343.734.000	1.660.105.539	130.050.000	0	0	1.790.155.539	446.421.539
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.202.173.320	141.560.680	0	0	1.343.734.000	1.660.105.539	130.050.000	0	0	1.790.155.539	446.421.539
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.202.173.320	141.560.680	0	0	1.343.734.000	1.660.105.539	130.050.000	0	0	1.790.155.539	446.421.539
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.199.140.064	0	0	0	1.199.140.064	1.199.136.000	0	0	0	1.199.136.000	(4.064)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.199.140.064	0	0	0	1.199.140.064	1.199.136.000	0	0	0	1.199.136.000	(4.064)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.199.140.064	0	0	0	1.199.140.064	1.199.136.000	0	0	0	1.199.136.000	(4.064)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015				Puskesmas Sialang	1.207.214.000	10.000.000	0	0	1.217.214.000	1.398.463.103	25.000.000	0	0	1.423.463.103	206.249.103
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.409.000	10.000.000	0	0	422.409.000	603.658.103	25.000.000	0	0	628.658.103	206.249.103

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	412.409.000	10.000.000	0	0	422.409.000	603.658.103	25.000.000	0	0	628.658.103	206.249.103
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	412.409.000	10.000.000	0	0	422.409.000	603.658.103	25.000.000	0	0	628.658.103	206.249.103
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	794.805.000	0	0	0	794.805.000	794.805.000	0	0	0	794.805.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	794.805.000	0	0	0	794.805.000	794.805.000	0	0	0	794.805.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	794.805.000	0	0	0	794.805.000	794.805.000	0	0	0	794.805.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017				Laboratorium Kesehatan Daerah	420.000.000	5.000.000	0	0	425.000.000	394.090.750	5.000.000	0	0	399.090.750	(25.909.250)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	275.000.000	0	0	0	275.000.000	275.000.000	0	0	0	275.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	275.000.000	0	0	0	275.000.000	275.000.000	0	0	0	275.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	275.000.000	0	0	0	275.000.000	275.000.000	0	0	0	275.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	145.000.000	5.000.000	0	0	150.000.000	119.090.750	5.000.000	0	0	124.090.750	(25.909.250)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	5.000.000	0	0	150.000.000	119.090.750	5.000.000	0	0	124.090.750	(25.909.250)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	145.000.000	5.000.000	0	0	150.000.000	119.090.750	5.000.000	0	0	124.090.750	(25.909.250)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	70.513.397.850	37.348.224.849	0	0	107.862.622.699	73.598.037.827	35.203.668.858	0	0	108.801.706.685	939.083.986
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.635.927.850	0	0	0	28.635.927.850	22.916.512.634	0	0	0	22.916.512.634	(5.719.415.216)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.635.927.850	0	0	0	28.635.927.850	22.916.512.634	0	0	0	22.916.512.634	(5.719.415.216)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.635.927.850	0	0	0	28.635.927.850	22.916.512.634	0	0	0	22.916.512.634	(5.719.415.216)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.877.470.000	37.348.224.849	0	0	79.226.694.849	50.681.525.193	35.203.668.858	0	0	85.885.194.051	6.658.499.202
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	33.026.694.849	0	0	33.026.694.849	0	33.026.694.849	0	0	33.026.694.849	0
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0	14.128.830.849	0	0	14.128.830.849	0	14.128.830.849	0	0	14.128.830.849	0
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	449.440.000	0	0	449.440.000	0	449.440.000	0	0	449.440.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	18.448.424.000	0	0	18.448.424.000	0	18.448.424.000	0	0	18.448.424.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.877.470.000	4.322.530.000	0	0	46.200.000.000	50.681.525.193	2.176.974.009	0	0	52.858.499.202	6.658.499.202
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0	0	0	0	0	(1.200.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	40.677.470.000	4.322.530.000	0	0	45.000.000.000	50.681.525.193	2.176.974.009	0	0	52.858.499.202	7.858.499.202
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**47.662.952.696**	**64.195.759.630**	**0**	**0**	**111.858.712.326**	**31.576.161.291**	**52.389.332.895**	**0**	**0**	**83.965.494.186**	**(27.893.218.140)**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	47.662.952.696	64.195.759.630	0	0	111.858.712.326	31.576.161.291	52.389.332.895	0	0	83.965.494.186	(27.893.218.140)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.447.479.800	96.400.000	0	0	9.543.879.800	7.972.841.400	77.300.000	0	0	8.050.141.400	(1.493.738.400)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.705.000	0	0	0	31.705.000	16.711.000	0	0	0	16.711.000	(14.994.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.705.000	0	0	0	31.705.000	16.711.000	0	0	0	16.711.000	(14.994.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.718.532.700	0	0	0	4.718.532.700	3.950.372.000	0	0	0	3.950.372.000	(768.160.700)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.718.532.700	0	0	0	4.718.532.700	3.950.372.000	0	0	0	3.950.372.000	(768.160.700)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.851.000	0	0	0	379.851.000	288.239.500	22.000.000	0	0	310.239.500	(69.611.500)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.498.000	0	0	0	4.498.000	4.498.000	0	0	0	4.498.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	0	0	0	36.000.000	35.545.000	22.000.000	0	0	57.545.000	21.545.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.497.000	0	0	0	13.497.000	9.920.500	0	0	0	9.920.500	(3.576.500)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	(9.000.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.000.000	0	0	0	36.000.000	19.000.000	0	0	0	19.000.000	(17.000.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.856.000	0	0	0	262.856.000	201.276.000	0	0	0	201.276.000	(61.580.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.331.000	96.400.000	0	0	253.731.000	1.815.000	55.300.000	0	0	57.115.000	(196.616.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.331.000	96.400.000	0	0	253.731.000	1.815.000	55.300.000	0	0	57.115.000	(196.616.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.888.304.100	0	0	0	2.888.304.100	2.738.473.900	0	0	0	2.738.473.900	(149.830.200)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(1.000.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.998.500	0	0	0	549.998.500	549.998.300	0	0	0	549.998.300	(200)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.334.305.600	0	0	0	2.334.305.600	2.185.475.600	0	0	0	2.185.475.600	(148.830.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.271.756.000	0	0	0	1.271.756.000	977.230.000	0	0	0	977.230.000	(294.526.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.560.000	0	0	0	444.560.000	444.560.000	0	0	0	444.560.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	827.196.000	0	0	0	827.196.000	532.670.000	0	0	0	532.670.000	(294.526.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	401.252.000	7.381.098.400	0	0	7.782.350.400	325.631.820	4.708.528.200	0	0	5.034.160.020	(2.748.170.380)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.471.000	3.453.998.400	0	0	3.604.469.400	80.523.820	1.525.779.200	0	0	1.606.303.020	(1.998.166.380)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	44.962.000	220.448.000	0	0	265.410.000	16.501.670	6.500.000	0	0	23.001.670	(242.408.330)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	105.509.000	3.233.550.400	0	0	3.339.059.400	64.022.150	1.519.279.200	0	0	1.583.301.350	(1.755.758.050)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.781.000	3.927.100.000	0	0	4.177.881.000	245.128.000	3.182.749.000	0	0	3.427.877.000	(750.004.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	170.973.000	2.308.600.000	0	0	2.479.573.000	170.373.000	2.058.700.000	0	0	2.229.073.000	(250.500.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	79.808.000	1.618.500.000	0	0	1.698.308.000	74.755.000	1.124.049.000	0	0	1.198.804.000	(499.504.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.481.338.000	0	0	0	1.481.338.000	1.403.747.000	0	0	0	1.403.747.000	(77.591.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.481.338.000	0	0	0	1.481.338.000	1.403.747.000	0	0	0	1.403.747.000	(77.591.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	244.704.000	0	0	0	244.704.000	230.104.000	0	0	0	230.104.000	(14.600.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.236.634.000	0	0	0	1.236.634.000	1.173.643.000	0	0	0	1.173.643.000	(62.991.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	33.450.000	0	0	0	33.450.000	33.450.000	0	0	0	33.450.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	REGIONAL											
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	33.450.000	0	0	0	33.450.000	33.450.000	0	0	0	33.450.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	33.450.000	0	0	0	33.450.000	33.450.000	0	0	0	33.450.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.621.042.000	0	0	0	2.621.042.000	2.562.156.800	0	0	0	2.562.156.800	(58.885.200)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.621.042.000	0	0	0	2.621.042.000	2.562.156.800	0	0	0	2.562.156.800	(58.885.200)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.429.707.000	0	0	0	2.429.707.000	2.417.707.000	0	0	0	2.417.707.000	(12.000.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	128.725.000	0	0	0	128.725.000	90.469.800	0	0	0	90.469.800	(38.255.200)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	62.610.000	0	0	0	62.610.000	53.980.000	0	0	0	53.980.000	(8.630.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.394.931.265	9.870.632.850	0	0	24.265.564.115	3.335.809.250	8.326.278.695	0	0	11.662.087.945	(12.603.476.170)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14.394.931.265	9.870.632.850	0	0	24.265.564.115	3.335.809.250	8.326.278.695	0	0	11.662.087.945	(12.603.476.170)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	476.719.000	22.500.000	0	0	499.219.000	308.570.100	0	0	0	308.570.100	(190.648.900)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	143.396.000	0	0	0	143.396.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	(43.396.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13.774.816.265	9.848.132.850	0	0	23.622.949.115	2.927.239.150	8.326.278.695	0	0	11.253.517.845	(12.369.431.270)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	11.375.732.631	46.824.984.000	0	0	58.200.716.631	10.242.861.421	39.277.226.000	0	0	49.520.087.421	(8.680.629.210)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	11.375.732.631	46.824.984.000	0	0	58.200.716.631	10.242.861.421	39.277.226.000	0	0	49.520.087.421	(8.680.629.210)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	8.659.563.631	43.112.884.000	0	0	51.772.447.631	7.508.142.421	34.312.863.500	0	0	41.821.005.921	(9.951.441.710)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	1.551.864.000	0	0	0	1.551.864.000	1.519.564.000	25.000.000	0	0	1.544.564.000	(7.300.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	0	3.712.100.000	0	0	3.712.100.000	0	4.914.362.500	0	0	4.914.362.500	1.202.262.500
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	1.164.305.000	0	0	0	1.164.305.000	1.215.155.000	25.000.000	0	0	1.240.155.000	75.850.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	396.079.000	20.244.380	0	0	416.323.380	57.103.200	0	0	0	57.103.200	(359.220.180)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	396.079.000	20.244.380	0	0	416.323.380	57.103.200	0	0	0	57.103.200	(359.220.180)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	396.079.000	20.244.380	0	0	416.323.380	57.103.200	0	0	0	57.103.200	(359.220.180)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7.511.648.000	2.400.000	0	0	7.514.048.000	5.642.540.400	0	0	0	5.642.540.400	(1.871.507.600)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5.573.200.000	0	0	0	5.573.200.000	5.500.000.000	0	0	0	5.500.000.000	(73.200.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	5.573.200.000	0	0	0	5.573.200.000	5.500.000.000	0	0	0	5.500.000.000	(73.200.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.938.448.000	2.400.000	0	0	1.940.848.000	142.540.400	0	0	0	142.540.400	(1.798.307.600)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.938.448.000	2.400.000	0	0	1.940.848.000	142.540.400	0	0	0	142.540.400	(1.798.307.600)
1	**04**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**13.083.765.970**	**533.894.060**	**0**	**0**	**13.617.660.030**	**3.969.955.500**	**505.118.500**	**0**	**0**	**4.475.074.000**	**(9.142.586.030)**
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.083.765.970	533.894.060	0	0	13.617.660.030	3.969.955.500	505.118.500	0	0	4.475.074.000	(9.142.586.030)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.442.475.420	29.000.000	0	0	2.471.475.420	2.332.317.840	36.000.000	0	0	2.368.317.840	(103.157.580)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.659.108.700	0	0	0	1.659.108.700	1.463.874.000	0	0	0	1.463.874.000	(195.234.700)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.659.108.700	0	0	0	1.659.108.700	1.463.874.000	0	0	0	1.463.874.000	(195.234.700)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.753.900	0	0	0	201.753.900	295.178.300	0	0	0	295.178.300	93.424.400
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.099.000	0	0	0	8.099.000	5.685.000	0	0	0	5.685.000	(2.414.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.569.000	0	0	0	40.569.000	47.569.000	0	0	0	47.569.000	7.000.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.496.000	0	0	0	13.496.000	15.837.200	0	0	0	15.837.200	2.341.200
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.980.000	0	0	0	26.980.000	39.980.000	0	0	0	39.980.000	13.000.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.609.900	0	0	0	31.609.900	35.109.900	0	0	0	35.109.900	3.500.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.000.000	0	0	0	81.000.000	150.997.200	0	0	0	150.997.200	69.997.200

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	29.000.000	0	0	29.000.000	0	36.000.000	0	0	36.000.000	7.000.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	22.000.000	0	0	22.000.000	0	29.000.000	0	0	29.000.000	7.000.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.574.100	0	0	0	463.574.100	417.917.800	0	0	0	417.917.800	(45.656.300)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(1.000.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.866.300	0	0	0	23.866.300	0	0	0	0	0	(23.866.300)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.707.800	0	0	0	435.707.800	414.917.800	0	0	0	414.917.800	(20.790.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.038.720	0	0	0	118.038.720	155.347.740	0	0	0	155.347.740	37.309.020
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.590.000	0	0	0	12.590.000	7.270.000	0	0	0	7.270.000	(5.320.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.750.000	0	0	0	38.750.000	38.750.000	0	0	0	38.750.000	0
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000	0	0	0	6.100.000	6.100.000	0	0	0	6.100.000	0
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.598.720	0	0	0	60.598.720	103.227.740	0	0	0	103.227.740	42.629.020
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	301.444.400	0	0	0	301.444.400	171.949.500	0	0	0	171.949.500	(129.494.900)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.808.600	0	0	0	45.808.600	16.178.600	0	0	0	16.178.600	(29.630.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	01		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.808.600	0	0	0	45.808.600	16.178.600	0	0	0	16.178.600	(29.630.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	37.428.000	0	0	0	37.428.000	12.730.000	0	0	0	12.730.000	(24.698.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02	01		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	37.428.000	0	0	0	37.428.000	12.730.000	0	0	0	12.730.000	(24.698.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	61.615.000	0	0	0	61.615.000	0	0	0	0	0	(61.615.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Relokasi Program Kabupaten/Kota											
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	61.615.000	0	0	0	61.615.000	0	0	0	0	0	(61.615.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.895.000	0	0	0	3.895.000	0	0	0	0	0	(3.895.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.895.000	0	0	0	3.895.000	0	0	0	0	0	(3.895.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	152.697.800	0	0	0	152.697.800	143.040.900	0	0	0	143.040.900	(9.656.900)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	152.697.800	0	0	0	152.697.800	143.040.900	0	0	0	143.040.900	(9.656.900)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.801.782.500	0	0	0	3.801.782.500	76.740.300	0	0	0	76.740.300	(3.725.042.200)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	27.856.000	0	0	0	27.856.000	24.946.000	0	0	0	24.946.000	(2.910.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	27.856.000	0	0	0	27.856.000	24.946.000	0	0	0	24.946.000	(2.910.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.219.600	0	0	0	100.219.600	51.632.800	0	0	0	51.632.800	(48.586.800)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	69.628.600	0	0	0	69.628.600	35.312.600	0	0	0	35.312.600	(34.316.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	30.591.000	0	0	0	30.591.000	16.320.200	0	0	0	16.320.200	(14.270.800)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.673.706.900	0	0	0	3.673.706.900	161.500	0	0	0	161.500	(3.673.545.400)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3.673.706.900	0	0	0	3.673.706.900	161.500	0	0	0	161.500	(3.673.545.400)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	157.821.000	0	0	0	157.821.000	157.821.000	0	0	0	157.821.000	0
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	157.821.000	0	0	0	157.821.000	157.821.000	0	0	0	157.821.000	0
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	157.821.000	0	0	0	157.821.000	157.821.000	0	0	0	157.821.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.380.242.650	504.894.060	0	0	6.885.136.710	1.231.126.860	469.118.500	0	0	1.700.245.360	(5.184.891.350)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.380.242.650	504.894.060	0	0	6.885.136.710	1.231.126.860	469.118.500	0	0	1.700.245.360	(5.184.891.350)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.380.242.650	504.894.060	0	0	6.885.136.710	1.231.126.860	469.118.500	0	0	1.700.245.360	(5.184.891.350)
1	**05**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**11.369.287.066**	**6.159.000.000**	**0**	**0**	**17.528.287.066**	**10.696.944.914**	**6.258.609.200**	**0**	**0**	**16.955.554.114**	**(572.732.952)**
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.982.876.766	0	0	0	8.982.876.766	8.203.885.164	0	0	0	8.203.885.164	(778.991.602)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.955.897.766	0	0	0	7.955.897.766	7.107.576.164	0	0	0	7.107.576.164	(848.321.602)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.442.715.870	0	0	0	3.442.715.870	2.865.569.000	0	0	0	2.865.569.000	(577.146.870)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.442.715.870	0	0	0	3.442.715.870	2.865.569.000	0	0	0	2.865.569.000	(577.146.870)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.883.200	0	0	0	183.883.200	241.178.300	0	0	0	241.178.300	57.295.100
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.452.000	0	0	0	5.452.000	5.452.000	0	0	0	5.452.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.448.000	0	0	0	29.448.000	30.048.000	0	0	0	30.048.000	600.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.772.400	0	0	0	13.772.400	13.972.400	0	0	0	13.972.400	200.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0	27.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.204.600	0	0	0	27.204.600	27.488.700	0	0	0	27.488.700	284.100
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.006.200	0	0	0	81.006.200	137.217.200	0	0	0	137.217.200	56.211.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.106.544.696	0	0	0	4.106.544.696	3.780.514.864	0	0	0	3.780.514.864	(326.029.832)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.551.096	0	0	0	37.551.096	37.550.464	0	0	0	37.550.464	(632)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.064.993.600	0	0	0	4.064.993.600	3.738.964.400	0	0	0	3.738.964.400	(326.029.200)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.754.000	0	0	0	222.754.000	220.314.000	0	0	0	220.314.000	(2.440.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.250.000	0	0	0	12.250.000	12.250.000	0	0	0	12.250.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.234.000	0	0	0	200.234.000	200.234.000	0	0	0	200.234.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.270.000	0	0	0	10.270.000	7.830.000	0	0	0	7.830.000	(2.440.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	476.869.000	0	0	0	476.869.000	572.701.000	0	0	0	572.701.000	95.832.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	359.734.000	0	0	0	359.734.000	416.686.000	0	0	0	416.686.000	56.952.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	273.870.000	0	0	0	273.870.000	360.542.000	0	0	0	360.542.000	86.672.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	77.864.000	0	0	0	77.864.000	48.144.000	0	0	0	48.144.000	(29.720.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	117.135.000	0	0	0	117.135.000	156.015.000	0	0	0	156.015.000	38.880.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12.567.000	0	0	0	12.567.000	12.567.000	0	0	0	12.567.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	104.568.000	0	0	0	104.568.000	143.448.000	0	0	0	143.448.000	38.880.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	550.110.000	0	0	0	550.110.000	523.608.000	0	0	0	523.608.000	(26.502.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	477.400.000	0	0	0	477.400.000	448.898.000	0	0	0	448.898.000	(28.502.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
							Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	477.400.000	0	0	0	477.400.000	448.898.000	0	0	0	448.898.000	(28.502.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	11.490.000	0	0	0	11.490.000	11.490.000	0	0	0	11.490.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	11.490.000	0	0	0	11.490.000	11.490.000	0	0	0	11.490.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.03			Investigasi Kejadian Kebakaran	21.360.000	0	0	0	21.360.000	21.360.000	0	0	0	21.360.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	21.360.000	0	0	0	21.360.000	21.360.000	0	0	0	21.360.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	39.860.000	0	0	0	39.860.000	41.860.000	0	0	0	41.860.000	2.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	39.860.000	0	0	0	39.860.000	41.860.000	0	0	0	41.860.000	2.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.386.410.300	6.159.000.000	0	0	8.545.410.300	2.493.059.750	6.258.609.200	0	0	8.751.668.950	206.258.650
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.823.831.100	29.000.000	0	0	1.852.831.100	1.666.952.850	29.000.000	0	0	1.695.952.850	(156.878.250)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	861.528.700	0	0	0	861.528.700	733.787.000	0	0	0	733.787.000	(127.741.700)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	861.528.700	0	0	0	861.528.700	733.787.000	0	0	0	733.787.000	(127.741.700)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.891.200	29.000.000	0	0	265.891.200	230.154.250	29.000.000	0	0	259.154.250	(6.736.950)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.577.000	0	0	0	2.577.000	2.577.000	0	0	0	2.577.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.352.000	29.000.000	0	0	76.352.000	48.886.450	29.000.000	0	0	77.886.450	1.534.450
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.500.000	0	0	0	67.500.000	36.910.000	0	0	0	36.910.000	(30.590.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.470.300	0	0	0	29.470.300	29.491.600	0	0	0	29.491.600	21.300
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.991.900	0	0	0	89.991.900	112.289.200	0	0	0	112.289.200	22.297.300
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.051.200	0	0	0	587.051.200	552.651.600	0	0	0	552.651.600	(34.399.600)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.999.600	0	0	0	17.999.600	18.190.000	0	0	0	18.190.000	190.400
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	500.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.051.600	0	0	0	562.051.600	526.961.600	0	0	0	526.961.600	(35.090.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.360.000	0	0	0	138.360.000	150.360.000	0	0	0	150.360.000	12.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.360.000	0	0	0	78.360.000	90.360.000	0	0	0	90.360.000	12.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	562.579.200	6.130.000.000	0	0	6.692.579.200	826.106.900	6.229.609.200	0	0	7.055.716.100	363.136.900
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	52.475.000	0	0	0	52.475.000	27.364.400	0	0	0	27.364.400	(25.110.600)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	52.475.000	0	0	0	52.475.000	27.364.400	0	0	0	27.364.400	(25.110.600)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	254.604.100	6.130.000.000	0	0	6.384.604.100	582.447.800	6.229.609.200	0	0	6.812.057.000	427.452.900
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	36.685.000	0	0	0	36.685.000	22.826.000	0	0	0	22.826.000	(13.859.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	28.565.000	0	0	0	28.565.000	352.758.000	0	0	0	352.758.000	324.193.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	37.981.000	0	0	0	37.981.000	25.556.000	0	0	0	25.556.000	(12.425.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	74.650.000	80.000.000	0	0	154.650.000	74.650.000	79.609.200	0	0	154.259.200	(390.800)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50.470.000	6.050.000.000	0	0	6.100.470.000	100.472.000	6.150.000.000	0	0	6.250.472.000	150.002.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	1.768.100	0	0	0	1.768.100	18.100	0	0	0	18.100	(1.750.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24.485.000	0	0	0	24.485.000	6.167.700	0	0	0	6.167.700	(18.317.300)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	205.866.600	0	0	0	205.866.600	216.294.700	0	0	0	216.294.700	10.428.100
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	109.585.000	0	0	0	109.585.000	109.584.200	0	0	0	109.584.200	(800)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.605.000	0	0	0	3.605.000	21.924.000	0	0	0	21.924.000	18.319.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	37.125.000	0	0	0	37.125.000	34.775.000	0	0	0	34.775.000	(2.350.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	41.228.000	0	0	0	41.228.000	50.011.500	0	0	0	50.011.500	8.783.500

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	05		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.323.600	0	0	0	14.323.600	0	0	0	0	0	(14.323.600)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49.633.500	0	0	0	49.633.500	0	0	0	0	0	(49.633.500)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.04	02		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	25.454.000	0	0	0	25.454.000	0	0	0	0	0	(25.454.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.04	03		Kerja Sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	24.179.500	0	0	0	24.179.500	0	0	0	0	0	(24.179.500)
1	**06**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**4.758.365.700**	**870.500.000**	**0**	**0**	**5.628.865.700**	**5.297.494.650**	**864.500.000**	**0**	**0**	**6.161.994.650**	**533.128.950**
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.758.365.700	870.500.000	0	0	5.628.865.700	5.297.494.650	864.500.000	0	0	6.161.994.650	533.128.950
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.772.233.300	870.500.000	0	0	4.642.733.300	3.257.076.550	864.500.000	0	0	4.121.576.550	(521.156.750)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.517.466.300	0	0	0	2.517.466.300	1.988.353.000	0	0	0	1.988.353.000	(529.113.300)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.517.466.300	0	0	0	2.517.466.300	1.988.353.000	0	0	0	1.988.353.000	(529.113.300)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.460.300	0	0	0	209.460.300	277.932.300	0	0	0	277.932.300	68.472.000
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.997.000	0	0	0	42.997.000	55.887.000	0	0	0	55.887.000	12.890.000
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.390.600	0	0	0	13.390.600	16.300.600	0	0	0	16.300.600	2.910.000
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	3.000.000
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.069.900	0	0	0	36.069.900	39.279.900	0	0	0	39.279.900	3.210.000
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.002.800	0	0	0	81.002.800	127.464.800	0	0	0	127.464.800	46.462.000
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	870.500.000	0	0	870.500.000	0	864.500.000	0	0	864.500.000	(6.000.000)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	820.000.000	0	0	820.000.000	0	820.000.000	0	0	820.000.000	0
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	(6.000.000)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	44.500.000	0	0	44.500.000	0	44.500.000	0	0	44.500.000	0
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	882.266.700	0	0	0	882.266.700	829.681.250	0	0	0	829.681.250	(52.585.450)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.392.900	0	0	0	77.392.900	64.903.750	0	0	0	64.903.750	(12.489.150)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.873.800	0	0	0	800.873.800	760.777.500	0	0	0	760.777.500	(40.096.300)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.040.000	0	0	0	163.040.000	161.110.000	0	0	0	161.110.000	(1.930.000)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.500.000	0	0	0	31.500.000	31.500.000	0	0	0	31.500.000	0
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.100.000	0	0	0	105.100.000	105.000.000	0	0	0	105.000.000	(100.000)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.440.000	0	0	0	6.440.000	4.610.000	0	0	0	4.610.000	(1.830.000)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	231.498.900	0	0	0	231.498.900	129.104.000	0	0	0	129.104.000	(102.394.900)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	231.498.900	0	0	0	231.498.900	129.104.000	0	0	0	129.104.000	(102.394.900)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	179.063.000	0	0	0	179.063.000	101.768.500	0	0	0	101.768.500	(77.294.500)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.435.900	0	0	0	52.435.900	27.335.500	0	0	0	27.335.500	(25.100.400)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	550.949.600	0	0	0	550.949.600	1.762.879.700	0	0	0	1.762.879.700	1.211.930.100
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	235.949.600	0	0	0	235.949.600	1.447.879.700	0	0	0	1.447.879.700	1.211.930.100
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	01	Penyediaan Pemakaman	34.823.400	0	0	0	34.823.400	19.753.700	0	0	0	19.753.700	(15.069.700)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	15.146.900	0	0	0	15.146.900	10.823.600	0	0	0	10.823.600	(4.323.300)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	24.715.000	0	0	0	24.715.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	(21.215.000)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.022.200	0	0	0	13.022.200	700.000	0	0	0	700.000	(12.322.200)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	24.234.400	0	0	0	24.234.400	1.296.289.900	0	0	0	1.296.289.900	1.272.055.500
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	22.566.900	0	0	0	22.566.900	22.566.900	0	0	0	22.566.900	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
							Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	07		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.020.900	0	0	0	4.020.900	160.000	0	0	0	160.000	(3.860.900)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	08		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.294.700	0	0	0	14.294.700	57.792.200	0	0	0	57.792.200	43.497.500
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	09		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	14.116.900	0	0	0	14.116.900	3.036.900	0	0	0	3.036.900	(11.080.000)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	10		Pemberian Layanan Kedaruratan	25.594.200	0	0	0	25.594.200	8.037.500	0	0	0	8.037.500	(17.556.700)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.524.700	0	0	0	16.524.700	2.296.000	0	0	0	2.296.000	(14.228.700)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	12		Pemberian Layanan Rujukan	26.888.400	0	0	0	26.888.400	22.923.000	0	0	0	22.923.000	(3.965.400)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	315.000.000	0	0	0	315.000.000	315.000.000	0	0	0	315.000.000	0
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.02	08		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	315.000.000	0	0	0	315.000.000	315.000.000	0	0	0	315.000.000	0
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	41.381.300	0	0	0	41.381.300	22.001.200	0	0	0	22.001.200	(19.380.100)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	41.381.300	0	0	0	41.381.300	22.001.200	0	0	0	22.001.200	(19.380.100)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	05	2.02	03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	41.381.300	0	0	0	41.381.300	22.001.200	0	0	0	22.001.200	(19.380.100)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	162.302.600	0	0	0	162.302.600	126.433.200	0	0	0	126.433.200	(35.869.400)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	162.302.600	0	0	0	162.302.600	126.433.200	0	0	0	126.433.200	(35.869.400)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	01		Penyediaan Makanan	104.508.800	0	0	0	104.508.800	101.008.800	0	0	0	101.008.800	(3.500.000)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	02		Penyediaan Sandang	15.400.000	0	0	0	15.400.000	15.400.000	0	0	0	15.400.000	0
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	03		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.936.900	0	0	0	20.936.900	5.364.400	0	0	0	5.364.400	(15.572.500)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	04		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.700.000	0	0	0	12.700.000	4.660.000	0	0	0	4.660.000	(8.040.000)
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.01	05		Pelayanan Dukungan Psikososial	8.756.900	0	0	0	8.756.900	0	0	0	0	0	(8.756.900)
2							**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**62.026.160.347**	**12.089.761.740**	**0**	**0**	**74.115.922.087**	**61.037.229.573**	**11.938.714.300**	**0**	**0**	**72.975.943.873**	**(1.139.978.214)**
2	**07**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**273.197.400**	**0**	**0**	**0**	**273.197.400**	**430.697.600**	**0**	**0**	**0**	**430.697.600**	**157.500.200**
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000					Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	273.197.400	0	0	0	273.197.400	430.697.600	0	0	0	430.697.600	157.500.200

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	69.077.000	0	0	0	69.077.000	25.763.000	0	0	0	25.763.000	(43.314.000)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	69.077.000	0	0	0	69.077.000	25.763.000	0	0	0	25.763.000	(43.314.000)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	69.077.000	0	0	0	69.077.000	25.763.000	0	0	0	25.763.000	(43.314.000)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	40.667.200	0	0	0	40.667.200	284.379.000	0	0	0	284.379.000	243.711.800
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	40.667.200	0	0	0	40.667.200	284.379.000	0	0	0	284.379.000	243.711.800
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	40.667.200	0	0	0	40.667.200	284.379.000	0	0	0	284.379.000	243.711.800
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	119.186.200	0	0	0	119.186.200	104.878.600	0	0	0	104.878.600	(14.307.600)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	46.674.000	0	0	0	46.674.000	33.139.200	0	0	0	33.139.200	(13.534.800)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	46.674.000	0	0	0	46.674.000	33.139.200	0	0	0	33.139.200	(13.534.800)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	72.512.200	0	0	0	72.512.200	71.739.400	0	0	0	71.739.400	(772.800)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	72.512.200	0	0	0	72.512.200	71.739.400	0	0	0	71.739.400	(772.800)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	44.267.000	0	0	0	44.267.000	15.677.000	0	0	0	15.677.000	(28.590.000)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.512.800	0	0	0	19.512.800	10.977.000	0	0	0	10.977.000	(8.535.800)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	19.512.800	0	0	0	19.512.800	10.977.000	0	0	0	10.977.000	(8.535.800)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	24.754.200	0	0	0	24.754.200	4.700.000	0	0	0	4.700.000	(20.054.200)
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	05	2.02	01	Pencegahan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.754.200	0	0	0	24.754.200	4.700.000	0	0	0	4.700.000	(20.054.200)
2	**08**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.330.576.000**	**0**	**0**	**0**	**1.330.576.000**	**1.388.446.600**	**0**	**0**	**0**	**1.388.446.600**	**57.870.600**
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	1.330.576.000	0	0	0	1.330.576.000	1.388.446.600	0	0	0	1.388.446.600	57.870.600

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	730.291.000	0	0	0	730.291.000	739.729.000	0	0	0	739.729.000	9.438.000
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.121.000	0	0	0	45.121.000	29.959.000	0	0	0	29.959.000	(15.162.000)
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.01	03		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	45.121.000	0	0	0	45.121.000	29.959.000	0	0	0	29.959.000	(15.162.000)
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	685.170.000	0	0	0	685.170.000	709.770.000	0	0	0	709.770.000	24.600.000
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.03	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	685.170.000	0	0	0	685.170.000	709.770.000	0	0	0	709.770.000	24.600.000
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	61.759.200	0	0	0	61.759.200	57.789.200	0	0	0	57.789.200	(3.970.000)
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	61.759.200	0	0	0	61.759.200	57.789.200	0	0	0	57.789.200	(3.970.000)
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.373.000	0	0	0	9.373.000	5.403.000	0	0	0	5.403.000	(3.970.000)
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	52.386.200	0	0	0	52.386.200	52.386.200	0	0	0	52.386.200	0
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	85.525.000	0	0	0	85.525.000	66.409.600	0	0	0	66.409.600	(19.115.400)
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	85.525.000	0	0	0	85.525.000	66.409.600	0	0	0	66.409.600	(19.115.400)
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	06	2.02	03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.525.000	0	0	0	85.525.000	66.409.600	0	0	0	66.409.600	(19.115.400)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	453.000.800	0	0	0	453.000.800	524.518.800	0	0	0	524.518.800	71.518.000
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	147.762.000	0	0	0	147.762.000	224.852.000	0	0	0	224.852.000	77.090.000
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	38.062.000	0	0	0	38.062.000	115.152.000	0	0	0	115.152.000	77.090.000
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	109.700.000	0	0	0	109.700.000	109.700.000	0	0	0	109.700.000	0
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.642.800	0	0	0	230.642.800	225.070.800	0	0	0	225.070.800	(5.572.000)
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.525.000	0	0	0	28.525.000	22.953.000	0	0	0	22.953.000	(5.572.000)
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	202.117.800	0	0	0	202.117.800	202.117.800	0	0	0	202.117.800	0
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000	0	0	0	74.596.000	74.596.000	0	0	0	74.596.000	0
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000	0	0	0	74.596.000	74.596.000	0	0	0	74.596.000	0
2	**09**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**4.525.459.000**	**0**	**0**	**0**	**4.525.459.000**	**3.577.830.850**	**0**	**0**	**0**	**3.577.830.850**	**(947.628.150)**
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000				Dinas Pangan dan Perikanan	4.525.459.000	0	0	0	4.525.459.000	3.577.830.850	0	0	0	3.577.830.850	(947.628.150)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.054.755.400	0	0	0	4.054.755.400	3.133.269.250	0	0	0	3.133.269.250	(921.486.150)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.990.594.350	0	0	0	2.990.594.350	2.019.405.000	0	0	0	2.019.405.000	(971.189.350)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.990.594.350	0	0	0	2.990.594.350	2.019.405.000	0	0	0	2.019.405.000	(971.189.350)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.175.600	0	0	0	249.175.600	338.963.050	0	0	0	338.963.050	89.787.450
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.642.500	0	0	0	3.642.500	1.970.500	0	0	0	1.970.500	(1.672.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.585.000	0	0	0	65.585.000	70.206.000	0	0	0	70.206.000	4.621.000
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.173.700	0	0	0	7.173.700	6.204.950	0	0	0	6.204.950	(968.750)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.018.000	0	0	0	40.018.000	28.620.000	0	0	0	28.620.000	(11.398.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.720.400	0	0	0	24.720.400	17.653.400	0	0	0	17.653.400	(7.067.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.036.000	0	0	0	108.036.000	214.308.200	0	0	0	214.308.200	106.272.200
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.050.450	0	0	0	734.050.450	695.686.200	0	0	0	695.686.200	(38.364.250)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.525.000	0	0	0	2.525.000	2.280.000	0	0	0	2.280.000	(245.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.923.650	0	0	0	49.923.650	49.424.400	0	0	0	49.424.400	(499.250)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	681.601.800	0	0	0	681.601.800	643.981.800	0	0	0	643.981.800	(37.620.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.935.000	0	0	0	80.935.000	79.215.000	0	0	0	79.215.000	(1.720.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.775.000	0	0	0	22.775.000	22.775.000	0	0	0	22.775.000	0
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000	0	0	0	51.000.000	51.000.000	0	0	0	51.000.000	0
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.160.000	0	0	0	7.160.000	5.440.000	0	0	0	5.440.000	(1.720.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	219.580.400	0	0	0	219.580.400	263.608.000	0	0	0	263.608.000	44.027.600
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	03	2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	59.270.600	0	0	0	59.270.600	60.777.400	0	0	0	60.777.400	1.506.800
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	03	2.01	01		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25.889.600	0	0	0	25.889.600	19.487.600	0	0	0	19.487.600	(6.402.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	03	2.01	04		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	33.381.000	0	0	0	33.381.000	41.289.800	0	0	0	41.289.800	7.908.800

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	03	2.02			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	03	2.02	03		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	03	2.04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	160.309.800	0	0	0	160.309.800	147.830.600	0	0	0	147.830.600	(12.479.200)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	03	2.04	01		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.413.000	0	0	0	9.413.000	6.349.800	0	0	0	6.349.800	(3.063.200)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	03	2.04	02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.896.800	0	0	0	150.896.800	141.480.800	0	0	0	141.480.800	(9.416.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	216.097.000	0	0	0	216.097.000	159.277.000	0	0	0	159.277.000	(56.820.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	216.097.000	0	0	0	216.097.000	159.277.000	0	0	0	159.277.000	(56.820.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.02	02		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.097.000	0	0	0	216.097.000	159.277.000	0	0	0	159.277.000	(56.820.000)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35.026.200	0	0	0	35.026.200	21.676.600	0	0	0	21.676.600	(13.349.600)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.026.200	0	0	0	35.026.200	21.676.600	0	0	0	21.676.600	(13.349.600)
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01	04		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.026.200	0	0	0	35.026.200	21.676.600	0	0	0	21.676.600	(13.349.600)
2	**10**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**165.000.000**	**0**	**0**	**0**	**165.000.000**	**116.655.200**	**0**	**0**	**0**	**116.655.200**	**(48.344.800)**
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	165.000.000	0	0	0	165.000.000	116.655.200	0	0	0	116.655.200	(48.344.800)
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	06				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	72.500.000	0	0	0	72.500.000	34.586.800	0	0	0	34.586.800	(37.913.200)
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	06	2.01			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.500.000	0	0	0	72.500.000	34.586.800	0	0	0	34.586.800	(37.913.200)
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	06	2.01	03		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma	72.500.000	0	0	0	72.500.000	34.586.800	0	0	0	34.586.800	(37.913.200)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	92.500.000	0	0	0	92.500.000	82.068.400	0	0	0	82.068.400	(10.431.600)
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	92.500.000	0	0	0	92.500.000	82.068.400	0	0	0	82.068.400	(10.431.600)
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	92.500.000	0	0	0	92.500.000	82.068.400	0	0	0	82.068.400	(10.431.600)
2	**11**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**4.938.508.950**	**71.770.000**	**0**	**0**	**5.010.278.950**	**4.507.926.040**	**125.730.000**	**0**	**0**	**4.633.656.040**	**(376.622.910)**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000				Dinas Lingkungan Hidup	4.938.508.950	71.770.000	0	0	5.010.278.950	4.507.926.040	125.730.000	0	0	4.633.656.040	(376.622.910)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.549.432.350	5.000.000	0	0	3.554.432.350	3.210.684.200	5.000.000	0	0	3.215.684.200	(338.748.150)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.177.189.900	0	0	0	2.177.189.900	1.786.730.000	0	0	0	1.786.730.000	(390.459.900)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.177.189.900	0	0	0	2.177.189.900	1.786.730.000	0	0	0	1.786.730.000	(390.459.900)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.338.400	0	0	0	189.338.400	272.427.500	0	0	0	272.427.500	83.089.100
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.601.800	0	0	0	3.601.800	3.372.800	0	0	0	3.372.800	(229.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.298.000	0	0	0	36.298.000	39.148.000	0	0	0	39.148.000	2.850.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.499.700	0	0	0	13.499.700	13.654.200	0	0	0	13.654.200	154.500
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.999.000	0	0	0	26.999.000	31.833.000	0	0	0	31.833.000	4.834.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.954.300	0	0	0	27.954.300	18.857.900	0	0	0	18.857.900	(9.096.400)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.005.600	0	0	0	81.005.600	165.561.600	0	0	0	165.561.600	84.556.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.124.534.050	0	0	0	1.124.534.050	1.093.176.700	0	0	0	1.093.176.700	(31.357.350)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	2.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.876.650	0	0	0	45.876.650	55.877.300	0	0	0	55.877.300	10.000.650
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.050.000	0	0	0	9.050.000	10.320.000	0	0	0	10.320.000	1.270.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.065.607.400	0	0	0	1.065.607.400	1.020.979.400	0	0	0	1.020.979.400	(44.628.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.350.000	0	0	0	58.350.000	58.350.000	0	0	0	58.350.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	0	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.850.000	0	0	0	41.850.000	41.850.000	0	0	0	41.850.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	210.088.000	0	0	0	210.088.000	185.874.000	0	0	0	185.874.000	(24.214.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	28.663.200	0	0	0	28.663.200	16.612.000	0	0	0	16.612.000	(12.051.200)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	28.663.200	0	0	0	28.663.200	16.612.000	0	0	0	16.612.000	(12.051.200)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	181.424.800	0	0	0	181.424.800	169.262.000	0	0	0	169.262.000	(12.162.800)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	181.424.800	0	0	0	181.424.800	169.262.000	0	0	0	169.262.000	(12.162.800)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	348.558.200	63.770.000	0	0	412.328.200	246.089.200	117.730.000	0	0	363.819.200	(48.509.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	319.542.400	63.770.000	0	0	383.312.400	221.076.400	117.730.000	0	0	338.806.400	(44.506.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	256.800.000	63.770.000	0	0	320.570.000	170.830.000	117.730.000	0	0	288.560.000	(32.010.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	62.742.400	0	0	0	62.742.400	50.246.400	0	0	0	50.246.400	(12.496.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	29.015.800	0	0	0	29.015.800	25.012.800	0	0	0	25.012.800	(4.003.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	29.015.800	0	0	0	29.015.800	25.012.800	0	0	0	25.012.800	(4.003.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	125.229.400	3.000.000	0	0	128.229.400	137.459.200	3.000.000	0	0	140.459.200	12.229.800
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	125.229.400	3.000.000	0	0	128.229.400	137.459.200	3.000.000	0	0	140.459.200	12.229.800

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	125.229.400	3.000.000	0	0	128.229.400	137.459.200	3.000.000	0	0	140.459.200	12.229.800
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.993.000	0	0	0	15.993.000	15.993.000	0	0	0	15.993.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	15.993.000	0	0	0	15.993.000	15.993.000	0	0	0	15.993.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.993.000	0	0	0	15.993.000	15.993.000	0	0	0	15.993.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	51.145.400	0	0	0	51.145.400	37.651.000	0	0	0	37.651.000	(13.494.400)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51.145.400	0	0	0	51.145.400	37.651.000	0	0	0	37.651.000	(13.494.400)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.675.200	0	0	0	24.675.200	16.537.200	0	0	0	16.537.200	(8.138.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.470.200	0	0	0	26.470.200	21.113.800	0	0	0	21.113.800	(5.356.400)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	9.891.800	0	0	0	9.891.800	6.284.200	0	0	0	6.284.200	(3.607.600)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	9.891.800	0	0	0	9.891.800	6.284.200	0	0	0	6.284.200	(3.607.600)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	9.891.800	0	0	0	9.891.800	6.284.200	0	0	0	6.284.200	(3.607.600)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	16.893.000	0	0	0	16.893.000	8.735.040	0	0	0	8.735.040	(8.157.960)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	16.893.000	0	0	0	16.893.000	8.735.040	0	0	0	8.735.040	(8.157.960)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Kabupaten/Kota											
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16.893.000	0	0	0	16.893.000	8.735.040	0	0	0	8.735.040	(8.157.960)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13.285.800	0	0	0	13.285.800	10.612.600	0	0	0	10.612.600	(2.673.200)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	13.285.800	0	0	0	13.285.800	10.612.600	0	0	0	10.612.600	(2.673.200)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	13.285.800	0	0	0	13.285.800	10.612.600	0	0	0	10.612.600	(2.673.200)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	597.992.000	0	0	0	597.992.000	648.543.600	0	0	0	648.543.600	50.551.600
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01		Pengelolaan Sampah	597.992.000	0	0	0	597.992.000	648.543.600	0	0	0	648.543.600	50.551.600
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	565.189.000	0	0	0	565.189.000	615.740.600	0	0	0	615.740.600	50.551.600
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	32.803.000	0	0	0	32.803.000	32.803.000	0	0	0	32.803.000	0
2	**12**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.282.149.850**	**156.600.000**	**0**	**0**	**4.438.749.850**	**3.719.107.350**	**73.707.440**	**0**	**0**	**3.792.814.790**	**(645.935.060)**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.282.149.850	156.600.000	0	0	4.438.749.850	3.719.107.350	73.707.440	0	0	3.792.814.790	(645.935.060)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.117.966.850	156.600.000	0	0	4.274.566.850	3.409.066.750	73.707.440	0	0	3.482.774.190	(791.792.660)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.973.600	3.000.000	0	0	19.973.600	14.334.600	0	0	0	14.334.600	(5.639.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.973.600	3.000.000	0	0	19.973.600	14.334.600	0	0	0	14.334.600	(5.639.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.763.740.800	0	0	0	2.763.740.800	2.169.810.000	0	0	0	2.169.810.000	(593.930.800)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.763.740.800	0	0	0	2.763.740.800	2.169.810.000	0	0	0	2.169.810.000	(593.930.800)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.350.000	0	0	0	19.350.000	7.870.000	0	0	0	7.870.000	(11.480.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	19.350.000	0	0	0	19.350.000	7.870.000	0	0	0	7.870.000	(11.480.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Atribut Kelengkapannya											
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.801.650	0	0	0	736.801.650	696.414.550	0	0	0	696.414.550	(40.387.100)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.062.750	0	0	0	9.062.750	7.272.750	0	0	0	7.272.750	(1.790.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.584.000	0	0	0	436.584.000	368.209.400	0	0	0	368.209.400	(68.374.600)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.262.000	0	0	0	20.262.000	16.301.000	0	0	0	16.301.000	(3.961.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.057.000	0	0	0	22.057.000	25.030.000	0	0	0	25.030.000	2.973.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.835.900	0	0	0	248.835.900	279.601.400	0	0	0	279.601.400	30.765.500
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	153.600.000	0	0	153.600.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	(148.600.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	26.600.000	0	0	26.600.000	0	0	0	0	0	(26.600.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	127.000.000	0	0	127.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	(122.000.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.688.600	0	0	0	453.688.600	405.087.600	0	0	0	405.087.600	(48.601.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000	0	0	0	4.150.000	2.305.000	0	0	0	2.305.000	(1.845.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.580.000	0	0	0	97.580.000	91.544.000	0	0	0	91.544.000	(6.036.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.958.600	0	0	0	351.958.600	311.238.600	0	0	0	311.238.600	(40.720.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.412.200	0	0	0	127.412.200	115.550.000	68.707.440	0	0	184.257.440	56.845.240
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.634.400	0	0	0	22.634.400	16.500.000	0	0	0	16.500.000	(6.134.400)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.117.800	0	0	0	70.117.800	64.000.000	0	0	0	64.000.000	(6.117.800)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.660.000	0	0	0	34.660.000	35.050.000	0	0	0	35.050.000	390.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	68.707.440	0	0	68.707.440	68.707.440
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	91.597.000	0	0	0	91.597.000	52.157.600	0	0	0	52.157.600	(39.439.400)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11.915.000	0	0	0	11.915.000	3.041.600	0	0	0	3.041.600	(8.873.400)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	11.915.000	0	0	0	11.915.000	3.041.600	0	0	0	3.041.600	(8.873.400)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.03			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	79.682.000	0	0	0	79.682.000	49.116.000	0	0	0	49.116.000	(30.566.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16.092.000	0	0	0	16.092.000	14.629.000	0	0	0	14.629.000	(1.463.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	35.000.000	0	0	0	35.000.000	27.400.000	0	0	0	27.400.000	(7.600.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	28.590.000	0	0	0	28.590.000	7.087.000	0	0	0	7.087.000	(21.503.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	29.342.000	0	0	0	29.342.000	229.731.000	0	0	0	229.731.000	200.389.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	12.650.000	0	0	0	12.650.000	2.540.000	0	0	0	2.540.000	(10.110.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	12.650.000	0	0	0	12.650.000	2.540.000	0	0	0	2.540.000	(10.110.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.03			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	16.692.000	0	0	0	16.692.000	227.191.000	0	0	0	227.191.000	210.499.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	16.692.000	0	0	0	16.692.000	227.191.000	0	0	0	227.191.000	210.499.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	43.244.000	0	0	0	43.244.000	28.152.000	0	0	0	28.152.000	(15.092.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.202.000	0	0	0	23.202.000	17.116.000	0	0	0	17.116.000	(6.086.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.692.000	0	0	0	16.692.000	12.236.000	0	0	0	12.236.000	(4.456.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	03		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.510.000	0	0	0	6.510.000	4.880.000	0	0	0	4.880.000	(1.630.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.04			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.042.000	0	0	0	20.042.000	11.036.000	0	0	0	11.036.000	(9.006.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	20.042.000	0	0	0	20.042.000	11.036.000	0	0	0	11.036.000	(9.006.000)
2	**13**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.227.842.590**	**101.500.000**	**0**	**0**	**5.329.342.590**	**4.619.833.650**	**101.500.000**	**0**	**0**	**4.721.333.650**	**(608.008.940)**
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.227.842.590	101.500.000	0	0	5.329.342.590	4.619.833.650	101.500.000	0	0	4.721.333.650	(608.008.940)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.479.362.190	101.500.000	0	0	3.580.862.190	2.992.710.850	101.500.000	0	0	3.094.210.850	(486.651.340)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.741.500.650	0	0	0	2.741.500.650	2.108.175.000	0	0	0	2.108.175.000	(633.325.650)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.741.500.650	0	0	0	2.741.500.650	2.108.175.000	0	0	0	2.108.175.000	(633.325.650)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.529.350	0	0	0	245.529.350	387.158.850	0	0	0	387.158.850	141.629.500
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.593.000	0	0	0	3.593.000	3.593.000	0	0	0	3.593.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.057.000	0	0	0	36.057.000	35.860.000	0	0	0	35.860.000	(197.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.493.550	0	0	0	13.493.550	11.493.650	0	0	0	11.493.650	(1.999.900)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	27.450.000	0	0	0	27.450.000	450.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.088.000	0	0	0	27.088.000	25.134.200	0	0	0	25.134.200	(1.953.800)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.297.800	0	0	0	138.297.800	283.628.000	0	0	0	283.628.000	145.330.200
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	101.500.000	0	0	101.500.000	0	101.500.000	0	0	101.500.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	0	44.000.000	0	0	44.000.000	0	44.000.000	0	0	44.000.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	57.500.000	0	0	57.500.000	0	57.500.000	0	0	57.500.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.580.190	0	0	0	390.580.190	363.099.000	0	0	0	363.099.000	(27.481.190)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.019.790	0	0	0	39.019.790	37.914.400	0	0	0	37.914.400	(1.105.390)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.560.400	0	0	0	347.560.400	321.184.600	0	0	0	321.184.600	(26.375.800)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.752.000	0	0	0	101.752.000	134.278.000	0	0	0	134.278.000	32.526.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	0	0	0	12.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	4.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.482.000	0	0	0	79.482.000	104.508.000	0	0	0	104.508.000	25.026.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.770.000	0	0	0	9.770.000	13.270.000	0	0	0	13.270.000	3.500.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	34.413.200	0	0	0	34.413.200	30.010.000	0	0	0	30.010.000	(4.403.200)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	34.413.200	0	0	0	34.413.200	30.010.000	0	0	0	30.010.000	(4.403.200)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15.027.200	0	0	0	15.027.200	14.138.800	0	0	0	14.138.800	(888.400)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	19.386.000	0	0	0	19.386.000	15.871.200	0	0	0	15.871.200	(3.514.800)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	723.834.000	0	0	0	723.834.000	733.539.000	0	0	0	733.539.000	9.705.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	723.834.000	0	0	0	723.834.000	733.539.000	0	0	0	733.539.000	9.705.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	170.402.000	0	0	0	170.402.000	196.888.000	0	0	0	196.888.000	26.486.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	30.739.200	0	0	0	30.739.200	0	0	0	0	0	(30.739.200)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	84.786.600	0	0	0	84.786.600	67.001.600	0	0	0	67.001.600	(17.785.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	37.906.200	0	0	0	37.906.200	70.149.400	0	0	0	70.149.400	32.243.200
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	400.000.000	0	0	0	400.000.000	399.500.000	0	0	0	399.500.000	(500.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	990.233.200	0	0	0	990.233.200	863.573.800	0	0	0	863.573.800	(126.659.400)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	990.233.200	0	0	0	990.233.200	863.573.800	0	0	0	863.573.800	(126.659.400)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	900.000.000	0	0	0	900.000.000	782.605.000	0	0	0	782.605.000	(117.395.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	44.996.200	0	0	0	44.996.200	44.996.200	0	0	0	44.996.200	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	27.596.000	0	0	0	27.596.000	21.796.000	0	0	0	21.796.000	(5.800.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	17.641.000	0	0	0	17.641.000	14.176.600	0	0	0	14.176.600	(3.464.400)
2	**14**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**3.891.002.000**	**0**	**0**	**0**	**3.891.002.000**	**3.887.732.000**	**0**	**0**	**0**	**3.887.732.000**	**(3.270.000)**
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.891.002.000	0	0	0	3.891.002.000	3.887.732.000	0	0	0	3.887.732.000	(3.270.000)
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	185.400.000	0	0	0	185.400.000	185.400.000	0	0	0	185.400.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	185.400.000	0	0	0	185.400.000	185.400.000	0	0	0	185.400.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	0	0	0	64.200.000	64.200.000	0	0	0	64.200.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	55.200.000	0	0	0	55.200.000	55.200.000	0	0	0	55.200.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	66.000.000	0	0	0	66.000.000	66.000.000	0	0	0	66.000.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.392.117.000	0	0	0	2.392.117.000	2.392.117.000	0	0	0	2.392.117.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	982.650.000	0	0	0	982.650.000	982.650.000	0	0	0	982.650.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	143.000.000	0	0	0	143.000.000	143.000.000	0	0	0	143.000.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	529.650.000	0	0	0	529.650.000	529.650.000	0	0	0	529.650.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	132.000.000	0	0	0	132.000.000	132.000.000	0	0	0	132.000.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	28.000.000	0	0	0	28.000.000	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	104.000.000	0	0	0	104.000.000	104.000.000	0	0	0	104.000.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	849.967.000	0	0	0	849.967.000	849.967.000	0	0	0	849.967.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.700.000	0	0	0	20.700.000	20.700.000	0	0	0	20.700.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	815.167.000	0	0	0	815.167.000	815.167.000	0	0	0	815.167.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000	0	0	0	14.100.000	14.100.000	0	0	0	14.100.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	427.500.000	0	0	0	427.500.000	427.500.000	0	0	0	427.500.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	418.500.000	0	0	0	418.500.000	418.500.000	0	0	0	418.500.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.313.485.000	0	0	0	1.313.485.000	1.310.215.000	0	0	0	1.310.215.000	(3.270.000)
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.313.485.000	0	0	0	1.313.485.000	1.310.215.000	0	0	0	1.310.215.000	(3.270.000)
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	0	0	0	360.000.000	360.000.000	0	0	0	360.000.000	0
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	39.985.000	0	0	0	39.985.000	36.715.000	0	0	0	36.715.000	(3.270.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
2 14 1.06.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	913.500.000	0	0	0	913.500.000	913.500.000	0	0	0	913.500.000	0
2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**6.615.064.050**	**230.279.660**	**0**	**0**	**6.845.343.710**	**5.645.843.600**	**265.779.660**	**0**	**0**	**5.911.623.260**	**(933.720.450)**
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	6.615.064.050	230.279.660	0	0	6.845.343.710	5.645.843.600	265.779.660	0	0	5.911.623.260	(933.720.450)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.225.599.050	83.000.000	0	0	6.308.599.050	5.266.744.200	118.500.000	0	0	5.385.244.200	(923.354.850)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.906.863.450	0	0	0	2.906.863.450	2.180.938.000	0	0	0	2.180.938.000	(725.925.450)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.906.863.450	0	0	0	2.906.863.450	2.180.938.000	0	0	0	2.180.938.000	(725.925.450)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.652.400	0	0	0	169.652.400	233.538.600	0	0	0	233.538.600	63.886.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.601.000	0	0	0	3.601.000	1.715.000	0	0	0	1.715.000	(1.886.000)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.001.000	0	0	0	27.001.000	21.101.000	0	0	0	21.101.000	(5.900.000)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.500.000	0	0	0	13.500.000	6.370.800	0	0	0	6.370.800	(7.129.200)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	17.400.000	0	0	0	17.400.000	(9.600.000)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.002.400	0	0	0	14.002.400	10.317.600	0	0	0	10.317.600	(3.684.800)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.548.000	0	0	0	84.548.000	176.634.200	0	0	0	176.634.200	92.086.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	83.000.000	0	0	83.000.000	0	118.500.000	0	0	118.500.000	35.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	83.000.000	0	0	83.000.000	0	118.500.000	0	0	118.500.000	35.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.947.853.200	0	0	0	2.947.853.200	2.565.037.600	0	0	0	2.565.037.600	(382.815.600)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	2.750.000	0	0	0	2.750.000	(1.250.000)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	0	0	0	170.000.000	180.000.000	0	0	0	180.000.000	10.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.773.853.200	0	0	0	2.773.853.200	2.382.287.600	0	0	0	2.382.287.600	(391.565.600)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	201.230.000	0	0	0	201.230.000	287.230.000	0	0	0	287.230.000	86.000.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Daerah											
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	0	0	0	17.500.000	17.500.000	0	0	0	17.500.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.740.000	0	0	0	169.740.000	261.740.000	0	0	0	261.740.000	92.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.990.000	0	0	0	13.990.000	7.990.000	0	0	0	7.990.000	(6.000.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	389.465.000	147.279.660	0	0	536.744.660	379.099.400	147.279.660	0	0	526.379.060	(10.365.600)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	85.572.000	147.279.660	0	0	232.851.660	104.304.200	147.279.660	0	0	251.583.860	18.732.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	41.909.000	147.279.660	0	0	189.188.660	41.705.400	147.279.660	0	0	188.985.060	(203.600)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	43.663.000	0	0	0	43.663.000	62.598.800	0	0	0	62.598.800	18.935.800
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179.071.000	0	0	0	179.071.000	149.441.000	0	0	0	149.441.000	(29.630.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179.071.000	0	0	0	179.071.000	149.441.000	0	0	0	149.441.000	(29.630.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	124.822.000	0	0	0	124.822.000	125.354.200	0	0	0	125.354.200	532.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	124.822.000	0	0	0	124.822.000	125.354.200	0	0	0	125.354.200	532.200
2	**16**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**5.097.904.770**	**59.500.000**	**0**	**0**	**5.157.404.770**	**4.947.016.872**	**33.200.000**	**0**	**0**	**4.980.216.872**	**(177.187.898)**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				Dinas Komunikasi dan Informatika	5.097.904.770	59.500.000	0	0	5.157.404.770	4.947.016.872	33.200.000	0	0	4.980.216.872	(177.187.898)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.687.404.170	0	0	0	3.687.404.170	3.493.671.472	0	0	0	3.493.671.472	(193.732.698)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.271.851.850	0	0	0	2.271.851.850	1.903.883.000	0	0	0	1.903.883.000	(367.968.850)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.271.851.850	0	0	0	2.271.851.850	1.903.883.000	0	0	0	1.903.883.000	(367.968.850)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.765.200	0	0	0	176.765.200	159.192.400	0	0	0	159.192.400	(17.572.800)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.599.000	0	0	0	3.599.000	634.000	0	0	0	634.000	(2.965.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.139.000	0	0	0	28.139.000	20.656.000	0	0	0	20.656.000	(7.483.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.009.900	0	0	0	10.009.900	2.820.300	0	0	0	2.820.300	(7.189.600)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.006.000	0	0	0	27.006.000	10.574.000	0	0	0	10.574.000	(16.432.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.004.500	0	0	0	27.004.500	13.324.500	0	0	0	13.324.500	(13.680.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.006.800	0	0	0	81.006.800	111.183.600	0	0	0	111.183.600	30.176.800
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.183.787.120	0	0	0	1.183.787.120	1.375.596.072	0	0	0	1.375.596.072	191.808.952
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	(2.800.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	681.887.520	0	0	0	681.887.520	921.886.472	0	0	0	921.886.472	239.998.952
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.030.000	0	0	0	9.030.000	1.690.000	0	0	0	1.690.000	(7.340.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.869.600	0	0	0	488.869.600	450.819.600	0	0	0	450.819.600	(38.050.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.336.039.600	59.500.000	0	0	1.395.539.600	1.417.814.200	33.200.000	0	0	1.451.014.200	55.474.600
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.336.039.600	59.500.000	0	0	1.395.539.600	1.417.814.200	33.200.000	0	0	1.451.014.200	55.474.600
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	224.461.000	0	0	0	224.461.000	224.750.000	0	0	0	224.750.000	289.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06		Pelayanan Informasi Publik	66.936.600	0	0	0	66.936.600	49.121.800	0	0	0	49.121.800	(17.814.800)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	07		Layanan Hubungan Media	763.300.000	0	0	0	763.300.000	1.006.789.600	0	0	0	1.006.789.600	243.489.600
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	74.619.000	0	0	0	74.619.000	18.349.600	0	0	0	18.349.600	(56.269.400)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	10		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	85.303.000	0	0	0	85.303.000	39.840.600	0	0	0	39.840.600	(45.462.400)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	13		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	121.420.000	59.500.000	0	0	180.920.000	78.962.600	33.200.000	0	0	112.162.600	(68.757.400)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	74.461.000	0	0	0	74.461.000	35.531.200	0	0	0	35.531.200	(38.929.800)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.461.000	0	0	0	74.461.000	35.531.200	0	0	0	35.531.200	(38.929.800)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	74.461.000	0	0	0	74.461.000	35.531.200	0	0	0	35.531.200	(38.929.800)
2	**17**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**3.988.872.650**	**58.647.000**	**0**	**0**	**4.047.519.650**	**3.488.880.450**	**40.800.000**	**0**	**0**	**3.529.680.450**	**(517.839.200)**
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	3.988.872.650	58.647.000	0	0	4.047.519.650	3.488.880.450	40.800.000	0	0	3.529.680.450	(517.839.200)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.478.502.950	58.647.000	0	0	3.537.149.950	3.012.782.550	40.800.000	0	0	3.053.582.550	(483.567.400)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.282.763.350	0	0	0	2.282.763.350	1.878.500.000	0	0	0	1.878.500.000	(404.263.350)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.282.763.350	0	0	0	2.282.763.350	1.878.500.000	0	0	0	1.878.500.000	(404.263.350)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.786.100	0	0	0	180.786.100	220.407.800	0	0	0	220.407.800	39.621.700
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.390.400	0	0	0	5.390.400	2.484.000	0	0	0	2.484.000	(2.906.400)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	15.796.000	0	0	0	15.796.000	(11.204.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.967.200	0	0	0	12.967.200	5.180.200	0	0	0	5.180.200	(7.787.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	13.931.000	0	0	0	13.931.000	(13.069.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.007.200	0	0	0	27.007.200	22.956.500	0	0	0	22.956.500	(4.050.700)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.421.300	0	0	0	81.421.300	160.060.100	0	0	0	160.060.100	78.638.800
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	46.200.000	0	0	46.200.000	0	40.800.000	0	0	40.800.000	(5.400.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	46.200.000	0	0	46.200.000	0	40.800.000	0	0	40.800.000	(5.400.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.053.500	0	0	0	904.053.500	833.444.750	0	0	0	833.444.750	(70.608.750)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	5.300.000	0	0	0	5.300.000	1.300.000
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.998.700	0	0	0	239.998.700	236.702.750	0	0	0	236.702.750	(3.295.950)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	660.054.800	0	0	0	660.054.800	591.442.000	0	0	0	591.442.000	(68.612.800)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.900.000	12.447.000	0	0	123.347.000	80.430.000	0	0	0	80.430.000	(42.917.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	0	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000	0	0	0	53.000.000	53.000.000	0	0	0	53.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	0	0	0	14.600.000	14.930.000	0	0	0	14.930.000	330.000
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.800.000	12.447.000	0	0	43.247.000	0	0	0	0	0	(43.247.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	55.119.000	0	0	0	55.119.000	37.129.000	0	0	0	37.129.000	(17.990.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.119.000	0	0	0	55.119.000	37.129.000	0	0	0	37.129.000	(17.990.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	55.119.000	0	0	0	55.119.000	37.129.000	0	0	0	37.129.000	(17.990.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	157.778.000	0	0	0	157.778.000	157.777.800	0	0	0	157.777.800	(200)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	157.778.000	0	0	0	157.778.000	157.777.800	0	0	0	157.777.800	(200)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	157.778.000	0	0	0	157.778.000	157.777.800	0	0	0	157.777.800	(200)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	297.472.700	0	0	0	297.472.700	281.191.100	0	0	0	281.191.100	(16.281.600)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	297.472.700	0	0	0	297.472.700	281.191.100	0	0	0	281.191.100	(16.281.600)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	54.880.700	0	0	0	54.880.700	18.599.100	0	0	0	18.599.100	(16.281.600)
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	262.592.000	0	0	0	262.592.000	262.592.000	0	0	0	262.592.000	0
2	**18**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.078.098.750**	**521.942.080**	**0**	**0**	**4.600.040.830**	**3.455.814.550**	**55.671.040**	**0**	**0**	**3.511.485.590**	**(1.088.555.240)**

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.078.098.750	521.942.080	0	0	4.600.040.830	3.455.814.550	55.671.040	0	0	3.511.485.590	(1.088.555.240)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.987.518.750	521.942.080	0	0	3.509.460.830	2.403.143.550	55.671.040	0	0	2.458.814.590	(1.050.646.240)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.125.137.550	0	0	0	2.125.137.550	1.460.568.000	0	0	0	1.460.568.000	(664.569.550)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.125.137.550	0	0	0	2.125.137.550	1.460.568.000	0	0	0	1.460.568.000	(664.569.550)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.142.000	0	0	0	310.142.000	439.893.200	0	0	0	439.893.200	129.751.200
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.400.100	0	0	0	4.400.100	4.400.100	0	0	0	4.400.100	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.233.000	0	0	0	52.233.000	70.746.000	0	0	0	70.746.000	18.513.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.258.000	0	0	0	17.258.000	19.009.800	0	0	0	19.009.800	1.751.800
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.700.000	0	0	0	23.700.000	35.420.000	0	0	0	35.420.000	11.720.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.996.100	0	0	0	33.996.100	20.812.300	0	0	0	20.812.300	(13.183.800)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.554.800	0	0	0	178.554.800	289.505.000	0	0	0	289.505.000	110.950.200
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	414.400.000	0	0	414.400.000	0	1.900.000	0	0	1.900.000	(412.500.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	414.400.000	0	0	414.400.000	0	1.900.000	0	0	1.900.000	(412.500.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.239.200	0	0	0	513.239.200	462.182.350	0	0	0	462.182.350	(51.056.850)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.074.200	0	0	0	111.074.200	92.597.350	0	0	0	92.597.350	(18.476.850)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.660.000	0	0	0	33.660.000	27.160.000	0	0	0	27.160.000	(6.500.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.505.000	0	0	0	364.505.000	338.425.000	0	0	0	338.425.000	(26.080.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.000.000	107.542.080	0	0	146.542.080	40.500.000	53.771.040	0	0	94.271.040	(52.271.040)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	26.500.000	0	0	0	26.500.000	1.500.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	107.542.080	0	0	107.542.080	0	53.771.040	0	0	53.771.040	(53.771.040)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	399.998.000	0	0	0	399.998.000	399.998.000	0	0	0	399.998.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	399.998.000	0	0	0	399.998.000	399.998.000	0	0	0	399.998.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	399.998.000	0	0	0	399.998.000	399.998.000	0	0	0	399.998.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	143.986.000	0	0	0	143.986.000	109.987.000	0	0	0	109.987.000	(33.999.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	143.986.000	0	0	0	143.986.000	109.987.000	0	0	0	109.987.000	(33.999.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	85.445.000	0	0	0	85.445.000	68.149.000	0	0	0	68.149.000	(17.296.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8.523.000	0	0	0	8.523.000	6.843.000	0	0	0	6.843.000	(1.680.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah	50.018.000	0	0	0	50.018.000	34.995.000	0	0	0	34.995.000	(15.023.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	511.300.000	0	0	0	511.300.000	511.300.000	0	0	0	511.300.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	511.300.000	0	0	0	511.300.000	511.300.000	0	0	0	511.300.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	285.300.000	0	0	0	285.300.000	285.300.000	0	0	0	285.300.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	226.000.000	0	0	0	226.000.000	226.000.000	0	0	0	226.000.000	0
2	19	2.18.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.296.000	0	0	0	35.296.000	31.386.000	0	0	0	31.386.000	(3.910.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.296.000	0	0	0	35.296.000	31.386.000	0	0	0	31.386.000	(3.910.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.296.000	0	0	0	35.296.000	31.386.000	0	0	0	31.386.000	(3.910.000)
2	**19**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**3.537.117.372**	**0**	**0**	**0**	**3.537.117.372**	**4.656.287.142**	**53.312.760**	**0**	**0**	**4.709.599.902**	**1.172.482.530**
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.537.117.372	0	0	0	3.537.117.372	4.656.287.142	53.312.760	0	0	4.709.599.902	1.172.482.530
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	460.006.000	0	0	0	460.006.000	460.006.000	0	0	0	460.006.000	0
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	460.006.000	0	0	0	460.006.000	460.006.000	0	0	0	460.006.000	0
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50.006.000	0	0	0	50.006.000	50.006.000	0	0	0	50.006.000	0
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	410.000.000	0	0	0	410.000.000	410.000.000	0	0	0	410.000.000	0
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.027.104.372	0	0	0	3.027.104.372	3.921.153.142	53.312.760	0	0	3.974.465.902	947.361.530
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	552.089.472	0	0	0	552.089.472	1.055.076.392	0	0	0	1.055.076.392	502.986.920
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	552.089.472	0	0	0	552.089.472	1.055.076.392	0	0	0	1.055.076.392	502.986.920
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.245.010.000	0	0	0	1.245.010.000	1.306.386.400	20.500.000	0	0	1.326.886.400	81.876.400
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.245.010.000	0	0	0	1.245.010.000	1.306.386.400	20.500.000	0	0	1.326.886.400	81.876.400
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.230.004.900	0	0	0	1.230.004.900	1.559.690.350	32.812.760	0	0	1.592.503.110	362.498.210

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.230.004.900	0	0	0	1.230.004.900	1.559.690.350	32.812.760	0	0	1.592.503.110	362.498.210
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	50.007.000	0	0	0	50.007.000	275.128.000	0	0	0	275.128.000	225.121.000
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	50.007.000	0	0	0	50.007.000	275.128.000	0	0	0	275.128.000	225.121.000
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	50.007.000	0	0	0	50.007.000	275.128.000	0	0	0	275.128.000	225.121.000
2	**20**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**149.937.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**169.937.000**	**54.558.400**	**20.000.000**	**0**	**0**	**74.558.400**	**(95.378.600)**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				Dinas Komunikasi dan Informatika	149.937.000	20.000.000	0	0	169.937.000	54.558.400	20.000.000	0	0	74.558.400	(95.378.600)
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	149.937.000	20.000.000	0	0	169.937.000	54.558.400	20.000.000	0	0	74.558.400	(95.378.600)
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.937.000	20.000.000	0	0	169.937.000	54.558.400	20.000.000	0	0	74.558.400	(95.378.600)
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	50.000.400	0	0	0	50.000.400	11.398.400	0	0	0	11.398.400	(38.602.000)
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	99.936.600	20.000.000	0	0	119.936.600	43.160.000	20.000.000	0	0	63.160.000	(56.776.600)
2	**21**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**25.056.600**	**0**	**0**	**0**	**25.056.600**	**17.186.000**	**0**	**0**	**0**	**17.186.000**	**(7.870.600)**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				Dinas Komunikasi dan Informatika	25.056.600	0	0	0	25.056.600	17.186.000	0	0	0	17.186.000	(7.870.600)
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.056.600	0	0	0	25.056.600	17.186.000	0	0	0	17.186.000	(7.870.600)
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.056.600	0	0	0	25.056.600	17.186.000	0	0	0	17.186.000	(7.870.600)
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.056.600	0	0	0	25.056.600	17.186.000	0	0	0	17.186.000	(7.870.600)
2	**22**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**9.656.280.515**	**0**	**0**	**0**	**9.656.280.515**	**13.154.229.281**	**118.763.500**	**0**	**0**	**13.272.992.781**	**3.616.712.266**
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.656.280.515	0	0	0	9.656.280.515	13.154.229.281	118.763.500	0	0	13.272.992.781	3.616.712.266
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.483.053.350	0	0	0	3.483.053.350	2.913.513.850	0	0	0	2.913.513.850	(569.539.500)
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.468.743.050	0	0	0	2.468.743.050	2.012.291.000	0	0	0	2.012.291.000	(456.452.050)
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.468.743.050	0	0	0	2.468.743.050	2.012.291.000	0	0	0	2.012.291.000	(456.452.050)
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.020.200	0	0	0	189.020.200	112.491.550	0	0	0	112.491.550	(76.528.650)
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4.514.400	0	0	0	4.514.400	3.324.850	0	0	0	3.324.850	(1.189.550)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	Kantor											
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	14.981.000	0	0	0	14.981.000	(12.019.000)
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.500.800	0	0	0	13.500.800	5.777.900	0	0	0	5.777.900	(7.722.900)
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	0	0	0	27.000.000	18.540.000	0	0	0	18.540.000	(8.460.000)
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.000.000	0	0	0	27.000.000	7.933.600	0	0	0	7.933.600	(19.066.400)
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.005.000	0	0	0	90.005.000	61.934.200	0	0	0	61.934.200	(28.070.800)
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.790.100	0	0	0	773.790.100	737.231.300	0	0	0	737.231.300	(36.558.800)
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	(2.000.000)
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.405.700	0	0	0	140.405.700	145.407.100	0	0	0	145.407.100	5.001.400
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.490.000	0	0	0	13.490.000	9.770.000	0	0	0	9.770.000	(3.720.000)
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	615.894.400	0	0	0	615.894.400	580.054.200	0	0	0	580.054.200	(35.840.200)
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.500.000	0	0	0	51.500.000	51.500.000	0	0	0	51.500.000	0
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000	0	0	0	13.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	0	0	0	38.000.000	38.000.000	0	0	0	38.000.000	0
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.555.562.165	0	0	0	4.555.562.165	6.880.703.775	43.463.500	0	0	6.924.167.275	2.368.605.110
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.955.411.765	0	0	0	3.955.411.765	5.929.243.575	20.000.000	0	0	5.949.243.575	1.993.831.810
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.955.411.765	0	0	0	3.955.411.765	5.929.243.575	20.000.000	0	0	5.949.243.575	1.993.831.810
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.150.400	0	0	0	600.150.400	951.460.200	23.463.500	0	0	974.923.700	374.773.300
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	600.150.400	0	0	0	600.150.400	951.460.200	23.463.500	0	0	974.923.700	374.773.300
2 22 2.22.3.26.2.19.01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.541.548.200	0	0	0	1.541.548.200	3.283.894.856	75.300.000	0	0	3.359.194.856	1.817.646.656

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.541.548.200	0	0	0	1.541.548.200	3.283.894.856	75.300.000	0	0	3.359.194.856	1.817.646.656
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	88.257.200	0	0	0	88.257.200	234.602.600	0	0	0	234.602.600	146.345.400
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.453.291.000	0	0	0	1.453.291.000	3.049.292.256	75.300.000	0	0	3.124.592.256	1.671.301.256
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	76.116.800	0	0	0	76.116.800	76.116.800	0	0	0	76.116.800	0
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	76.116.800	0	0	0	76.116.800	76.116.800	0	0	0	76.116.800	0
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	76.116.800	0	0	0	76.116.800	76.116.800	0	0	0	76.116.800	0
2	**23**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**4.099.200.950**	**10.869.523.000**	**0**	**0**	**14.968.723.950**	**3.300.075.388**	**11.050.249.900**	**0**	**0**	**14.350.325.288**	**(618.398.662)**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.099.200.950	10.869.523.000	0	0	14.968.723.950	3.300.075.388	11.050.249.900	0	0	14.350.325.288	(618.398.662)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.724.751.950	99.500.000	0	0	3.824.251.950	2.553.733.900	75.500.000	0	0	2.629.233.900	(1.195.018.050)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.019.721.650	0	0	0	3.019.721.650	1.864.218.000	0	0	0	1.864.218.000	(1.155.503.650)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.019.721.650	0	0	0	3.019.721.650	1.864.218.000	0	0	0	1.864.218.000	(1.155.503.650)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.195.300	0	0	0	220.195.300	209.570.900	0	0	0	209.570.900	(10.624.400)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.164.800	0	0	0	9.164.800	5.070.800	0	0	0	5.070.800	(4.094.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.372.000	0	0	0	29.372.000	17.097.000	0	0	0	17.097.000	(12.275.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.103.500	0	0	0	29.103.500	25.969.100	0	0	0	25.969.100	(3.134.400)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.491.000	0	0	0	25.491.000	27.150.000	0	0	0	27.150.000	1.659.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.670.000	0	0	0	24.670.000	14.620.000	0	0	0	14.620.000	(10.050.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.394.000	0	0	0	102.394.000	119.664.000	0	0	0	119.664.000	17.270.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	99.500.000	0	0	99.500.000	0	75.500.000	0	0	75.500.000	(24.000.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	0	42.500.000	0	0	42.500.000	0	22.500.000	0	0	22.500.000	(20.000.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	57.000.000	0	0	57.000.000	0	53.000.000	0	0	53.000.000	(4.000.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.015.000	0	0	0	292.015.000	314.335.000	0	0	0	314.335.000	22.320.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.212.000	0	0	0	37.212.000	37.212.000	0	0	0	37.212.000	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.603.000	0	0	0	253.603.000	275.923.000	0	0	0	275.923.000	22.320.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.820.000	0	0	0	192.820.000	165.610.000	0	0	0	165.610.000	(27.210.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.500.000	0	0	0	23.500.000	17.500.000	0	0	0	17.500.000	(6.000.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.090.000	0	0	0	68.090.000	59.040.000	0	0	0	59.040.000	(9.050.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.430.000	0	0	0	16.430.000	4.270.000	0	0	0	4.270.000	(12.160.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.800.000	0	0	0	84.800.000	84.800.000	0	0	0	84.800.000	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	374.449.000	10.770.023.000	0	0	11.144.472.000	746.341.488	10.974.749.900	0	0	11.721.091.388	576.619.388
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.097.000	670.023.000	0	0	858.120.000	444.139.208	874.749.900	0	0	1.318.889.108	460.769.108
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.777.000	670.023.000	0	0	734.800.000	92.693.000	874.749.900	0	0	967.442.900	232.642.900
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	123.320.000	0	0	0	123.320.000	351.446.208	0	0	0	351.446.208	228.126.208
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	186.352.000	10.100.000.000	0	0	10.286.352.000	302.202.280	10.100.000.000	0	0	10.402.202.280	115.850.280
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	175.152.000	10.100.000.000	0	0	10.275.152.000	219.957.880	10.100.000.000	0	0	10.319.957.880	44.805.880
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	11.200.000	0	0	0	11.200.000	82.244.400	0	0	0	82.244.400	71.044.400
2	**24**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**144.891.900**	**0**	**0**	**0**	**144.891.900**	**69.108.600**	**0**	**0**	**0**	**69.108.600**	**(75.783.300)**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	144.891.900	0	0	0	144.891.900	69.108.600	0	0	0	69.108.600	(75.783.300)
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	144.891.900	0	0	0	144.891.900	69.108.600	0	0	0	69.108.600	(75.783.300)
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	110.997.000	0	0	0	110.997.000	39.918.900	0	0	0	39.918.900	(71.078.100)
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	41.496.000	0	0	0	41.496.000	30.850.800	0	0	0	30.850.800	(10.645.200)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	23.432.000	0	0	0	23.432.000	0	0	0	0	0	(23.432.000)
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	46.069.000	0	0	0	46.069.000	9.068.100	0	0	0	9.068.100	(37.000.900)
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	33.894.900	0	0	0	33.894.900	29.189.700	0	0	0	29.189.700	(4.705.200)
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	33.894.900	0	0	0	33.894.900	29.189.700	0	0	0	29.189.700	(4.705.200)
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**28.084.260.350**	**106.000.000**	**0**	**0**	**28.190.260.350**	**21.350.993.100**	**75.000.000**	**0**	**0**	**21.425.993.100**	**(6.764.267.250)**
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**340.852.100**	**0**	**0**	**0**	**340.852.100**	**293.203.700**	**0**	**0**	**0**	**293.203.700**	**(47.648.400)**
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000				Dinas Pangan dan Perikanan	340.852.100	0	0	0	340.852.100	293.203.700	0	0	0	293.203.700	(47.648.400)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	268.606.700	0	0	0	268.606.700	246.826.900	0	0	0	246.826.900	(21.779.800)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	268.606.700	0	0	0	268.606.700	246.826.900	0	0	0	246.826.900	(21.779.800)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.336.000	0	0	0	89.336.000	74.260.000	0	0	0	74.260.000	(15.076.000)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	179.270.700	0	0	0	179.270.700	172.566.900	0	0	0	172.566.900	(6.703.800)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.049.000	0	0	0	27.049.000	23.403.200	0	0	0	23.403.200	(3.645.800)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	27.049.000	0	0	0	27.049.000	23.403.200	0	0	0	23.403.200	(3.645.800)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	27.049.000	0	0	0	27.049.000	23.403.200	0	0	0	23.403.200	(3.645.800)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	45.196.400	0	0	0	45.196.400	22.973.600	0	0	0	22.973.600	(22.222.800)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	45.196.400	0	0	0	45.196.400	22.973.600	0	0	0	22.973.600	(22.222.800)
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.196.400	0	0	0	45.196.400	22.973.600	0	0	0	22.973.600	(22.222.800)
3	**26**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000.000**	**542.218.600**	**5.500.000**	**0**	**0**	**547.718.600**	**297.718.600**

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	250.000.000	0	0	0	250.000.000	542.218.600	5.500.000	0	0	547.718.600	297.718.600
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	67.962.000	0	0	0	67.962.000	57.097.000	0	0	0	57.097.000	(10.865.000)
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	67.962.000	0	0	0	67.962.000	57.097.000	0	0	0	57.097.000	(10.865.000)
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Dayk Tarik Wisata Kabupaten/Kota	67.962.000	0	0	0	67.962.000	57.097.000	0	0	0	57.097.000	(10.865.000)
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	145.832.000	0	0	0	145.832.000	147.970.000	0	0	0	147.970.000	2.138.000
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	145.832.000	0	0	0	145.832.000	147.970.000	0	0	0	147.970.000	2.138.000
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	145.832.000	0	0	0	145.832.000	147.970.000	0	0	0	147.970.000	2.138.000
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	36.206.000	0	0	0	36.206.000	337.151.600	5.500.000	0	0	342.651.600	306.445.600
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	36.206.000	0	0	0	36.206.000	337.151.600	5.500.000	0	0	342.651.600	306.445.600
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	36.206.000	0	0	0	36.206.000	337.151.600	5.500.000	0	0	342.651.600	306.445.600
3	**27**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**22.560.080.800**	**71.500.000**	**0**	**0**	**22.631.580.800**	**16.590.197.250**	**51.500.000**	**0**	**0**	**16.641.697.250**	**(5.989.883.550)**
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000				Dinas Pertanian	22.560.080.800	71.500.000	0	0	22.631.580.800	16.590.197.250	51.500.000	0	0	16.641.697.250	(5.989.883.550)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.126.340.050	71.500.000	0	0	15.197.840.050	12.463.435.800	51.500.000	0	0	12.514.935.800	(2.682.904.250)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.975.776.250	0	0	0	12.975.776.250	10.273.303.000	0	0	0	10.273.303.000	(2.702.473.250)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.975.776.250	0	0	0	12.975.776.250	10.273.303.000	0	0	0	10.273.303.000	(2.702.473.250)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.496.800	0	0	0	320.496.800	437.467.300	0	0	0	437.467.300	116.970.500
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.198.800	0	0	0	7.198.800	7.198.800	0	0	0	7.198.800	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.550.000	0	0	0	58.550.000	68.568.000	0	0	0	68.568.000	10.018.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.394.000	0	0	0	13.394.000	16.419.500	0	0	0	16.419.500	3.025.500
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000	0	0	0	42.000.000	39.000.000	0	0	0	39.000.000	(3.000.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.155.000	0	0	0	31.155.000	28.605.000	0	0	0	28.605.000	(2.550.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.199.000	0	0	0	168.199.000	277.676.000	0	0	0	277.676.000	109.477.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	71.500.000	0	0	71.500.000	0	51.500.000	0	0	51.500.000	(20.000.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	71.500.000	0	0	71.500.000	0	51.500.000	0	0	51.500.000	(20.000.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.501.277.000	0	0	0	1.501.277.000	1.423.875.500	0	0	0	1.423.875.500	(77.401.500)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.000.000	0	0	0	68.000.000	57.298.500	0	0	0	57.298.500	(10.701.500)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.429.277.000	0	0	0	1.429.277.000	1.362.577.000	0	0	0	1.362.577.000	(66.700.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.790.000	0	0	0	328.790.000	328.790.000	0	0	0	328.790.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.580.000	0	0	0	299.580.000	299.580.000	0	0	0	299.580.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.210.000	0	0	0	15.210.000	15.210.000	0	0	0	15.210.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.090.451.650	0	0	0	2.090.451.650	1.375.011.550	0	0	0	1.375.011.550	(715.440.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	35.373.000	0	0	0	35.373.000	22.413.000	0	0	0	22.413.000	(12.960.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	35.373.000	0	0	0	35.373.000	22.413.000	0	0	0	22.413.000	(12.960.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	691.376.500	0	0	0	691.376.500	639.476.400	0	0	0	639.476.400	(51.900.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	225.522.500	0	0	0	225.522.500	107.861.000	0	0	0	107.861.000	(117.661.500)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	358.253.000	0	0	0	358.253.000	436.204.400	0	0	0	436.204.400	77.951.400
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	107.601.000	0	0	0	107.601.000	95.411.000	0	0	0	95.411.000	(12.190.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	188.552.150	0	0	0	188.552.150	184.452.150	0	0	0	184.452.150	(4.100.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	188.552.150	0	0	0	188.552.150	184.452.150	0	0	0	184.452.150	(4.100.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.175.150.000	0	0	0	1.175.150.000	528.670.000	0	0	0	528.670.000	(646.480.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.175.150.000	0	0	0	1.175.150.000	528.670.000	0	0	0	528.670.000	(646.480.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.776.039.100	0	0	0	3.776.039.100	1.251.132.000	0	0	0	1.251.132.000	(2.524.907.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	58.887.000	0	0	0	58.887.000	0	0	0	0	0	(58.887.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	58.887.000	0	0	0	58.887.000	0	0	0	0	0	(58.887.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	3.717.152.100	0	0	0	3.717.152.100	1.251.132.000	0	0	0	1.251.132.000	(2.466.020.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	148.273.200	0	0	0	148.273.200	1.130.000	0	0	0	1.130.000	(147.143.200)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.568.878.900	0	0	0	3.568.878.900	1.250.002.000	0	0	0	1.250.002.000	(2.318.876.900)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	859.972.500	0	0	0	859.972.500	850.290.500	0	0	0	850.290.500	(9.682.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	107.097.500	0	0	0	107.097.500	97.415.500	0	0	0	97.415.500	(9.682.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	107.097.500	0	0	0	107.097.500	97.415.500	0	0	0	97.415.500	(9.682.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	752.875.000	0	0	0	752.875.000	752.875.000	0	0	0	752.875.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	752.875.000	0	0	0	752.875.000	752.875.000	0	0	0	752.875.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	15.200.000	0	0	0	15.200.000	3.260.000	0	0	0	3.260.000	(11.940.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	15.200.000	0	0	0	15.200.000	3.260.000	0	0	0	3.260.000	(11.940.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan,	15.200.000	0	0	0	15.200.000	3.260.000	0	0	0	3.260.000	(11.940.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan											
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	692.077.500	0	0	0	692.077.500	647.067.400	0	0	0	647.067.400	(45.010.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	692.077.500	0	0	0	692.077.500	647.067.400	0	0	0	647.067.400	(45.010.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	528.677.000	0	0	0	528.677.000	507.250.900	0	0	0	507.250.900	(21.426.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	163.400.500	0	0	0	163.400.500	139.816.500	0	0	0	139.816.500	(23.584.000)
3	**30**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**139.998.600**	**0**	**0**	**0**	**139.998.600**	**110.429.300**	**0**	**0**	**0**	**110.429.300**	**(29.569.300)**
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	139.998.600	0	0	0	139.998.600	110.429.300	0	0	0	110.429.300	(29.569.300)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	27.738.800	0	0	0	27.738.800	26.985.500	0	0	0	26.985.500	(753.300)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.738.800	0	0	0	27.738.800	26.985.500	0	0	0	26.985.500	(753.300)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.738.800	0	0	0	27.738.800	26.985.500	0	0	0	26.985.500	(753.300)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	17.150.600	0	0	0	17.150.600	14.611.500	0	0	0	14.611.500	(2.539.100)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	17.150.600	0	0	0	17.150.600	14.611.500	0	0	0	14.611.500	(2.539.100)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.150.600	0	0	0	17.150.600	14.611.500	0	0	0	14.611.500	(2.539.100)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	95.109.200	0	0	0	95.109.200	68.832.900	0	0	0	68.832.900	(26.276.900)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	95.109.200	0	0	0	95.109.200	68.832.900	0	0	0	68.832.900	(26.276.900)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	67.891.100	0	0	0	67.891.100	49.714.300	0	0	0	49.714.300	(18.176.800)
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	27.218.100	0	0	0	27.218.100	19.118.000	0	0	0	19.118.000	(8.100.100)
3	**31**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**594.711.400**	**0**	**0**	**0**	**594.711.400**	**361.204.100**	**0**	**0**	**0**	**361.204.100**	**(233.507.300)**
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	594.711.400	0	0	0	594.711.400	361.204.100	0	0	0	361.204.100	(233.507.300)
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	584.270.000	0	0	0	584.270.000	351.707.700	0	0	0	351.707.700	(232.562.300)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	584.270.000	0	0	0	584.270.000	351.707.700	0	0	0	351.707.700	(232.562.300)
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	28.116.000	0	0	0	28.116.000	24.168.000	0	0	0	24.168.000	(3.948.000)
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	556.154.000	0	0	0	556.154.000	327.539.700	0	0	0	327.539.700	(228.614.300)
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	10.441.400	0	0	0	10.441.400	9.496.400	0	0	0	9.496.400	(945.000)
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.441.400	0	0	0	10.441.400	9.496.400	0	0	0	9.496.400	(945.000)
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.441.400	0	0	0	10.441.400	9.496.400	0	0	0	9.496.400	(945.000)
3	**32**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**4.198.617.450**	**34.500.000**	**0**	**0**	**4.233.117.450**	**3.453.740.150**	**18.000.000**	**0**	**0**	**3.471.740.150**	**(761.377.300)**
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000				Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.198.617.450	34.500.000	0	0	4.233.117.450	3.453.740.150	18.000.000	0	0	3.471.740.150	(761.377.300)
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.198.617.450	34.500.000	0	0	4.233.117.450	3.453.740.150	18.000.000	0	0	3.471.740.150	(761.377.300)
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.700.000	0	0	0	5.700.000	1.442.000	0	0	0	1.442.000	(4.258.000)
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.700.000	0	0	0	5.700.000	1.442.000	0	0	0	1.442.000	(4.258.000)
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.395.758.250	0	0	0	3.395.758.250	2.713.290.000	0	0	0	2.713.290.000	(682.468.250)
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.395.758.250	0	0	0	3.395.758.250	2.713.290.000	0	0	0	2.713.290.000	(682.468.250)
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.482.100	0	0	0	230.482.100	220.040.650	0	0	0	220.040.650	(10.441.450)
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.554.500	0	0	0	8.554.500	2.085.250	0	0	0	2.085.250	(6.469.250)
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.256.000	0	0	0	47.256.000	28.025.500	0	0	0	28.025.500	(19.230.500)
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.321.000	0	0	0	27.321.000	12.914.000	0	0	0	12.914.000	(14.407.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.875.000	0	0	0	23.875.000	12.651.000	0	0	0	12.651.000	(11.224.000)
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.475.600	0	0	0	123.475.600	164.364.900	0	0	0	164.364.900	40.889.300
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	34.500.000	0	0	34.500.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	(16.500.000)
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	34.500.000	0	0	34.500.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	(16.500.000)
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.797.100	0	0	0	516.797.100	473.527.500	0	0	0	473.527.500	(43.269.600)
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.999.300	0	0	0	56.999.300	56.999.300	0	0	0	56.999.300	0
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.797.800	0	0	0	459.797.800	416.528.200	0	0	0	416.528.200	(43.269.600)
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.880.000	0	0	0	49.880.000	45.440.000	0	0	0	45.440.000	(4.440.000)
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0
3 32 3.32.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.880.000	0	0	0	9.880.000	5.440.000	0	0	0	5.440.000	(4.440.000)
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**69.865.249.468**	**1.835.150.000**	**0**	**0**	**71.700.399.468**	**75.016.545.035**	**1.844.438.500**	**0**	**0**	**76.860.983.535**	**5.160.584.067**
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**33.331.513.936**	**1.741.650.000**	**0**	**0**	**35.073.163.936**	**34.477.470.416**	**1.823.438.500**	**0**	**0**	**36.300.908.916**	**1.227.744.980**
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	33.331.513.936	1.741.650.000	0	0	35.073.163.936	34.477.470.416	1.823.438.500	0	0	36.300.908.916	1.227.744.980
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.572.047.136	1.704.150.000	0	0	27.276.197.136	26.278.101.116	1.803.938.500	0	0	28.082.039.616	805.842.480
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.540.433.000	0	0	0	8.540.433.000	5.632.792.000	0	0	0	5.632.792.000	(2.907.641.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.540.433.000	0	0	0	8.540.433.000	5.632.792.000	0	0	0	5.632.792.000	(2.907.641.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	235.000.000	0	0	0	235.000.000	235.000.000	0	0	0	235.000.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	235.000.000	0	0	0	235.000.000	235.000.000	0	0	0	235.000.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.305.010.500	1.750.000	0	0	3.306.760.500	5.104.569.200	1.750.000	0	0	5.106.319.200	1.799.558.700
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	128.640.000	0	0	0	128.640.000	191.520.000	0	0	0	191.520.000	62.880.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
							Kantor											
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.812.000	0	0	0	263.812.000	372.726.000	0	0	0	372.726.000	108.916.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.423.500	1.750.000	0	0	61.173.500	108.337.000	1.750.000	0	0	110.087.000	48.913.500
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.378.805.000	0	0	0	1.378.805.000	2.349.630.000	0	0	0	2.349.630.000	970.825.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.700.000	0	0	0	36.700.000	53.361.200	0	0	0	53.361.200	16.661.200
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.437.630.000	0	0	0	1.437.630.000	2.028.993.000	0	0	0	2.028.993.000	591.363.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.143.600	1.702.400.000	0	0	1.985.543.600	550.349.868	1.802.188.500	0	0	2.352.538.368	366.994.768
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	625.000.000	0	0	625.000.000	0	910.900.000	0	0	910.900.000	285.900.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	283.143.600	1.077.400.000	0	0	1.360.543.600	550.349.868	891.288.500	0	0	1.441.638.368	81.094.768
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.274.165.936	0	0	0	7.274.165.936	7.519.722.848	0	0	0	7.519.722.848	245.556.912
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.400.000	0	0	0	50.400.000	47.400.000	0	0	0	47.400.000	(3.000.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.442.043.336	0	0	0	1.442.043.336	1.522.285.248	0	0	0	1.522.285.248	80.241.912
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.663.200.000	0	0	0	1.663.200.000	1.967.850.000	0	0	0	1.967.850.000	304.650.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.118.522.600	0	0	0	4.118.522.600	3.982.187.600	0	0	0	3.982.187.600	(136.335.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.106.400	0	0	0	1.460.106.400	1.725.950.000	0	0	0	1.725.950.000	265.843.600
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.150.000	0	0	0	248.150.000	338.570.000	0	0	0	338.570.000	90.420.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.021.956.400	0	0	0	1.021.956.400	1.165.880.000	0	0	0	1.165.880.000	143.923.600
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.000.000	0	0	0	190.000.000	221.500.000	0	0	0	221.500.000	31.500.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	908.473.000	0	0	0	908.473.000	1.026.708.500	0	0	0	1.026.708.500	118.235.500
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	178.473.000	0	0	0	178.473.000	96.708.500	0	0	0	96.708.500	(81.764.500)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	270.000.000	0	0	0	270.000.000	470.000.000	0	0	0	470.000.000	200.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	0	0	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	16.325.000	0	0	0	16.325.000	16.325.000	0	0	0	16.325.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16.325.000	0	0	0	16.325.000	16.325.000	0	0	0	16.325.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13			Penataan Organisasi	249.994.800	0	0	0	249.994.800	267.885.000	0	0	0	267.885.000	17.890.200
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	85.105.800	0	0	0	85.105.800	84.612.000	0	0	0	84.612.000	(493.800)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	76.319.000	0	0	0	76.319.000	86.255.000	0	0	0	86.255.000	9.936.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	88.570.000	0	0	0	88.570.000	97.018.000	0	0	0	97.018.000	8.448.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.299.394.900	0	0	0	3.299.394.900	4.198.798.700	0	0	0	4.198.798.700	899.403.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01		Fasilitasi Keprotokolan	3.299.394.900	0	0	0	3.299.394.900	4.198.798.700	0	0	0	4.198.798.700	899.403.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.975.899.100	37.500.000	0	0	7.013.399.100	7.150.611.400	19.500.000	0	0	7.170.111.400	156.712.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	605.936.100	37.500.000	0	0	643.436.100	383.018.600	19.500.000	0	0	402.518.600	(240.917.500)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	106.299.900	0	0	0	106.299.900	91.380.200	0	0	0	91.380.200	(14.919.700)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	344.284.200	37.500.000	0	0	381.784.200	164.134.600	19.500.000	0	0	183.634.600	(198.149.600)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	155.352.000	0	0	0	155.352.000	127.503.800	0	0	0	127.503.800	(27.848.200)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.063.400.000	0	0	0	6.063.400.000	6.391.969.000	0	0	0	6.391.969.000	328.569.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.965.667.000	0	0	0	5.965.667.000	6.381.849.000	0	0	0	6.381.849.000	416.182.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	53.003.000	0	0	0	53.003.000	5.670.000	0	0	0	5.670.000	(47.333.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	44.730.000	0	0	0	44.730.000	4.450.000	0	0	0	4.450.000	(40.280.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	249.999.000	0	0	0	249.999.000	273.233.400	0	0	0	273.233.400	23.234.400
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	84.127.900	0	0	0	84.127.900	128.714.300	0	0	0	128.714.300	44.586.400
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	109.476.100	0	0	0	109.476.100	98.718.100	0	0	0	98.718.100	(10.758.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusen, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	56.395.000	0	0	0	56.395.000	45.801.000	0	0	0	45.801.000	(10.594.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	56.564.000	0	0	0	56.564.000	102.390.400	0	0	0	102.390.400	45.826.400
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	56.564.000	0	0	0	56.564.000	102.390.400	0	0	0	102.390.400	45.826.400
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	783.567.700	0	0	0	783.567.700	1.048.757.900	0	0	0	1.048.757.900	265.190.200
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	151.689.000	0	0	0	151.689.000	181.910.000	0	0	0	181.910.000	30.221.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	21.576.000	0	0	0	21.576.000	14.453.000	0	0	0	14.453.000	(7.123.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	50.200.000	0	0	0	50.200.000	53.265.000	0	0	0	53.265.000	3.065.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	79.913.000	0	0	0	79.913.000	114.192.000	0	0	0	114.192.000	34.279.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	175.000.000	0	0	0	175.000.000	290.652.200	0	0	0	290.652.200	115.652.200
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	71.314.000	0	0	0	71.314.000	126.266.400	0	0	0	126.266.400	54.952.400
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51.517.000	0	0	0	51.517.000	51.517.000	0	0	0	51.517.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.169.000	0	0	0	52.169.000	112.868.800	0	0	0	112.868.800	60.699.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400.297.600	0	0	0	400.297.600	526.354.600	0	0	0	526.354.600	126.057.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	172.710.600	0	0	0	172.710.600	282.242.600	0	0	0	282.242.600	109.532.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	165.908.800	0	0	0	165.908.800	174.933.800	0	0	0	174.933.800	9.025.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	61.678.200	0	0	0	61.678.200	69.178.200	0	0	0	69.178.200	7.500.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	56.581.100	0	0	0	56.581.100	49.841.100	0	0	0	49.841.100	(6.740.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	29.545.100	0	0	0	29.545.100	27.825.100	0	0	0	27.825.100	(1.720.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	27.036.000	0	0	0	27.036.000	22.016.000	0	0	0	22.016.000	(5.020.000)
4 02	**SEKRETARIAT DPRD**	**36.533.735.532**	**93.500.000**	**0**	**0**	**36.627.235.532**	**40.539.074.619**	**21.000.000**	**0**	**0**	**40.560.074.619**	**3.932.839.087**
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	36.533.735.532	93.500.000	0	0	36.627.235.532	40.539.074.619	21.000.000	0	0	40.560.074.619	3.932.839.087
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.547.657.032	93.500.000	0	0	18.641.157.032	16.800.752.019	21.000.000	0	0	16.821.752.019	(1.819.405.013)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.995.354.935	0	0	0	1.995.354.935	1.656.532.205	0	0	0	1.656.532.205	(338.822.730)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.995.354.935	0	0	0	1.995.354.935	1.656.532.205	0	0	0	1.656.532.205	(338.822.730)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.500.000	0	0	0	226.500.000	220.500.000	0	0	0	220.500.000	(6.000.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	226.500.000	0	0	0	226.500.000	220.500.000	0	0	0	220.500.000	(6.000.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.368.351.600	4.500.000	0	0	1.372.851.600	1.301.503.800	0	0	0	1.301.503.800	(71.347.800)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.930.000	0	0	0	27.930.000	27.930.000	0	0	0	27.930.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.622.000	4.500.000	0	0	301.122.000	276.025.000	0	0	0	276.025.000	(25.097.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	155.675.100	0	0	0	155.675.100	120.758.700	0	0	0	120.758.700	(34.916.400)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.250.000	0	0	0	238.250.000	183.243.000	0	0	0	183.243.000	(55.007.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	284.492.900	0	0	0	284.492.900	252.664.100	0	0	0	252.664.100	(31.828.800)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.381.600	0	0	0	365.381.600	440.883.000	0	0	0	440.883.000	75.501.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	89.000.000	0	0	89.000.000	0	21.000.000	0	0	21.000.000	(68.000.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	89.000.000	0	0	89.000.000	0	21.000.000	0	0	21.000.000	(68.000.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.803.871.032	0	0	0	1.803.871.032	1.621.741.936	0	0	0	1.621.741.936	(182.129.096)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0	0	0	10.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(4.000.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	382.467.032	0	0	0	382.467.032	317.465.936	0	0	0	317.465.936	(65.001.096)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.411.404.000	0	0	0	1.411.404.000	1.298.276.000	0	0	0	1.298.276.000	(113.128.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.009.794.300	0	0	0	1.009.794.300	498.935.300	0	0	0	498.935.300	(510.859.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	425.500.000	0	0	0	425.500.000	137.713.000	0	0	0	137.713.000	(287.787.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.660.000	0	0	0	176.660.000	108.500.000	0	0	0	108.500.000	(68.160.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.634.300	0	0	0	307.634.300	132.634.300	0	0	0	132.634.300	(175.000.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	0	0	0	100.000.000	120.088.000	0	0	0	120.088.000	20.088.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.807.885.165	0	0	0	11.807.885.165	11.211.338.778	0	0	0	11.211.338.778	(596.546.387)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.807.885.165	0	0	0	11.807.885.165	11.211.338.778	0	0	0	11.211.338.778	(596.546.387)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	335.900.000	0	0	0	335.900.000	290.200.000	0	0	0	290.200.000	(45.700.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	335.900.000	0	0	0	335.900.000	290.200.000	0	0	0	290.200.000	(45.700.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.986.078.500	0	0	0	17.986.078.500	23.738.322.600	0	0	0	23.738.322.600	5.752.244.100
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.467.561.000	0	0	0	3.467.561.000	4.044.743.200	0	0	0	4.044.743.200	577.182.200
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.061.961.000	0	0	0	3.061.961.000	3.847.113.200	0	0	0	3.847.113.200	785.152.200
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	405.600.000	0	0	0	405.600.000	197.630.000	0	0	0	197.630.000	(207.970.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.338.705.500	0	0	0	3.338.705.500	2.533.852.400	0	0	0	2.533.852.400	(804.853.100)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	669.956.000	0	0	0	669.956.000	461.744.600	0	0	0	461.744.600	(208.211.400)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	669.956.000	0	0	0	669.956.000	394.910.000	0	0	0	394.910.000	(275.046.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pembahasan APBD	666.264.500	0	0	0	666.264.500	356.370.500	0	0	0	356.370.500	(309.894.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	666.264.500	0	0	0	666.264.500	662.842.700	0	0	0	662.842.700	(3.421.800)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	666.264.500	0	0	0	666.264.500	657.984.600	0	0	0	657.984.600	(8.279.900)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.461.790.000	0	0	0	2.461.790.000	2.960.853.000	0	0	0	2.960.853.000	499.063.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	1.890.370.000	0	0	0	1.890.370.000	2.102.033.000	0	0	0	2.102.033.000	211.663.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	571.420.000	0	0	0	571.420.000	858.820.000	0	0	0	858.820.000	287.400.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	8.718.022.000	0	0	0	8.718.022.000	14.198.874.000	0	0	0	14.198.874.000	5.480.852.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	8.381.612.000	0	0	0	8.381.612.000	13.923.194.000	0	0	0	13.923.194.000	5.541.582.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	336.410.000	0	0	0	336.410.000	275.680.000	0	0	0	275.680.000	(60.730.000)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**23.415.814.207**	**287.628.000**	**1.000.000.000**	**110.982.394.000**	**135.685.836.207**	**21.561.859.121**	**465.200.000**	**4.154.380.709**	**110.966.408.030**	**137.147.847.860**	**1.462.011.653**
5 01	**PERENCANAAN**	**4.354.365.850**	**102.500.000**	**0**	**0**	**4.456.865.850**	**3.660.583.350**	**102.500.000**	**0**	**0**	**3.763.083.350**	**(693.782.500)**
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	4.354.365.850	102.500.000	0	0	4.456.865.850	3.660.583.350	102.500.000	0	0	3.763.083.350	(693.782.500)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.209.589.750	102.500.000	0	0	3.312.089.750	2.652.621.350	102.500.000	0	0	2.755.121.350	(556.968.400)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.394.508.450	0	0	0	2.394.508.450	1.810.532.000	0	0	0	1.810.532.000	(583.976.450)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.508.450	0	0	0	2.394.508.450	1.810.532.000	0	0	0	1.810.532.000	(583.976.450)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.012.500	0	0	0	310.012.500	395.255.800	0	0	0	395.255.800	85.243.300
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.220.000	0	0	0	8.220.000	10.287.500	0	0	0	10.287.500	2.067.500
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.566.000	0	0	0	32.566.000	41.349.000	0	0	0	41.349.000	8.783.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.681.500	0	0	0	22.681.500	34.634.300	0	0	0	34.634.300	11.952.800
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.040.000	0	0	0	20.040.000	53.386.000	0	0	0	53.386.000	33.346.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.200.000	0	0	0	23.200.000	37.221.400	0	0	0	37.221.400	14.021.400
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.305.000	0	0	0	203.305.000	218.377.600	0	0	0	218.377.600	15.072.600
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	102.500.000	0	0	102.500.000	0	102.500.000	0	0	102.500.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	102.500.000	0	0	102.500.000	0	102.500.000	0	0	102.500.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.318.800	0	0	0	458.318.800	400.083.550	0	0	0	400.083.550	(58.235.250)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.000.000	0	0	0	115.000.000	105.000.750	0	0	0	105.000.750	(9.999.250)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.380.000	0	0	0	10.380.000	15.880.000	0	0	0	15.880.000	5.500.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.938.800	0	0	0	327.938.800	274.202.800	0	0	0	274.202.800	(53.736.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.750.000	0	0	0	46.750.000	46.750.000	0	0	0	46.750.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.750.000	0	0	0	24.750.000	24.750.000	0	0	0	24.750.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	588.102.200	0	0	0	588.102.200	607.025.300	0	0	0	607.025.300	18.923.100
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	534.758.700	0	0	0	534.758.700	588.842.100	0	0	0	588.842.100	54.083.400

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	139.958.100	0	0	0	139.958.100	89.834.500	0	0	0	89.834.500	(50.123.600)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	394.800.600	0	0	0	394.800.600	499.007.600	0	0	0	499.007.600	104.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	32.573.600	0	0	0	32.573.600	13.393.200	0	0	0	13.393.200	(19.180.400)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	32.573.600	0	0	0	32.573.600	13.393.200	0	0	0	13.393.200	(19.180.400)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.769.900	0	0	0	20.769.900	4.790.000	0	0	0	4.790.000	(15.979.900)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	20.769.900	0	0	0	20.769.900	4.790.000	0	0	0	4.790.000	(15.979.900)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	556.673.900	0	0	0	556.673.900	400.936.700	0	0	0	400.936.700	(155.737.200)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	83.115.400	0	0	0	83.115.400	72.014.000	0	0	0	72.014.000	(11.101.400)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.296.000	0	0	0	29.296.000	23.904.000	0	0	0	23.904.000	(5.392.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53.819.400	0	0	0	53.819.400	48.110.000	0	0	0	48.110.000	(5.709.400)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	77.170.000	0	0	0	77.170.000	32.669.000	0	0	0	32.669.000	(44.501.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.014.000	0	0	0	37.014.000	12.664.000	0	0	0	12.664.000	(24.350.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.156.000	0	0	0	40.156.000	20.005.000	0	0	0	20.005.000	(20.151.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	396.388.500	0	0	0	396.388.500	296.253.700	0	0	0	296.253.700	(100.134.800)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	163.821.400	0	0	0	163.821.400	107.383.600	0	0	0	107.383.600	(56.437.800)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	194.993.100	0	0	0	194.993.100	180.844.100	0	0	0	180.844.100	(14.149.000)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	37.574.000	0	0	0	37.574.000	8.026.000	0	0	0	8.026.000	(29.548.000)
5	**02**					**KEUANGAN**	**12.525.730.861**	**163.128.000**	**1.000.000.000**	**110.982.394.000**	**124.671.252.861**	**12.137.888.700**	**340.700.000**	**4.154.380.709**	**110.966.408.030**	**127.599.377.439**	**2.928.124.578**
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				Badan Keuangan Daerah	12.525.730.861	163.128.000	1.000.000.000	110.982.394.000	124.671.252.861	12.137.888.700	340.700.000	4.154.380.709	110.966.408.030	127.599.377.439	2.928.124.578
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.475.932.661	63.128.000	0	0	7.539.060.661	7.161.917.700	181.400.000	0	0	7.343.317.700	(195.742.961)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.077.153.611	0	0	0	6.077.153.611	5.226.794.900	0	0	0	5.226.794.900	(850.358.711)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.077.153.611	0	0	0	6.077.153.611	5.226.794.900	0	0	0	5.226.794.900	(850.358.711)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.655.400	0	0	0	626.655.400	945.974.500	0	0	0	945.974.500	319.319.100
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.500	0	0	0	14.989.500	11.889.500	0	0	0	11.889.500	(3.100.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.999.000	0	0	0	149.999.000	153.567.000	0	0	0	153.567.000	3.568.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.999.000	0	0	0	52.999.000	57.683.000	0	0	0	57.683.000	4.684.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.632.000	0	0	0	52.632.000	120.530.000	0	0	0	120.530.000	67.898.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	169.499.900	0	0	0	169.499.900	214.346.600	0	0	0	214.346.600	44.846.700
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.536.000	0	0	0	186.536.000	387.958.400	0	0	0	387.958.400	201.422.400
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	41.000.000	0	0	41.000.000	0	125.500.000	0	0	125.500.000	84.500.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	24.000.000	0	0	24.000.000	0	19.500.000	0	0	19.500.000	(4.500.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	17.000.000	0	0	17.000.000	0	106.000.000	0	0	106.000.000	89.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.023.650	0	0	0	699.023.650	901.048.300	33.772.000	0	0	934.820.300	235.796.650
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	0	0	0	16.000.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	(5.000.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.600.000	0	0	0	192.600.000	356.775.500	33.772.000	0	0	390.547.500	197.947.500
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.403.200	0	0	0	47.403.200	77.683.200	0	0	0	77.683.200	30.280.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.6000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.020.450	0	0	0	443.020.450	455.589.600	0	0	0	455.589.600	12.569.150
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.100.000	22.128.000	0	0	95.228.000	88.100.000	22.128.000	0	0	110.228.000	15.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	0	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.600.000	0	0	0	56.600.000	71.600.000	0	0	0	71.600.000	15.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	22.128.000	0	0	22.128.000	0	22.128.000	0	0	22.128.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.875.742.600	100.000.000	1.060.000.000	110.982.394.000	115.958.136.600	3.921.637.200	99.300.000	4.154.380.709	110.966.408.030	119.141.725.939	3.183.589.339
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.919.400.000	0	0	0	1.919.400.000	1.875.504.000	0	0	0	1.875.504.000	(43.896.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	300.041.000	0	0	0	300.041.000	260.063.000	0	0	0	260.063.000	(39.978.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	262.800.000	0	0	0	262.800.000	200.193.000	0	0	0	200.193.000	(62.607.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	124.326.000	0	0	0	124.326.000	347.647.000	0	0	0	347.647.000	223.321.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	944.173.000	0	0	0	944.173.000	916.011.000	0	0	0	916.011.000	(28.162.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	288.060.000	0	0	0	288.060.000	151.590.000	0	0	0	151.590.000	(136.470.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	435.003.000	0	0	0	435.003.000	269.695.000	0	0	0	269.695.000	(165.308.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	71.557.000	0	0	0	71.557.000	51.995.000	0	0	0	51.995.000	(19.562.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	363.446.000	0	0	0	363.446.000	217.700.000	0	0	0	217.700.000	(145.746.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	465.844.000	0	0	0	465.844.000	499.782.200	0	0	0	499.782.200	33.938.200
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	64.012.000	0	0	0	64.012.000	157.584.400	0	0	0	157.584.400	93.572.400
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	163.036.000	0	0	0	163.036.000	118.659.000	0	0	0	118.659.000	(44.377.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	222.423.000	0	0	0	222.423.000	213.688.800	0	0	0	213.688.800	(8.734.200)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	11.565.000	0	0	0	11.565.000	5.042.000	0	0	0	5.042.000	(6.523.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4.808.000	0	0	0	4.808.000	4.808.000	0	0	0	4.808.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	960.000.000	0	1.000.000.000	110.982.394.000	112.942.394.000	1.110.000.000	0	4.154.380.709	110.966.408.030	116.230.788.739	3.288.394.739
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	960.000.000	0	0	110.982.394.000	111.942.394.000	1.110.000.000	0	0	110.966.408.030	112.076.408.030	134.014.030
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	4.154.380.709	0	4.154.380.709	3.154.380.709
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	95.495.600	100.000.000	0	0	195.495.600	166.656.000	99.300.000	0	0	265.956.000	70.460.400
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	15.497.000	0	0	0	15.497.000	15.497.000	0	0	0	15.497.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	79.998.600	100.000.000	0	0	179.998.600	151.159.000	99.300.000	0	0	250.459.000	70.460.400
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	494.329.000	0	0	0	494.329.000	295.046.000	60.000.000	0	0	355.046.000	(139.283.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	494.329.000	0	0	0	494.329.000	295.046.000	60.000.000	0	0	355.046.000	(139.283.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	55.810.000	0	0	0	55.810.000	38.754.600	0	0	0	38.754.600	(17.055.400)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	122.891.000	0	0	0	122.891.000	84.318.000	0	0	0	84.318.000	(38.573.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	67.930.000	0	0	0	67.930.000	44.755.600	0	0	0	44.755.600	(23.174.400)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	247.698.000	0	0	0	247.698.000	127.217.800	60.000.000	0	0	187.217.800	(60.480.200)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	679.726.600	0	0	0	679.726.600	759.287.800	0	0	0	759.287.800	79.561.200
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	679.726.600	0	0	0	679.726.600	759.287.800	0	0	0	759.287.800	79.561.200
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	231.034.600	0	0	0	231.034.600	322.038.800	0	0	0	322.038.800	91.004.200
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	49.120.000	0	0	0	49.120.000	32.565.000	0	0	0	32.565.000	(16.555.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	182.122.000	0	0	0	182.122.000	135.000.000	0	0	0	135.000.000	(47.122.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	169.100.000	0	0	0	169.100.000	136.044.000	0	0	0	136.044.000	(33.056.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	48.350.000	0	0	0	48.350.000	133.640.000	0	0	0	133.640.000	85.290.000
5	**03**					**KEPEGAWAIAN**	**5.371.819.396**	**22.000.000**	**0**	**0**	**5.393.819.396**	**4.343.799.771**	**22.000.000**	**0**	**0**	**4.365.799.771**	**(1.028.019.625)**
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.371.819.396	22.000.000	0	0	5.393.819.396	4.343.799.771	22.000.000	0	0	4.365.799.771	(1.028.019.625)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.170.920.396	22.000.000	0	0	4.192.920.396	3.260.590.346	22.000.000	0	0	3.282.590.346	(910.330.050)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.246.000	0	0	0	33.246.000	39.350.000	0	0	0	39.350.000	6.104.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.246.000	0	0	0	33.246.000	39.350.000	0	0	0	39.350.000	6.104.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.616.062.900	0	0	0	3.616.062.900	2.682.461.000	0	0	0	2.682.461.000	(933.601.900)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.616.062.900	0	0	0	3.616.062.900	2.682.461.000	0	0	0	2.682.461.000	(933.601.900)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.702.600	0	0	0	207.702.600	243.604.700	0	0	0	243.604.700	35.902.100
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.500	0	0	0	4.500.500	976.000	0	0	0	976.000	(3.524.500)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.053.000	0	0	0	45.053.000	38.670.000	0	0	0	38.670.000	(6.383.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.499.800	0	0	0	13.499.800	10.116.700	0	0	0	10.116.700	(3.383.100)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.681.000	0	0	0	27.681.000	24.142.000	0	0	0	24.142.000	(3.539.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.003.300	0	0	0	36.003.300	22.750.000	0	0	0	22.750.000	(13.253.300)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.965.000	0	0	0	80.965.000	146.950.000	0	0	0	146.950.000	65.985.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	22.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0	22.000.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	22.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0	22.000.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.918.896	0	0	0	264.918.896	254.448.896	0	0	0	254.448.896	(10.470.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.840.496	0	0	0	50.840.496	50.840.496	0	0	0	50.840.496	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.078.400	0	0	0	210.078.400	199.608.400	0	0	0	199.608.400	(10.470.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.990.000	0	0	0	48.990.000	40.725.750	0	0	0	40.725.750	(8.264.250)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	14.108.250	0	0	0	14.108.250	(891.750)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.500.000	0	0	0	20.500.000	19.457.500	0	0	0	19.457.500	(1.042.500)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.490.000	0	0	0	13.490.000	7.160.000	0	0	0	7.160.000	(6.330.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.200.899.000	0	0	0	1.200.899.000	1.083.209.425	0	0	0	1.083.209.425	(117.689.575)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	235.064.000	0	0	0	235.064.000	325.701.000	0	0	0	325.701.000	90.637.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.000.000	0	0	0	20.000.000	12.948.000	0	0	0	12.948.000	(7.052.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	150.000.000	0	0	0	150.000.000	271.392.000	0	0	0	271.392.000	121.392.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	20.038.000	0	0	0	20.038.000	14.099.000	0	0	0	14.099.000	(5.939.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.032.000	0	0	0	25.032.000	16.282.000	0	0	0	16.282.000	(8.750.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	19.994.000	0	0	0	19.994.000	10.980.000	0	0	0	10.980.000	(9.014.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	64.488.000	0	0	0	64.488.000	59.785.000	0	0	0	59.785.000	(4.703.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	20.015.000	0	0	0	20.015.000	19.815.000	0	0	0	19.815.000	(200.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	44.473.000	0	0	0	44.473.000	39.970.000	0	0	0	39.970.000	(4.503.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	726.957.000	0	0	0	726.957.000	542.979.425	0	0	0	542.979.425	(183.977.575)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	34.908.000	0	0	0	34.908.000	27.497.000	0	0	0	27.497.000	(7.411.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	157.486.000	0	0	0	157.486.000	168.361.000	0	0	0	168.361.000	10.875.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	529.570.000	0	0	0	529.570.000	343.698.425	0	0	0	343.698.425	(185.871.575)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	4.993.000	0	0	0	4.993.000	3.423.000	0	0	0	3.423.000	(1.570.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	174.390.000	0	0	0	174.390.000	154.744.000	0	0	0	154.744.000	(19.646.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.418.000	0	0	0	4.418.000	4.058.000	0	0	0	4.058.000	(360.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	149.985.000	0	0	0	149.985.000	138.327.000	0	0	0	138.327.000	(11.658.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	19.987.000	0	0	0	19.987.000	12.359.000	0	0	0	12.359.000	(7.628.000)
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.012.724.000**	**0**	**0**	**0**	**1.012.724.000**	**891.477.000**	**0**	**0**	**0**	**891.477.000**	**(121.247.000)**
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.012.724.000	0	0	0	1.012.724.000	891.477.000	0	0	0	891.477.000	(121.247.000)
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.012.724.000	0	0	0	1.012.724.000	891.477.000	0	0	0	891.477.000	(121.247.000)
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	16.690.000	0	0	0	16.690.000	3.550.000	0	0	0	3.550.000	(13.140.000)
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	16.690.000	0	0	0	16.690.000	3.550.000	0	0	0	3.550.000	(13.140.000)
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	03	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	996.034.000	0	0	0	996.034.000	887.927.000	0	0	0	887.927.000	(108.107.000)
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	996.034.000	0	0	0	996.034.000	887.927.000	0	0	0	887.927.000	(108.107.000)
5	**05**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**151.174.100**	**0**	**0**	**0**	**151.174.100**	**528.110.300**	**0**	**0**	**0**	**528.110.300**	**376.936.200**
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000				Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	151.174.100	0	0	0	151.174.100	528.110.300	0	0	0	528.110.300	376.936.200
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	151.174.100	0	0	0	151.174.100	528.110.300	0	0	0	528.110.300	376.936.200
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	85.896.400	0	0	0	85.896.400	402.345.700	0	0	0	402.345.700	316.449.300

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	17.473.500	0	0	0	17.473.500	88.836.600	0	0	0	88.836.600	71.363.100
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	68.422.900	0	0	0	68.422.900	313.509.100	0	0	0	313.509.100	245.086.200
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	65.277.700	0	0	0	65.277.700	125.764.600	0	0	0	125.764.600	60.486.900
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	65.277.700	0	0	0	65.277.700	125.764.600	0	0	0	125.764.600	60.486.900
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.575.404.600**	**1.224.553.600**	**0**	**0**	**8.799.958.200**	**5.163.132.900**	**604.500.000**	**0**	**0**	**5.767.632.900**	**(3.032.325.300)**
6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**7.575.404.600**	**1.224.553.600**	**0**	**0**	**8.799.958.200**	**5.163.132.900**	**604.500.000**	**0**	**0**	**5.767.632.900**	**(3.032.325.300)**
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Kabupaten	7.575.404.600	1.224.553.600	0	0	8.799.958.200	5.163.132.900	604.500.000	0	0	5.767.632.900	(3.032.325.300)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.172.304.600	1.224.553.600	0	0	7.396.858.200	3.995.763.100	604.500.000	0	0	4.600.263.100	(2.796.595.100)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.610.000	0	0	0	104.610.000	69.864.800	0	0	0	69.864.800	(34.745.200)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.610.000	0	0	0	104.610.000	69.864.800	0	0	0	69.864.800	(34.745.200)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.947.410.600	0	0	0	4.947.410.600	3.039.508.000	0	0	0	3.039.508.000	(1.907.902.600)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.947.410.600	0	0	0	4.947.410.600	3.039.508.000	0	0	0	3.039.508.000	(1.907.902.600)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	297.726.000	0	0	0	297.726.000	160.893.000	0	0	0	160.893.000	(136.833.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	297.726.000	0	0	0	297.726.000	160.893.000	0	0	0	160.893.000	(136.833.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.670.000	51.300.000	0	0	445.970.000	317.084.600	0	0	0	317.084.600	(128.885.400)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.448.000	0	0	0	13.448.000	7.633.000	0	0	0	7.633.000	(5.815.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.418.000	0	0	0	100.418.000	45.485.000	0	0	0	45.485.000	(54.933.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.735.000	51.300.000	0	0	66.035.000	11.645.000	0	0	0	11.645.000	(54.390.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.870.000	0	0	0	48.870.000	33.160.000	0	0	0	33.160.000	(15.710.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.050.000	0	0	0	36.050.000	28.018.000	0	0	0	28.018.000	(8.032.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.680.000	0	0	0	1.680.000	(120.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	179.349.000	0	0	0	179.349.000	189.463.600	0	0	0	189.463.600	10.114.600

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	dan Konsultasi SKPD											
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	858.700.000	0	0	858.700.000	0	604.500.000	0	0	604.500.000	(254.200.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	645.000.000	0	0	645.000.000	0	604.500.000	0	0	604.500.000	(40.500.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	20.900.000	0	0	20.900.000	0	0	0	0	0	(20.900.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	192.800.000	0	0	192.800.000	0	0	0	0	0	(192.800.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.888.000	0	0	0	347.888.000	328.412.700	0	0	0	328.412.700	(19.475.300)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000	(2.300.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.625.000	0	0	0	94.625.000	96.373.700	0	0	0	96.373.700	1.748.700
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.650.000	0	0	0	20.650.000	12.990.000	0	0	0	12.990.000	(7.660.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.613.000	0	0	0	228.613.000	217.349.000	0	0	0	217.349.000	(11.264.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000	314.553.600	0	0	394.553.600	80.000.000	0	0	0	80.000.000	(314.553.600)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	0	0	0	16.000.000	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000	0	0	0	64.000.000	64.000.000	0	0	0	64.000.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	314.553.600	0	0	314.553.600	0	0	0	0	0	(314.553.600)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	712.887.600	0	0	0	712.887.600	665.799.600	0	0	0	665.799.600	(47.088.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	656.907.600	0	0	0	656.907.600	620.249.000	0	0	0	620.249.000	(36.658.600)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	64.660.000	0	0	0	64.660.000	177.381.200	0	0	0	177.381.200	112.721.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	93.718.000	0	0	0	93.718.000	62.451.000	0	0	0	62.451.000	(31.267.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	53.280.000	0	0	0	53.280.000	36.901.000	0	0	0	36.901.000	(16.379.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	85.000.000	0	0	0	85.000.000	68.752.000	0	0	0	68.752.000	(16.248.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pengawasan Desa	128.489.600	0	0	0	128.489.600	132.666.800	0	0	0	132.666.800	4.177.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	136.620.000	0	0	0	136.620.000	88.538.200	0	0	0	88.538.200	(48.081.800)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	95.140.000	0	0	0	95.140.000	53.558.800	0	0	0	53.558.800	(41.581.200)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP											
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55.980.000	0	0	0	55.980.000	45.550.600	0	0	0	45.550.600	(10.429.400)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55.980.000	0	0	0	55.980.000	45.550.600	0	0	0	45.550.600	(10.429.400)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	690.212.400	0	0	0	690.212.400	501.570.200	0	0	0	501.570.200	(188.642.200)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	145.160.000	0	0	0	145.160.000	97.675.400	0	0	0	97.675.400	(47.484.600)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	145.160.000	0	0	0	145.160.000	97.675.400	0	0	0	97.675.400	(47.484.600)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	545.052.400	0	0	0	545.052.400	403.894.800	0	0	0	403.894.800	(141.157.600)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	260.997.400	0	0	0	260.997.400	200.496.400	0	0	0	200.496.400	(60.501.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	132.222.000	0	0	0	132.222.000	95.897.000	0	0	0	95.897.000	(36.325.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	151.833.000	0	0	0	151.833.000	107.501.400	0	0	0	107.501.400	(44.331.600)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**19.302.021.160**	**365.850.000**	**0**	**0**	**19.667.871.160**	**15.753.381.600**	**245.940.000**	**0**	**0**	**15.999.321.600**	**(3.668.549.560)**
7 01	**KECAMATAN**	**19.302.021.160**	**365.850.000**	**0**	**0**	**19.667.871.160**	**15.753.381.600**	**245.940.000**	**0**	**0**	**15.999.321.600**	**(3.668.549.560)**
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Pulau Punjung	2.186.759.150	35.500.000	0	0	2.222.259.150	1.999.090.500	0	0	0	1.999.090.500	(223.168.650)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.154.139.150	35.500.000	0	0	2.189.639.150	1.986.700.500	0	0	0	1.986.700.500	(202.938.650)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.862.127.950	0	0	0	1.862.127.950	1.661.796.000	0	0	0	1.661.796.000	(200.331.950)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.862.127.950	0	0	0	1.862.127.950	1.661.796.000	0	0	0	1.661.796.000	(200.331.950)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.150.700	0	0	0	103.150.700	140.924.000	0	0	0	140.924.000	37.773.300
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.887.600	0	0	0	1.887.600	1.713.400	0	0	0	1.713.400	(174.200)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.300.000	0	0	0	18.300.000	17.418.000	0	0	0	17.418.000	(882.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.100	0	0	0	9.000.100	7.917.600	0	0	0	7.917.600	(1.082.500)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	0	0	0	13.500.000	16.560.000	0	0	0	16.560.000	3.060.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.500.000	0	0	0	13.500.000	10.840.000	0	0	0	10.840.000	(2.660.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.963.000	0	0	0	46.963.000	86.475.000	0	0	0	86.475.000	39.512.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	35.500.000	0	0	35.500.000	0	0	0	0	0	(35.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	35.500.000	0	0	35.500.000	0	0	0	0	0	(35.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.360.500	0	0	0	173.360.500	168.980.500	0	0	0	168.980.500	(4.380.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	(500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	0	0	0	6.000.000	9.500.000	0	0	0	9.500.000	3.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.440.000	0	0	0	4.440.000	3.900.000	0	0	0	3.900.000	(540.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.920.500	0	0	0	160.920.500	154.080.500	0	0	0	154.080.500	(6.840.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.500.000	0	0	0	15.500.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	(500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000	0	0	0	11.500.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	(500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.300.000	0	0	0	7.300.000	0	0	0	0	0	(7.300.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.300.000	0	0	0	7.300.000	0	0	0	0	0	(7.300.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.800.000	0	0	0	6.800.000	0	0	0	0	0	(6.800.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	(500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.080.000	0	0	0	12.080.000	8.190.000	0	0	0	8.190.000	(3.890.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.080.000	0	0	0	12.080.000	8.190.000	0	0	0	8.190.000	(3.890.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.080.000	0	0	0	12.080.000	8.190.000	0	0	0	8.190.000	(3.890.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	(2.700.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						UMUM											
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	(2.700.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	(2.700.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.540.000	0	0	0	10.540.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	(6.340.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.540.000	0	0	0	10.540.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	(6.340.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.540.000	0	0	0	10.540.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	(6.340.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000				Kecamatan Sitiung	2.043.615.400	50.800.000	0	0	2.094.415.400	1.560.858.100	62.300.000	0	0	1.623.158.100	(471.257.300)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.973.239.200	50.800.000	0	0	2.024.039.200	1.515.118.900	62.300.000	0	0	1.577.418.900	(446.620.300)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.694.298.900	0	0	0	1.694.298.900	1.231.871.000	0	0	0	1.231.871.000	(462.427.900)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.694.298.900	0	0	0	1.694.298.900	1.231.871.000	0	0	0	1.231.871.000	(462.427.900)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.555.400	1.100.000	0	0	130.655.400	144.123.000	1.100.000	0	0	145.223.000	14.567.600
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.170.500	0	0	0	3.170.500	2.937.400	0	0	0	2.937.400	(233.100)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.552.000	0	0	0	20.552.000	11.718.000	0	0	0	11.718.000	(8.834.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.076.200	1.100.000	0	0	12.176.200	4.963.700	1.100.000	0	0	6.063.700	(6.112.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000	0	0	0	16.500.000	20.310.000	0	0	0	20.310.000	3.810.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.054.700	0	0	0	15.054.700	11.830.500	0	0	0	11.830.500	(3.224.200)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.202.000	0	0	0	63.202.000	92.363.400	0	0	0	92.363.400	29.161.400
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	49.700.000	0	0	49.700.000	0	61.200.000	0	0	61.200.000	11.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	17.000.000	0	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0	17.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	32.700.000	0	0	32.700.000	0	44.200.000	0	0	44.200.000	11.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.284.900	0	0	0	122.284.900	114.024.900	0	0	0	114.024.900	(8.260.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	(1.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.047.500	0	0	0	8.047.500	8.047.500	0	0	0	8.047.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.237.400	0	0	0	112.237.400	104.977.400	0	0	0	104.977.400	(7.260.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.100.000	0	0	0	27.100.000	25.100.000	0	0	0	25.100.000	(2.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(2.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.810.000	0	0	0	30.810.000	18.740.600	0	0	0	18.740.600	(12.069.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.810.000	0	0	0	30.810.000	18.740.600	0	0	0	18.740.600	(12.069.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.040.000	0	0	0	15.040.000	9.280.000	0	0	0	9.280.000	(5.760.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	15.770.000	0	0	0	15.770.000	9.460.600	0	0	0	9.460.600	(6.309.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.446.200	0	0	0	15.446.200	9.381.600	0	0	0	9.381.600	(6.064.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.446.200	0	0	0	15.446.200	9.381.600	0	0	0	9.381.600	(6.064.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.446.200	0	0	0	15.446.200	9.381.600	0	0	0	9.381.600	(6.064.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.520.000	0	0	0	8.520.000	5.510.000	0	0	0	5.510.000	(3.010.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.520.000	0	0	0	8.520.000	5.510.000	0	0	0	5.510.000	(3.010.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	8.520.000	0	0	0	8.520.000	5.510.000	0	0	0	5.510.000	(3.010.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.600.000	0	0	0	15.600.000	12.107.000	0	0	0	12.107.000	(3.493.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.600.000	0	0	0	15.600.000	12.107.000	0	0	0	12.107.000	(3.493.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.600.000	0	0	0	15.600.000	12.107.000	0	0	0	12.107.000	(3.493.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000				Kecamatan Koto Baru	2.145.860.000	31.500.000	0	0	2.177.360.000	1.722.265.400	31.500.000	0	0	1.753.765.400	(423.594.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.111.220.000	31.500.000	0	0	2.142.720.000	1.700.465.400	31.500.000	0	0	1.731.965.400	(410.754.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.713.624.000	0	0	0	1.713.624.000	1.318.592.000	0	0	0	1.318.592.000	(395.032.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.713.624.000	0	0	0	1.713.624.000	1.318.592.000	0	0	0	1.318.592.000	(395.032.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.595.200	0	0	0	103.595.200	108.282.200	0	0	0	108.282.200	4.687.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.105.000	0	0	0	1.105.000	(695.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	0	0	0	18.000.000	11.276.000	0	0	0	11.276.000	(6.724.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	0	0	0	9.000.000	5.498.000	0	0	0	5.498.000	(3.502.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	0	0	0	13.500.000	7.782.000	0	0	0	7.782.000	(5.718.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.500.000	0	0	0	13.500.000	7.280.000	0	0	0	7.280.000	(6.220.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.795.200	0	0	0	47.795.200	75.341.200	0	0	0	75.341.200	27.546.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	31.500.000	0	0	31.500.000	0	31.500.000	0	0	31.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	11.500.000	0	0	11.500.000	0	11.500.000	0	0	11.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.000.800	0	0	0	276.000.800	255.591.200	0	0	0	255.591.200	(20.409.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.090.000	0	0	0	1.090.000	(910.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.466.000	0	0	0	8.466.000	5.426.400	0	0	0	5.426.400	(3.039.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.220.000	0	0	0	4.220.000	2.110.000	0	0	0	2.110.000	(2.110.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.314.800	0	0	0	261.314.800	246.964.800	0	0	0	246.964.800	(14.350.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.510.000	0	0	0	4.510.000	1.670.000	0	0	0	1.670.000	(2.840.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.510.000	0	0	0	4.510.000	1.670.000	0	0	0	1.670.000	(2.840.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.510.000	0	0	0	4.510.000	1.670.000	0	0	0	1.670.000	(2.840.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.510.000	0	0	0	4.510.000	1.010.000	0	0	0	1.010.000	(3.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.510.000	0	0	0	4.510.000	1.010.000	0	0	0	1.010.000	(3.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.510.000	0	0	0	4.510.000	1.010.000	0	0	0	1.010.000	(3.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.620.000	0	0	0	13.620.000	7.120.000	0	0	0	7.120.000	(6.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.620.000	0	0	0	13.620.000	7.120.000	0	0	0	7.120.000	(6.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.620.000	0	0	0	13.620.000	7.120.000	0	0	0	7.120.000	(6.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000				Kecamatan Sungai Rumbai	1.693.188.500	26.000.000	0	0	1.719.188.500	1.374.423.950	0	0	0	1.374.423.950	(344.764.550)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.671.488.500	26.000.000	0	0	1.697.488.500	1.357.923.950	0	0	0	1.357.923.950	(339.564.550)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.418.999.100	0	0	0	1.418.999.100	1.107.027.000	0	0	0	1.107.027.000	(311.972.100)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.999.100	0	0	0	1.418.999.100	1.107.027.000	0	0	0	1.107.027.000	(311.972.100)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.518.800	0	0	0	97.518.800	117.855.350	0	0	0	117.855.350	20.336.550
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.600	0	0	0	1.800.600	1.800.600	0	0	0	1.800.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.657.000	0	0	0	16.657.000	13.120.000	0	0	0	13.120.000	(3.537.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.999.200	0	0	0	8.999.200	5.049.350	0	0	0	5.049.350	(3.949.850)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	0	0	0	13.500.000	11.950.000	0	0	0	11.950.000	(1.550.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.670.000	0	0	0	8.670.000	6.050.000	0	0	0	6.050.000	(2.620.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.892.000	0	0	0	47.892.000	79.885.400	0	0	0	79.885.400	31.993.400
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	26.000.000	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	(26.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	26.000.000	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	(26.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.370.600	0	0	0	141.370.600	118.841.600	0	0	0	118.841.600	(22.529.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.590.000	0	0	0	1.590.000	1.590.000	0	0	0	1.590.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.035.000	0	0	0	12.035.000	12.035.000	0	0	0	12.035.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.440.000	0	0	0	4.440.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	(2.440.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.305.600	0	0	0	123.305.600	103.216.600	0	0	0	103.216.600	(20.089.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.600.000	0	0	0	13.600.000	14.200.000	0	0	0	14.200.000	600.000
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.600.000	0	0	0	4.600.000	5.200.000	0	0	0	5.200.000	600.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.450.000	0	0	0	4.450.000	1.850.000	0	0	0	1.850.000	(2.600.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.450.000	0	0	0	4.450.000	1.850.000	0	0	0	1.850.000	(2.600.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.250.000	0	0	0	2.250.000	0	0	0	0	0	(2.250.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.200.000	0	0	0	2.200.000	1.850.000	0	0	0	1.850.000	(350.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.150.000	0	0	0	12.150.000	11.950.000	0	0	0	11.950.000	(200.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.150.000	0	0	0	12.150.000	11.950.000	0	0	0	11.950.000	(200.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.150.000	0	0	0	12.150.000	11.950.000	0	0	0	11.950.000	(200.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.000	0	0	0	2.400.000	900.000	0	0	0	900.000	(1.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.400.000	0	0	0	2.400.000	900.000	0	0	0	900.000	(1.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.400.000	0	0	0	2.400.000	900.000	0	0	0	900.000	(1.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.700.000	0	0	0	2.700.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	(900.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.700.000	0	0	0	2.700.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	(900.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.700.000	0	0	0	2.700.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	(900.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000				Kecamatan Sembilan Koto	1.676.972.050	22.000.000	0	0	1.698.972.050	1.207.875.600	19.290.000	0	0	1.227.165.600	(471.806.450)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.667.322.050	22.000.000	0	0	1.689.322.050	1.201.395.600	19.290.000	0	0	1.220.685.600	(468.636.450)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.394.934.950	0	0	0	1.394.934.950	924.741.000	0	0	0	924.741.000	(470.193.950)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.394.934.950	0	0	0	1.394.934.950	924.741.000	0	0	0	924.741.000	(470.193.950)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.140.300	0	0	0	110.140.300	124.697.800	0	0	0	124.697.800	14.557.500

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.803.000	0	0	0	1.803.000	1.673.000	0	0	0	1.673.000	(130.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.005.000	0	0	0	18.005.000	9.866.000	0	0	0	9.866.000	(8.139.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	0	0	0	9.000.000	5.857.800	0	0	0	5.857.800	(3.142.200)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	0	0	0	15.000.000	30.824.000	0	0	0	30.824.000	15.824.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.883.300	0	0	0	14.883.300	9.689.000	0	0	0	9.689.000	(5.194.300)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.449.000	0	0	0	51.449.000	66.788.000	0	0	0	66.788.000	15.339.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	22.000.000	0	0	22.000.000	0	19.290.000	0	0	19.290.000	(2.710.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	22.000.000	0	0	22.000.000	0	19.290.000	0	0	19.290.000	(2.710.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.386.800	0	0	0	141.386.800	132.906.800	0	0	0	132.906.800	(8.480.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	(1.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.003.000	0	0	0	6.003.000	6.003.000	0	0	0	6.003.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.383.800	0	0	0	133.383.800	125.903.800	0	0	0	125.903.800	(7.480.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.860.000	0	0	0	20.860.000	19.050.000	0	0	0	19.050.000	(1.810.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.250.000	0	0	0	3.250.000	3.250.000	0	0	0	3.250.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	0	0	0	13.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	1.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.610.000	0	0	0	4.610.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	(2.810.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.090.000	0	0	0	5.090.000	5.090.000	0	0	0	5.090.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.090.000	0	0	0	5.090.000	5.090.000	0	0	0	5.090.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.090.000	0	0	0	5.090.000	5.090.000	0	0	0	5.090.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	2.760.000	0	0	0	2.760.000	510.000	0	0	0	510.000	(2.250.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						UMUM											
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.760.000	0	0	0	2.760.000	510.000	0	0	0	510.000	(2.250.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.760.000	0	0	0	2.760.000	510.000	0	0	0	510.000	(2.250.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.800.000	0	0	0	1.800.000	880.000	0	0	0	880.000	(920.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.800.000	0	0	0	1.800.000	880.000	0	0	0	880.000	(920.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.800.000	0	0	0	1.800.000	880.000	0	0	0	880.000	(920.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000				Kecamatan Timpeh	1.520.281.810	27.500.000	0	0	1.547.781.810	1.335.023.400	27.500.000	0	0	1.362.523.400	(185.258.410)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.495.381.810	27.500.000	0	0	1.522.881.810	1.331.723.400	27.500.000	0	0	1.359.223.400	(163.658.410)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.209.123.710	0	0	0	1.209.123.710	1.057.081.000	0	0	0	1.057.081.000	(152.042.710)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.209.123.710	0	0	0	1.209.123.710	1.057.081.000	0	0	0	1.057.081.000	(152.042.710)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.049.300	0	0	0	94.049.300	120.853.600	0	0	0	120.853.600	26.804.300
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.808.500	0	0	0	1.808.500	0	0	0	0	0	(1.808.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.645.600	0	0	0	22.645.600	13.021.800	0	0	0	13.021.800	(9.623.800)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.316.000	0	0	0	2.316.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	(316.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.490.000	0	0	0	13.490.000	12.450.000	0	0	0	12.450.000	(1.040.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.184.200	0	0	0	13.184.200	6.016.800	0	0	0	6.016.800	(7.167.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.605.000	0	0	0	40.605.000	87.365.000	0	0	0	87.365.000	46.760.000
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	27.500.000	0	0	27.500.000	0	27.500.000	0	0	27.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	27.500.000	0	0	27.500.000	0	27.500.000	0	0	27.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.768.800	0	0	0	167.768.800	130.788.800	0	0	0	130.788.800	(36.980.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.570.000	0	0	0	1.570.000	0	0	0	0	0	(1.570.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.875.000	0	0	0	3.875.000	3.875.000	0	0	0	3.875.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.323.800	0	0	0	162.323.800	126.913.800	0	0	0	126.913.800	(35.410.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.440.000	0	0	0	24.440.000	23.000.000	0	0	0	23.000.000	(1.440.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000	0	0	0	13.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.440.000	0	0	0	4.440.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(1.440.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.450.000	0	0	0	7.450.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000	(4.150.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.450.000	0	0	0	7.450.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000	(4.150.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.450.000	0	0	0	7.450.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000	(4.150.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.450.000	0	0	0	17.450.000	0	0	0	0	0	(17.450.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.450.000	0	0	0	17.450.000	0	0	0	0	0	(17.450.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.450.000	0	0	0	17.450.000	0	0	0	0	0	(17.450.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000					Kecamatan Koto Salak	1.495.071.900	18.200.000	0	0	1.513.271.900	1.228.133.500	0	0	0	1.228.133.500	(285.138.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.473.331.900	18.200.000	0	0	1.491.531.900	1.214.813.500	0	0	0	1.214.813.500	(276.718.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.215.141.200	0	0	0	1.215.141.200	963.379.000	0	0	0	963.379.000	(251.762.200)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.215.141.200	0	0	0	1.215.141.200	963.379.000	0	0	0	963.379.000	(251.762.200)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.385.100	0	0	0	104.385.100	112.892.900	0	0	0	112.892.900	8.507.800
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.807.000	0	0	0	1.807.000	1.873.000	0	0	0	1.873.000	66.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.100.000	0	0	0	18.100.000	14.395.000	0	0	0	14.395.000	(3.705.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.035.000	0	0	0	9.035.000	6.324.600	0	0	0	6.324.600	(2.710.400)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	0	0	0	13.500.000	12.300.000	0	0	0	12.300.000	(1.200.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.655.100	0	0	0	13.655.100	7.441.300	0	0	0	7.441.300	(6.213.800)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.288.000	0	0	0	48.288.000	70.559.000	0	0	0	70.559.000	22.271.000
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	18.200.000	0	0	18.200.000	0	0	0	0	0	(18.200.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	18.200.000	0	0	18.200.000	0	0	0	0	0	(18.200.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.975.600	0	0	0	134.975.600	121.681.600	0	0	0	121.681.600	(13.294.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	(800.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.250.000	0	0	0	7.250.000	4.640.000	0	0	0	4.640.000	(2.610.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.725.600	0	0	0	125.725.600	115.841.600	0	0	0	115.841.600	(9.884.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.830.000	0	0	0	18.830.000	16.860.000	0	0	0	16.860.000	(1.970.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.750.000	0	0	0	3.750.000	(250.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.830.000	0	0	0	4.830.000	3.110.000	0	0	0	3.110.000	(1.720.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.760.000	0	0	0	3.760.000	2.540.000	0	0	0	2.540.000	(1.220.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.760.000	0	0	0	3.760.000	2.540.000	0	0	0	2.540.000	(1.220.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.760.000	0	0	0	3.760.000	2.540.000	0	0	0	2.540.000	(1.220.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.120.000	0	0	0	9.120.000	7.200.000	0	0	0	7.200.000	(1.920.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.120.000	0	0	0	9.120.000	7.200.000	0	0	0	7.200.000	(1.920.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.120.000	0	0	0	9.120.000	7.200.000	0	0	0	7.200.000	(1.920.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.860.000	0	0	0	8.860.000	3.580.000	0	0	0	3.580.000	(5.280.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.860.000	0	0	0	8.860.000	3.580.000	0	0	0	3.580.000	(5.280.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.860.000	0	0	0	8.860.000	3.580.000	0	0	0	3.580.000	(5.280.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000				Kecamatan Asam Jujuhan	1.315.074.400	0	0	0	1.315.074.400	1.029.221.900	0	0	0	1.029.221.900	(285.852.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.275.714.400	0	0	0	1.275.714.400	1.017.981.900	0	0	0	1.017.981.900	(257.732.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	972.433.500	0	0	0	972.433.500	695.574.000	0	0	0	695.574.000	(276.859.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	972.433.500	0	0	0	972.433.500	695.574.000	0	0	0	695.574.000	(276.859.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.896.400	0	0	0	119.896.400	134.443.400	0	0	0	134.443.400	14.547.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.753.000	0	0	0	2.753.000	2.498.000	0	0	0	2.498.000	(255.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.105.000	0	0	0	18.105.000	18.368.000	0	0	0	18.368.000	263.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.001.800	0	0	0	9.001.800	7.799.600	0	0	0	7.799.600	(1.202.200)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.129.000	0	0	0	28.129.000	23.178.000	0	0	0	23.178.000	(4.951.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.510.200	0	0	0	13.510.200	6.812.600	0	0	0	6.812.600	(6.697.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.397.400	0	0	0	48.397.400	75.787.200	0	0	0	75.787.200	27.389.800
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.024.500	0	0	0	161.024.500	154.714.500	0	0	0	154.714.500	(6.310.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.740.000	0	0	0	1.740.000	(260.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.002.500	0	0	0	5.002.500	5.002.500	0	0	0	5.002.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.022.000	0	0	0	154.022.000	147.972.000	0	0	0	147.972.000	(6.050.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.360.000	0	0	0	22.360.000	33.250.000	0	0	0	33.250.000	10.890.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	0	0	0	12.500.000	27.500.000	0	0	0	27.500.000	15.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.610.000	0	0	0	4.610.000	500.000	0	0	0	500.000	(4.110.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.900.000	0	0	0	19.900.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000	(17.700.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.900.000	0	0	0	19.900.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000	(17.700.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.600.000	0	0	0	10.600.000	0	0	0	0	0	(10.600.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.300.000	0	0	0	9.300.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000	(7.100.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.040.000	0	0	0	9.040.000	9.040.000	0	0	0	9.040.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.040.000	0	0	0	9.040.000	9.040.000	0	0	0	9.040.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.040.000	0	0	0	9.040.000	9.040.000	0	0	0	9.040.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.420.000	0	0	0	10.420.000	0	0	0	0	0	(10.420.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.420.000	0	0	0	10.420.000	0	0	0	0	0	(10.420.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.420.000	0	0	0	10.420.000	0	0	0	0	0	(10.420.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Koto Besar	2.077.717.350	40.400.000	0	0	2.118.117.350	1.795.377.700	40.400.000	0	0	1.835.777.700	(282.339.650)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.048.017.050	40.400.000	0	0	2.088.417.050	1.768.677.400	40.400.000	0	0	1.809.077.400	(279.339.650)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.660.190.200	0	0	0	1.660.190.200	1.354.425.000	0	0	0	1.354.425.000	(305.765.200)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.660.190.200	0	0	0	1.660.190.200	1.354.425.000	0	0	0	1.354.425.000	(305.765.200)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.411.050	900.000	0	0	117.311.050	149.436.600	900.000	0	0	150.336.600	33.025.550
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.034.400	0	0	0	3.034.400	2.040.150	0	0	0	2.040.150	(994.250)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.752.000	900.000	0	0	14.652.000	12.073.000	900.000	0	0	12.973.000	(1.679.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.378.450	0	0	0	6.378.450	6.378.450	0	0	0	6.378.450	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.117.000	0	0	0	8.117.000	8.563.000	0	0	0	8.563.000	446.000

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.220.000	0	0	0	10.220.000	8.470.000	0	0	0	8.470.000	(1.750.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.909.200	0	0	0	74.909.200	111.912.000	0	0	0	111.912.000	37.002.800
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	39.500.000	0	0	39.500.000	0	39.500.000	0	0	39.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	39.500.000	0	0	39.500.000	0	39.500.000	0	0	39.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.571.800	0	0	0	140.571.800	133.971.800	0	0	0	133.971.800	(6.600.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.558.000	0	0	0	7.558.000	7.558.000	0	0	0	7.558.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.513.800	0	0	0	131.513.800	124.913.800	0	0	0	124.913.800	(6.600.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.844.000	0	0	0	130.844.000	130.844.000	0	0	0	130.844.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000	0	0	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0	11.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.750.000	0	0	0	3.750.000	3.750.000	0	0	0	3.750.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000	0	0	0	5.110.000	5.110.000	0	0	0	5.110.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.484.000	0	0	0	110.484.000	110.484.000	0	0	0	110.484.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.200.000	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0	0	3.200.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.200.000	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0	0	3.200.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.100.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.100.300	0	0	0	9.100.300	9.100.300	0	0	0	9.100.300	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.100.300	0	0	0	9.100.300	9.100.300	0	0	0	9.100.300	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	9.100.300	0	0	0	9.100.300	9.100.300	0	0	0	9.100.300	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Perencanaan Pembangunan di Desa											
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.790.000	0	0	0	5.790.000	4.790.000	0	0	0	4.790.000	(1.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	5.790.000	0	0	0	5.790.000	4.790.000	0	0	0	4.790.000	(1.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.790.000	0	0	0	5.790.000	4.790.000	0	0	0	4.790.000	(1.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.610.000	0	0	0	11.610.000	9.610.000	0	0	0	9.610.000	(2.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.610.000	0	0	0	11.610.000	9.610.000	0	0	0	9.610.000	(2.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.610.000	0	0	0	11.610.000	9.610.000	0	0	0	9.610.000	(2.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000				Kecamatan Padang Laweh	1.407.358.950	99.950.000	0	0	1.507.308.950	1.215.320.250	59.450.000	0	0	1.274.770.250	(232.538.700)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.377.958.950	99.950.000	0	0	1.477.908.950	1.199.160.250	59.450.000	0	0	1.258.610.250	(219.298.700)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.139.242.150	0	0	0	1.139.242.150	947.231.000	0	0	0	947.231.000	(192.011.150)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.139.242.150	0	0	0	1.139.242.150	947.231.000	0	0	0	947.231.000	(192.011.150)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.124.400	0	0	0	110.124.400	132.956.850	0	0	0	132.956.850	22.832.450
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.500	0	0	0	1.800.500	1.539.750	0	0	0	1.539.750	(260.750)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.765.000	0	0	0	18.765.000	19.157.000	0	0	0	19.157.000	392.000
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.839.000	0	0	0	9.839.000	8.298.700	0	0	0	8.298.700	(1.540.300)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	0	0	0	15.000.000	13.670.000	0	0	0	13.670.000	(1.330.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.012.100	0	0	0	15.012.100	13.380.600	0	0	0	13.380.600	(1.631.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.707.800	0	0	0	49.707.800	76.910.800	0	0	0	76.910.800	27.203.000
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	99.950.000	0	0	99.950.000	0	59.450.000	0	0	59.450.000	(40.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Operasional atau Lapangan											
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	27.950.000	0	0	27.950.000	0	27.950.000	0	0	27.950.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	52.000.000	0	0	52.000.000	0	11.500.000	0	0	11.500.000	(40.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.342.400	0	0	0	109.342.400	101.722.400	0	0	0	101.722.400	(7.620.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	(500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.595.000	0	0	0	1.595.000	1.595.000	0	0	0	1.595.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.747.400	0	0	0	105.747.400	98.627.400	0	0	0	98.627.400	(7.120.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.250.000	0	0	0	19.250.000	17.250.000	0	0	0	17.250.000	(2.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.750.000	0	0	0	4.750.000	4.750.000	0	0	0	4.750.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	0	0	0	3.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	(2.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.250.000	0	0	0	8.250.000	1.780.000	0	0	0	1.780.000	(6.470.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.250.000	0	0	0	8.250.000	1.780.000	0	0	0	1.780.000	(6.470.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.460.000	0	0	0	3.460.000	1.080.000	0	0	0	1.080.000	(2.380.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.790.000	0	0	0	4.790.000	700.000	0	0	0	700.000	(4.090.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.940.000	0	0	0	10.940.000	10.940.000	0	0	0	10.940.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.940.000	0	0	0	10.940.000	10.940.000	0	0	0	10.940.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.940.000	0	0	0	10.940.000	10.940.000	0	0	0	10.940.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.690.000	0	0	0	4.690.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	(3.490.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	4.690.000	0	0	0	4.690.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	(3.490.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	Peraturan Kepala Daerah											
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.690.000	0	0	0	4.690.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	(3.490.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.520.000	0	0	0	5.520.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	(3.280.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.520.000	0	0	0	5.520.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	(3.280.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.520.000	0	0	0	5.520.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	(3.280.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tiumang	1.740.121.650	14.000.000	0	0	1.754.121.650	1.285.791.300	5.500.000	0	0	1.291.291.300	(462.830.350)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.715.799.650	14.000.000	0	0	1.729.799.650	1.264.619.300	5.500.000	0	0	1.270.119.300	(459.680.350)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.420.044.250	0	0	0	1.420.044.250	962.213.000	0	0	0	962.213.000	(457.831.250)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.420.044.250	0	0	0	1.420.044.250	962.213.000	0	0	0	962.213.000	(457.831.250)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.223.400	0	0	0	106.223.400	120.324.300	0	0	0	120.324.300	14.100.900
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.853.500	0	0	0	1.853.500	1.853.500	0	0	0	1.853.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.530.000	0	0	0	18.530.000	18.530.000	0	0	0	18.530.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.274.200	0	0	0	10.274.200	10.274.200	0	0	0	10.274.200	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.550.000	0	0	0	14.550.000	12.290.000	0	0	0	12.290.000	(2.260.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.959.700	0	0	0	10.959.700	10.960.600	0	0	0	10.960.600	900
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.056.000	0	0	0	50.056.000	66.416.000	0	0	0	66.416.000	16.360.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0	5.500.000	0	0	5.500.000	(8.500.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0	5.500.000	0	0	5.500.000	(8.500.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.092.000	0	0	0	176.092.000	169.252.000	0	0	0	169.252.000	(6.840.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.700.000	0	0	0	8.700.000	8.700.000	0	0	0	8.700.000	0

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.392.000	0	0	0	165.392.000	158.552.000	0	0	0	158.552.000	(6.840.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.440.000	0	0	0	13.440.000	12.830.000	0	0	0	12.830.000	(610.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000	0	0	0	2.440.000	1.830.000	0	0	0	1.830.000	(610.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.072.000	0	0	0	6.072.000	5.072.000	0	0	0	5.072.000	(1.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.072.000	0	0	0	6.072.000	5.072.000	0	0	0	5.072.000	(1.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.900.000	0	0	0	1.900.000	900.000	0	0	0	900.000	(1.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.172.000	0	0	0	4.172.000	4.172.000	0	0	0	4.172.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.260.000	0	0	0	11.260.000	11.260.000	0	0	0	11.260.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11.260.000	0	0	0	11.260.000	11.260.000	0	0	0	11.260.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.260.000	0	0	0	11.260.000	11.260.000	0	0	0	11.260.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.480.000	0	0	0	3.480.000	3.480.000	0	0	0	3.480.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.480.000	0	0	0	3.480.000	3.480.000	0	0	0	3.480.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.480.000	0	0	0	3.480.000	3.480.000	0	0	0	3.480.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.510.000	0	0	0	3.510.000	1.360.000	0	0	0	1.360.000	(2.150.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.510.000	0	0	0	3.510.000	1.360.000	0	0	0	1.360.000	(2.150.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.510.000	0	0	0	3.510.000	1.360.000	0	0	0	1.360.000	(2.150.000)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
0						**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**5.381.827.580**	**0**	**0**	**0**	**5.381.827.580**	**16.652.056.380**	**0**	**0**	**0**	**16.652.056.380**	**11.270.228.800**
0	**01**					**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.381.827.580**	**0**	**0**	**0**	**5.381.827.580**	**16.652.056.380**	**0**	**0**	**0**	**16.652.056.380**	**11.270.228.800**
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.381.827.580	0	0	0	5.381.827.580	16.652.056.380	0	0	0	16.652.056.380	11.270.228.800
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.296.801.300	0	0	0	1.296.801.300	1.022.926.000	0	0	0	1.022.926.000	(273.875.300)
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	956.367.000	0	0	0	956.367.000	631.619.000	0	0	0	631.619.000	(324.748.000)
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	956.367.000	0	0	0	956.367.000	631.619.000	0	0	0	631.619.000	(324.748.000)
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.309.000	0	0	0	141.309.000	202.861.700	0	0	0	202.861.700	61.552.700
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.802.600	0	0	0	1.802.600	1.802.600	0	0	0	1.802.600	0
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.499.000	0	0	0	22.499.000	25.259.000	0	0	0	25.259.000	2.760.000
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.002.600	0	0	0	9.002.600	8.418.600	0	0	0	8.418.600	(584.000)
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.002.000	0	0	0	18.002.000	14.862.000	0	0	0	14.862.000	(3.140.000)
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000	0	0	0	18.000.000	23.225.300	0	0	0	23.225.300	5.225.300
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.002.800	0	0	0	72.002.800	129.294.200	0	0	0	129.294.200	57.291.400
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.625.300	0	0	0	179.625.300	168.945.300	0	0	0	168.945.300	(10.680.000)
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.415.100	0	0	0	15.415.100	15.415.100	0	0	0	15.415.100	0
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.720.000	0	0	0	3.720.000	2.720.000	0	0	0	2.720.000	(1.000.000)
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.490.200	0	0	0	158.490.200	148.810.200	0	0	0	148.810.200	(9.680.000)
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.500.000	0	0	0	19.500.000	19.500.000	0	0	0	19.500.000	0
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0
0	01	0.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	1.186.069.600	0	0	0	1.186.069.600	1.142.020.300	0	0	0	1.142.020.300	(44.049.300)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						KEBANGSAAN											
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.186.069.600	0	0	0	1.186.069.600	1.142.020.300	0	0	0	1.142.020.300	(44.049.300)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.174.273.200	0	0	0	1.174.273.200	1.133.156.700	0	0	0	1.133.156.700	(41.116.500)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11.796.400	0	0	0	11.796.400	8.863.600	0	0	0	8.863.600	(2.932.800)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.439.973.480	0	0	0	2.439.973.480	13.861.952.880	0	0	0	13.861.952.880	11.421.979.400
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.439.973.480	0	0	0	2.439.973.480	13.861.952.880	0	0	0	13.861.952.880	11.421.979.400
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.409.983.880	0	0	0	2.409.983.880	13.861.952.880	0	0	0	13.861.952.880	11.451.969.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29.989.600	0	0	0	29.989.600	0	0	0	0	0	(29.989.600)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	34.983.000	0	0	0	34.983.000	75.251.000	0	0	0	75.251.000	40.268.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	34.983.000	0	0	0	34.983.000	75.251.000	0	0	0	75.251.000	40.268.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14.990.000	0	0	0	14.990.000	40.650.000	0	0	0	40.650.000	25.660.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	19.993.000	0	0	0	19.993.000	34.601.000	0	0	0	34.601.000	14.608.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	424.000.200	0	0	0	424.000.200	549.906.200	0	0	0	549.906.200	125.906.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	424.000.200	0	0	0	424.000.200	549.906.200	0	0	0	549.906.200	125.906.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	424.000.200	0	0	0	424.000.200	549.906.200	0	0	0	549.906.200	125.906.000
						TOTAL	766.159.260.882	151.236.483.671	1.000.000.000	110.982.394.000	1.029.378.138.553	714.730.300.737	152.416.828.609	4.154.380.709	110.966.408.030	982.267.918.085	(47.110.220.468)

Bupati Dharmasraya

SUTAN RIESKA

LAMPIRAN V

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01				**PELAYANAN UMUM**											
01	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	253.182.439.676	107.542.080	0	0	253.289.981.756	217.016.504.674	107.542.080	0	0	217.124.046.754	(36.165.935.002)
01	02	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	112.494.096.986	1.247.385.280	0	0	113.741.482.266	96.045.271.450	1.244.044.600	0	0	97.289.316.050	(16.452.166.216)
01	03	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.447.479.800	96.400.000	0	0	9.543.879.800	7.972.841.400	77.300.000	0	0	8.050.141.400	(1.493.738.400)
01	04	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.442.475.420	29.000.000	0	0	2.471.475.420	2.332.317.840	36.000.000	0	0	2.368.317.840	(103.157.580)
01	05	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.779.728.866	29.000.000	0	0	9.808.728.866	8.774.529.014	29.000.000	0	0	8.803.529.014	(1.005.199.852)
01	06	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.772.233.300	870.500.000	0	0	4.642.733.300	3.257.076.550	864.500.000	0	0	4.121.576.550	(521.156.750)
01	07	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.054.755.400	0	0	0	4.054.755.400	3.133.269.250	0	0	0	3.133.269.250	(921.486.150)

01	08	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.549.432.350	5.000.000	0	0	3.554.432.350	3.210.684.200	5.000.000	0	0	3.215.684.200	(338.748.150)
01	09	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.282.149.850	156.600.000	0	0	4.438.749.850	3.719.107.350	73.707.440	0	0	3.792.814.790	(645.935.060)
01	10	2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.227.842.590	101.500.000	0	0	5.329.342.590	4.619.833.650	101.500.000	0	0	4.721.333.650	(608.008.940)
01	11	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.225.599.050	83.000.000	0	0	6.308.599.050	5.266.744.200	118.500.000	0	0	5.385.244.200	(923.354.850)
01	12	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.687.404.170	0	0	0	3.687.404.170	3.493.671.472	0	0	0	3.493.671.472	(193.732.698)
01	13	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.478.502.950	58.647.000	0	0	3.537.149.950	3.012.782.550	40.800.000	0	0	3.053.582.550	(483.567.400)
01	14	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.987.518.750	521.942.080	0	0	3.509.460.830	2.403.143.550	55.671.040	0	0	2.458.814.590	(1.050.646.240)
01	15	2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	149.937.000	20.000.000	0	0	169.937.000	54.558.400	20.000.000	0	0	74.558.400	(95.378.600)
01	16	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.483.053.350	0	0	0	3.483.053.350	2.913.513.850	0	0	0	2.913.513.850	(569.539.500)
01	17	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN	3.724.751.950	99.500.000	0	0	3.824.251.950	2.553.733.900	75.500.000	0	0	2.629.233.900	(1.195.018.050)

				BIDANG PERPUSTAKAAN											
01	18	2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	144.891.900	0	0	0	144.891.900	69.108.600	0	0	0	69.108.600	(75.783.300)
01	19	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.126.340.050	71.500.000	0	0	15.197.840.050	12.463.435.800	51.500.000	0	0	12.514.935.800	(2.682.904.250)
01	20	3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.198.617.450	34.500.000	0	0	4.233.117.450	3.453.740.150	18.000.000	0	0	3.471.740.150	(761.377.300)
01	21	4	01	SEKRETARIAT DAERAH	33.331.513.936	1.741.650.000	0	0	35.073.163.936	34.477.470.416	1.823.438.500	0	0	36.300.908.916	1.227.744.980
01	22	4	02	SEKRETARIAT DPRD	36.533.735.532	93.500.000	0	0	36.627.235.532	40.539.074.619	21.000.000	0	0	40.560.074.619	3.932.839.087
01	23	5	01	PERENCANAAN	4.354.365.850	102.500.000	0	0	4.456.865.850	3.660.583.350	102.500.000	0	0	3.763.083.350	(693.782.500)
01	24	5	02	KEUANGAN	12.525.730.861	163.128.000	1.000.000.000	110.982.394.000	124.671.252.861	12.137.888.700	340.700.000	4.154.380.709	110.966.408.030	127.599.377.439	2.928.124.578
01	25	5	03	KEPEGAWAIAN	5.371.819.396	22.000.000	0	0	5.393.819.396	4.343.799.771	22.000.000	0	0	4.365.799.771	(1.028.019.625)
01	26	5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.012.724.000	0	0	0	1.012.724.000	891.477.000	0	0	0	891.477.000	(121.247.000)
01	27	5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	151.174.100	0	0	0	151.174.100	528.110.300	0	0	0	528.110.300	376.936.200
01	28	6	01	INSPEKTORAT DAERAH	7.575.404.600	1.224.553.600	0	0	8.799.958.200	5.163.132.900	604.500.000	0	0	5.767.632.900	(3.032.325.300)
01	29	7	01	KECAMATAN	19.302.021.160	365.850.000	0	0	19.667.871.160	15.753.381.600	245.940.000	0	0	15.999.321.600	(3.668.549.560)
01	30	8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.381.827.580	0	0	0	5.381.827.580	16.652.056.380	0	0	0	16.652.056.380	11.270.228.800
03				**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**											
03	01	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.589.558.200	6.130.000.000	0	0	7.719.558.200	1.922.415.900	6.229.609.200	0	0	8.152.025.100	432.466.900
03	02	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	162.302.600	0	0	0	162.302.600	126.433.200	0	0	0	126.433.200	(35.869.400)
04				**EKONOMI**											
04	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	26.567.994.896	64.096.959.630	0	0	90.664.954.526	13.961.425.691	52.312.032.895	0	0	66.273.458.586	(24.391.495.940)

				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
04	02	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	273.197.400	0	0	0	273.197.400	430.697.600	0	0	0	430.697.600	157.500.200
04	03	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	470.703.600	0	0	0	470.703.600	444.561.600	0	0	0	444.561.600	(26.142.000)
04	04	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	389.465.000	147.279.660	0	0	536.744.660	379.099.400	147.279.660	0	0	526.379.060	(10.365.600)
04	05	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.410.500.600	59.500.000	0	0	1.470.000.600	1.453.345.400	33.200.000	0	0	1.486.545.400	16.544.800
04	06	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	510.369.700	0	0	0	510.369.700	476.097.900	0	0	0	476.097.900	(34.271.800)
04	07	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.090.580.000	0	0	0	1.090.580.000	1.052.671.000	0	0	0	1.052.671.000	(37.909.000)
04	08	2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.056.600	0	0	0	25.056.600	17.186.000	0	0	0	17.186.000	(7.870.600)
04	09	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	340.852.100	0	0	0	340.852.100	293.203.700	0	0	0	293.203.700	(47.648.400)
04	10	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7.433.740.750	0	0	0	7.433.740.750	4.126.761.450	0	0	0	4.126.761.450	(3.306.979.300)
04	11	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	139.998.600	0	0	0	139.998.600	110.429.300	0	0	0	110.429.300	(29.569.300)
04	12	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN	594.711.400	0	0	0	594.711.400	361.204.100	0	0	0	361.204.100	(233.507.300)

				BIDANG PERINDUSTRIAN										
05				**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**										
05	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.166.140.000	2.400.000	0	0	10.168.540.000	8.238.147.200	0	0	0	8.238.147.200	(1.930.392.800)
05	02	2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	165.000.000	0	0	0	165.000.000	116.655.200	0	0	0	116.655.200	(48.344.800)
05	03	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.389.076.600	66.770.000	0	0	1.455.846.600	1.297.241.840	120.730.000	0	0	1.417.971.840	(37.874.760)
06				**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**											
06	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.481.338.000	0	0	0	1.481.338.000	1.403.747.000	0	0	0	1.403.747.000	(77.591.000)
06	02	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.641.290.550	504.894.060	0	0	11.146.184.610	1.637.637.660	469.118.500	0	0	2.106.756.160	(9.039.428.450)
07				**KESEHATAN**											
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	75.610.003.264	39.603.851.849	0	0	115.213.855.113	85.488.115.643	37.458.295.858	0	0	122.946.411.501	7.732.556.388
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.891.002.000	0	0	0	3.891.002.000	3.887.732.000	0	0	0	3.887.732.000	(3.270.000)
08				**PARIWISATA**											
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN	250.000.000	0	0	0	250.000.000	542.218.600	5.500.000	0	0	547.718.600	297.718.600

				BIDANG PARIWISATA										
10				**PENDIDIKAN**										
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	32.347.611.812	22.609.607.432	0	0	54.957.219.244	48.104.654.906	38.415.592.676	0	0	86.520.247.582	31.563.028.338
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.537.117.372	0	0	0	3.537.117.372	4.656.287.142	53.312.760	0	0	4.709.599.902	1.172.482.530
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.173.227.165	0	0	0	6.173.227.165	10.240.715.431	118.763.500	0	0	10.359.478.931	4.186.251.766
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	374.449.000	10.770.023.000	0	0	11.144.472.000	746.341.488	10.974.749.900	0	0	11.721.091.388	576.619.388
11				**PERLINDUNGAN SOSIAL**											
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	823.829.800	0	0	0	823.829.800	1.913.984.900	0	0	0	1.913.984.900	1.090.155.100
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.330.576.000	0	0	0	1.330.576.000	1.388.446.600	0	0	0	1.388.446.600	57.870.600
				TOTAL	**766.159.260.882**	**151.236.483.671**	**1.000.000.000**	**110.982.394.000**	**1.029.378.138.553**	**714.730.300.737**	**152.416.828.609**	**4.154.380.709**	**110.966.408.030**	**982.267.918.085**	**(47.110.220.468)**

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN VI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	A SPM Bidang Pendidikan					
	Pendidikan Dasar					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Penambahan Ruang Kelas Baru	672.234.360	13.317.906.380	12.645.672.020
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.561.681.300	1.906.681.280	344.999.980
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**2.233.915.660**	**15.224.587.660**	**12.990.672.000**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.885.578.755	8.501.326.140	615.747.385
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22.000.000	1.070.000	(20.930.000)
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.543.000	101.917.900	89.374.900
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.593.000	2.643.878.800	2.618.285.800
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**7.945.714.755**	**11.248.192.840**	**3.302.478.085**
			Jumlah Pendidikan Dasar	**10.179.630.415**	**26.472.780.500**	**16.293.150.085**
	Pendidikan Kesetaraan					
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.006.800.000	1.006.800.000	0
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	10.000.000	0
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**1.016.800.000**	**1.016.800.000**	**0**
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81.850.000	231.850.000	150.000.000
			Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**81.850.000**	**231.850.000**	**150.000.000**
			Jumlah Pendidikan Kesetaraan	**1.098.650.000**	**1.248.650.000**	**150.000.000**
	Pendidikan Anak Usia Dini					
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	98.580.240	1.436.711.920	1.338.131.680
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.669.134.000	2.674.818.800	1.005.684.800
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.971.400.000	5.173.774.000	1.202.374.000

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	10.000.000	82.086.000	72.086.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30.000.000	769.800.000	739.800.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	60.100.400	417.098.400	356.998.000
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**5.839.214.640**	**10.554.289.120**	**4.715.074.480**
			Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini	**5.839.214.640**	**10.554.289.120**	**4.715.074.480**
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	**17.117.495.055**	**38.275.719.620**	**21.158.224.565**
	B SPM Bidang Kesehatan					
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.003.400	43.003.400	0
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**43.003.400**	**43.003.400**	**0**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	**43.003.400**	**43.003.400**	**0**
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60.000.000	60.000.000	0
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.000.200	39.000.200	0
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**39.000.200**	**39.000.200**	**0**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	**39.000.200**	**39.000.200**	**0**
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	164.520.000	164.520.000	0
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**164.520.000**	**164.520.000**	**0**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**164.520.000**	**164.520.000**	**0**
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	320.047.725	320.047.725	0

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**320.047.725**	**320.047.725**	**0**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			**320.047.725**	**320.047.725**	**0**
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000	50.000.000	0
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**50.000.000**	**50.000.000**	**0**
	Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			**50.000.000**	**50.000.000**	**0**
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	135.330.000	135.330.000	0
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**135.330.000**	**135.330.000**	**0**
	Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			**135.330.000**	**135.330.000**	**0**
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	56.300.000	56.300.000	0
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**56.300.000**	**56.300.000**	**0**
	Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			**56.300.000**	**56.300.000**	**0**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.995.500	43.995.500	0
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**43.995.500**	**43.995.500**	**0**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			**43.995.500**	**43.995.500**	**0**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210.878.900	191.993.600	(18.885.300)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**210.878.900**	**191.993.600**	**(18.885.300)**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			**210.878.900**	**191.993.600**	**(18.885.300)**
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	180.000.000	179.999.000	(1.000)

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**180.000.000**	**179.999.000**	**(1.000)**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**180.000.000**	**179.999.000**	**(1.000)**
	Pelayanan Kesehatan Balita					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51.800.000	51.800.000	0
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**51.800.000**	**51.800.000**	**0**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	**51.800.000**	**51.800.000**	**0**
			Jumlah SPM Bidang Kesehatan	**1.354.875.725**	**1.335.989.425**	**(18.886.300)**
	C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	244.704.000	230.104.000	(14.600.000)
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.236.634.000	1.173.643.000	(62.991.000)
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**1.481.338.000**	**1.403.747.000**	**(77.591.000)**
			Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	**1.481.338.000**	**1.403.747.000**	**(77.591.000)**
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.429.707.000	2.417.707.000	(12.000.000)
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	128.725.000	90.469.800	(38.255.200)
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	62.610.000	53.980.000	(8.630.000)
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**2.621.042.000**	**2.562.156.800**	**(58.885.200)**
			Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	**2.621.042.000**	**2.562.156.800**	**(58.885.200)**
			Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**4.102.380.000**	**3.965.903.800**	**(136.476.200)**
	D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota					
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	61.615.000	0	(61.615.000)
			Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**61.615.000**	**0**	**(61.615.000)**
			Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	**61.615.000**	**0**	**(61.615.000)**
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.808.600	16.178.600	(29.630.000)
			Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**45.808.600**	**16.178.600**	**(29.630.000)**
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	37.428.000	12.730.000	(24.698.000)
			Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**37.428.000**	**12.730.000**	**(24.698.000)**
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.895.000	0	(3.895.000)
			Jumlah Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**3.895.000**	**0**	**(3.895.000)**
			Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	**87.131.600**	**28.908.600**	**(58.223.000)**
			Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	**148.746.600**	**28.908.600**	**(119.838.000)**
	E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	273.870.000	360.542.000	86.672.000
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	77.864.000	48.144.000	(29.720.000)
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8.000.000	8.000.000	0
			Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**359.734.000**	**416.686.000**	**56.952.000**
			Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	**359.734.000**	**416.686.000**	**56.952.000**
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	36.685.000	22.826.000	(13.859.000)
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	28.565.000	352.758.000	324.193.000
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	37.981.000	25.556.000	(12.425.000)
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	154.650.000	154.259.200	(390.800)

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Penyusunan Rencana Kontijensi	1.768.100	18.100	(1.750.000)
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24.485.000	6.167.700	(18.317.300)
			Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**284.134.100**	**561.585.000**	**277.450.900**
			Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**284.134.100**	**561.585.000**	**277.450.900**
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	109.585.000	109.584.200	(800)
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.605.000	21.924.000	18.319.000
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	37.125.000	34.775.000	(2.350.000)
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	41.228.000	50.011.500	8.783.500
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.323.600	0	(14.323.600)
			Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**205.866.600**	**216.294.700**	**10.428.100**
			Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**205.866.600**	**216.294.700**	**10.428.100**
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	477.400.000	448.898.000	(28.502.000)
			Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**477.400.000**	**448.898.000**	**(28.502.000)**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	39.860.000	41.860.000	2.000.000
			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**39.860.000**	**41.860.000**	**2.000.000**
			Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	**517.260.000**	**490.758.000**	**(26.502.000)**
			Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	**1.366.994.700**	**1.685.323.700**	**318.329.000**
	F SPM Bidang Sosial					
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
			Penyediaan Permakanan	34.823.400	19.753.700	(15.069.700)
			Penyediaan Sandang	15.146.900	10.823.600	(4.323.300)
			Penyediaan Alat Bantu	24.715.000	3.500.000	(21.215.000)
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.022.200	700.000	(12.322.200)
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	24.234.400	1.296.289.900	1.272.055.500

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	22.566.900	22.566.900	0
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelaniran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.020.900	160.000	(3.860.900)
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.294.700	57.792.200	43.497.500
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	14.116.900	3.036.900	(11.080.000)
			Pemberian Layanan Kedaruratan	25.594.200	8.037.500	(17.556.700)
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.524.700	2.296.000	(14.228.700)
			Pemberian Layanan Rujukan	26.889.400	22.923.000	(3.966.400)
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			**235.949.600**	**1.447.879.700**	**1.211.930.100**
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			**235.949.600**	**1.447.879.700**	**1.211.930.100**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial					
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Makanan	104.508.800	101.008.800	(3.500.000)
			Penyediaan Sandang	15.400.000	15.400.000	0
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.936.900	5.364.400	(15.572.500)
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.700.000	4.660.000	(8.040.000)
			Pelayanan Dukungan Psikososial	8.756.900	0	(8.756.900)
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		**162.302.600**	**126.433.200**	**(35.869.400)**
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		**162.302.600**	**126.433.200**	**(35.869.400)**
		Jumlah SPM Bidang Sosial		**398.252.200**	**1.574.312.900**	**1.176.060.700**

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	652.918.682.271	685.836.063.501	635.438.138.837	(50.397.924.664)	7 %
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	303.943.998.851	308.247.201.000	303.644.294.336	(4.602.906.664)	1 %
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	295.025.330.851	253.289.981.756	217.124.046.754	(36.165.935.002)	14 %
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	8.261.880.000	54.850.179.244	86.063.207.582	31.213.028.338	57 %
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	188.881.000	25.190.000	225.190.000	200.000.000	794 %
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	467.907.000	81.850.000	231.850.000	150.000.000	183 %
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	235.013.204.103	228.955.337.379	220.235.727.551	(8.719.609.828)	4 %
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.682.585.703	113.741.482.266	97.289.316.050	(16.452.166.216)	14 %
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	126.310.000.000	113.111.209.113	120.611.166.501	7.499.957.388	7 %
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.182.000.000	1.529.998.000	1.762.597.000	232.599.000	15 %
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.084.618.400	402.648.000	402.648.000	0	0 %
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	754.000.000	170.000.000	170.000.000	0	0 %
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60.976.719.536	111.858.712.326	83.965.494.186	(27.893.218.140)	25 %
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.726.719.536	9.543.879.800	8.050.141.400	(1.493.738.400)	16 %
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.000.000.000	7.782.350.400	5.034.180.020	(2.748.170.380)	35 %
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.000.000.000	1.481.338.000	1.403.747.000	(77.591.000)	5 %
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	33.450.000	33.450.000	0	0 %
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.000.000.000	2.621.042.000	2.562.156.800	(58.885.200)	2 %
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0	24.265.564.115	11.662.087.945	(12.603.476.170)	52 %
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	35.000.000.000	58.200.716.631	49.520.087.421	(8.680.629.210)	15 %
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	250.000.000	416.323.380	57.103.200	(359.220.180)	86 %
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	500.000.000	7.514.048.000	5.642.540.400	(1.871.507.600)	25 %

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.331.609.000	13.617.660.030	4.475.074.000	(9.142.586.030)	67 %
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.774.109.000	2.471.475.420	2.368.317.840	(103.157.580)	4 %
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.017.500.000	301.444.400	171.949.500	(129.494.900)	43 %
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.015.000.000	3.801.782.500	76.740.300	(3.725.042.200)	98 %
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.325.000.000	157.821.000	157.821.000	0	0 %
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.200.000.000	6.885.136.710	1.700.245.360	(5.184.891.350)	75 %
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.117.755.767	17.528.287.066	16.955.554.114	(572.732.952)	3 %
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.829.755.767	9.808.728.866	8.803.529.014	(1.005.199.852)	10 %
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	423.000.000	476.869.000	572.701.000	95.832.000	20 %
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.865.000.000	6.692.579.200	7.055.716.100	363.136.900	5 %
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0	550.110.000	523.608.000	(26.502.000)	5 %
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.535.395.014	5.628.865.700	6.161.994.650	533.128.950	9 %
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.453.395.014	4.642.733.300	4.121.576.550	(521.156.750)	11 %
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.600.000.000	231.498.900	129.104.000	(102.394.900)	44 %
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.157.000.000	550.949.600	1.762.879.700	1.211.930.100	220 %
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.600.000.000	41.381.300	22.001.200	(19.380.100)	47 %
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	725.000.000	162.302.600	126.433.200	(35.869.400)	22 %
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	84.219.647.516	74.115.922.087	72.975.943.873	(1.139.978.214)	2 %
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.502.000.000	273.197.400	430.697.600	157.500.200	58 %
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0	69.077.000	25.763.000	(43.314.000)	63 %
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.902.000.000	40.667.200	284.379.000	243.711.800	599 %
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.374.000.000	119.186.200	104.878.600	(14.307.600)	12 %

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	226.000.000	44.267.000	15.677.000	(28.590.000)	65 %
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	972.127.350	1.330.576.000	1.388.446.600	57.870.600	4 %
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	57.127.350	730.291.000	739.729.000	9.438.000	1 %
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	525.000.000	61.759.200	57.789.200	(3.970.000)	6 %
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	262.500.000	85.525.000	66.409.600	(19.115.400)	22 %
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	75.000.000	453.000.800	524.518.800	71.518.000	16 %
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.240.000.000	4.525.459.000	3.577.830.850	(947.628.150)	21 %
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.235.000.000	4.054.755.400	3.133.269.250	(921.486.150)	23 %
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	660.000.000	219.580.400	263.608.000	44.027.600	20 %
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	125.000.000	216.097.000	159.277.000	(56.820.000)	26 %
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.000.000	35.026.200	21.676.600	(13.349.600)	38 %
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	200.000.000	165.000.000	116.655.200	(48.344.800)	29 %
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	100.000.000	72.500.000	34.586.800	(37.913.200)	52 %
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100.000.000	92.500.000	82.068.400	(10.431.600)	11 %
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.826.448.750	5.010.278.950	4.633.656.040	(376.622.910)	8 %
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.159.712.500	3.554.432.350	3.215.684.200	(338.748.150)	10 %
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	691.875.000	210.088.000	185.874.000	(24.214.000)	12 %
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.263.592.500	412.328.200	363.819.200	(48.509.000)	12 %
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	743.893.750	128.229.400	140.459.200	12.229.800	10 %
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	30.750.000	15.993.000	15.993.000	0	0 %
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	169.125.000	51.145.400	37.651.000	(13.494.400)	26 %

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1.537.500.000	9.891.800	6.284.200	(3.607.600)	36 %
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	123.000.000	16.893.000	8.735.040	(8.157.960)	48 %
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.625.000	13.285.800	10.612.600	(2.673.200)	20 %
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.081.375.000	597.992.000	648.543.600	50.551.600	8 %
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.462.444.000	4.438.749.850	3.792.814.790	(645.935.060)	15 %
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.959.944.000	4.274.566.850	3.482.774.190	(791.792.660)	19 %
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	642.650.000	91.597.000	52.157.600	(39.439.400)	43 %
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	662.450.000	29.342.000	229.731.000	200.389.000	683 %
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	197.400.000	43.244.000	28.152.000	(15.092.000)	35 %
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.295.900.400	5.329.342.590	4.721.333.650	(608.008.940)	11 %
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.959.944.000	3.580.862.190	3.094.210.850	(486.651.340)	14 %
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	128.700.000	34.413.200	30.010.000	(4.403.200)	13 %
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	841.679.325	723.834.000	733.539.000	9.705.000	1 %
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.365.577.075	990.233.200	863.573.800	(126.659.400)	13 %
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	865.600.000	3.891.002.000	3.887.732.000	(3.270.000)	0 %
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0	185.400.000	185.400.000	0	0 %
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	259.600.000	2.392.117.000	2.392.117.000	0	0 %
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	606.000.000	1.313.485.000	1.310.215.000	(3.270.000)	0 %
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	14.519.552.088	6.845.343.710	5.911.623.260	(933.720.450)	14 %
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.113.737.138	6.308.599.050	5.385.244.200	(923.354.850)	15 %
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.405.814.950	536.744.660	526.379.060	(10.365.600)	2 %

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.429.500.000	5.157.404.770	4.980.216.872	(177.187.898)	3 %
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.739.500.000	3.687.404.170	3.493.671.472	(193.732.698)	5 %
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	200.000.000	1.395.539.600	1.451.014.200	55.474.600	4 %
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	490.000.000	74.461.000	35.531.200	(38.929.800)	52 %
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.429.925.000	4.047.519.650	3.529.680.450	(517.839.200)	13 %
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.879.925.000	3.537.149.950	3.053.582.550	(483.567.400)	14 %
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	65.000.000	55.119.000	37.129.000	(17.990.000)	33 %
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	205.000.000	157.778.000	157.777.800	(200)	0 %
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	260.000.000	297.472.700	281.191.100	(16.281.600)	5 %
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.699.134.078	4.600.040.830	3.511.485.590	(1.088.555.240)	24 %
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.165.594.491	3.509.460.830	2.458.814.590	(1.050.646.240)	30 %
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	595.804.363	399.998.000	399.998.000	0	0 %
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	198.872.969	143.986.000	109.987.000	(33.999.000)	24 %
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	369.812.255	511.300.000	511.300.000	0	0 %
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0	35.296.000	31.386.000	(3.910.000)	11 %
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.286.032.900	3.537.117.372	4.709.599.902	1.172.482.530	33 %
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	200.856.500	460.006.000	460.006.000	0	0 %
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.010.176.400	3.027.104.372	3.974.465.902	947.361.530	31 %
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000	50.007.000	275.128.000	225.121.000	450 %
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	650.000.000	169.937.000	74.558.400	(95.378.600)	56 %
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	650.000.000	169.937.000	74.558.400	(95.378.600)	56 %
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.000.000	25.056.600	17.186.000	(7.870.600)	31 %

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.000.000	25.056.600	17.186.000	(7.870.600)	31 %
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.343.782.950	9.656.280.515	13.272.992.781	3.616.712.266	37 %
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.879.060.350	3.483.053.350	2.913.513.850	(569.539.500)	16 %
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.879.060.350	4.555.562.165	6.924.167.275	2.368.605.110	52 %
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	496.939.750	1.541.548.200	3.359.194.856	1.817.646.656	118 %
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	88.722.500	76.116.800	76.116.800	0	0 %
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.737.200.000	14.968.723.950	14.350.325.288	(618.398.662)	4 %
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.049.700.000	3.824.251.950	2.629.233.900	(1.195.018.050)	31 %
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	600.000.000	11.144.472.000	11.721.091.388	576.619.388	5 %
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	660.000.000	144.891.900	69.108.600	(75.783.300)	52 %
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	385.000.000	144.891.900	69.108.600	(75.783.300)	52 %
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	48.252.099.700	28.190.260.350	21.425.993.100	(6.764.267.250)	24 %
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.160.000.000	340.852.100	293.203.700	(47.648.400)	14 %
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.825.000.000	268.606.700	246.826.900	(21.779.800)	8 %
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.000.000	27.049.000	23.403.200	(3.645.800)	13 %
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	165.000.000	45.196.400	22.973.600	(22.222.800)	49 %
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	449.711.500	250.000.000	547.718.600	297.718.600	119 %
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	288.476.500	67.962.000	57.097.000	(10.865.000)	16 %
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	106.235.000	145.832.000	147.970.000	2.138.000	1 %
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	55.000.000	36.206.000	342.651.600	306.445.600	846 %
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	28.749.038.200	22.631.580.800	16.641.697.250	(5.989.883.550)	26 %
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.799.285.600	15.197.840.050	12.514.935.800	(2.682.904.250)	18 %
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.138.184.400	2.090.451.650	1.375.011.550	(715.440.100)	34 %
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.134.953.100	3.776.039.100	1.251.132.000	(2.524.907.100)	67 %

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	859.972.500	850.290.500	(9.682.000)	1 %
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	70.000	15.200.000	3.260.000	(11.940.000)	79 %
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	619.078.900	692.077.500	647.067.400	(45.010.100)	7 %
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.495.000.000	139.998.600	110.429.300	(29.569.300)	21 %
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	8.055.000.000	27.738.800	26.985.500	(753.300)	3 %
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	180.000.000	17.150.600	14.611.500	(2.539.100)	15 %
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	260.000.000	95.109.200	68.832.300	(26.276.900)	28 %
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.520.000.000	594.711.400	361.204.100	(233.507.300)	39 %
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.000.000.000	584.270.000	351.707.700	(232.562.300)	40 %
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	100.000.000	10.441.400	9.496.400	(945.000)	9 %
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.878.350.000	4.233.117.450	3.471.740.150	(761.377.300)	18 %
3	32	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.878.350.000	4.233.117.450	3.471.740.150	(761.377.300)	18 %
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	111.971.501.929	71.700.399.468	76.860.983.535	5.160.584.067	7 %
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	69.978.801.974	35.073.163.936	36.300.908.916	1.227.744.980	4 %
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.494.326.994	27.276.197.136	28.082.039.616	805.842.480	3 %
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.005.244.800	7.013.399.100	7.170.111.400	156.712.300	2 %
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	23.479.230.180	783.567.700	1.048.757.900	265.190.200	34 %
4	02		SEKRETARIAT DPRD	41.992.699.955	36.627.235.532	40.560.074.619	3.932.839.087	11 %
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.479.230.180	18.641.157.032	16.821.752.019	(1.819.405.013)	10 %
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.513.469.775	17.986.078.500	23.738.322.600	5.752.244.100	32 %
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	171.177.122.826	135.685.836.207	137.147.847.860	1.462.011.653	1 %
5	01		PERENCANAAN	5.849.530.389	4.456.865.850	3.763.083.350	(693.782.500)	16 %
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.329.852.708	3.312.089.750	2.755.121.350	(556.968.400)	17 %
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	943.500.000	588.102.200	607.025.300	18.923.100	3 %

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	576.177.681	556.673.900	400.936.700	(155.737.200)	28 %
5	02		KEUANGAN	156.431.520.562	124.671.252.861	127.599.377.439	2.928.124.578	2 %
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.589.270.562	7.539.060.661	7.343.317.700	(195.742.961)	3 %
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	113.739.500.000	115.958.136.600	119.141.725.939	3.183.589.339	3 %
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.113.000.000	494.329.000	355.046.000	(139.283.000)	28 %
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.989.750.000	679.726.600	759.287.800	79.561.200	12 %
5	03		KEPEGAWAIAN	7.465.941.875	5.393.819.396	4.365.799.771	(1.028.019.625)	19 %
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.988.941.875	4.192.920.396	3.282.590.346	(910.330.050)	22 %
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.477.000.000	1.200.899.000	1.083.209.425	(117.689.575)	10 %
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.405.130.000	1.012.724.000	891.477.000	(121.247.000)	12 %
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.405.130.000	1.012.724.000	891.477.000	(121.247.000)	12 %
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.000.000	151.174.100	528.110.300	376.936.200	249 %
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	25.000.000	151.174.100	528.110.300	376.936.200	249 %
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.268.708.852	8.799.958.200	5.767.632.900	(3.032.325.300)	34 %
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	8.268.708.852	8.799.958.200	5.767.632.900	(3.032.325.300)	34 %
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.837.598.852	7.396.858.200	4.600.263.100	(2.796.595.100)	38 %
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.016.826.000	712.887.600	665.799.600	(47.088.000)	7 %
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	414.284.000	690.212.400	501.570.200	(188.642.200)	27 %
7			UNSUR KEWILAYAHAN	12.833.218.204	19.667.871.160	15.999.321.600	(3.668.549.560)	19 %
7	01		KECAMATAN	12.833.218.204	19.667.871.160	15.999.321.600	(3.668.549.560)	19 %
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.200.218.204	19.329.462.660	15.804.520.100	(3.524.942.560)	18 %
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.250.000.000	88.252.000	37.052.600	(51.199.400)	58 %
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.100.000.000	113.676.500	97.451.900	(16.224.600)	14 %
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.320.000.000	34.850.000	17.400.000	(17.450.000)	50 %

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	968.000.000	101.630.000	42.897.000	(58.733.000)	58 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.825.326.680	5.381.827.580	16.652.056.380	11.270.228.800	209 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.825.326.680	5.381.827.580	16.652.056.380	11.270.228.800	209 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.740.576.000	1.296.801.300	1.022.926.000	(273.875.300)	21 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	401.500.000	1.186.069.600	1.142.020.300	(44.049.300)	4 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.043.875.680	2.439.573.480	13.861.952.880	11.421.979.400	468 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	143.000.000	34.583.000	75.251.000	40.268.000	115 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	440.000.000	424.600.200	549.906.200	125.906.000	30 %

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan	333.351.958.182	328.391.280.193	303.644.294.336
1.01.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	333.351.958.182	328.391.280.193	303.644.294.336
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	333.351.958.182	328.391.280.193	303.644.294.336
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	247.225.333.283	241.842.695.354	217.124.046.754
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	240.282.476.603	235.024.424.374	211.563.531.274
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	240.282.476.603	235.024.424.374	211.563.531.274
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.939.000	212.403.300	212.403.300
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000	5.991.000	5.991.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.040.000	39.335.000	39.335.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.481.400	8.994.400	8.994.400
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	19.000.000	19.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.839.800	45.708.500	45.708.500
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.377.800	93.374.400	93.374.400
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.537.875.600	6.455.825.600	5.198.070.100
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	2.000.000	2.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000	143.000.000	143.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.020.000	5.120.000	5.120.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.378.855.600	6.305.705.600	5.047.950.100
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.042.080	150.042.080	150.042.080
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.500.000	42.500.000	42.500.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.542.080	107.542.080	107.542.080
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	85.669.584.899	86.091.544.839	86.063.207.582
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.545.711.360	39.510.908.243	40.441.393.059
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	13.317.906.380	13.317.906.380	13.317.906.380
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.906.681.280	1.906.681.280	1.906.681.280
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	167.132.700	167.132.700	167.132.700
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	16.506.000	670.000	670.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	21.490.000	2.462.000	2.462.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15.980.000	9.934.000	9.934.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.100.015.000	24.106.121.883	25.036.606.699
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.988.812.279	34.999.239.736	34.040.725.403
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.881.590.039	12.881.590.039	12.881.590.040
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.501.326.140	8.501.326.140	8.501.326.140
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	18.314.400	3.170.000	3.170.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	21.500.000	1.070.000	1.070.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	101.917.900	101.917.900	101.917.900
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.643.878.800	2.643.878.800	2.643.878.800
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.820.285.000	10.866.286.857	9.907.772.523
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.108.261.260	10.554.596.860	10.554.289.120
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.436.711.920	1.436.711.920	1.436.711.920

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.674.280.340	2.675.126.540	2.674.818.800
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	61.920.600	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.666.374.000	5.173.774.000	5.173.774.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	82.086.000	82.086.000	82.086.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	769.800.000	769.800.000	769.800.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	417.098.400	417.098.400	417.098.400
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.026.800.000	1.026.800.000	1.026.800.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.006.800.000	1.006.800.000	1.006.800.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	225.190.000	225.190.000	225.190.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	225.190.000	225.190.000	225.190.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	225.190.000	225.190.000	225.190.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	231.850.000	231.850.000	231.850.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	231.850.000	231.850.000	231.850.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	231.850.000	231.850.000	231.850.000
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	116.698.008.836	119.721.709.325	111.434.020.866

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	116.698.008.836	119.721.709.325	111.434.020.866
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	116.698.008.836	119.721.709.325	111.434.020.866
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.896.577.536	83.771.916.275	74.372.803.416
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.385.200	46.247.000	46.247.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.385.200	46.247.000	46.247.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.950.074.300	60.903.101.975	51.629.232.728
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.866.180.500	60.882.103.375	51.608.234.128
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.701.200	14.406.000	14.406.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.396.000	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.796.600	6.592.600	6.592.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.837.600	18.448.900	18.448.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	19.418.800	11.768.600	11.768.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	11.022.800	6.680.300	6.680.300
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.396.000	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.992.800	48.069.800	48.069.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.600.000	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.247.200	6.337.900	6.337.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.366.500	4.266.200	4.266.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.013.400	27.598.600	27.598.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.011.000	8.117.100	8.117.100

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.754.700	1.750.000	1.750.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.592.900	247.523.500	247.523.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.190.500	4.190.500	4.190.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	34.479.000	34.479.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.480.000	13.370.500	13.370.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.022.000	10.537.000	10.537.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.905.000	34.375.000	34.375.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.995.400	150.571.500	150.571.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.498.146.500	3.372.417.200	3.247.173.588
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.998.900	84.949.000	84.949.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.600.000	10.600.000	10.600.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.370.547.600	3.272.868.200	3.147.624.588
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.500.000	52.500.000	52.500.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	12.500.000	12.500.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	16.955.048.236	19.083.607.900	19.083.607.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16.955.048.236	19.083.607.900	19.083.607.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	33.466.186.300	33.614.548.050	34.725.972.450

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.936.893.800	5.933.845.500	5.933.845.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.001.000	50.001.000	50.001.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	494.985.400	491.945.100	491.945.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.587.986.000	1.587.986.000	1.587.986.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.446.173.000	1.446.173.000	1.446.173.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.275.094.000	2.275.094.000	2.275.094.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	82.654.400	82.646.400	82.646.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.439.868.100	27.626.287.750	28.737.712.150
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.995.500	43.995.500	43.995.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210.878.900	191.993.600	191.993.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	180.000.000	179.999.000	179.999.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51.800.000	51.800.000	51.800.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.003.400	43.003.400	43.003.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.000.200	39.000.200	39.000.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	164.520.000	164.520.000	164.520.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	320.047.725	320.047.725	320.047.725
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	135.330.000	135.330.000	135.330.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	56.300.000	56.300.000	56.300.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	75.759.300	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.210.000	28.210.000	28.210.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	387.947.000	386.397.000	386.397.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56.060.000	56.060.000	56.060.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	351.776.000	351.776.000	351.776.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.170.000	87.170.000	87.170.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.488.023.000	9.476.228.400	10.624.852.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	709.800.000	747.000.000	709.800.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	13.946.649.800	13.946.617.800	13.946.617.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	305.509.000	262.750.850	262.750.850
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	280.515.000	580.515.000	580.515.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	82.840.000	82.840.000	82.840.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	61.100.000	61.100.000	61.100.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	223.633.275	223.633.275	223.633.275
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	89.424.400	54.414.800	54.414.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	89.424.400	54.414.800	54.414.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.762.597.000	1.762.597.000	1.762.597.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	271.804.000	271.804.000	271.804.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	271.804.000	271.804.000	271.804.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.490.793.000	1.490.793.000	1.490.793.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.490.793.000	1.490.793.000	1.490.793.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	402.648.000	402.648.000	402.648.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.690.000	83.690.000	83.690.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.690.000	83.690.000	83.690.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	318.958.000	318.958.000	318.958.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	318.958.000	318.958.000	318.958.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	170.000.000	170.000.000	170.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	170.000.000	170.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	170.000.000	170.000.000	170.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000						Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	106.662.622.699	113.887.239.926	108.801.706.685

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	106.662.622.699	113.887.239.926	108.801.706.685
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	106.662.622.699	113.887.239.926	108.801.706.685
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.635.927.850	28.002.045.875	22.916.512.634
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.635.927.850	28.002.045.875	22.916.512.634
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.635.927.850	28.002.045.875	22.916.512.634
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.026.694.849	85.885.194.051	85.885.194.051
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.026.694.849	33.026.694.849	33.026.694.849
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	14.128.830.849	14.128.830.849	14.128.830.849
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	449.440.000	449.440.000	449.440.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.448.424.000	18.448.424.000	18.448.424.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000.000	52.858.499.202	52.858.499.202
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	45.000.000.000	52.858.499.202	52.858.499.202
1.03.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	85.674.009.349	84.942.904.978	83.965.494.186
1.03.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	85.674.009.349	84.942.904.978	83.965.494.186
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	85.674.009.349	84.942.904.978	83.965.494.186
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.214.724.100	8.905.643.650	8.050.141.400
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.711.000	16.711.000	16.711.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.711.000	16.711.000	16.711.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.718.532.700	4.660.144.250	3.950.372.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.718.532.700	4.660.144.250	3.950.372.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.967.500	288.239.500	310.239.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.498.000	4.498.000	4.498.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.635.000	35.545.000	57.545.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.920.500	9.920.500	9.920.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.050.000	18.000.000	18.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.000.000	19.000.000	19.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.864.000	201.276.000	201.276.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.231.000	76.015.000	57.115.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.231.000	76.015.000	57.115.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.887.303.900	2.887.303.900	2.738.473.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.998.300	549.998.300	549.998.300
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.334.305.600	2.334.305.600	2.185.475.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.160.978.000	977.230.000	977.230.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.560.000	444.560.000	444.560.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	716.418.000	532.670.000	532.670.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.063.018.000	5.034.184.020	5.034.180.020
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.635.137.000	1.606.303.020	1.606.303.020
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	32.424.900	23.001.670	23.001.670
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.602.712.100	1.583.301.350	1.583.301.350

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.427.881.000	3.427.881.000	3.427.877.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.229.073.000	2.229.073.000	2.229.073.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.198.808.000	1.198.808.000	1.198.804.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.462.738.000	1.403.747.000	1.403.747.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.462.738.000	1.403.747.000	1.403.747.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	230.104.000	230.104.000	230.104.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.232.634.000	1.173.643.000	1.173.643.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	33.450.000	33.450.000	33.450.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	33.450.000	33.450.000	33.450.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	33.450.000	33.450.000	33.450.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.598.892.000	2.562.156.800	2.562.156.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.598.892.000	2.562.156.800	2.562.156.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.424.707.000	2.417.707.000	2.417.707.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	111.575.000	90.469.800	90.469.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	62.610.000	53.980.000	53.980.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.844.742.280	12.173.424.145	11.662.087.945
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian	10.844.742.280	12.173.424.145	11.662.087.945

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	476.204.000	308.070.100	308.570.100
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	128.273.000	100.000.000	100.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10.240.265.280	11.765.354.045	11.253.517.845
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	49.149.784.883	49.149.554.883	49.520.087.421
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	49.149.784.883	49.149.554.883	49.520.087.421
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	41.962.253.383	41.637.253.383	41.821.005.921
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	1.551.864.000	1.544.564.000	1.544.564.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	4.471.362.500	4.652.562.500	4.914.362.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	1.164.305.000	1.315.175.000	1.240.155.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	272.285.886	38.204.080	57.103.200
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	272.285.886	38.204.080	57.103.200
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	272.285.886	38.204.080	57.103.200
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7.034.374.200	5.642.540.400	5.642.540.400
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.534.374.200	142.540.400	142.540.400
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.534.374.200	142.540.400	142.540.400
1.04.2.10.0.00.01.0000						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.648.954.838	4.886.393.685	4.591.729.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.489.144.838	4.769.738.485	4.475.074.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.489.144.838	4.769.738.485	4.475.074.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.469.878.848	2.642.234.225	2.368.317.840
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.657.517.700	1.737.730.625	1.463.874.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.657.517.700	1.737.730.625	1.463.874.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.749.900	295.178.300	295.178.300
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.096.000	5.685.000	5.685.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.569.000	47.569.000	47.569.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.496.000	15.837.200	15.837.200
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.980.000	39.980.000	39.980.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.609.900	35.109.900	35.109.900
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.999.000	150.997.200	150.997.200
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.000.000	36.000.000	36.000.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	7.000.000	7.000.000	7.000.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	29.000.000	29.000.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.574.100	438.707.800	417.917.800
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.000.000	3.000.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.866.300	0	0
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.707.800	435.707.800	414.917.800
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.037.148	134.617.500	155.347.740
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.590.000	7.270.000	7.270.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.750.000	38.750.000	38.750.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000	6.100.000	6.100.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.597.148	82.497.500	103.227.740
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	280.049.100	171.650.300	171.949.500
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	34.746.000	15.878.600	16.178.600
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	34.746.000	15.878.600	16.178.600
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32.388.000	12.730.000	12.730.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	32.388.000	12.730.000	12.730.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	61.615.000	0	0
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	61.615.000	0	0
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.895.000	0	0
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.895.000	0	0
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	147.405.100	143.041.700	143.040.900
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	147.405.100	143.041.700	143.040.900
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.826.486.750	77.054.300	76.740.300
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	27.856.000	24.946.000	24.946.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	27.856.000	24.946.000	24.946.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	86.139.800	51.946.800	51.632.800
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	55.760.300	35.626.600	35.312.600
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	30.379.500	16.320.200	16.320.200
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.712.490.950	161.500	161.500
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1.712.490.950	161.500	161.500
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	157.821.000	157.821.000	157.821.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	157.821.000	157.821.000	157.821.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	157.821.000	157.821.000	157.821.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.754.909.140	1.720.978.660	1.700.245.360
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.754.909.140	1.720.978.660	1.700.245.360
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.754.909.140	1.720.978.660	1.700.245.360
1.04.2.10.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	159.810.000	116.655.200	116.655.200
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	159.810.000	116.655.200	116.655.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	70.460.000	39.746.800	34.586.800
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.460.000	39.746.800	34.586.800
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	70.460.000	39.746.800	34.586.800
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	89.350.000	76.908.400	82.068.400
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	89.350.000	76.908.400	82.068.400
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	89.350.000	76.908.400	82.068.400
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.860.876.666	8.970.601.621	8.203.885.164
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.860.876.666	8.970.601.621	8.203.885.164
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.860.876.666	8.970.601.621	8.203.885.164
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.858.949.666	7.878.494.621	7.107.576.164
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.442.715.870	3.310.457.625	2.865.569.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.442.715.870	3.310.457.625	2.865.569.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.638.100	241.178.300	241.178.300
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.452.000	5.452.000	5.452.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.948.000	30.048.000	30.048.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.971.400	13.972.400	13.972.400
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	27.000.000	27.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.210.500	27.488.700	27.488.700
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	68.056.200	137.217.200	137.217.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Konsultasi SKPD			
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.106.544.696	4.106.544.696	3.780.514.864
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.551.096	37.551.096	37.550.464
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.064.993.600	4.064.993.600	3.738.964.400
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.051.000	220.314.000	220.314.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.250.000	12.250.000	12.250.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.531.000	200.234.000	200.234.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.270.000	7.830.000	7.830.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	464.269.000	568.499.000	572.701.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.734.000	412.484.000	416.686.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	273.870.000	356.340.000	360.542.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	68.864.000	48.144.000	48.144.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	113.535.000	156.015.000	156.015.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.967.000	12.567.000	12.567.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	104.568.000	143.448.000	143.448.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	537.658.000	523.608.000	523.608.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	477.130.000	448.898.000	448.898.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	477.130.000	448.898.000	448.898.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	8.450.000	11.490.000	11.490.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	8.450.000	11.490.000	11.490.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	12.858.000	21.360.000	21.360.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12.858.000	21.360.000	21.360.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	39.220.000	41.860.000	41.860.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	39.220.000	41.860.000	41.860.000
1.05.0.00.0.00.02.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.943.117.500	8.852.363.575	8.751.668.950
1.05.0.00.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.943.117.500	8.852.363.575	8.751.668.950
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.943.117.500	8.852.363.575	8.751.668.950
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.807.966.900	1.821.657.475	1.695.952.850
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	861.528.700	838.578.725	733.787.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	861.528.700	838.578.725	733.787.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.027.000	263.156.850	259.154.250
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.577.000	2.577.000	2.577.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.352.000	77.100.450	77.886.450
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.520.000	37.240.000	36.910.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.496.100	29.481.100	29.491.600
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.081.900	116.758.300	112.289.200
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.051.200	569.561.900	552.651.600
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.999.600	17.999.600	18.190.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000	7.500.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.051.600	548.562.300	526.961.600
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.360.000	150.360.000	150.360.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.360.000	90.360.000	90.360.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.135.150.600	7.030.706.100	7.055.716.100
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	52.475.000	21.364.400	27.364.400
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	52.475.000	21.364.400	27.364.400
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6.840.063.100	6.812.057.000	6.812.057.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	22.826.000	22.826.000	22.826.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	352.640.000	352.758.000	352.758.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	33.222.000	25.556.000	25.556.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	154.650.000	154.259.200	154.259.200
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	6.250.472.000	6.250.472.000	6.250.472.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	1.768.100	18.100	18.100
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24.485.000	6.167.700	6.167.700
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	199.782.000	197.284.700	216.294.700
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	109.584.200	109.584.200	109.584.200
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.605.000	2.000.000	21.924.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	37.121.200	37.240.000	34.775.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	39.228.000	48.460.500	50.011.500
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10.243.600	0	0
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	42.830.500	0	0
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	18.651.000	0	0
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	24.179.500	0	0
1.06.2.08.2.14.01.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.209.156.500	11.993.440.198	11.438.173.250
1.06.2.08.2.14.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.893.394.500	6.717.261.598	6.161.994.650
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.893.394.500	6.717.261.598	6.161.994.650
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.642.733.300	4.677.683.498	4.121.576.550
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.517.466.300	2.503.643.648	1.988.353.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.517.466.300	2.503.643.648	1.988.353.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.460.300	277.932.300	277.932.300

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.997.000	55.887.000	55.887.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.390.600	16.300.600	16.300.600
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	30.000.000	30.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.069.900	39.279.900	39.279.900
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.002.800	127.464.800	127.464.800
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	870.500.000	864.500.000	864.500.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	820.000.000	820.000.000	820.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	6.000.000	0	0
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.500.000	44.500.000	44.500.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	882.266.700	870.497.550	829.681.250
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.392.960	64.903.750	64.903.750
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.873.800	801.593.800	760.777.500
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.040.000	161.110.000	161.110.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.500.000	31.500.000	31.500.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.100.000	105.000.000	105.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.440.000	4.610.000	4.610.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	219.499.800	129.104.000	129.104.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	219.499.800	129.104.000	129.104.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	179.063.000	101.768.500	101.768.500
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40.436.800	27.335.500	27.335.500
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.839.483.500	1.762.039.700	1.762.879.700
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.524.483.500	1.447.039.700	1.447.879.700
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	25.821.800	19.753.700	19.753.700
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	14.146.900	10.823.600	10.823.600
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	24.715.000	3.500.000	3.500.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.006.700	700.000	700.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.296.289.900	1.296.289.900	1.296.289.900
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	22.566.900	22.566.900	22.566.900
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.020.900	160.000	160.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	57.792.200	57.792.200	57.792.200
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11.116.900	3.036.900	3.036.900
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	19.592.200	8.037.500	8.037.500
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12.524.700	1.456.000	2.296.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	26.889.400	22.923.000	22.923.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	315.000.000	315.000.000	315.000.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	315.000.000	315.000.000	315.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	41.381.300	22.001.200	22.001.200
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	41.381.300	22.001.200	22.001.200
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	41.381.300	22.001.200	22.001.200
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	150.296.600	126.433.200	126.433.200
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	150.296.600	126.433.200	126.433.200
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	104.508.800	101.008.800	101.008.800
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	15.400.000	15.400.000	15.400.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	15.934.900	5.364.400	5.364.400
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	7.696.000	4.660.000	4.660.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.756.900	0	0
1.06.2.08.2.14.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.315.762.000	5.276.178.600	5.276.178.600
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.424.760.000	1.388.446.600	1.388.446.600
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	747.385.000	739.729.000	739.729.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	37.615.000	29.959.000	29.959.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	37.615.000	29.959.000	29.959.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	709.770.000	709.770.000	709.770.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan	709.770.000	709.770.000	709.770.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	61.759.200	57.789.200	57.789.200
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	61.759.200	57.789.200	57.789.200
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.373.000	5.403.000	5.403.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	52.386.200	52.386.200	52.386.200
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	85.525.000	66.409.600	66.409.600
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	85.525.000	66.409.600	66.409.600
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.525.000	66.409.600	66.409.600
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	530.090.800	524.518.800	524.518.800
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	224.852.000	224.852.000	224.852.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	115.152.000	115.152.000	115.152.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	109.700.000	109.700.000	109.700.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.642.800	225.070.800	225.070.800
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	28.525.000	22.953.000	22.953.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	202.117.800	202.117.800	202.117.800
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000	74.596.000	74.596.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000	74.596.000	74.596.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.891.002.000	3.887.732.000	3.887.732.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	185.400.000	185.400.000	185.400.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	185.400.000	185.400.000	185.400.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	64.200.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	55.200.000	55.200.000	55.200.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	66.000.000	66.000.000	66.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.392.117.000	2.392.117.000	2.392.117.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	982.650.000	982.650.000	982.650.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	143.000.000	143.000.000	143.000.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	529.650.000	529.650.000	529.650.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	132.000.000	132.000.000	132.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	28.000.000	28.000.000	28.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	104.000.000	104.000.000	104.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	849.967.000	849.967.000	849.967.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.700.000	20.700.000	20.700.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	815.167.000	815.167.000	815.167.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000	14.100.000	14.100.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	427.500.000	427.500.000	427.500.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	418.500.000	418.500.000	418.500.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.313.485.000	1.310.215.000	1.310.215.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.313.485.000	1.310.215.000	1.310.215.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	360.000.000	360.000.000	360.000.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	39.985.000	36.715.000	36.715.000
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	913.500.000	913.500.000	913.500.000
2.09.3.25.0.00.01.0000						Dinas Pangan dan Perikanan	4.876.338.900	4.210.896.825	3.871.034.550
2.09.3.25.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.555.517.600	3.922.465.125	3.577.830.850
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.555.517.600	3.922.465.125	3.577.830.850
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.100.325.400	3.507.890.525	3.133.269.250
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.990.594.350	2.406.645.625	2.019.405.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.990.594.350	2.406.645.625	2.019.405.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.745.600	288.723.250	338.963.050
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.642.500	1.970.500	1.970.500
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.155.000	70.206.000	70.206.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.173.700	6.204.950	6.204.950
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.018.000	28.620.000	28.620.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.720.400	17.637.800	17.653.400
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.036.000	164.084.000	214.308.200
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.050.450	733.306.650	695.686.200
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.525.000	2.280.000	2.280.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.923.650	49.424.850	49.424.400

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	681.601.800	681.601.800	643.981.800
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.935.000	79.215.000	79.215.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.775.000	22.775.000	22.775.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000	51.000.000	51.000.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.160.000	5.440.000	5.440.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	0	0
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	206.063.000	178.621.000	263.608.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	51.270.600	30.790.400	60.777.400
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25.889.600	19.487.600	19.487.600
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	25.381.000	11.302.800	41.289.800
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	0	55.000.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	55.000.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	154.792.400	147.830.600	147.830.600
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	7.403.000	6.349.800	6.349.800
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	147.389.400	141.480.800	141.480.800
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	216.097.000	214.277.000	159.277.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	216.097.000	214.277.000	159.277.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.097.000	214.277.000	159.277.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	33.032.200	21.676.600	21.676.600
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	33.032.200	21.676.600	21.676.600
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	33.032.200	21.676.600	21.676.600
2.09.3.25.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	320.821.300	288.431.700	293.203.700
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	320.821.300	288.431.700	293.203.700
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	259.584.100	242.054.900	246.826.900
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	259.584.100	242.054.900	246.826.900
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.325.600	74.260.000	74.260.000
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.258.500	167.794.900	172.566.900
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.049.000	23.403.200	23.403.200
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	25.049.000	23.403.200	23.403.200
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	25.049.000	23.403.200	23.403.200
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	36.188.200	22.973.600	22.973.600
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	36.188.200	22.973.600	22.973.600

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.188.200	22.973.600	22.973.600
2.11.0.00.0.00.01.0000						Dinas Lingkungan Hidup	4.938.738.450	4.905.503.500	4.633.656.040
2.11.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.938.738.450	4.905.503.500	4.633.656.040
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.938.738.450	4.905.503.500	4.633.656.040
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.527.407.050	3.516.761.100	3.215.684.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.177.189.900	2.094.472.900	1.786.730.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.177.189.900	2.094.472.900	1.786.730.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.333.100	225.783.500	272.427.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.601.800	3.372.800	3.372.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.298.000	37.578.000	39.148.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.499.700	13.654.200	13.654.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.003.000	24.241.000	31.833.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.954.200	18.857.900	18.857.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.976.400	128.079.600	165.561.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.121.534.050	1.133.154.700	1.093.176.700
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	6.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.876.650	55.877.300	55.877.300
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.050.000	6.050.000	10.320.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.065.607.400	1.067.227.400	1.020.979.400

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.350.000	58.350.000	58.350.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	16.500.000	16.500.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.850.000	41.850.000	41.850.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	205.088.000	169.910.000	185.874.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	23.663.200	16.612.000	16.612.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	23.663.200	16.612.000	16.612.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	181.424.800	153.298.000	169.262.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	181.424.800	153.298.000	169.262.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	388.819.600	363.818.800	363.819.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	363.806.800	338.806.000	338.806.400
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	313.560.000	288.560.000	288.560.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.246.800	50.246.000	50.246.400
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25.012.800	25.012.800	25.012.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.012.800	25.012.800	25.012.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	123.222.800	127.463.800	140.459.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	123.222.800	127.463.800	140.459.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	123.222.800	127.463.800	140.459.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.993.000	15.993.000	15.993.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	15.993.000	15.993.000	15.993.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.993.000	15.993.000	15.993.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	42.145.400	37.651.000	37.651.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.145.400	37.651.000	37.651.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	19.675.200	16.537.200	16.537.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.470.200	21.113.800	21.113.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	8.891.800	6.284.200	6.284.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	8.891.800	6.284.200	6.284.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	8.891.800	6.284.200	6.284.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	15.893.000	8.465.400	8.735.040
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.893.000	8.465.400	8.735.040
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15.893.000	8.465.400	8.735.040
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13.285.800	10.612.600	10.612.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	13.285.800	10.612.600	10.612.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	13.285.800	10.612.600	10.612.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	597.992.000	648.543.600	648.543.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	597.992.000	648.543.600	648.543.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	565.189.000	615.740.600	615.740.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	32.803.000	32.803.000	32.803.000
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.557.996.650	4.160.021.950	3.792.814.790
2.12.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.557.996.650	4.160.021.950	3.792.814.790
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.557.996.650	4.160.021.950	3.792.814.790
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.196.334.650	3.849.981.350	3.482.774.190
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.468.600	14.334.600	14.334.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.468.600	14.334.600	14.334.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.763.740.800	2.549.210.500	2.169.810.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.763.740.800	2.549.210.500	2.169.810.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.350.000	7.870.000	7.870.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.350.000	7.870.000	7.870.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	672.326.650	707.672.650	696.414.550
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.062.750	6.272.750	7.272.750
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	399.619.000	370.609.400	368.209.400
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.752.000	15.101.000	16.301.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.057.000	20.517.100	25.030.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.835.900	295.172.400	279.601.400
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.600.000	5.000.000	5.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	26.600.000	0	0
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.000.000	5.000.000	5.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.688.600	451.343.600	405.087.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000	1.805.000	2.305.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.580.000	97.580.000	91.544.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.958.600	351.958.600	311.238.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.160.000	114.550.000	184.257.440
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	16.500.000	16.500.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000	64.000.000	64.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.660.000	34.050.000	35.050.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	0	0	68.707.440

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						dan Bangunan Lainnya			
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	82.577.000	52.157.600	52.157.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11.915.000	3.041.600	3.041.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	11.915.000	3.041.600	3.041.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	70.662.000	49.116.000	49.116.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16.092.000	14.629.000	14.629.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	30.000.000	27.400.000	27.400.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	24.570.000	7.087.000	7.087.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	235.841.000	229.731.000	229.731.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	8.650.000	2.540.000	2.540.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	8.650.000	2.540.000	2.540.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	227.191.000	227.191.000	227.191.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	227.191.000	227.191.000	227.191.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	43.244.000	28.152.000	28.152.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.202.000	17.116.000	17.116.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.692.000	12.236.000	12.236.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.510.000	4.880.000	4.880.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.042.000	11.036.000	11.036.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	20.042.000	11.036.000	11.036.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Pendayagunaan Data Kependudukan			
2.13.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.241.417.590	5.141.605.400	4.721.333.650
2.13.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.241.417.590	5.141.605.400	4.721.333.650
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.241.417.590	5.141.605.400	4.721.333.650
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.563.813.590	3.476.141.400	3.094.210.850
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.741.500.650	2.502.070.750	2.108.175.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.741.500.650	2.502.070.750	2.108.175.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.980.750	377.343.850	387.158.850
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.593.000	3.593.000	3.593.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.241.000	30.635.000	35.860.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.493.650	11.493.650	11.493.650
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.367.000	26.950.000	27.450.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.988.300	20.861.200	25.134.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.297.800	283.811.000	283.628.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.500.000	101.500.000	101.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	44.000.000	44.000.000	44.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.500.000	57.500.000	57.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.580.190	389.974.800	363.099.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.019.790	38.414.400	37.914.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.560.400	347.560.400	321.184.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.252.000	105.252.000	134.278.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	12.500.000	16.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.482.000	79.482.000	104.508.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.270.000	13.270.000	13.270.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	32.063.200	30.010.000	30.010.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	32.063.200	30.010.000	30.010.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	14.627.200	14.138.800	14.138.800
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	17.436.000	15.871.200	15.871.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	664.572.000	695.310.200	733.539.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	664.572.000	695.310.200	733.539.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	127.370.000	165.909.200	196.888.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	30.739.200	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68.556.600	67.001.600	67.001.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	37.906.200	62.899.400	70.149.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	400.000.000	399.500.000	399.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	980.968.800	940.143.800	863.573.800
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	980.968.800	940.143.800	863.573.800

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	900.000.000	859.175.000	782.605.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	44.996.200	44.996.200	44.996.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	21.796.000	21.796.000	21.796.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	14.176.600	14.176.600	14.176.600
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	6.921.712.310	6.695.009.860	5.911.623.260
2.15.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.921.712.310	6.695.009.860	5.911.623.260
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.921.712.310	6.695.009.860	5.911.623.260
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.395.079.050	6.201.528.800	5.385.244.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.871.899.850	2.586.277.000	2.180.938.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.899.850	2.586.277.000	2.180.938.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.652.400	223.538.600	233.538.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.601.000	1.715.000	1.715.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.001.000	21.101.000	21.101.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.500.000	6.370.800	6.370.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	17.400.000	17.400.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.002.400	10.317.600	10.317.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.548.000	166.634.200	176.634.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.963.600	83.000.000	118.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.963.600	83.000.000	118.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.944.333.200	3.021.483.200	2.565.037.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	2.750.000	2.750.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	248.400.000	180.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.770.333.200	2.770.333.200	2.382.287.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.230.000	287.230.000	287.230.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	17.500.000	17.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.740.000	261.740.000	261.740.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.990.000	7.990.000	7.990.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	526.633.260	493.481.060	526.379.060
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	231.747.660	218.685.860	251.583.860
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	189.098.660	188.985.060	188.985.060
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	42.649.000	29.700.800	62.598.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	170.071.000	149.441.000	149.441.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	170.071.000	149.441.000	149.441.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	124.814.600	125.354.200	125.354.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	124.814.600	125.354.200	125.354.200
2.16.2.20.2.21.01.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	5.137.398.220	5.134.906.772	5.071.961.272

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.137.398.220	5.134.906.772	5.071.961.272
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.966.930.620	5.043.162.372	4.980.216.872
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.636.498.020	3.856.596.972	3.493.671.472
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.271.851.850	2.238.758.500	1.903.883.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.271.851.850	2.238.758.500	1.903.883.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.859.050	159.192.400	159.192.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.599.000	634.000	634.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.139.000	20.656.000	20.656.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.008.750	2.820.300	2.820.300
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.004.000	10.574.000	10.574.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.037.500	13.324.500	13.324.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.070.800	111.183.600	111.183.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.182.787.120	1.403.646.072	1.375.596.072
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1.200.000	1.200.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	681.887.520	921.886.472	921.886.472
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.030.000	1.690.000	1.690.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.869.600	478.869.600	450.819.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.272.975.800	1.151.034.200	1.451.014.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.272.975.800	1.151.034.200	1.451.014.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	214.955.800	195.950.000	224.750.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	53.933.600	49.121.800	49.121.800
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	723.320.200	735.609.600	1.006.789.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	45.600.800	18.349.600	18.349.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	62.244.000	39.840.600	39.840.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	172.921.400	112.162.600	112.162.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	57.456.800	35.531.200	35.531.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.456.800	35.531.200	35.531.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	57.456.800	35.531.200	35.531.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	148.911.000	74.558.400	74.558.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	148.911.000	74.558.400	74.558.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	148.911.000	74.558.400	74.558.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	28.974.400	11.398.400	11.398.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	119.936.600	63.160.000	63.160.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	21.556.600	17.186.000	17.186.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	21.556.600	17.186.000	17.186.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.556.600	17.186.000	17.186.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.556.600	17.186.000	17.186.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4.756.925.950	4.504.106.050	4.001.313.850
2.17.3.30.3.31.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.033.745.950	4.032.472.650	3.529.680.450
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.033.745.950	4.032.472.650	3.529.680.450
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.533.845.150	3.556.374.750	3.053.582.550
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.282.763.350	2.314.842.500	1.878.500.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.282.763.350	2.314.842.500	1.878.500.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.681.300	220.407.800	220.407.800
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.390.400	2.484.000	2.484.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.800.000	15.796.000	15.796.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.064.800	5.180.200	5.180.200
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	13.931.000	13.931.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.007.200	22.956.500	22.956.500
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.418.900	160.060.100	160.060.100
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.000.000	40.800.000	40.800.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.000.000	40.800.000	40.800.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.053.500	901.504.450	833.444.750
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.800.000	5.300.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.998.700	238.813.650	236.702.750
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	660.054.800	657.890.800	591.442.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.347.000	78.820.000	80.430.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	12.500.000	12.500.000	12.500.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000	53.000.000	53.000.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	13.320.000	14.930.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.247.000	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	49.570.300	37.129.000	37.129.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.570.300	37.129.000	37.129.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.570.300	37.129.000	37.129.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	157.777.800	157.777.800	157.777.800
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	157.777.800	157.777.800	157.777.800
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	157.777.800	157.777.800	157.777.800
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	292.552.700	281.191.100	281.191.100
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	292.552.700	281.191.100	281.191.100
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	29.960.700	18.599.100	18.599.100
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	262.592.000	262.592.000	262.592.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	723.180.000	471.633.400	471.633.400

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	132.968.600	110.429.300	110.429.300
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	27.738.800	26.985.500	26.985.500
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.738.800	26.985.500	26.985.500
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.738.800	26.985.500	26.985.500
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	16.210.600	14.611.500	14.611.500
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	16.210.600	14.611.500	14.611.500
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	16.210.600	14.611.500	14.611.500
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89.019.200	68.832.300	68.832.300
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	89.019.200	68.832.300	68.832.300
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	61.801.100	49.714.300	49.714.300
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	27.218.100	19.118.000	19.118.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	590.211.400	361.204.100	361.204.100
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	579.770.000	351.707.700	351.707.700
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	579.770.000	351.707.700	351.707.700
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	23.616.000	24.168.000	24.168.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	556.154.000	327.539.700	327.539.700
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	10.441.400	9.496.400	9.496.400

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.441.400	9.496.400	9.496.400
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.441.400	9.496.400	9.496.400
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.589.540.830	3.813.390.390	3.511.485.590
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.589.540.830	3.813.390.390	3.511.485.590
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.589.540.830	3.813.390.390	3.511.485.590
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.500.460.830	2.762.139.390	2.458.814.590
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.125.137.550	1.737.812.750	1.460.568.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.125.137.550	1.737.812.750	1.460.568.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.142.000	422.916.400	439.893.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.400.100	3.874.100	4.400.100
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.233.000	73.605.000	70.746.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.258.000	14.512.200	19.009.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.700.000	25.710.000	35.420.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.996.100	20.812.300	20.812.300
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.554.800	284.402.800	289.505.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	414.400.000	1.900.000	1.900.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	414.400.000	1.900.000	1.900.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.239.200	506.739.200	462.182.350
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.074.200	111.074.200	92.597.350
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.660.000	27.160.000	27.160.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.505.000	364.505.000	338.425.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.542.080	92.771.040	94.271.040
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	14.000.000	14.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	25.000.000	26.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.542.080	53.771.040	53.771.040
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	399.998.000	399.998.000	399.998.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	399.998.000	399.998.000	399.998.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	399.998.000	399.998.000	399.998.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	142.486.000	109.987.000	109.987.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	142.486.000	109.987.000	109.987.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	83.945.000	68.149.000	68.149.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	8.523.000	6.843.000	6.843.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	50.018.000	34.995.000	34.995.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	511.300.000	511.300.000	511.300.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	511.300.000	511.300.000	511.300.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	285.300.000	285.300.000	285.300.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	226.000.000	226.000.000	226.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.296.000	29.966.000	31.386.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.296.000	29.966.000	31.386.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.296.000	29.966.000	31.386.000
2.22.3.26.2.19.01.0000						Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	19.074.503.709	18.964.621.859	18.530.311.283
2.22.3.26.2.19.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.531.222.509	18.417.357.659	17.982.592.683
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.709.708.942	4.709.608.942	4.709.599.902
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	460.006.000	460.006.000	460.006.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	460.006.000	460.006.000	460.006.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	50.006.000	50.006.000	50.006.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Daya Saing Pemuda Pelopor			
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	410.000.000	410.000.000	410.000.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.974.570.942	3.974.470.942	3.974.465.902
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.055.076.392	1.055.076.392	1.055.076.392
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.055.076.392	1.055.076.392	1.055.076.392
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.326.990.000	1.326.890.000	1.326.886.400
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.326.990.000	1.326.890.000	1.326.886.400
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.592.504.550	1.592.504.550	1.592.503.110
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.592.504.550	1.592.504.550	1.592.503.110
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	275.132.000	275.132.000	275.128.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	275.132.000	275.132.000	275.128.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	275.132.000	275.132.000	275.128.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	13.821.513.567	13.707.748.717	13.272.992.781
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.462.047.650	3.348.282.800	2.913.513.850
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.468.743.050	2.411.219.750	2.012.291.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.468.743.050	2.411.219.750	2.012.291.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.014.500	112.491.550	112.491.550
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.514.400	3.324.850	3.324.850

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	14.981.000	14.981.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.500.300	5.777.900	5.777.900
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.500.000	18.540.000	18.540.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.500.000	7.933.600	7.933.600
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.999.800	61.934.200	61.934.200
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.790.100	773.071.500	737.231.300
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	2.000.000	2.000.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.405.700	145.407.100	145.407.100
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.490.000	9.770.000	9.770.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	615.894.400	615.894.400	580.054.200
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.500.000	51.500.000	51.500.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000	13.500.000	13.500.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	38.000.000	38.000.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.924.147.186	6.924.147.186	6.924.167.275
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.949.238.686	5.949.238.686	5.949.243.575
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	5.949.238.686	5.949.238.686	5.949.243.575
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	974.908.500	974.908.500	974.923.700
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	974.908.500	974.908.500	974.923.700
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.359.201.931	3.359.201.931	3.359.194.856

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.359.201.931	3.359.201.931	3.359.194.856
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	234.606.000	234.606.000	234.602.600
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3.124.595.931	3.124.595.931	3.124.592.256
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	76.116.800	76.116.800	76.116.800
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	76.116.800	76.116.800	76.116.800
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	76.116.800	76.116.800	76.116.800
2.22.3.26.2.19.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	543.281.200	547.264.200	547.718.600
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	543.281.200	547.264.200	547.718.600
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	66.962.000	57.097.000	57.097.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	66.962.000	57.097.000	57.097.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	66.962.000	57.097.000	57.097.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	145.832.000	147.970.000	147.970.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	145.832.000	147.970.000	147.970.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	145.832.000	147.970.000	147.970.000
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	330.487.200	342.197.200	342.651.600
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	330.487.200	342.197.200	342.651.600
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	330.487.200	342.197.200	342.651.600
2.23.2.24.0.00.01.0000						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.615.361.038	14.991.183.663	14.419.433.888
2.23.2.24.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	15.615.361.038	14.991.183.663	14.419.433.888

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						DASAR			
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	15.508.996.338	14.922.075.063	14.350.325.288
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.778.754.950	3.200.952.275	2.629.233.900
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.019.721.650	2.420.746.375	1.864.218.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.019.721.650	2.420.746.375	1.864.218.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.748.300	209.570.900	209.570.900
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.094.800	5.070.800	5.070.800
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.195.000	17.097.000	17.097.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.103.500	25.969.100	25.969.100
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.291.000	27.150.000	27.150.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.670.000	14.620.000	14.620.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.394.000	119.664.000	119.664.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.500.000	75.500.000	75.500.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	42.500.000	22.500.000	22.500.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.000.000	53.000.000	53.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.015.000	329.525.000	314.335.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.212.000	37.212.000	37.212.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.603.000	291.113.000	275.923.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.770.000	165.610.000	165.610.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	17.500.000	17.500.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.040.000	59.040.000	59.040.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.430.000	4.270.000	4.270.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.800.000	84.800.000	84.800.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	11.730.241.388	11.721.122.788	11.721.091.388
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.318.009.708	1.317.996.908	1.318.889.108
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	966.563.500	966.550.700	967.442.900
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	351.446.208	351.446.208	351.446.208
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.412.231.680	10.403.125.880	10.402.202.280
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.340.363.280	10.330.717.880	10.319.957.880
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	71.868.400	72.408.000	82.244.400
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	106.364.700	69.108.600	69.108.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	106.364.700	69.108.600	69.108.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	75.015.700	39.918.900	39.918.900
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	35.597.400	30.850.800	30.850.800
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	14.869.300	0	0
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	24.549.000	9.068.100	9.068.100
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	31.349.000	29.189.700	29.189.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	31.349.000	29.189.700	29.189.700
3.27.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pertanian	20.692.830.051	18.152.043.425	16.641.697.250
3.27.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	20.692.830.051	18.152.043.425	16.641.697.250

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	20.692.830.051	18.152.043.425	16.641.697.250
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.167.990.050	14.028.281.975	12.514.935.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.975.776.250	11.716.949.175	10.273.303.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.975.776.250	11.716.949.175	10.273.303.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.646.800	440.467.300	437.467.300
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.198.800	7.198.800	7.198.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.550.000	68.568.000	68.568.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.394.000	16.419.500	16.419.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.000.000	42.000.000	39.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.605.000	28.605.000	28.605.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.899.000	277.676.000	277.676.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.500.000	51.500.000	51.500.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.500.000	51.500.000	51.500.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.501.277.000	1.490.575.500	1.423.875.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.000.000	57.298.500	57.298.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.429.277.000	1.429.277.000	1.362.577.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.790.000	328.790.000	328.790.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	14.000.000	14.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.580.000	299.580.000	299.580.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.210.000	15.210.000	15.210.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.484.480.150	1.372.011.550	1.375.011.550
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	26.733.000	22.413.000	22.413.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	26.733.000	22.413.000	22.413.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	581.345.000	636.476.400	639.476.400
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	120.301.000	107.861.000	107.861.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	353.903.000	436.204.400	436.204.400
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	107.141.000	92.411.000	95.411.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	184.452.150	184.452.150	184.452.150
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	184.452.150	184.452.150	184.452.150
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	691.950.000	528.670.000	528.670.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	691.950.000	528.670.000	528.670.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.451.632.951	1.251.132.000	1.251.132.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	58.887.000	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	58.887.000	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	2.392.745.951	1.251.132.000	1.251.132.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5.700.000	1.130.000	1.130.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.387.045.951	1.250.002.000	1.250.002.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	852.340.500	850.290.500	850.290.500

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	99.465.500	97.415.500	97.415.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	99.465.500	97.415.500	97.415.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	752.875.000	752.875.000	752.875.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	752.875.000	752.875.000	752.875.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	13.200.000	3.260.000	3.260.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	13.200.000	3.260.000	3.260.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.200.000	3.260.000	3.260.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	703.186.400	647.067.400	647.067.400
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	703.186.400	647.067.400	647.067.400
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	560.577.900	507.250.900	507.250.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	142.608.500	139.816.500	139.816.500
3.32.2.07.0.00.01.0000						Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.685.585.100	4.488.814.988	3.902.437.750
3.32.2.07.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	452.468.400	410.727.600	430.697.600
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	452.468.400	410.727.600	430.697.600
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	40.603.000	25.763.000	25.763.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	40.603.000	25.763.000	25.763.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	40.603.000	25.763.000	25.763.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	284.379.000	284.379.000	284.379.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit	284.379.000	284.379.000	284.379.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Kompetensi			
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	284.379.000	284.379.000	284.379.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	109.461.600	94.885.600	104.878.600
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	41.381.000	33.139.200	33.139.200
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	41.381.000	33.139.200	33.139.200
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	68.080.600	61.746.400	71.739.400
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	68.080.600	61.746.400	71.739.400
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	18.024.800	5.700.000	15.677.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.943.200	1.000.000	10.977.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	6.943.200	1.000.000	10.977.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	11.081.600	4.700.000	4.700.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.081.600	4.700.000	4.700.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.233.116.700	4.078.087.388	3.471.740.150
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.233.116.700	4.078.087.388	3.471.740.150
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.233.116.700	4.078.087.388	3.471.740.150
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.700.000	1.420.000	1.442.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.700.000	1.420.000	1.442.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.395.758.250	3.289.877.838	2.713.290.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.395.758.250	3.289.877.838	2.713.290.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.481.350	220.040.650	220.040.650
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.554.250	2.085.250	2.085.250
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.255.500	28.025.500	28.025.500
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.321.000	12.914.000	12.914.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.875.000	12.651.000	12.651.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.475.600	164.364.900	164.364.900
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.500.000	18.000.000	18.000.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	18.000.000	18.000.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.797.100	503.308.900	473.527.500
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.999.300	56.999.300	56.999.300
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.797.800	446.309.600	416.528.200
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.880.000	45.440.000	45.440.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000	36.000.000	36.000.000
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.880.000	5.440.000	5.440.000
4.01.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat Daerah	35.362.248.936	36.082.909.373	36.300.908.916
4.01.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	35.362.248.936	36.082.909.373	36.300.908.916
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	35.362.248.936	36.082.909.373	36.300.908.916
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	27.275.174.336	28.052.765.473	28.082.039.616

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.540.433.000	7.126.276.625	5.632.792.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.540.433.000	7.126.276.625	5.632.792.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	235.000.000	235.000.000	235.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	235.000.000	235.000.000	235.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.306.760.500	4.417.026.900	5.106.319.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	128.640.000	178.640.000	191.520.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.812.000	298.812.000	372.728.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.173.500	52.768.000	110.087.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.378.805.000	1.595.380.000	2.349.630.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.700.000	51.700.000	53.361.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.437.630.000	2.239.726.900	2.028.993.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.985.543.600	2.094.539.350	2.352.538.368
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	625.000.000	600.900.000	910.900.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.360.543.600	1.493.639.350	1.441.638.368
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.274.165.936	7.646.615.798	7.519.722.848
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.400.000	45.400.000	47.400.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.442.043.336	1.592.043.198	1.522.285.248
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.663.200.000	1.718.100.000	1.967.850.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.118.522.600	4.291.072.600	3.982.187.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.106.400	1.587.088.900	1.725.950.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	248.150.000	245.463.000	338.570.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.021.956.400	1.151.625.900	1.165.880.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.000.000	190.000.000	221.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	908.473.000	1.032.144.000	1.026.708.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	178.473.000	102.144.000	96.708.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	270.000.000	470.000.000	470.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	16.325.000	16.325.000	16.325.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16.325.000	16.325.000	16.325.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	248.972.000	257.949.000	267.885.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	84.606.000	84.612.000	84.612.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	76.319.000	76.319.000	86.255.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	88.047.000	97.018.000	97.018.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.299.394.900	3.639.799.900	4.198.798.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	3.299.394.900	3.639.799.900	4.198.798.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.305.009.100	7.105.855.400	7.170.111.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	473.865.100	402.518.600	402.518.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	98.305.900	91.380.200	91.380.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	227.207.200	183.634.600	183.634.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	148.352.000	127.503.800	127.503.800

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.533.606.000	6.341.959.000	6.391.969.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.475.833.000	6.331.839.000	6.381.849.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	31.084.000	5.670.000	5.670.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	26.689.000	4.450.000	4.450.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	249.999.000	273.987.400	273.233.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	84.127.900	119.368.300	128.714.300
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	109.476.100	108.618.100	98.718.100
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	56.395.000	46.001.000	45.801.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	47.539.000	87.390.400	102.390.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	47.539.000	87.390.400	102.390.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	782.065.500	924.288.500	1.048.757.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	151.689.000	161.911.000	181.910.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	21.576.000	14.453.000	14.453.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	50.200.000	53.265.000	53.265.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	79.913.000	94.193.000	114.192.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	174.997.800	220.645.800	290.652.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	71.314.000	71.314.000	126.266.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51.517.000	51.517.000	51.517.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.166.800	97.814.800	112.868.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400.297.600	491.890.600	526.354.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	172.710.600	264.303.600	282.242.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	165.908.800	165.908.800	174.933.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	61.678.200	61.678.200	69.178.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	55.081.100	49.841.100	49.841.100
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	29.545.100	27.825.100	27.825.100
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.536.000	22.016.000	22.016.000
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	36.434.671.232	39.648.480.750	40.560.074.619
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	36.434.671.232	39.648.480.750	40.560.074.619
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	36.434.671.232	39.648.480.750	40.560.074.619
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.609.312.032	17.213.249.750	16.821.752.019
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.995.354.935	1.824.714.812	1.656.532.205
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.995.354.935	1.824.714.812	1.656.532.205
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.500.000	265.500.000	220.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	226.500.000	220.500.000	220.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	45.000.000	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.351.014.600	1.489.163.000	1.301.503.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.930.000	27.930.000	27.930.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.122.000	329.122.000	276.025.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	155.675.100	155.686.100	120.758.700
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.243.000	218.243.000	183.243.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	282.662.900	282.662.900	252.664.100
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.381.600	475.519.000	440.883.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.000.000	21.000.000	21.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.000.000	21.000.000	21.000.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.793.863.032	1.779.663.032	1.621.741.936
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	7.000.000	6.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	382.467.032	382.467.032	317.465.936
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.401.396.000	1.390.196.000	1.298.276.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.009.794.300	618.886.900	498.935.300
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	425.500.000	224.677.800	137.713.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.660.000	126.486.800	108.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.634.300	147.634.300	132.634.300
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	120.088.000	120.088.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.807.885.165	10.878.422.006	11.211.338.778
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.807.885.165	10.878.422.006	11.211.338.778
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	335.900.000	335.900.000	290.200.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	335.900.000	335.900.000	290.200.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.825.359.200	22.435.231.000	23.738.322.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.448.555.200	3.248.505.200	4.044.743.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.042.955.200	3.042.955.200	3.847.113.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	405.600.000	205.550.000	197.630.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.337.004.000	2.880.787.600	2.533.852.400
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	669.956.000	449.560.000	461.744.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	669.956.000	453.900.000	394.910.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	666.264.500	666.264.500	356.370.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	666.264.500	666.264.500	662.842.700
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	664.563.000	644.798.600	657.984.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	2.461.790.000	2.651.647.000	2.960.853.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	1.890.370.000	1.677.227.000	2.102.033.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	571.420.000	974.420.000	858.820.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	8.578.010.000	13.654.291.200	14.198.874.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	8.241.600.000	13.423.611.200	13.923.194.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	336.410.000	230.680.000	275.680.000
5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	4.974.479.750	4.511.829.715	4.291.193.650
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.974.479.750	4.511.829.715	4.291.193.650
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	4.446.369.450	3.983.719.415	3.763.083.350
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.353.713.350	3.109.241.015	2.755.121.350
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.394.508.450	2.164.763.165	1.810.532.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.508.450	2.164.763.165	1.810.532.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.642.100	391.884.300	395.255.800
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.205.000	10.287.500	10.287.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.566.000	44.412.000	41.349.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.624.500	31.009.100	34.634.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.040.000	51.720.000	53.386.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.200.000	51.159.500	37.221.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.006.600	203.296.200	218.377.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.500.000	102.500.000	102.500.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.500.000	102.500.000	102.500.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.312.800	403.343.550	400.083.550
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.300.000	5.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.000.000	105.000.750	105.000.750
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.380.000	15.880.000	15.880.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.932.800	278.162.800	274.202.800
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.750.000	46.750.000	46.750.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	22.000.000	22.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.750.000	24.750.000	24.750.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000	0	0
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	588.102.200	473.691.700	607.025.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	534.758.700	455.508.500	588.842.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	139.958.100	89.820.300	89.834.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	394.800.600	365.688.200	499.007.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	32.573.600	13.393.200	13.393.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	32.573.600	13.393.200	13.393.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.769.900	4.790.000	4.790.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	20.769.900	4.790.000	4.790.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	504.553.900	400.786.700	400.936.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	83.115.400	71.864.000	72.014.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.296.000	23.754.000	23.904.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53.819.400	48.110.000	48.110.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	45.617.000	32.669.000	32.669.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.968.000	12.664.000	12.664.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.649.000	20.005.000	20.005.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	375.821.500	296.253.700	296.253.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	163.810.400	107.383.600	107.383.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	194.993.100	180.844.100	180.844.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	17.018.000	8.026.000	8.026.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	528.110.300	528.110.300	528.110.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	528.110.300	528.110.300	528.110.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	402.345.700	402.345.700	402.345.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	88.836.600	88.836.600	88.836.600

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Terhadap Pelaksanaan Peraturan			
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	313.509.100	313.509.100	313.509.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	125.764.600	125.764.600	125.764.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	125.764.600	125.764.600	125.764.600
5.02.0.00.0.00.01.0000						Badan Keuangan Daerah	128.793.080.370	126.821.531.372	127.599.377.439
5.02.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	128.793.080.370	126.821.531.372	127.599.377.439
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02				KEUANGAN	128.793.080.370	126.821.531.372	127.599.377.439
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.522.114.011	8.173.455.190	7.343.317.700
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.076.453.611	6.328.543.890	5.226.794.900
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.076.453.611	6.328.543.890	5.226.794.900
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	615.575.400	877.380.500	945.974.500
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.889.500	11.889.500	11.889.500
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.999.000	137.851.000	153.567.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.999.000	52.999.000	57.683.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.632.000	113.336.000	120.530.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	169.499.900	199.346.600	214.346.600
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.556.000	361.958.400	387.958.400
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.000.000	17.000.000	125.500.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	24.000.000	0	19.500.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	17.000.000	106.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.857.000	840.302.800	934.820.300
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	11.000.000	11.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.600.000	294.600.000	390.547.500

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.403.200	77.683.200	77.683.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.853.800	457.019.600	455.589.600
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.228.000	110.228.000	110.228.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	16.500.000	16.500.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.600.000	71.600.000	71.600.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.128.000	22.128.000	22.128.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	120.212.046.359	117.816.431.382	119.141.725.939
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.756.116.000	1.586.392.000	1.875.504.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	278.031.000	250.541.000	260.063.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	220.882.000	220.882.000	200.193.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	116.826.000	116.826.000	347.647.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	942.673.000	842.523.000	916.011.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	197.704.000	155.620.000	151.590.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	347.855.000	248.905.000	269.695.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	51.995.000	51.995.000	51.995.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	295.860.000	196.910.000	217.700.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	509.396.800	476.994.200	499.782.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	156.686.000	134.796.400	157.584.400
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	118.659.000	118.659.000	118.659.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	217.678.800	213.688.800	213.688.800
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	11.565.000	5.042.000	5.042.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4.808.000	4.808.000	4.808.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	117.403.182.959	115.304.389.182	116.230.788.739
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	111.942.394.000	110.843.600.223	112.076.408.030
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.460.788.959	4.460.788.959	4.154.380.709
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	195.495.600	199.751.000	265.956.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	15.497.000	15.497.000	15.497.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	179.998.600	184.254.000	250.459.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	454.211.000	317.601.200	355.046.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	454.211.000	317.601.200	355.046.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	51.010.000	38.754.600	38.754.600
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	104.473.000	67.558.000	84.318.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	67.930.000	44.755.600	44.755.600
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	230.798.000	166.533.000	187.217.800
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	604.709.000	514.043.600	759.287.800
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	604.709.000	514.043.600	759.287.800
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	210.434.600	210.434.600	322.038.800
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	35.114.400	32.565.000	32.565.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	179.122.000	135.000.000	135.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	154.668.000	136.044.000	136.044.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	25.370.000	0	133.640.000
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.171.123.296	5.513.964.717	5.257.276.771
5.03.5.04.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.171.123.296	5.513.964.717	5.257.276.771
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	5.166.929.296	4.925.397.717	4.365.799.771
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.161.443.296	4.077.057.292	3.282.590.346
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.246.000	28.736.000	39.350.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.246.000	28.736.000	39.350.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.616.062.900	3.147.794.946	2.682.461.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.616.062.900	3.147.794.946	2.682.461.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.225.500	572.881.700	243.604.700
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	3.498.500	976.000	976.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.051.000	38.670.000	38.670.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.496.700	10.116.700	10.116.700
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.191.000	46.306.000	24.142.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.003.300	22.750.000	22.750.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.985.000	454.063.000	146.950.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	22.000.000	22.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	22.000.000	22.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.918.896	264.918.896	254.448.896
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.840.496	50.840.496	50.840.496
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.078.400	210.078.400	199.608.400
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.990.000	40.725.750	40.725.750
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	14.108.250	14.108.250
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.500.000	19.457.500	19.457.500
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.490.000	7.160.000	7.160.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.005.486.000	848.340.425	1.083.209.425
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	202.615.000	188.376.000	325.701.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	17.990.000	12.948.000	12.948.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	127.455.000	134.067.000	271.392.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	20.038.000	14.099.000	14.099.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.082.000	16.282.000	16.282.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	17.050.000	10.980.000	10.980.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	64.488.000	59.785.000	59.785.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	20.015.000	19.815.000	19.815.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	44.473.000	39.970.000	39.970.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	567.403.000	445.435.425	542.979.425
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	31.503.000	17.497.000	27.497.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	130.486.000	113.871.000	168.361.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	400.421.000	310.644.425	343.698.425
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	4.993.000	3.423.000	3.423.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	170.980.000	154.744.000	154.744.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.418.000	4.058.000	4.058.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	148.575.000	138.327.000	138.327.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	17.987.000	12.359.000	12.359.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.004.194.000	588.567.000	891.477.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.004.194.000	588.567.000	891.477.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	11.166.000	3.550.000	3.550.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	11.166.000	3.550.000	3.550.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	993.028.000	585.017.000	887.927.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	993.028.000	585.017.000	887.927.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat Kabupaten	8.259.458.200	6.563.606.150	5.767.632.900
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.259.458.200	6.563.606.150	5.767.632.900
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	8.259.458.200	6.563.606.150	5.767.632.900
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.205.108.200	5.416.236.350	4.600.263.100
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.206.800	69.864.800	69.864.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.206.800	69.864.800	69.864.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.947.410.600	3.844.217.250	3.039.508.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.947.410.600	3.844.217.250	3.039.508.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.946.000	160.893.000	160.893.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	218.946.000	160.893.000	160.893.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.403.200	317.084.600	317.084.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.443.000	7.633.000	7.633.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.428.000	45.485.000	45.485.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.033.200	11.645.000	11.645.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.810.000	33.160.000	33.160.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.050.000	28.018.000	28.018.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.680.000	1.680.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.839.000	189.463.600	189.463.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	858.700.000	604.500.000	604.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	645.000.000	604.500.000	604.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	20.900.000	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.800.000	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.888.000	339.676.700	328.412.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	1.700.000	1.700.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.625.000	96.373.700	96.373.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.650.000	12.990.000	12.990.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.613.000	228.613.000	217.349.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.553.600	80.000.000	80.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	16.000.000	16.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000	64.000.000	64.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	314.553.600	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	534.268.800	665.799.600	665.799.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	494.279.200	620.249.000	620.249.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	49.627.600	177.381.200	177.381.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	68.707.200	62.451.000	62.451.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	43.283.800	36.901.000	36.901.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	75.007.600	68.752.000	68.752.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	94.486.800	132.666.800	132.666.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	97.022.600	88.538.200	88.538.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	66.143.600	53.558.800	53.558.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39.989.600	45.550.600	45.550.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39.989.600	45.550.600	45.550.600

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	520.081.200	481.570.200	501.570.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	111.776.400	97.675.400	97.675.400
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	111.776.400	97.675.400	97.675.400
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	408.304.800	383.894.800	403.894.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191.745.600	187.696.400	200.496.400
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	102.726.400	88.697.000	95.897.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	113.832.800	107.501.400	107.501.400
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Pulau Punjung	2.218.688.600	2.223.445.250	1.999.090.500
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.218.688.600	2.223.445.250	1.999.090.500
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	2.218.688.600	2.223.445.250	1.999.090.500
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.188.118.600	2.211.055.250	1.986.700.500
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.862.127.950	1.888.120.750	1.661.796.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.862.127.950	1.888.120.750	1.661.796.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.630.150	134.614.000	140.924.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.887.450	1.713.400	1.713.400
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.300.000	16.326.000	17.418.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.921.600	7.917.600	7.917.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	15.960.000	16.560.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.058.100	10.840.000	10.840.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.963.000	81.857.000	86.475.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.500.000	0	0
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.500.000	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.360.500	173.320.500	168.980.500
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	1.500.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	9.500.000	9.500.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.440.000	1.900.000	3.900.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.920.500	160.920.500	154.080.500
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.500.000	15.000.000	15.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000	11.000.000	11.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.260.000	0	0
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.260.000	0	0
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.760.000	0	0
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	500.000	0	0
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.070.000	8.190.000	8.190.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.070.000	8.190.000	8.190.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.070.000	8.190.000	8.190.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.700.000	0	0
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.700.000	0	0

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.700.000	0	0
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.540.000	4.200.000	4.200.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.540.000	4.200.000	4.200.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.540.000	4.200.000	4.200.000
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Sitiung	2.090.574.400	1.820.236.983	1.623.158.100
7.01.0.00.0.00.02.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.090.574.400	1.820.236.983	1.623.158.100
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01				KECAMATAN	2.090.574.400	1.820.236.983	1.623.158.100
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.024.039.200	1.775.807.783	1.577.418.900
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.694.298.900	1.441.909.883	1.231.871.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.694.298.900	1.441.909.883	1.231.871.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.655.400	140.233.000	145.223.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.170.500	2.937.400	2.937.400
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.552.000	11.718.000	11.718.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.176.200	6.063.700	6.063.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000	18.310.000	20.310.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.054.700	11.830.500	11.830.500
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.202.000	89.373.400	92.363.400
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.700.000	49.700.000	61.200.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	17.000.000	17.000.000	17.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.700.000	32.700.000	44.200.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	122.284.900	118.864.900	114.024.900

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Pemerintahan Daerah			
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.047.500	8.047.500	8.047.500
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.237.400	109.817.400	104.977.400
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.100.000	25.100.000	25.100.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	14.000.000	14.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	3.000.000	3.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.969.000	18.740.600	18.740.600
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	26.969.000	18.740.600	18.740.600
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.619.000	9.280.000	9.280.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	14.350.000	9.460.600	9.460.600
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.446.200	9.381.600	9.381.600
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.446.200	9.381.600	9.381.600
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.446.200	9.381.600	9.381.600
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.520.000	5.510.000	5.510.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.520.000	5.510.000	5.510.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.520.000	5.510.000	5.510.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.600.000	10.797.000	12.107.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.600.000	10.797.000	12.107.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.600.000	10.797.000	12.107.000
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Koto Baru	2.172.260.000	2.055.372.308	1.753.765.400
7.01.0.00.0.00.03.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.172.260.000	2.055.372.308	1.753.765.400
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01				KECAMATAN	2.172.260.000	2.055.372.308	1.753.765.400
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.137.620.000	2.033.572.308	1.731.965.400
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.713.624.000	1.611.088.908	1.318.592.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.713.624.000	1.611.088.908	1.318.592.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.495.200	103.042.200	108.282.200
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	1.105.000	1.105.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	11.276.000	11.276.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.900.000	5.498.000	5.498.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	7.782.000	7.782.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.500.000	7.280.000	7.280.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.795.200	70.101.200	75.341.200
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.500.000	31.500.000	31.500.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000	11.500.000	11.500.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.000.800	269.941.200	255.591.200
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.090.000	1.090.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.466.000	5.426.400	5.426.400
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.220.000	2.110.000	2.110.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.314.800	261.314.800	246.964.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000	18.000.000	18.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	14.000.000	14.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.510.000	1.670.000	1.670.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.510.000	1.670.000	1.670.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.510.000	1.670.000	1.670.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.000.000	12.000.000	12.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.000.000	12.000.000	12.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000	12.000.000	12.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.510.000	1.010.000	1.010.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.510.000	1.010.000	1.010.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4.510.000	1.010.000	1.010.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.620.000	7.120.000	7.120.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.620.000	7.120.000	7.120.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.620.000	7.120.000	7.120.000
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Sungai Rumbai	1.713.688.500	1.630.539.836	1.374.423.950
7.01.0.00.0.00.04.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.713.688.500	1.630.539.836	1.374.423.950
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01				KECAMATAN	1.713.688.500	1.630.539.836	1.374.423.950
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.693.188.500	1.613.389.836	1.357.923.950
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.418.999.100	1.357.908.886	1.107.027.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.999.100	1.357.908.886	1.107.027.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.438.800	112.520.350	117.855.350
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.600	1.800.600	1.800.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.657.000	13.085.000	13.120.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.136.200	5.049.350	5.049.350
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	11.950.000	11.950.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.453.000	6.050.000	6.050.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.892.000	74.585.400	79.885.400
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.000.000	0	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	0	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.150.600	129.360.600	118.841.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.590.000	1.590.000	1.590.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.035.000	12.035.000	12.035.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.220.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.305.600	113.735.600	103.216.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.600.000	13.600.000	14.200.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.600.000	4.600.000	5.200.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.450.000	2.200.000	1.850.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.450.000	2.200.000	1.850.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.250.000	0	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.200.000	2.200.000	1.850.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.150.000	11.950.000	11.950.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.150.000	11.950.000	11.950.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.150.000	11.950.000	11.950.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.200.000	1.200.000	900.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.200.000	1.200.000	900.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.200.000	1.200.000	900.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.700.000	1.800.000	1.800.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.700.000	1.800.000	1.800.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.700.000	1.800.000	1.800.000
7.01.0.00.0.00.05.0000						Kecamatan Sembilan Koto	1.694.471.850	1.359.984.225	1.227.165.600
7.01.0.00.0.00.05.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.694.471.850	1.359.984.225	1.227.165.600
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01				KECAMATAN	1.694.471.850	1.359.984.225	1.227.165.600
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.684.821.850	1.353.504.225	1.220.685.600
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.394.934.950	1.070.079.625	924.741.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.394.934.950	1.070.079.625	924.741.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.640.100	104.697.800	124.697.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.803.000	1.673.000	1.673.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.005.000	9.866.000	9.866.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	5.857.800	5.857.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	10.824.000	30.824.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.383.100	9.689.000	9.689.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.449.000	66.788.000	66.788.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	19.290.000	19.290.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	19.290.000	19.290.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.386.800	140.386.800	132.906.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.003.000	6.003.000	6.003.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.383.800	133.383.800	125.903.800

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.860.000	19.050.000	19.050.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.250.000	3.250.000	3.250.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	14.000.000	14.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.610.000	1.800.000	1.800.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.090.000	5.090.000	5.090.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.090.000	5.090.000	5.090.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.090.000	5.090.000	5.090.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.760.000	510.000	510.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.760.000	510.000	510.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.760.000	510.000	510.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.800.000	880.000	880.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.800.000	880.000	880.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.800.000	880.000	880.000
7.01.0.00.0.00.06.0000						Kecamatan Timpeh	1.543.781.810	1.584.543.611	1.362.523.400
7.01.0.00.0.00.06.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.543.781.810	1.584.543.611	1.362.523.400
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01				KECAMATAN	1.543.781.810	1.584.543.611	1.362.523.400

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.518.881.810	1.581.243.611	1.359.223.400
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.209.123.710	1.273.051.211	1.057.081.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.209.123.710	1.273.051.211	1.057.081.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.049.300	122.353.600	120.853.600
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.808.500	0	0
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.645.600	13.021.800	13.021.800
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.316.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.490.000	12.450.000	12.450.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.184.200	6.016.800	6.016.800
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.605.000	88.865.000	87.365.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.500.000	27.500.000	27.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.500.000	27.500.000	27.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.768.800	136.838.800	130.788.800
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.570.000	0	0
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.875.000	3.875.000	3.875.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.323.800	132.963.800	126.913.800
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.440.000	21.500.000	23.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000	13.500.000	13.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.440.000	1.500.000	3.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.450.000	3.300.000	3.300.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						DESA DAN KELURAHAN			
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.450.000	3.300.000	3.300.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.450.000	3.300.000	3.300.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.450.000	0	0
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.450.000	0	0
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.450.000	0	0
7.01.0.00.0.00.07.0000						Kecamatan Koto Salak	1.510.771.900	1.402.113.000	1.228.133.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.510.771.900	1.402.113.000	1.228.133.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01				KECAMATAN	1.510.771.900	1.402.113.000	1.228.133.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.489.801.900	1.388.793.000	1.214.813.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.215.141.200	1.132.259.500	963.379.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.215.141.200	1.132.259.500	963.379.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.655.100	112.892.900	112.892.900
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.807.000	1.873.000	1.873.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.100.000	14.395.000	14.395.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.035.000	6.324.600	6.324.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	12.300.000	12.300.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.925.100	7.441.300	7.441.300
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.288.000	70.559.000	70.559.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.200.000	0	0
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	18.200.000	0	0
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.975.600	126.780.600	121.681.600

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.200.000	1.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.250.000	4.640.000	4.640.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.725.600	120.940.600	115.841.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.830.000	16.860.000	16.860.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	3.750.000	3.750.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.830.000	3.110.000	3.110.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.550.000	2.540.000	2.540.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.550.000	2.540.000	2.540.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.550.000	2.540.000	2.540.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.800.000	7.200.000	7.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.800.000	7.200.000	7.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.800.000	7.200.000	7.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.620.000	3.580.000	3.580.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.620.000	3.580.000	3.580.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.620.000	3.580.000	3.580.000
7.01.0.00.0.00.08.0000						Kecamatan Asam Jujuhan	1.309.574.400	1.128.846.900	1.029.221.900
7.01.0.00.0.00.08.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.309.574.400	1.128.846.900	1.029.221.900
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01				KECAMATAN	1.309.574.400	1.128.846.900	1.029.221.900

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.274.714.400	1.117.606.900	1.017.981.900
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	972.433.500	804.149.000	695.574.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	972.433.500	804.149.000	695.574.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.896.400	134.443.400	134.443.400
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.753.000	2.498.000	2.498.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.105.000	18.368.000	18.368.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.001.800	7.799.600	7.799.600
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.129.000	23.178.000	23.178.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.510.200	6.812.600	6.812.600
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.397.400	75.787.200	75.787.200
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.024.500	160.764.500	154.714.500
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.740.000	1.740.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.002.500	5.002.500	5.002.500
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.022.000	154.022.000	147.972.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.360.000	18.250.000	33.250.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	12.500.000	27.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.250.000	5.250.000	5.250.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.610.000	500.000	500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.000.000	2.200.000	2.200.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.000.000	2.200.000	2.200.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.700.000	0	0
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.300.000	2.200.000	2.200.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.040.000	9.040.000	9.040.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.040.000	9.040.000	9.040.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.040.000	9.040.000	9.040.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.820.000	0	0
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.820.000	0	0
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.820.000	0	0
7.01.0.00.0.00.09.0000						Kecamatan Koto Besar	2.115.117.350	2.053.719.036	1.835.777.700
7.01.0.00.0.00.09.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.115.117.350	2.053.719.036	1.835.777.700
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01				KECAMATAN	2.115.117.350	2.053.719.036	1.835.777.700
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.088.417.050	2.027.018.736	1.809.077.400
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.660.190.200	1.565.106.336	1.354.425.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.660.190.200	1.565.106.336	1.354.425.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.311.050	150.336.600	150.336.600
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.034.400	2.040.150	2.040.150
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.652.000	12.973.000	12.973.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.378.450	6.378.450	6.378.450
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.117.000	8.563.000	8.563.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.220.000	8.470.000	8.470.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	74.909.200	111.912.000	111.912.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Konsultasi SKPD			
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.500.000	39.500.000	39.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.500.000	39.500.000	39.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.571.800	141.231.800	133.971.800
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.558.000	7.558.000	7.558.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.513.800	132.173.800	124.913.800
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.844.000	130.844.000	130.844.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000	11.500.000	11.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.750.000	3.750.000	3.750.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000	5.110.000	5.110.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.484.000	110.484.000	110.484.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.200.000	3.200.000	3.200.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.200.000	3.200.000	3.200.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.100.300	9.100.300	9.100.300
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.100.300	9.100.300	9.100.300
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	9.100.300	9.100.300	9.100.300

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Pembangunan di Desa			
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.790.000	4.790.000	4.790.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	4.790.000	4.790.000	4.790.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.790.000	4.790.000	4.790.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.610.000	9.610.000	9.610.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.610.000	9.610.000	9.610.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.610.000	9.610.000	9.610.000
7.01.0.00.0.00.10.0000						Kecamatan Padang Laweh	1.503.808.950	1.444.627.186	1.274.770.250
7.01.0.00.0.00.10.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.503.808.950	1.444.627.186	1.274.770.250
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01				KECAMATAN	1.503.808.950	1.444.627.186	1.274.770.250
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.476.428.950	1.433.687.186	1.258.610.250
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.139.242.150	1.114.217.936	947.231.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.139.242.150	1.114.217.936	947.231.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.644.400	132.926.850	132.956.850
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.500	1.539.750	1.539.750
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.765.000	19.157.000	19.157.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.839.000	8.268.700	8.298.700
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	13.670.000	13.670.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.532.100	13.380.600	13.380.600
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.707.800	76.910.800	76.910.800

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.950.000	59.450.000	59.450.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	27.950.000	27.950.000	27.950.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.000.000	11.500.000	11.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.342.400	108.842.400	101.722.400
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.500.000	1.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.595.000	1.595.000	1.595.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.747.400	105.747.400	98.627.400
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.250.000	18.250.000	17.250.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000	11.000.000	11.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.750.000	4.750.000	4.750.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	2.500.000	1.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.230.000	0	1.780.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.230.000	0	1.780.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.460.000	0	1.080.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.770.000	0	700.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.940.000	10.940.000	10.940.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.940.000	10.940.000	10.940.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	10.940.000	10.940.000	10.940.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Pembangunan di Desa			
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.690.000	0	1.200.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.690.000	0	1.200.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.690.000	0	1.200.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.520.000	0	2.240.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.520.000	0	2.240.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.520.000	0	2.240.000
7.01.0.00.0.00.11.0000						Kecamatan Tiumang	1.749.621.550	1.474.594.875	1.291.291.300
7.01.0.00.0.00.11.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.749.621.550	1.474.594.875	1.291.291.300
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01				KECAMATAN	1.749.621.550	1.474.594.875	1.291.291.300
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.725.299.550	1.453.422.875	1.270.119.300
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.420.044.250	1.138.676.575	962.213.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.420.044.250	1.138.676.575	962.213.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.723.300	120.324.300	120.324.300
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.853.500	1.853.500	1.853.500
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.530.000	18.530.000	18.530.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.274.200	10.274.200	10.274.200
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.550.000	12.290.000	12.290.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.459.600	10.960.600	10.960.600
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.056.000	66.416.000	66.416.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.000.000	5.500.000	5.500.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	5.500.000	5.500.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.092.000	176.092.000	169.252.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.700.000	8.700.000	8.700.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.392.000	165.392.000	158.552.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.440.000	12.830.000	12.830.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000	11.000.000	11.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000	1.830.000	1.830.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.072.000	5.072.000	5.072.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.072.000	5.072.000	5.072.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.900.000	900.000	900.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.172.000	4.172.000	4.172.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.260.000	11.260.000	11.260.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11.260.000	11.260.000	11.260.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.260.000	11.260.000	11.260.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.480.000	3.480.000	3.480.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.480.000	3.480.000	3.480.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.480.000	3.480.000	3.480.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.510.000	1.360.000	1.360.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.510.000	1.360.000	1.360.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.510.000	1.360.000	1.360.000
8.01.0.00.0.00.01.0000						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.352.011.980	5.064.660.180	16.652.056.380
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.352.011.980	5.064.660.180	16.652.056.380
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.352.011.980	5.064.660.180	16.652.056.380
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.286.816.700	1.108.862.800	1.022.926.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	956.367.000	740.690.000	631.619.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	956.367.000	740.690.000	631.619.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.324.400	170.547.500	202.861.700
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.802.600	1.802.600	1.802.600
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.449.000	14.841.000	25.259.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.002.600	7.789.000	8.418.600
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.032.000	12.882.000	14.862.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.040.000	13.933.300	23.225.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.998.200	119.299.600	129.294.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.625.300	178.125.300	168.945.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.500.000	2.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.415.100	15.415.100	15.415.100

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.720.000	2.720.000	2.720.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.490.200	158.490.200	148.810.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.500.000	19.500.000	19.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	18.000.000	18.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.180.055.600	1.127.600.300	1.142.020.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.180.055.600	1.127.600.300	1.142.020.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.170.269.200	1.118.736.700	1.133.156.700
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9.786.400	8.863.600	8.863.600
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.434.987.480	2.350.290.880	13.861.952.880
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.434.987.480	2.350.290.880	13.861.952.880

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.409.977.880	2.350.290.880	13.861.952.880
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.009.600	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	30.153.000	27.843.000	75.251.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	30.153.000	27.843.000	75.251.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	13.820.000	11.510.000	40.650.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16.333.000	16.333.000	34.601.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	419.999.200	450.063.200	549.906.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	419.999.200	450.063.200	549.906.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	419.999.200	450.063.200	549.906.200

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
	dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN IX

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan												
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	122.001.600	0	0	0	853.137.000	0	0	0	853.137.000	100
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	93.348.000	0	0	0	66.278.400	0	0	0	66.278.400	100
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											
			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	49.508.400	0	0	0	9.400.000	0	0	0	9.400.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Pangan dan Perikanan	681.601.800	0	0	0	643.981.800	0	0	0	643.981.800	100
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											
			Dinas Pangan dan Perikanan	0	0	0	0	55.000.000	0	0	0	55.000.000	100
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
			Dinas Pangan dan Perikanan	216.097.000	0	0	0	159.277.000	0	0	0	159.277.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											
			Dinas Pangan dan Perikanan	35.026.200	0	0	0	21.676.600	0	0	0	21.676.600	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											
			Dinas Pangan dan Perikanan	89.336.000	0	0	0	74.260.000	0	0	0	74.260.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											
			Dinas Pangan dan Perikanan	27.049.000	0	0	0	23.403.200	0	0	0	23.403.200	100
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
			Dinas Pangan dan Perikanan	45.196.400	0	0	0	22.973.600	0	0	0	22.973.600	100
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	67.962.000	0	0	0	57.097.000	0	0	0	57.097.000	100
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	145.832.000	0	0	0	147.970.000	0	0	0	147.970.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	36.206.000	0	0	0	337.151.600	5.500.000	0	0	342.651.600	100

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Pertanian	58.550.000	0	0	0	68.568.000	0	0	0	68.568.000	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
			Dinas Pertanian	35.373.000	0	0	0	22.413.000	0	0	0	22.413.000	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
			Dinas Pertanian	3.568.878.900	0	0	0	1.250.002.000	0	0	0	1.250.002.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											
			Dinas Pertanian	107.097.500	0	0	0	97.415.500	0	0	0	97.415.500	100
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											
			Dinas Pertanian	15.200.000	0	0	0	3.260.000	0	0	0	3.260.000	100
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
			Dinas Pertanian	163.400.500	0	0	0	139.816.500	0	0	0	139.816.500	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.791.516.500	0	0	0	5.426.580.000	0	0	0	5.426.580.000	100
2	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.500.000	0	0	0	16.500.000	0	0	0	16.500.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.386.000	0	0	0	15.871.200	0	0	0	15.871.200	100
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	170.402.000	0	0	0	196.888.000	0	0	0	196.888.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.996.200	0	0	0	44.996.200	0	0	0	44.996.200	100
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Pendidikan	56.839.800	0	0	0	45.708.500	0	0	0	45.708.500	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
			Dinas Pendidikan	10.000.000	0	0	0	82.086.000	0	0	0	82.086.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM											

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Pendidikan	25.190.000	0	0	0	225.190.000	0	0	0	225.190.000	100
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											
			Dinas Pendidikan	81.850.000	0	0	0	231.850.000	0	0	0	231.850.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Kesehatan	35.905.000	0	0	0	34.375.000	0	0	0	34.375.000	100
			Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	28.635.927.850	0	0	0	22.916.512.634	0	0	0	22.916.512.634	100
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
			Dinas Kesehatan	164.520.000	0	0	0	164.520.000	0	0	0	164.520.000	100
			Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	40.677.470.000	4.322.530.000	0	0	50.681.525.193	2.176.974.009	0	0	52.858.499.202	100
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											
			Dinas Kesehatan	1.258.194.000	0	0	0	1.490.793.000	0	0	0	1.490.793.000	100
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											
			Dinas Kesehatan	83.690.000	0	0	0	83.690.000	0	0	0	83.690.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
			Dinas Kesehatan	71.480.000	0	0	0	170.000.000	0	0	0	170.000.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.442.715.870	0	0	0	2.865.569.000	0	0	0	2.865.569.000	100
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.440.000	0	0	0	4.610.000	0	0	0	4.610.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	179.063.000	0	0	0	101.768.500	0	0	0	101.768.500	100
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	315.000.000	0	0	0	315.000.000	0	0	0	315.000.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	82.762.600	0	0	0	44.002.400	0	0	0	44.002.400	100

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			dan Keluarga Berencana										
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.400.000	0	0	0	15.400.000	0	0	0	15.400.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA											
			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	138.154.000	0	0	0	51.526.000	0	0	0	51.526.000	100
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.121.000	0	0	0	29.959.000	0	0	0	29.959.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	52.386.200	0	0	0	52.386.200	0	0	0	52.386.200	100
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	85.525.000	0	0	0	66.409.600	0	0	0	66.409.600	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	109.700.000	0	0	0	109.700.000	0	0	0	109.700.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.262.000	0	0	0	16.301.000	0	0	0	16.301.000	100
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.092.000	0	0	0	14.629.000	0	0	0	14.629.000	100
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL											
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.692.000	0	0	0	227.191.000	0	0	0	227.191.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.510.000	0	0	0	4.880.000	0	0	0	4.880.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.200.000	0	0	0	55.200.000	0	0	0	55.200.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	913.500.000	0	0	0	913.500.000	0	0	0	913.500.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	5.390.400	0	0	0	2.484.000	0	0	0	2.484.000	100
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	55.119.000	0	0	0	37.129.000	0	0	0	37.129.000	100
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	157.778.000	0	0	0	157.777.800	0	0	0	157.777.800	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	262.592.000	0	0	0	262.592.000	0	0	0	262.592.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	410.000.000	0	0	0	410.000.000	0	0	0	410.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.245.010.000	0	0	0	1.306.386.400	20.500.000	0	0	1.326.886.400	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	50.007.000	0	0	0	275.128.000	0	0	0	275.128.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.468.743.050	0	0	0	2.012.291.000	0	0	0	2.012.291.000	100
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	42.500.000	0	0	0	22.500.000	0	0	22.500.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64.777.000	670.023.000	0	0	92.693.000	874.749.900	0	0	967.442.900	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46.069.000	0	0	0	9.068.100	0	0	0	9.068.100	100
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	27.738.800	0	0	0	26.985.500	0	0	0	26.985.500	100
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	17.150.600	0	0	0	14.611.500	0	0	0	14.611.500	100
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	27.218.100	0	0	0	19.118.000	0	0	0	19.118.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	556.154.000	0	0	0	327.539.700	0	0	0	327.539.700	100
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	10.441.400	0	0	0	9.496.400	0	0	0	9.496.400	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Inspektorat Kabupaten	36.050.000	0	0	0	28.018.000	0	0	0	28.018.000	100
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.700.000	0	0	0	35.420.000	0	0	0	35.420.000	100
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	399.998.000	0	0	0	399.998.000	0	0	0	399.998.000	100

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.445.000	0	0	0	68.149.000	0	0	0	68.149.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	285.300.000	0	0	0	285.300.000	0	0	0	285.300.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.296.000	0	0	0	31.386.000	0	0	0	31.386.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	600.150.400	0	0	0	951.460.200	23.463.500	0	0	974.923.700	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	88.257.200	0	0	0	234.602.600	0	0	0	234.602.600	100
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	76.116.800	0	0	0	76.116.800	0	0	0	76.116.800	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Sekretariat Daerah	190.000.000	0	0	0	221.500.000	0	0	0	221.500.000	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
			Sekretariat Daerah	56.395.000	0	0	0	45.801.000	0	0	0	45.801.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Sekretariat DPRD	1.411.404.000	0	0	0	1.298.276.000	0	0	0	1.298.276.000	100
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
			Sekretariat DPRD	666.264.500	0	0	0	662.842.700	0	0	0	662.842.700	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	24.750.000	0	0	0	24.750.000	0	0	0	24.750.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
			Badan Perencanaan, Penelitian, dan	32.573.600	0	0	0	13.393.200	0	0	0	13.393.200	100

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Pengembangan Daerah										
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
			Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	29.296.000	0	0	0	23.904.000	0	0	0	23.904.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Badan Keuangan Daerah	0	22.128.000	0	0	0	22.128.000	0	0	22.128.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
			Badan Keuangan Daerah	262.800.000	0	0	0	200.193.000	0	0	0	200.193.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											
			Badan Keuangan Daerah	55.810.000	0	0	0	38.754.600	0	0	0	38.754.600	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											
			Badan Keuangan Daerah	169.100.000	0	0	0	136.044.000	0	0	0	136.044.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000	0	0	0	14.108.250	0	0	0	14.108.250	100
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.908.000	0	0	0	27.497.000	0	0	0	27.497.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.690.000	0	0	0	3.550.000	0	0	0	3.550.000	100
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
			Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	68.422.900	0	0	0	313.509.100	0	0	0	313.509.100	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Inspektorat Kabupaten	4.947.410.600	0	0	0	3.039.508.000	0	0	0	3.039.508.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											
			Inspektorat Kabupaten	128.489.600	0	0	0	132.666.800	0	0	0	132.666.800	100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
			Inspektorat Kabupaten	151.833.000	0	0	0	107.501.400	0	0	0	107.501.400	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Kecamatan Pulau Punjung	160.920.500	0	0	0	154.080.500	0	0	0	154.080.500	100
			Kecamatan Sitiung	2.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	100
			Kecamatan Koto Baru	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	100
			Kecamatan Sungai Rumbai	47.892.000	0	0	0	79.885.400	0	0	0	79.885.400	100
			Kecamatan Sembilan Koto	18.005.000	0	0	0	9.866.000	0	0	0	9.866.000	100
			Kecamatan Timpeh	2.316.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
			Kecamatan Koto Salak	2.000.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	100
			Kecamatan Asam Jujuhan	9.001.800	0	0	0	7.799.600	0	0	0	7.799.600	100
			Kecamatan Koto Besar	131.513.800	0	0	0	124.913.800	0	0	0	124.913.800	100
			Kecamatan Padang Laweh	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	100
			Kecamatan Tiumang	10.959.700	0	0	0	10.960.600	0	0	0	10.960.600	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
			Kecamatan Sungai Rumbai	2.200.000	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	100
			Kecamatan Koto Besar	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			Kecamatan Pulau Punjung	12.080.000	0	0	0	8.190.000	0	0	0	8.190.000	100
			Kecamatan Sungai Rumbai	12.150.000	0	0	0	11.950.000	0	0	0	11.950.000	100
			Kecamatan Sembilan Koto	5.090.000	0	0	0	5.090.000	0	0	0	5.090.000	100
			Kecamatan Timpeh	7.450.000	0	0	0	3.300.000	0	0	0	3.300.000	100
			Kecamatan Koto Besar	9.100.300	0	0	0	9.100.300	0	0	0	9.100.300	100
			Kecamatan Tiumang	11.260.000	0	0	0	11.260.000	0	0	0	11.260.000	100
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			Kecamatan Sungai Rumbai	2.400.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	100
			Kecamatan Sembilan Koto	2.760.000	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	100
			Kecamatan Koto Besar	5.790.000	0	0	0	4.790.000	0	0	0	4.790.000	100
			Kecamatan Tiumang	3.480.000	0	0	0	3.480.000	0	0	0	3.480.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
			Kecamatan Pulau Punjung	10.540.000	0	0	0	4.200.000	0	0	0	4.200.000	100
			Kecamatan Sungai Rumbai	2.700.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000	100

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Kecamatan Sembilan Koto	1.800.000	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000	100
			Kecamatan Koto Besar	11.610.000	0	0	0	9.610.000	0	0	0	9.610.000	100
			Kecamatan Tiumang	3.510.000	0	0	0	1.360.000	0	0	0	1.360.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.720.000	0	0	0	2.720.000	0	0	0	2.720.000	100
5	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	36.000.000	0	0	0	35.545.000	22.000.000	0	0	57.545.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	79.808.000	1.618.500.000	0	0	74.755.000	1.124.049.000	0	0	1.198.804.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	33.450.000	0	0	0	33.450.000	0	0	0	33.450.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	62.610.000	0	0	0	53.980.000	0	0	0	53.980.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.551.864.000	0	0	0	1.519.564.000	25.000.000	0	0	1.544.564.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	396.079.000	20.244.380	0	0	57.103.200	0	0	0	57.103.200	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.938.448.000	2.400.000	0	0	142.540.400	0	0	0	142.540.400	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.598.720	0	0	0	103.227.740	0	0	0	103.227.740	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	37.428.000	0	0	0	12.730.000	0	0	0	12.730.000	100
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.673.706.900	0	0	0	161.500	0	0	0	161.500	100
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	157.821.000	0	0	0	157.821.000	0	0	0	157.821.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.380.242.650	504.894.060	0	0	1.231.126.860	469.118.500	0	0	1.700.245.360	100
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE											
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	72.500.000	0	0	0	34.586.800	0	0	0	34.586.800	100
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH											
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	92.500.000	0	0	0	82.068.400	0	0	0	82.068.400	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Perhubungan	13.990.000	0	0	0	7.990.000	0	0	0	7.990.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
			Dinas Perhubungan	43.663.000	0	0	0	62.598.800	0	0	0	62.598.800	100
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.500.000	0	0	0	36.910.000	0	0	0	36.910.000	100
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.470.000	6.050.000.000	0	0	100.472.000	6.150.000.000	0	0	6.250.472.000	100
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	477.400.000	0	0	0	448.898.000	0	0	0	448.898.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Lingkungan Hidup	81.005.600	0	0	0	165.561.600	0	0	0	165.561.600	100
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											
			Dinas Lingkungan Hidup	28.663.200	0	0	0	16.612.000	0	0	0	16.612.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
			Dinas Lingkungan Hidup	29.015.800	0	0	0	25.012.800	0	0	0	25.012.800	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											
			Dinas Lingkungan Hidup	125.229.400	3.000.000	0	0	137.459.200	3.000.000	0	0	140.459.200	100

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											
			Dinas Lingkungan Hidup	15.993.000	0	0	0	15.993.000	0	0	0	15.993.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											
			Dinas Lingkungan Hidup	24.675.200	0	0	0	16.537.200	0	0	0	16.537.200	100
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH											
			Dinas Lingkungan Hidup	9.891.800	0	0	0	6.284.200	0	0	0	6.284.200	100
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
			Dinas Lingkungan Hidup	16.893.000	0	0	0	8.735.040	0	0	0	8.735.040	100
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											
			Dinas Lingkungan Hidup	13.285.800	0	0	0	10.612.600	0	0	0	10.612.600	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
			Dinas Lingkungan Hidup	32.803.000	0	0	0	32.803.000	0	0	0	32.803.000	100
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	81.006.200	0	0	0	137.217.200	0	0	0	137.217.200	100
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	104.568.000	0	0	0	143.448.000	0	0	0	143.448.000	100
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.490.000	0	0	0	11.490.000	0	0	0	11.490.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Komunikasi dan Informatika	10.009.900	0	0	0	2.820.300	0	0	0	2.820.300	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
			Dinas Komunikasi dan Informatika	74.619.000	0	0	0	18.349.600	0	0	0	18.349.600	100
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
			Dinas Komunikasi dan Informatika	74.461.000	0	0	0	35.531.200	0	0	0	35.531.200	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
			Dinas Komunikasi dan Informatika	50.000.400	0	0	0	11.398.400	0	0	0	11.398.400	100

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
			Dinas Komunikasi dan Informatika	25.056.600	0	0	0	17.186.000	0	0	0	17.186.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
			Kecamatan Sitiung	15.040.000	0	0	0	9.280.000	0	0	0	9.280.000	100
			Kecamatan Koto Baru	4.510.000	0	0	0	1.670.000	0	0	0	1.670.000	100
			Kecamatan Koto Salak	3.760.000	0	0	0	2.540.000	0	0	0	2.540.000	100
			Kecamatan Asam Jujuhan	9.300.000	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	100
			Kecamatan Padang Laweh	4.790.000	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			Kecamatan Sitiung	15.446.200	0	0	0	9.381.600	0	0	0	9.381.600	100
			Kecamatan Koto Baru	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	100
			Kecamatan Koto Salak	9.120.000	0	0	0	7.200.000	0	0	0	7.200.000	100
			Kecamatan Asam Jujuhan	9.040.000	0	0	0	9.040.000	0	0	0	9.040.000	100
			Kecamatan Padang Laweh	10.940.000	0	0	0	10.940.000	0	0	0	10.940.000	100
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			Kecamatan Sitiung	8.520.000	0	0	0	5.510.000	0	0	0	5.510.000	100
			Kecamatan Koto Baru	4.510.000	0	0	0	1.010.000	0	0	0	1.010.000	100
			Kecamatan Padang Laweh	4.690.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
			Kecamatan Sitiung	15.600.000	0	0	0	12.107.000	0	0	0	12.107.000	100
			Kecamatan Koto Baru	13.620.000	0	0	0	7.120.000	0	0	0	7.120.000	100
			Kecamatan Koto Salak	8.860.000	0	0	0	3.580.000	0	0	0	3.580.000	100
			Kecamatan Padang Laweh	5.520.000	0	0	0	2.240.000	0	0	0	2.240.000	100
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											
			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11.796.400	0	0	0	8.863.600	0	0	0	8.863.600	100
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.409.983.880	0	0	0	13.861.952.880	0	0	0	13.861.952.880	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											
			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	19.993.000	0	0	0	34.601.000	0	0	0	34.601.000	100

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	424.000.200	0	0	0	549.906.200	0	0	0	549.906.200	100

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran X : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 Tahun 2023
TANGGAL : 25 Oktober 2023

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	GOLONGAN	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Golongan IV/ e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Golongan IV/ d	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Golongan IV/ c	-	13	-	-	-	4	3	4	-	24
4	Golongan IV/ b	-	7	18	-	-	155	13	4	3	200
5	Golongan IV/ a	-	2	64	36	-	218	47	4	23	394
SUB JUMLAH		-	25	82	36	-	377	63	12	26	621
SUB JUMLAH		-	-	35	139	-	287	152	17	35	665
SUB JUMLAH		-	-	3	70	-	364	93	18	38	586
SUB JUMLAH		-	-	-	12	-	222	159	39	76	508
SUB JUMLAH		-	-	-	2	-	260	50	41	74	427
SUB JUMLAH		-	-	38	223	-	1.133	454	115	223	2.186
10	Golongan II/ d	-	-	-	-	-	3	116	14	60	193
11	Golongan II/ c	-	-	-	-	-	3	56	5	77	141
12	Golongan II/ b	-	-	-	-	-	2	3	6	9	20
13	Golongan II/ a	-	-	-	-	-	1	-	-	6	7
SUB JUMLAH		-	-	-	-	-	9	175	25	152	361
14	Golongan I/ d	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
15	Golongan I/ c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16	Golongan I/ b	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
17	Golongan I/ a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SUB JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
JUMLAH		-	25	120	259	-	1.519	692	152	409	3.176

Pulau Punjung, 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 Tahun 2023
TANGGAL : 25 Oktober 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir N-1
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
1	**Piutang Pajak**	**2021**	**36.232.224.028,00**	**5.794.824.266,00**	**3.540.249.939,00**	**38.486.798.355,00**
	- Pajak PBB-P2	2021	35.163.427.868,00	4.504.215.953,00	2.471.453.779,00	37.196.190.042,00
	- Pajak Penerangan Jalan	2021	1.067.255.885,00	1.094.177.313,00	1.067.255.885,00	1.094.177.313,00
	- Pajak Restoran	2021	1.540.275,00		1540275,00	-
	- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2021	-	196.431.000,00		196.431.000,00
2	**Piutang Retribusi**	**2021**	**767.327.811,00**	**405.534.200,00**	**226.030.100,00**	**946.831.911,00**
	- Retribusi Pelayanan Pasar	2021	2.300.000,00		2.300.000,00	-
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2021	240.299.261,00	111.150.000,00	133.650.000	217.799.261,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2021	53.067.000,00	**48.445.800,00**	**53.067.000,00**	48.445.800,00
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2021	471.661.550,00	209.885.400,00	37.013.100,00	644.533.850,00
	- Retribusi Retribusi Sampah	2021		11.678.000,00		11.678.000,00
	- Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2021		24.375.000,00		24.375.000,00
3	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**	**2021**	**10.284.830,00**	**12.032.841,00**	**10.284.830,00**	**12.032.841,00**
4	**Piutang Lain-lain PAD yang sah**	2021	**18.281.799.828,37**	**9.450.132.727,18**	**16.353.782.093,92**	**11.378.150.461,63**
	- Piutang BLUD	2021	13.310.387.523,00	6.240.168.020,00	13.310.387.523,00	6.240.168.020,00
	- Piutang Dana Bergulir	2021	554.897.679,00			554.897.679,00
	- Piutang Bunga Deposito	2021	900.000,00		900.000,00	-
	- Piutang Air Minum UPT SPAM	2021	-			-
	- Piutang TGR	2021	4.410.484.635,37	3.209.252.445,86	3.042.494.570,92	4.577.242.510,31
	- Piutang Pengembalian Belanja	2021	5.129.991,00		0,00	5.129.991,00
	- Piutang Remunerasi DBH Treasury Deposit Facility (TDF)	2021		652.261,32		652.261,32

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir N-1
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
	- Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	2021		60.000,00	0,00	60.000,00
5	**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Pusat**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**2021**	**9.630.356.468,00**	**9.186.486.845,00**	**9.630.356.468,00**	**9.186.486.845,00**
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2021	2.272.094.248,00	2.432.299.879,00	2.272.094.248,00	2.432.299.879,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2021	1.979.521.626,00	1.155.163.560,00	1.979.521.626,00	1.155.163.560,00
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2021	5.368.133.877,00	5.580.621.185,00	5.368.133.877,00	5.580.621.185,00
	- Pajak Air Permukaan (PAP)	2021	10.606.717,00	18.402.221,00	10.606.717,00	18.402.221,00
	- Pajak Rokok	2021	0,00			-
7	**Piutang Lainnya**	**2021**	**13.050.752,00**	**0,00**	**13.050.752,00**	**-**
	Jumlah		**64.935.043.717,37**	**24.849.010.879,18**	**29.773.754.182,92**	**60.010.300.413,63**

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XII
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran XII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 Oktober 2023

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 9-12
1	2006 dan 2007 2012 2013 2017 2023	PT BPD Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari	Perda No. 2 Tahun 2009 Perda No.8 Tahun 2017 Perda No.8 Tahun 2017	11.000 lembar saham Seri A 3.236 lembar saham Seri A 5.400 lembar saham seri A 3.716 lembar saham seri A	25.852.000.000,00	25.852.000.000,00	1.500.000.000,00	27.352.000.000,00	-	4.832.210.107,00	-	27.352.000.000,00
2	2010	PT. Balairung Citra Jaya Sumbar	Surat Gubernur Sumbar	900 lembar saham Seri A 600.000 lembar Saham Seri B	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	9.000.000,00	-	1.500.000.000,00
3	2012	PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung		10.000 lembar saham Seri B	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	6.000.000,00		100.000.000,00
JUMLAH					27.452.000.000,00	27.452.000.000,00	1.500.000.000,00	28.952.000.000,00	-	4.847.210.107,00	-	28.952.000.000,00

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XIII.a
REKAPITULASI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran XIII.a: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 Tahun 2023
TANGGAL : 25 Oktober 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Nama OPD	Saldo Pada Akhir Tahun T-2 (2021)	Perkiraan Penambahan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Pengurangan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1 (2022)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat DPRD	64.042.307.564	1.517.870.832	1.933.528.530	63.626.649.866
2	Sekretariat Daerah	505.623.295.325	14.949.606.295	29.087.339.293	491.485.562.327
3	Kec. Pulau Punjung	2.544.907.545	8.000.000	139.590.000	2.413.317.545
4	Kec. Sitiung	2.004.317.865	45.184.520	48.915.000	2.000.587.385
5	Kec. Koto Baru	3.306.365.686	139.704.000	-	3.446.069.686
6	Kec. Sungai Rumbai	3.091.561.053	-	-	3.091.561.053
7	Kec. IX Koto	808.276.379	14.000.000	26.715.000	795.561.379
8	Kec. Timpeh	2.830.507.271	148.680.125	199.747.457	2.779.439.939
9	Kec. Padang Laweh	1.832.928.683	-	19.546.000	1.813.382.683
10	Kec Tiumang	2.934.837.284	-	57.700.000	2.877.137.284
11	Kec Koto Besar	3.148.939.052	-	27.500.000	3.121.439.052
12	Kec Koto Salak	2.516.606.224	266.200.000	157.950.000	2.624.856.224
13	Kec. Asam Jujuhan	3.473.762.125	24.150.000	61.463.800	3.436.448.325
14	Dinas PUPR	1.599.306.404.134	88.690.722.700	3.368.745.832	1.684.628.381.003
15	Dinas PERKIMTAN	31.123.254.710	22.696.726.480	292.850.000	53.527.131.190
16	Dinas Perhubungan	14.923.747.886	439.888.480	321.000.000	15.042.636.366
17	Dinas Kesehatan	175.016.203.402	16.663.496.160	7.557.762.858	184.121.936.704
18	RSUD	163.315.274.428	17.761.427.745	1.957.785.640	179.118.916.533
19	Dinas Pendidikan	416.871.588.779	27.904.099.476	775.546.207	444.000.142.048
20	Dinas BUDPARPORA	105.803.055.753	456.452.938	296.480.000	105.963.028.691
21	Dinas TRANSNAKER	6.694.572.581	153.323.000	-	6.847.895.581

NO	Nama OPD	Saldo Pada Akhir Tahun T-2 (2021)	Perkiraan Penambahan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Pengurangan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1 (2022)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
22	DSP3KB	7.002.590.598	1.755.886.263	509.608.507	8.248.868.354
23	DISDUKCAPIL	4.548.592.822	631.178.000	96.229.250	5.083.541.572
24	Dinas PMD	1.428.703.300	620.244.138	283.294.138	1.765.653.300
25	Dinas Pertanian	39.634.345.715	1.335.579.340	62.113.453	40.907.811.602
26	Dinas Pangan dan Perikanan	18.798.630.952	1.714.000.000	23.250.000	20.489.380.952
27	Dinas KUMPERDAG	81.692.572.557	-	273.772.600	81.418.799.957
28	BKD	10.669.293.510	530.704.000	243.413.160	10.956.584.350
29	DPMPTSP	2.147.265.441	454.260.838	157.500.000	2.444.026.279
30	Inspektorat Kabupaten	3.068.373.687	736.978.459	57.704.000	3.747.648.146
31	BAPPPEDA	1.697.805.442	412.343.607	217.072.057	1.893.076.992
32	DLH	11.532.926.205	834.532.500	976.266.412	11.391.192.293
33	Kantor KESBANGPOL	258.254.500	29.435.000	-	287.689.500
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.551.227.096	1.000.000	-	6.552.227.096
35	BPBD	17.005.512.808	22.381.483.018	30.866.410.232	8.520.585.594
36	BKPSDM	2.115.542.136	148.210.000	13.410.000	2.250.342.136
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.875.846.483	100.531.000	33.385.000	5.942.992.483
38	Dinas KOMINFO	3.757.795.544	639.501.000	-	4.397.296.544
	JUMLAH	3.328.997.992.525	224.205.399.915	80.143.594.426	3.473.059.798.014

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XIII.b
REKAPITULASI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XIII.b: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 Tahun 2023
TANGGAL : 25 Oktober 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Nama OPD	Saldo Pada Akhir Tahun T-2 (2021)	Perkiraan Penambahan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Pengurangan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1 (2022)
1	2	3	4	p	6=3+4-5
1	Sekretariat DPRD	413.144.500	69.655.000	68.981.000	413.818.500
2	Sekretariat Daerah	7.596.331.529	1.541.650.000	2.059.709.138	7.078.272.391
3	Kec. Pulau Punjung	437.179.000	177.540.000	66.550.000	548.169.000
4	Kec. Sitiung	243.500.000	48.915.000	19.215.000	273.200.000
5	Kec. Koto Baru	402.111.800	-	25.375.000	376.736.800
6	Kec. Sungai Rumbai	446.698.000	14.355.000	14.355.000	446.698.000
7	Kec. IX Koto	316.133.000	26.715.000	84.975.000	257.873.000
8	Kec. Timpeh	367.441.950	15.950.000	15.950.000	367.441.950
9	Kec. Padang Laweh	280.393.000	19.546.000	62.970.000	236.969.000
10	Kec Tiumang	331.166.000	57.700.000	-	388.866.000
11	Kec Koto Besar	520.163.334	27.500.000	-	547.663.334
12	Kec Koto Salak	790.437.000	-	34.500.000	755.937.000
13	Kec. Asam Jujuhan	314.795.000	61.463.800	29.360.000	346.898.800
14	Dinas PUPR	126.002.286.022	2.024.063.000	4.617.251.000	123.409.098.022
15	Dinas PERKIMTAN	2.563.320.722	-	2.416.935.672	146.385.050
16	Dinas Perhubungan	1.564.706.530	296.919.000	481.500.000	1.380.125.530
17	Dinas Kesehatan	10.048.016.009	518.525.000	540.538.623	10.026.002.386
18	RSUD	9.904.439.196	1.957.785.640	287.060.678	11.575.164.158
19	Dinas Pendidikan	18.742.783.159	1.035.936.207	970.834.455	18.807.884.911
20	Dinas BUDPARPORA	173.590.852	36.000.000	13.500.000	196.090.852
21	Dinas TRANSNAKER	412.148.858	34.947.000	36.729.000	410.366.858
22	DSP3KB	1.587.630.663	224.698.507	298.452.138	1.513.877.032
23	DISDUKCAPIL	471.927.869	97.729.250	-	569.657.119

NO	Nama OPD	Saldo Pada Akhir Tahun T-2 (2021)	Perkiraan Penambahan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Pengurangan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1 (2022)
1	2	3	4	p	6=3+4-5
24	Dinas PMD	565.289.593	-	283.294.138	281.995.455
25	Dinas Pertanian	14.691.326.778	61.429.200	61.429.200	14.691.326.778
26	Dinas Pangan dan Perikanan	966.902.800	23.250.000	-	990.152.800
27	Dinas KUMPERDAG	142.153.833	273.772.600	254.250.000	161.676.433
28	BKD	2.730.340.372	318.648.640	29.790.000	3.019.199.012
29	DPMPTSP	128.073.400	6.750.000	-	134.823.400
30	Inspektorat Kabupaten	81.720.490	43.900.000	26.284.000	99.336.490
31	BAPPPEDA	435.769.795	128.250.000	128.250.000	435.769.795
32	DLH	2.869.418.016	765.859.412	477.243.500	3.158.033.928
33	Kantor KESBANGPOL	156.131.700	-	-	156.131.700
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	284.242.598	7.500.000	-	291.742.598
35	BPBD	1.327.312.000	-	413.075.000	914.237.000
36	BKPSDM	320.329.400	13.410.000	13.410.000	320.329.400
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77.672.580	33.385.000	-	111.057.580
38	Dinas KOMINFO	562.179.325	-	-	562.179.325
	JUMLAH	209.269.206.673	9.963.748.256	13.831.767.542	205.401.187.386

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XIV. a

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

a. Tahun Pertama

Lampiran XIV.a: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 Tahun 2023
TANGGAL : 25 Oktober 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama OPD	Nilai KDP TA T-2 (2021)	Jumlah Anggaran T-1 (Rp.)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir Tahun TA T-1 (2022) (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan Dalam Tahun ini (2023)	
			Penambahan	Pengurangan		APBD TA T (2023)	Perubahan ABPD TA (2023)
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-		
2	Sekretariat Daerah	-	6.360.000	6.360.000	-		
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-		
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-		
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-		
6	Kec. Sungai Rumbai	-	-	-	-		
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-		
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-		
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-		
10	Kec Tiumang	-	-	-	-		
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-		
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-		
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-		
14	Dinas PUPR	2.935.383.067	2.923.370.613	627.064.000	5.231.689.680	2.061.229.500	
15	Dinas PERKIMTAN	239.520.000	-	-	239.520.000		
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-		
17	Dinas Kesehatan	7.037.737.858	-	7.037.737.858	-		
18	RSUD	-	-	-	-		
19	Dinas Pendidikan	-	-	-	-		
20	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-		
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-		
22	DSP3KB	-	-	-	-		

NO	Nama OPD	Nilai KDP TA T-2 (2021)	Jumlah Anggaran T-1 (Rp.)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir Tahun TA T-1 (2022) (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan Dalam Tahun ini (2023)	
			Penambahan	Pengurangan		APBD TA T (2023)	Perubahan ABPD TA (2023)
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8
23	DISDUKCAPIL	-	-	-	-		
24	Dinas PMD	-	-	-	-		
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-		
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-		
27	Dinas KUMPERDAG	332.915.000	-	-	332.915.000		
28	BKD	-	-	-	-		
29	DPMPTSP	-	-	-	-		
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-		
31	BAPPPEDA	-	-	-	-		
32	DLH	-	-	-	-		
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-		
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-		
35	BPBD	368.216.182	9.957.809.470	4.232.487.408	6.093.538.244	6.050.000.000	
36	BKPSDM	-	-	-	-		
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	836.767.350	-	-	836.767.350	257.669.000	
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-		
	JUMLAH	11.750.539.457	12.887.540.083	11.903.649.266	12.734.430.274	8.368.898.500	-

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XIV.b

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

b. Tahun Kedua

Lampiran XIV.b: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 Tahun 2023
TANGGAL : 25 Oktober 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama OPD	Nilai KDP TA T-2 (2020)	Jumlah Anggaran T-2 (2020) (Rp.)		Jumlah Realiasasi Sampai dengan Akhir TA T-2 (2021) (Rp.)	Jumlah Anggaran T-1(2022) (Rp.)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir Tahun TA T-1 (2022) (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan Dalam Tahun ini (2023)	
			Penambahan	Pengurangan		Penambahan	Pengurangan		APBD TA (2023)	Perubahan ABPD TA (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Sekretariat Daerah	-	17.040.000	17.040.000	-	6.360.000	6.360.000	-		-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-	-		-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-	-		-
6	Kec. Sungai Rumbai	-	-	-	-	-	-	-		-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-	-	-	-		-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-	-		-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-	-		-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-	-	-	-		-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-	-	-	-		-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-	-		-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-		-
14	Dinas PUPR	105.548.268.107	162.399.415	102.775.284.455	2.935.383.067	2.923.370.613	627.064.000	5.231.689.680	2.061.229.500	-
15	Dinas PERKIMTAN	366.648.550	-	127.128.550	239.520.000	-	-	239.520.000		-
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-		-
17	Dinas Kesehatan	5.007.327.230	7.077.404.738	5.046.994.110	7.037.737.858	-	7.037.737.858	-		-
18	RSUD	-	-	-	-	-	-	-		-
19	Dinas Pendidikan	978.512.000	-	978.512.000	-	-	-	-		-
20	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-	-	-	-		-
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-	-	-	-		-
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-	-		-
23	DISDUKCAPIL	-	-	-	-	-	-	-		-
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-	-		-
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-		-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-		-
27	Dinas KUMPERDAG	382.365.000	-	49.450.000	332.915.000	-	-	332.915.000		-
28	BKD	-	-	-	-	-	-	-		-
29	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-		-

NO	Nama OPD	Nilai KDP TA T-2 (2020)	Jumlah Anggaran T-2 (2020) (Rp.)		Jumlah Realisasi Sampai dengan Akhir TA T-2 (2021) (Rp.)	Jumlah Anggaran T-1(2022) (Rp.)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir Tahun TA T-1 (2022) (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan Dalam Tahun ini (2023)	
			Penambahan	Pengurangan		Penambahan	Pengurangan		APBD TA (2023)	Perubahan ABPD TA (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-		-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-	-	-	-		-
32	DLH	-	-	-	-	-	-	-		-
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-	-		-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMK	-	-	-	-	-	-	-		-
35	BPBD	-	368.216.182	-	368.216.182	9.957.809.470	4.232.487.408	6.093.538.244	6.050.000.000	-
36	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-		-
37	Dinas Perpustakaan dan Kear	836.767.350	-	-	836.767.350	-	-	836.767.350	257.669.000	-
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-	-	-		-
	JUMLAH	113.119.888.237	7.625.060.335	108.994.409.115	11.750.539.457	12.887.540.083	11.903.649.266	12.734.430.274	8.368.898.500	-

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XV

DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Daerah	Saldo Ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Oinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Punjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	JUMLAH										

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XVII
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Ref	Anggaran 2022 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	V.A.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.A.1.a				
Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.a.1	22.776.715.953,00	21.634.156.143,46	94,98	20.496.633.389,25
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.a.2	3.873.808.400,00	2.759.700.350,00	71,24	2.411.365.382,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.3	4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	100,00	3.524.570.411,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.a.4	74.440.779.485,00	79.292.868.316,34	106,52	56.397.892.339,62
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**105.415.369.674,00**	**108.010.790.645,80**	**102,46**	**82.829.461.520,87**
PENDAPATAN TRANSFER	V.A.1.b				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	V.A.1.b.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.1.a	17.815.048.000,00	23.514.204.916,00	131,99	30.199.842.269,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.A.1.b.1.b	4.490.028.000,00	5.871.006.918,00	130,78	3.462.713.300,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.b.1.c	472.606.168.000,00	472.528.368.049,00	99,98	472.416.143.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.A.1.b.1.d	187.370.966.000,00	171.656.798.100,00	91,61	207.765.406.760,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**682.282.210.000,00**	**673.570.378.483,00**	**98,72**	**713.844.105.329,00**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	V.A.1.b.2				
Dana Otonomi Khusus		-	-		-
Dana Penyesuaian	V.A.1.b.2	54.283.677.000,00	54.283.677.000,00	100,00	73.540.405.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		**54.283.677.000,00**	**54.283.677.000,00**	**100,00**	**73.540.405.000,00**
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	V.A.1.b.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.3.a	60.871.766.164,00	58.631.065.543,00	96,32	61.272.491.740,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.A.1.b.3.b	-	-	-	-

Uraian	Ref	Anggaran 2022 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
Bantuan Keuangan		-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		**60.871.766.184,00**	**58.631.965.543,00**	**96,32**	**51.272.491.740,00**
Total Pendapatan Transfer		**797.437.653.184,00**	**786.486.021.026,00**	**98,63**	**838.657.002.069,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.A.1.c				
Pendapatan Hibah	V.A.1.c.1	15.624.620.000,00	16.560.071.607,00	106,12	26.548.313.512,00
Pendapatan Dana Darurat	V.A.1.c.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	V.A.1.c.3	-	-	0,00	30.885.940.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		**15.624.620.000,00**	**16.560.071.607,00**	**106,12**	**57.434.253.512,00**
JUMLAH PENDAPATAN		**918.477.642.858,00**	**911.076.883.278,80**	**99,19**	**978.920.717.101,87**
BELANJA	V.A.2				
BELANJA OPERASI	V.A.2.a				
Belanja Pegawai	V.A.2.a.1	393.543.166.479,00	380.048.882.570,44	96,57	380.289.821.307,81
Belanja Barang	V.A.2.a.2	320.595.136.217,00	304.634.151.224,05	95,08	246.612.992.141,35
Bunga		-		-	
Subsidi		-		-	
Hibah	V.A.2.a.3	11.550.690.880,00	11.277.041.621,00	97,63	11.804.111.087,00
Bantuan Sosial	V.A.2.a.4	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		**725.688.993.576,00**	**696.160.075.415,49**	**95,93**	**638.706.924.536,16**
BELANJA MODAL	V.A.2.b				
Belanja Tanah	V.A.2.b.1	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2	49.984.934.923,00	48.052.940.621,00	96,13	51.641.540.729,92
Belanja Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3	21.484.719.732,00	15.750.482.106,12	73,31	85.966.356.136,57
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.A.2.b.4	77.611.351.420,00	66.363.505.690,74	85,51	22.155.213.262,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5	2.824.227.376,00	2.624.446.575,00	92,93	6.569.632.088,00
Jumlah Belanja Modal		**151.905.233.451,00**	**132.791.374.992,86**	**87,42**	**166.252.751.216,49**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	V.A.2.c	450.000.000,00	369.162.297,00	82,04	164.439.330,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**450.000.000,00**	**369.162.297,00**	**82,04**	**164.439.330,00**
JUMLAH BELANJA		**878.044.227.027,00**	**829.320.612.705,35**	**94,45**	**805.124.115.082,65**

Uraian	Ref	Anggaran 2022 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
TRANSFER	V.A.3				
TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA					
Bagi Hasil Pajak		2.825.328.297,00	2.364.214.550,00	84,39	1.656.321.536,00
Bagi Hasil Retribusi		423.889.516,00	275.334.926,00	64,95	202.856.707,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		107.391.184.000,00	107.391.175.000,00	100,00	110.062.853.000,00
JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA		110.640.401.813,00	110.050.724.476,00	99,47	111.924.041.243,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		988.684.628.840,00	939.371.337.181,35	95,01	917.048.156.325,65
SURPLUS/(DEFISIT)	V.A.4	(70.206.985.982,00)	(28.294.453.902,55)	(40,30)	61.872.560.776,22
PEMBIAYAAN	V.A.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.A.5.a				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	V.A.5.a	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	100,00	8.334.425.206,49
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	100,00	8.334.425.206,49
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.5.b	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	V.A.5.b	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang					
Pemberian Pinjaman Daerah					
Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	100	8.334.425.206,49

Uraian	Ref	Anggaran 2022 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI		-	41.912.532.080,16	-	70.206.985.982,71
KOREKSI SILPA		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SETELAH KOREKSI	V.A.6	-	41.912.532.080,16	-	70.206.985.982,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B	**70.206.985.982,71**	**8.334.425.206,49**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		70.206.985.982,71	8.334.425.206,49
Subtotal		-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		41.912.532.080,16	70.206.985.982,71
Subtotal		**41.912.532.080,16**	**70.206.985.982,71**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**41.912.532.080,16**	70.206.985.982,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

3. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2022	SALDO 31 DES 2021
1	2	3	4
ASET	V.C.1		
ASET LANCAR	V.C.1.a		
Kas di Kas Daerah	V.C.1.a.1	34.291.745.810,17	66.539.152.597,42
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.a.2	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.a.3	-	-
Kas di BLUD	V.C.1.a.4	7.566.677.529,99	3.502.297.770,29
Kas di BOS	V.C.1.a.5	52.108.740,00	154.464.863,00
Kas Lainnya	V.C.1.a.6	123.263.561,00	312.184.107,27
Setara Kas	V.C.1.a.7	-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak	V.C.1.a.8	36.486.798.355,00	36.232.224.028,00
Penyisihan Piutang Pajak		(26.707.658.256,28)	(26.498.466.733,38)
Piutang Pajak Netto		9.779.140.098,72	9.733.757.294,62
Piutang Retribusi	V.C.1.a.9	946.831.911,00	767.327.811,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(647.241.325,00)	(486.855.897,00)
Piutang Retribusi Netto		299.590.586,00	280.471.914,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a.10	12.032.841,00	10.284.630,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		(60.164,21)	(51.424,15)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		11.972.676,79	10.233.405,85
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a.11	11.378.150.461,63	18.281.799.828,37
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(3.046.534.023,19)	(2.215.043.743,10)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		8.331.616.438,44	16.066.154.083,27
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	V.C.1.a.12	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.C.1.a.13	9.186.486.845,00	9.630.358.468,00
Piutang Pendapatan Lainnya	V.C.1.a.14	-	13.050.752,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		-	(13.050.752,00)
Piutang Lainnya Netto		-	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	V.C.1.a.15	276.672.526,15	1.558.223.934,04
Persediaan	V.C.1.a.16	46.047.259.249,88	38.086.808.001,69
Jumlah Aset Lancar		**115.968.534.062,14**	**145.672.214.439,45**
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.b		
Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-

URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2022	SALDO 31 DES 2021
1	2	3	4
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.b.1	27.452.000.000,00	27.452.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		**27.452.000.000,00**	**27.452.000.000,00**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**27.452.000.000,00**	**27.452.000.000,00**
ASET TETAP			
Tanah	V.C.1.c.1	642.128.841.182,00	667.421.012.047,00
Peralatan dan Mesin	V.C.1.c.2	409.319.889.897,76	365.830.496.579,35
Gedung dan Bangunan	V.C.1.c.3	881.692.577.852,96	828.611.661.247,60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.1.c.4	1.417.084.539.911,16	1.347.104.392.370,42
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.c.5	110.099.516.896,00	108.279.890.823,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.1.c.6	12.734.430.274,00	11.750.539.457,00
Akumulasi Penyusutan		(1.190.948.112.056,18)	(1.055.277.207.905,60)
Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan		**2.282.111.685.957,72**	**2.273.720.764.618,98**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	V.C.1.d	-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	V.C.1.e		
Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.e.1	287.907.729,00	293.256.963,00
Aset Tak Berwujud	V.C.1.e.2	4.345.006.277,00	4.013.267.277,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(2.233.315.887,00)	(1.906.478.687,00)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi		2.111.690.390,00	2.106.788.590,00
Aset Lain-Lain	V.C.1.e.3	201.056.181.109,44	205.255.939.395,84
Penyusutan Aset Lain-Lain		(157.064.214.099,44)	(148.585.496.096,84)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan		43.991.967.010,00	56.670.443.299,00
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	V.C.1.e.4	2.888.400.169,00	-
Jumlah Aset Lainnya		**49.080.965.298,00**	**59.070.490.852,00**
JUMLAH ASET		**2.474.613.185.317,86**	**2.506.115.489.910,43**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.a.1	257.846.811,27	765.399.544,27
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.a.2	83.144.415,10	102.623.340,64
Utang Belanja	V.C.2.a.3	11.321.739.731,88	12.286.454.764,47
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.a.4	4.891.202.700,00	4.891.202.700
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**16.553.933.658,25**	**18.045.680.349,38**

URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2022	SALDO 31 DES 2021
1	2	3	4
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya	V.C.2.b	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		16.553.933.658,25	18.045.680.349,38
EKUITAS			
EKUITAS	V.A.3	2.458.059.251.659,61	2.488.069.609.561,05
JUMLAH EKUITAS		2.458.059.251.659,61	2.488.069.609.561,05
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.474.613.185.317,86	2.506.115.489.910,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pendapatan Pajak Daerah	V.D.1.a.1	23.850.796.763,46	22.455.754.207,25	1.395.042.556,21	6,21
Pendapatan Retribusi Daerah	V.D.1.a.2	2.947.679.575,54	2.499.784.055,43	447.895.520,11	17,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.D.1.a.3	4.325.613.847,00	10.284.630,00	4.315.529.017,00	41.960,14
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	V.D.1.a.4	68.255.991.163,72	68.868.917.011,55	(612.925.847,83)	(0,89)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**99.380.281.349,72**	**93.834.740.104,23**	**5.545.541.245,49**	**5,91**
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.1.a	26.203.605.085,00	26.352.048.498,00	(148.443.413,00)	(0,56)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.b.1.b	5.871.006.918,00	3.419.652.416,00	2.451.354.502,00	71,68
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.D.1.b.1.c	472.528.366.549,00	472.416.143.000,00	112.223.549,00	0,02
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.D.1.b.1.d	171.656.798.100,00	207.765.406.760,00	(36.108.608.660,00)	(17,38)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**676.259.776.652,00**	**709.953.250.674,00**	**(33.693.472.022,00)**	**(4,75)**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA					
Dana Penyesuaian		54.283.677.000,00	73.540.405.000,00	(19.256.728.000,00)	(26,19)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		**54.283.677.000,00**	**73.540.405.000,00**	**(19.256.728.000,00)**	**(26,19)**

URAIAN	Ref	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.3.a	56.188.095.920,00	51.935.128.939,00	6.252.966.981,00	12,04
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.D.1.b.3.b	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		**56.188.095.920,00**	**51.935.128.939,00**	**6.252.966.981,00**	**12,04**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**788.731.551.572,00**	**835.428.784.613,00**	**(46.697.233.041,00)**	**(5,59)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	V.D.1.c.1	62.593.326.137,23	91.236.115.776,00	(28.642.789.638,77)	(31,39)
Pendapatan Dana Darurat	V.D.1.c.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	V.D.1.c.3	-	30.885.940.000,00	(30.885.940.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		**62.593.326.137,23**	**122.122.055.776,00**	**(59.528.729.638,77)**	**(48,75)**
JUMLAH PENDAPATAN		**950.705.159.058,95**	**1.051.385.580.493,23**	**(100.680.421.434,28)**	**(9,58)**
BEBAN					
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	V.D.2.a	380.917.803.230,71	382.354.718.195,46	(1.436.914.964,75)	(0,38)
Beban Persediaan	V.D.2.b	108.439.121.892,65	72.600.984.126,33	35.838.137.766,32	49,36
Beban Jasa	V.D.2.c	110.592.860.111,88	98.084.318.217,81	12.508.541.894,07	12,75
Beban Sewa	V.D.2.d	4.396.584.495,00	2.509.976.767,12	1.886.607.727,88	75,16
Beban Pemeliharaan	V.D.2.e	12.208.329.617,99	11.196.376.603,00	1.011.953.014,99	9,04
Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.f	60.814.621.826,00	47.517.031.727,00	13.297.590.099,00	27,98
Beban Hibah	V.D.2.g	12.430.936.621,00	21.567.610.832,00	(9.136.674.211,00)	(42,36)
Beban Bantuan Sosial	V.D.2.h	-	-	-	-
Beban Penyusutan/Amortisasi	V.D.2.i	152.432.884.181,18	168.473.799.471,73	(16.040.915.290,55)	(9,52)
Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.j	3.187.423.217,06	3.573.789.229,02	(386.366.011,97)	(10,81)
Beban Transfer	V.D.2.k	109.572.502.947,00	112.110.404.801,00	(2.537.901.854,00)	(2,26)
Beban Lain-Lain	V.D.2.l	1.658.326.578,00	3.567.438.148,62	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASI		**956.651.404.718,46**	**923.556.448.119,09**	**33.094.956.599,37**	**3,58**
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	V.D.3	**(5.946.245.659,51)**	**127.829.132.374,14**	**(133.775.378.033,65)**	**(104,65)**

URAIAN	Ref	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.D.4				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		945.393.931,00	363.292.100,00	582.101.831,00	160,23
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V.D.4.1	-	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		**945.393.931,00**	**363.292.100,00**	**582.101.831,00**	**160,23**
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	V.D.5	**(5.000.851.728,51)**	**128.192.424.474,14**	**(133.193.276.202,65)**	**(103,90)**
POS LUAR BIASA	V.D.6				
Pendapatan Luar Biasa	V.D.6.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	V.D.6.2	336.162.297,00	197.439.330,00	138.722.967,00	70,26
Jumlah Pos Luar Biasa		**336.162.297,00**	**197.439.330,00**	**138.722.967,00**	**70,26**
SURPLUS/DEFISIT LO	V.D.7	**(5.337.014.025,51)**	**127.994.985.144,14**	**(133.331.999.169,65)**	**(104,17)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
Arus Masuk Kas	V.E.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah		21.634.156.143,46	20.495.633.388,25
Penerimaan Retribusi Daerah		2.759.700.350,00	2.411.365.382,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.324.085.836,00	3.524.570.411,00
Lain-Lain PAD yang Sah		78.250.863.518,34	56.034.600.239,82
Dana Bagi Hasil Pajak		23.514.204.916,00	30.199.642.269,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		5.871.006.916,00	3.462.713.300,00
Dana Alokasi Umum		472.528.368.548,00	472.416.143.000,00
Dana Alokasi Khusus		171.656.798.100,00	207.765.406.760,00
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana Penyesuaian		54.283.677.000,00	73.540.405.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		58.631.963.543,00	51.272.491.740,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Hibah		16.580.071.607,00	26.548.313.512,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	30.865.940.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**910.034.878.480,80**	**978.557.425.001,07**
Arus Keluar Kas	V.E.1.b		
Pembayaran Pegawai		380.048.882.570,44	380.289.821.307,81
Pembayaran Barang		304.834.151.224,05	246.612.992.141,35
Pembayaran Bunga			
Pembayaran Subsidi			
Pembayaran Hibah		11.277.041.621,00	11.804.111.087,00
Pembayaran Bantuan Sosial		-	0,00
Pembayaran Tak Terduga		369.162.297,00	184.439.330,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.384.214.550,00	1.708.764.771,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		275.334.926,00	152.413.472,00

URAIAN	Ref	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3	4
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan		107.391.175.000,00	110.062.863.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**806.579.962.188,49**	**750.795.405.109,10**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**103.454.916.292,31**	**227.702.015.892,71**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi	V.E.2		
Arus Masuk Kas	V.E.2.a		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.041.104.798,00	354.867.100,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		900.000,00	9.425.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**1.042.004.798,00**	**363.292.100,00**
Arus Keluar Kas	V.E.2.b		
Perolehan Tanah			
Perolehan Peralatan dan Mesin		48.052.940.621,00	31.541.549.729,92
Perolehan Gedung dan Bangunan		15.750.482.196,12	85.066.356.136,57
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		68.363.505.690,74	22.155.213.282,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.624.446.575,00	6.569.632.088,00
Perolehan Aset Lainnya			
Jumlah Arus Keluar Kas		**132.791.374.992,86**	**166.252.751.216,49**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(131.749.370.194,86)**	**(165.889.459.116,49)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
Arus Masuk Kas	V.E.3.a		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas			
Arus Keluar Kas	V.E.3.b		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			

URAIAN	Ref	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3	4
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
Arus Masuk Kas	V.E.4.a		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60.514.332.892,54	62.122.057.999,27
Penerimaan Kas		13.497.676,00	38.500.244,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**60.527.830.568,54**	**62.160.558.243,27**
Arus Keluar Kas	V.E.4.b		
Penyaluran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60.665.200.118,81	61.853.274.136,00
Pengeluaran Kas		38.500.244,00	1.897.200,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**60.703.700.362,81**	**61.855.171.336,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(175.869.794,27)**	**305.386.907,27**
Kenaikan/Penurunan Kas		**(28.470.323.696,82)**	**62.177.947.883,69**
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		66.539.152.597,42	6.155.078.601,54
Saldo Awal Kas di BLUD		3.500.297.770,29	1.526.712.732,36
Saldo Awal Kas di Dana BOS		154.484.863,00	645.579.320,00
Saldo Awal Kas Lainnya		312.184.107,27	
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		34.291.745.810,17	66.539.152.597,42
Saldo Akhir Kas di BLUD		7.568.677.529,99	3.500.297.770,29
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Saldo Akhir Kas di Dana BOS		52.108.740,00	154.484.863,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		123.263.561,00	312.184.107,27
Saldo Akhir Kas		**42.035.795.641,16**	**70.506.119.337,98**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4
Ekuitas Awal	V.F	**2.488.069.809.561,05**	**2.348.493.866.411,02**
Surplus/Defisit-LO		(5.337.014.025,51)	127.994.985.144,14
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar			
a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan			-
b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		(24.873.543.875,93)	13.580.956.005,89
Ekuitas Akhir		**2.458.059.251.659,61**	**2.488.069.809.561,05**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.